



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
(LPPD) TAHUN 2025**





BUPATI BANJAR
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar hingga saat ini. Berkenaan dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, kami selaku Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

Penyampaian LPPD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Banjar selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Ruang lingkup LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan Bab V Penutup.

Melalui dukungan berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh agama dan alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang telah tercapai selama tahun 2025 yang lalu. Selain dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ini, kami pun menyadari masih terdapat berbagai kekurangan termasuk pula dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Martapura, 30 Maret 2026

Bupati Banjar,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang	6
1.1. Penjelasan Umum	6
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	25
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	48
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	53
2.1. Capaian Kinerja Makro	53
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	76
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci	76
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	81
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	82
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	191
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	191
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota	191
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	192
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	193
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	193
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	195
4.1. Urusan Pendidikan	195
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	195
4.1.2. Target Pencapaian	196
4.1.3. Realisasi	196
4.1.4. Alokasi Anggaran	197
4.1.5. Dukungan Personil	201
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	206
4.2. Urusan Kesehatan	207
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	207
4.2.2. Target Pencapaian	209
4.2.3. Realisasi	210
4.2.4. Dukungan Personil	213
4.2.5. Alokasi Anggaran	219
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	220
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	223
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	223
4.3.2. Target Pencapaian	223
4.3.3. Realisasi	224
4.3.4. Alokasi Anggaran	225
4.3.5. Dukungan Personil	226
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	227
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	228
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	228
4.4.2. Target Pencapaian	228
4.4.3. Realisasi	229

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



4.4.4. Alokasi Anggaran	229
4.4.5. Dukungan Personil	230
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	231
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	232
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	232
4.5.2. Target Pencapaian	233
4.5.3. Realisasi	234
4.5.4. Alokasi Anggaran	238
4.5.5. Dukungan Personil	241
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	263
4.6. Urusan Sosial	264
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	264
4.6.2. Target Pencapaian	265
4.6.3. Realisasi	266
4.6.4. Alokasi Anggaran	269
4.6.5. Dukungan Personil	271
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	274
4.7. Program dan Kegiatan	275
BAB V PENUTUP	358



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Selanjutnya dijelaskan sejarah perkembangan kewilayahan Kabupaten Banjar sebagai berikut.

Pembentukan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar yang berada di tanah Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 24 September 1526 sampai dengan 11 Juni 1860. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya (sekarang Kabupaten Banjar). Ketika Ibukota berkedudukan di Martapura maka disebut juga Kesultanan Kayu Tangi. Pada saat itu wilayah ibukotanya masih berada di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Lahirnya Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kesultanan Negara Daha, yaitu Kesultanan Hindu yang beribukota di kota Nagara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Era Kesultanan Banjar berakhir pada tahun 1905, pada saat setelah berakhirnya perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Gusti Muhammad Seman dan para pengikutnya yang setia pada tahun periode 1859-1905. Kemudian Martapura diperintah oleh Belanda dan pada tahun 1942-1945 Martapura diperintah oleh Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah kalah oleh Tentara Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.



Pada masa revolusi fisik bangsa Indonesia berkobar dengan hebatnya untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1948, Pemerintah Belanda (NICA) di Kalimantan Selatan justru memaksakan kehendaknya untuk membentuk sebuah Dewan yang disebut Dewan Banjar yang wilayahnya meliputi Afdeling Banjarmasin dan Hulu Sungai. Pembentukan Dewan Banjar tersebut merupakan hasil Konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook.

Pembentukan Dewan Banjar ternyata tidak mendapat dukungan dari Rakyat Kalimantan Selatan, sehingga keinginan Belanda untuk mendirikan negara bagian dengan tujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia tidak tercapai. Walaupun demikian Pemerintah Belanda tetap saja melaksanakan kehendaknya tersebut dengan mengangkat anggota-anggotanya dengan harapan dapat menjadi alat Pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 Dewan Banjar dibubarkan dan Afdeling Banjarmasin dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada saat itu belum memungkinkan adanya otonomi untuk Kabupaten Banjar. Namun atas dasar Kebijaksanaan Gubernur Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 tanggal 13 Agustus 1950, ditetapkan Susunan Wilayah dan Jabatan Pemerintahan dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Surat Keputusan tersebut antara lain memuat perubahan *Afdeling* Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjarmasin.

Selain itu pula melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Sementara Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Banjarmasin. Pada tanggal 23 Desember 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) telah dibentuk dengan jumlah anggota 22 orang dengan Ketua K.H. Hasan Corong. Dengan dilantiknyanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara tersebut, maka resmilah terbentuknya Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten Banjar



dengan Martapura sebagai Ibukotanya. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Banjarmasin, meliputi :

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala Berangas
- 4) Kewedanaan Tanah Laut Pelaihari

Dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Nomor DPRDS/43/2 tanggal 27 Pebruari 1952 mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan dan Pemerintah Pusat agar nama Kabupaten Banjarmasin dirubah jadi nama Kabupaten Banjar, juga mengusulkan perubahan Kewedanaan, yaitu:

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala
- 4) Kewedanaan Tanah Laut
- 5) Kewedanaan Ulin Gambut

Usul penambahan Kewedanaan tersebut disetujui oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Nomor C-246-2-3 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menyetujui perubahan sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarmasin menjadi Daerah Kabupaten Banjar. Pada awalnya Kabupaten Banjar terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah



Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
- Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (0,250%) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,006%).

Secara topografis, ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50– 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya



tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,78 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (0,0 mm) dan tertinggi pada bulan April (613,0 mm). Dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (23 hari), sebaliknya jumlah hujan terendah pada bulan September (0 hari).

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2025 semester II sebanyak 600.058 Jiwa yang terdiri atas 302.994 Jiwa penduduk laki-laki dan 297.064 Jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 9.665 Jiwa. Rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024			JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Aluh-Aluh	15.535	14.851	30.386	15.694	14.932	30.626
Kertak Hanyar	21.368	21.426	42.794	21.935	22.027	43.962
Gambut	23.368	23.440	46.808	24.058	24.132	48.190
Sungai Tabuk	32.234	31.248	63.482	32.725	31.767	64.492
Martapura	64.413	64.383	128.796	65.685	65.672	131.357
Karang Intan	18.870	18.538	37.408	19.144	18.802	37.946
Astambul	18.489	18.350	36.839	18.614	18.485	37.099
Simpang Empat	12.519	12.008	24.527	12.656	12.195	24.851
Pengaron	9.197	8.946	18.143	9.393	9.134	18.527



KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024			JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Sungai Pinang	7.903	7.458	15.361	8.063	7.600	15.663
Aranio	4.971	4.651	9.622	5.081	4.761	9.842
Mataraman	12.781	12.470	25.251	12.827	12.546	25.373
Beruntung Baru	7.524	7.326	14.850	7.558	7.367	14.925
Martapura Barat	10.163	9.518	19.681	10.243	9.575	19.818
Martapura Timur	15.716	15.227	30.943	15.903	15.342	31.245
Sambung Makmur	6.768	6.630	13.398	6.895	6.785	13.680
Paramasan	2.074	1.851	3.925	2.126	1.903	4.029
Telaga Bauntung	1.742	1.712	3.454	1.767	1.740	3.507
Tatah Makmur	6.739	6.748	13.487	6.848	6.871	13.719
Cintapuri Darussalam	5.800	5.438	11.238	5.779	5.428	11.207
Jumlah	298.173	292.219	590.393	302.994	297.064	600.058

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjar, 2026

d. Jumlah Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Banjar terbagi kedalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

LUAS WILAYAH KABUPATEN BANJAR MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Aluh-Aluh	82,48	19	
2.	Beruntung Baru	61,42	12	
3.	Gambut	129,30	12	2
4.	Kertak Hanyar	45,83	10	3
5.	Tatah Makmur	35,47	13	
6.	Sungai Tabuk	147,30	20	1
7.	Martapura	42,03	19	7
8.	Martapura Timur	29,99	20	
9.	Martapura Barat	149,38	14	
10.	Astambul	216,50	22	
11.	Karang Intan	215,35	26	
12.	Aranio	1.166,35	12	
13.	Sungai Pinang	458,65	11	
14.	Paramasan	560,85	4	
15.	Pengaron	433,25	12	
16.	Sambung Makmur	134,65	7	
17.	Mataraman	148,40	15	
18.	Simpang Empat	141,10	15	
19.	Telaga Bauntung	158,00	4	
20.	Cintapuri Darussalam	428,29	11	
Jumlah		4.668,5	277	13

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No.	Perangkat Daerah	Sekretariat	Sub bagian	Bagian / Bidang	Sub bidang / Seksi	UPT
1.	Sekretariat Daerah					
	- Sekretaris Daerah	1		10 Bagian	29 Sub Bagian	
	- Asisten	3				
	- Staf Ahli	3				
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	3 Bagian	9 Sub Bagian	
3.	Inspektorat Daerah	1	3			
	- Inspektur Pembantu Wilayah	4				
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	1	3	5	12	
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	3	6	
6.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1	3	6	18	
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	3	9	
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	3	6	
9.	Dinas Pendidikan	1	3	4	12	40
10.	Dinas Kesehatan	1	3	4	12	29
11.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	3	6	18	
12.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	3	5	15	2
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	3	6	
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3	5	13	1
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	3	6	
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	3	5	11	1
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	4	8	2
18.	Dinas Perhubungan	1	2	3	6	2
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	4	8	
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	3	3	9	
21.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1	3	5	14	1
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	5	10	
23.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1	3	5	13	
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	3	2	4	
25.	Dinas Pertanian	1	3	6	18	4
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	2	2	4	
27.	Kecamatan (20 Camat)	20	40	-	80	
28.	Kelurahan (13 Lurah)	20	-	-	20	

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2026

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jumlah aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Banjar per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 10.200 yang terdiri atas 4.032 laki-laki dan 6.168 perempuan.

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki			Perempuan			Total			
		PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	Jumlah Keseluruhan
1	SEKRETARIAT DAERAH	62	6	52	56	14	24	118	20	76	214
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	15	22	28	14	13	17	29	35	45	109
3	INSPEKTORAT DAERAH	18	3	3	29	5	0	47	8	3	58
4	DINAS PENDIDIKAN	956	454	99	1676	1334	144	2632	1788	243	4663
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	31	8	27	25	9	18	56	17	45	118
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14	14	5	18	10	4	32	24	9	65
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	6	5	6	4	6	18	10	11	39
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	7	8	9	6	6	21	13	14	48
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28	12	11	32	9	6	60	21	17	98
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	53	57	204	26	24	103	79	81	307	467
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	15	1	15	21	4	10	36	5	25	66
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16	5	20	18	6	16	34	11	36	81
13	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12	73	11	4	10	5	16	83	16	115
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	3	19	20	10	13	34	13	32	79
15	DINAS PERTANIAN	24	11	54	24	8	17	48	19	71	138
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	6	3	15	11	6	23	17	9	49
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	37	8	43	19	6	25	56	14	68	138
18	DINAS PERHUBUNGAN	28	17	28	9	3	15	37	20	43	100
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	6	23	9	8	27	17	14	50	81
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9	5	7	12	6	5	21	11	12	44
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	4	11	15	6	5	23	10	16	49
22	DINAS KESEHATAN	222	157	40	766	519	68	988	676	108	1772
23	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	23	5	20	15	7	10	38	12	30	80
24	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	7	35	19	7	25	29	14	60	103
25	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,S TATISTIK DAN PERSANDIAN	12	8	31	12	7	12	24	15	43	82

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Perangkat Daerah	Laki-Laki			Perempuan			Total			
		PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	Jumlah Keseluruhan
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38	101	17	4	26	9	42	127	26	195
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	156	54	58	291	86	67	447	140	125	712
28	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	9	0	1	2	1	1	11	1	2	14
29	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	5	1	1	3	0	5	8	1	6	15
30	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	6	0	3	3	2	1	9	2	4	15
31	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT	10	0	3	2	1	3	12	1	6	19
32	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	5	0	2	4	0	4	9	0	6	15
33	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	5	0	2	6	1	4	11	1	6	18
34	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	6	2	2	1	0	0	7	2	2	11
35	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	7	0	2	3	2	4	10	2	6	18
36	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	5	0	1	3	1	2	8	1	3	12
37	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	8	1	0	1	0	0	9	1	0	10
38	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH	12	0	3	0	2	2	12	2	5	19
39	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	9	1	4	3	1	4	12	2	8	22
40	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARRUSALAM	6	2	0	0	0	2	6	2	2	10
41	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	6	1	3	0	1	3	6	2	6	14
42	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	9	0	2	3	1	2	12	1	4	17
43	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	9	2	1	2	0	2	11	2	3	16
44	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	6	1	3	6	1	3	12	2	6	20
45	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	7	0	3	3	2	3	10	2	6	18
46	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	10	0	0	0	1	1	10	1	1	12
47	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	5	2	0	7	0	3	12	2	3	17
48	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	4	1	1	2	0	0	6	1	1	8
49	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	1	1	1	2	0	1	3	1	2	6
50	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	2	0	1	8	1	1	10	1	2	13
51	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT	1	0	2	2	0	1	3	0	3	6
52	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	3	0	1	1	0	1	4	0	2	6
53	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	2	1	3	3	0	3	5	1	6	12
54	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	3	0	1	1	0	0	4	0	1	5
55	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	2	1	3	4	0	0	6	1	3	10
56	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	5	0	0	4	1	3	9	1	3	13
57	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	3	0	3	6	2	0	9	2	3	14
58	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT BARAT	3	0	1	5	0	1	8	0	2	10
59	PEMERINTAH KELURAHAN MANDAR SARI	3	0	1	2	1	3	5	1	4	10
60	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON	3	1	2	2	0	4	5	1	6	12

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Perangkat Daerah	Laki-Laki			Perempuan			Total			
		PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	PNS	PPPK Penuh waktu	PPPK Paruh waktu	Jumlah Keseluruhan
Jumlah		2021	1078	933	3258	2180	730	5279	3258	1663	10200

Sumber : Data Diolah BKPSDM 2026

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BERDASARKAN JENIS JABATAN TAHUN 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH	40	29	145	214
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	11	8	90	109
4	INSPEKTORAT DAERAH	9	37	12	58
5	DINAS PENDIDIKAN	19	4309	335	4663
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	24	4	90	118
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20	16	29	65
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	2	26	39
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	9	27	48
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	25	59	98
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	28	12	427	467
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	13	10	43	66
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20	6	55	81
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9	79	27	115
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	31	46	79
16	DINAS PERTANIAN	31	13	94	138
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	23	18	49
18	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	27	15	96	138
19	DINAS PERHUBUNGAN	14	8	78	100
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	9	65	81
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	5	28	44
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15	4	30	49
23	DINAS KESEHATAN	47	1224	501	1772
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	22	3	55	80
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18	6	79	103
26	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN	17	9	56	82
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	15	169	195
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	18	422	272	712
29	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	7	1	6	14
30	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	6	1	8	15
31	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	5	1	9	15

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
32	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT	6	1	12	19
33	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	4	0	11	15
34	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI TABUK	6	1	11	18
35	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	6	1	4	11
36	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	7	1	10	18
37	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	7	1	4	12
38	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	7	1	2	10
39	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH	8	2	9	19
40	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	7	1	14	22
41	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARRUSALAM	5	1	4	10
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	5	1	8	14
43	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	8	1	8	17
44	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	7	2	7	16
45	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	8	2	10	20
46	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	8	1	9	18
47	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	8	1	3	12
48	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	8	1	8	17
49	PEMERINTAH KELURAHAN SEKUMPUL	4	0	4	8
50	PEMERINTAH KELURAHAN MANARAP LAMA	3	0	3	6
51	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI PARING	5	0	8	13
52	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT	2	0	4	6
53	PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI LULUT	4	0	2	6
54	PEMERINTAH KELURAHAN PASAYANGAN	3	0	9	12
55	PEMERINTAH KELURAHAN KERTAK HANYAR	4	0	1	5
56	PEMERINTAH KELURAHAN MURUNG KERATON	5	0	5	10
57	PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT	4	0	9	13
58	PEMERINTAH KELURAHAN JAWA	5	0	9	14
59	PEMERINTAH KELURAHAN GAMBUT BARAT	5	0	5	10
60	PEMERINTAH KELURAHAN MANDAR SARI	4	0	6	10
61	PEMERINTAH KELURAHAN KERATON	4	0	8	12
JUMLAH		663	6355	3182	10200

Sumber : Data Diolah BKPSDM 2026



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan Program dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

N O	Uraian	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Hibah		Belanja Bantuan Sosial		Belanja Tanah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Belanja Modal Aset Lainnya		Belanja Tidak Terduga		Belanja Bagi Hasil		Belanja Bantuan Keuangan	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	515.713.700.647,00	477.367.193.563,00	97.387.560.297,00	85.339.876.983,00	28.166.890.000,00	27.125.219.296,00	-	-	1.684.250.000,00	860.427.330,00	28.193.610.685,00	20.269.207.482,00	43.288.509.279,00	41.584.843.445,85	-	-	5.140.919.100,00	4.762.299.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	257.192.883.971,00	228.383.076.408,00	345.152.251.767,00	321.939.073.993,81	950.000.000,00	949.987.072,00	-	-	5.509.000.000,00	2.945.570.000,00	36.197.439.197,00	34.591.455.163,00	70.516.468.526,00	63.158.229.433,02	4.590.000.000,00	4.589.907.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.696.182.512,00	9.396.582.558,00	30.392.942.303,00	27.064.528.154,87	28.447.083.840,00	25.795.089.939,65	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	436.805.000,00	399.783.256,00	17.837.300.000,00	16.331.930.214,18	274.489.609.377,00	248.916.207.094,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	684.998.000,00	442.285.420,00	-	-	-	-	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	25.299.375.994,00	23.855.037.422,33	-	-	3.186.415.000,00	3.183.052.550,00	-	-	87.484.000,00	86.419.050,00	-	-	24.449.710.800,00	23.250.503.264,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.429.975.000,00	11.654.902.532,00	43.621.274.747,00	38.336.077.768,90	-	-	-	-	613.190.000,00	317.283.000,00	7.428.237.850,00	6.949.157.776,00	12.831.144.000,00	11.985.748.600,00	5.692.114.980,00	5.417.938.351,90	-	-	1.100.640.000,00	1.058.473.615,00	-	-	-	-	-	-
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.294.600.000,00	22.019.447.188,00	22.873.559.977,00	17.231.223.888,20	-	-	-	-	-	-	14.308.578.095,00	13.620.176.384,00	1.669.423.000,00	1.642.402.790,00	-	-	19.800.000,00	19.402.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.796.850.000,00	6.050.472.949,00	13.451.791.521,00	9.812.827.381,00	-	-	1.735.900.000,00	1.447.980.000,00	10.600.000.000,00	441.532.500,00	727.892.000,00	641.107.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	3.427.375.050,00	1.803.214.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	10.228.660.100,00	9.722.725.362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000.000,00	125.291.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.764.125.000,00	4.217.617.863,00	6.947.923.358,00	5.487.052.429,00	-	-	-	-	-	-	107.410.000,00	106.084.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	261.746.500,00	255.730.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.576.550.000,00	6.201.291.506,00	6.944.634.455,00	6.201.814.911,00	150.515.000,00	150.515.000,00	-	-	-	-	880.224.000,00	860.059.548,00	-	-	52.000.000,00	50.942.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	2.168.959.500,00	1.858.624.931,00	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000,00	2.344.300.000,00	-	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.511.900.000,00	3.929.577.750,00	5.925.064.425,00	5.244.746.447,00	-	-	-	-	-	-	455.488.000,00	431.213.756,00	-	-	-	-	10.000.000,00	8.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.570.950.000,00	4.343.059.183,00	15.995.426.852,00	14.916.836.476,00	-	-	-	-	-	-	599.022.000,00	591.068.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.486.963.799,00	11.909.878.616,00	183.120.791.000,00	183.120.316.588,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.039.450.000,00	5.467.968.781,00	12.334.936.809,00	9.343.106.730,00	-	-	-	-	-	-	3.817.713.910,00	3.688.978.169,00	1.862.519.240,00	1.655.149.209,00	20.000.000,00	19.874.500,00	-	-	190.000.000,00	189.904.950,00	-	-	-	-	-	-
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.106.150.000,00	4.816.692.133,00	14.263.658.993,00	13.472.684.727,00	-	-	-	-	-	-	1.382.821.000,00	1.275.860.998,00	50.000.000,00	49.782.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	187.144.700,00	157.943.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	100.787.400,00	62.381.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	79.642.500,00	-	-	-	-	-	-	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.234.650.000,00	6.279.257.320,00	6.532.700.361,00	5.469.045.351,00	-	-	-	-	-	-	360.697.000,00	346.696.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	1.625.850.680,00	1.368.249.777,00	-	-	-	-	-	-	60.858.000,00	57.860.000,00	1.156.800.000,00	947.126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	3.572.088.500,00	1.473.116.769,00	-	-	-	-	-	-	137.133.000,00	57.642.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.190.950.000,00	5.967.496.700,00	5.372.783.240,00	4.786.225.901,00	-	-	-	-	-	-	934.014.750,00	892.862.191,00	775.017.000,00	702.110.998,00	1.942.000.000,00	1.650.670.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN CLAHRAGA	6.536.350.000,00	6.324.983.935,00	11.870.772.350,00	10.650.099.567,00	8.479.417.500,00	7.694.147.715,00	-	-	-	-	1.804.240.000,00	1.767.947.586,00	12.181.940.000,00	10.819.145.911,00	-	-	-	-	21.050.000,00	21.050.000,00	-	-	-	-	-	-
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	2.802.965.000,00	2.455.554.642,00	161.750.000,00	161.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA	-	-	7.951.400.750,00	7.366.295.118,00	-	-	-	-	-	-	350.135.000,00	311.550.000,00	919.862.750,00	913.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.991.850.000,00	4.673.460.043,00	2.956.363.630,00	2.412.192.667,00	-	-	-	-	-	-	194.548.000,00	192.350.140,00	59.560.000,00	-	-	-	219.118.000,00	219.065.861,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	268.160.500,00	261.202.500,00	-	-	-	-	-	-	11.126.000,00	4.900.002.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.951.050.000,00	29.432.222.550,00	21.397.466.444,00	18.770.706.235,00	-	-	-	-	-	-	1.842.398.696,00	1.753.100.319,00	1.336.285.000,00	1.330.548.000,00	808.860.000,00	807.543.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	20.495.103.840,00	19.683.780.613,00	48.288.095.701,00	43.932.955.210,27	33.083.661.000,00	31.046.822.619,89	-	-	-	-	10.859.107.000,00	10.376.678.064,00	2.085.000.000,00	1.896.876.940,46	-	-	11.154.000,00	3.175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	38.411.317.586,00	34.219.717.856,00	49.500.276.546,00	37.714.630.504,00	-	-	-	-	-	-	7.215.267.945,00	6.357.952.002,00	-	-	-	-	27.582.000,00	23.659.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PERENCANAAN	7.255.950.000,00	6.811.370.367,00	7.624.058.796,00	6.664.106.899,00	-	-	-	-	-	-	699.706.000,00	658.423.498,00	200.000.000,00	199.724.041,61	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	1.578.625.200,00	1.466.681.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



N O	Uraian	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Hibah		Belanja Bantuan Sosial		Belanja Tanah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Belanja Modal Aset Lainnya		Belanja Tidak Terduga		Belanja Bagi Hasil		Belanja Bantuan Keuangan	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
35	KEUANGAN	61.783.175.007,00	50.596.564.995,00	14.944.863.754,00	13.049.020.264,13	-	-	-	-	-	-	3.524.858.000,00	3.283.181.599,00	195.050.000,00	191.523.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	397.250.000,00	10.000.000,00	5.121.658.105,00	-	-	228.056.356.792,00	211.423.885.859,00
36	KEPEGAWAIAN	7.320.250.000,00	7.059.585.910,00	8.057.782.169,00	5.526.269.700,00	300.000.000,00	299.600.578,00	-	-	-	-	1.818.592.780,00	1.668.427.424,00	175.487.499,00	175.337.500,72	100.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	4.830.421.000,00	3.933.747.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	INSPEKTORAT DAERAH	10.131.650.000,00	9.823.804.281,00	6.450.001.555,00	3.586.098.487,00	-	-	-	-	-	-	1.268.465.000,00	1.041.168.139,00	13.000.000,00	12.948.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN	49.217.884.516,00	45.608.833.366,00	31.987.443.818,00	28.894.489.555,59	-	-	-	-	-	-	10.583.991.170,00	10.003.077.242,00	803.066.188,00	741.420.250,00	2.174.033.400,00	2.108.198.750,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.136.000.000,00	3.649.089.519,00	6.668.334.645,00	5.986.317.305,00	1.851.990.000,00	1.851.990.000,00	-	-	-	-	263.040.000,00	259.810.850,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	-	-	300.000.000,00	299.550.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.119.349.498.079,00	1.013.978.049.874,00	901.930.527.387,00	798.314.778.412,10	101.591.307.340,00	95.065.122.220,54	6.922.315.000,00	6.631.032.550,00	19.156.440.000,00	4.564.812.830,00	136.553.454.075,00	122.546.543.114,00	168.160.432.482,00	154.541.587.833,84	314.318.328.557,00	286.811.785.897,70	5.446.073.100,00	5.053.352.667,00	2.371.690.000,00	2.045.871.065,00	10.000.000,00	5.121.658.105,00	12.486.963.799,00	11.909.878.616,00	411.177.147.792,00	394.544.202.447,00

Sumber : BPKPAD Kab.Banjarn, per tanggal 15 Januari 2026

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	Rp2.593.834.061.575,00	Rp3.099.419.014.972,29	119,49%
Pendapatan Asli Daerah	Rp331.708.671.959,00	Rp378.195.544.475,29	114,01%
Pajak Daerah	Rp161.734.000.000,00	Rp192.638.435.244,74	119,11%
Retribusi Daerah	Rp133.745.147.512,00	Rp55.395.281.817,10	41,42%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp13.754.419.548,00	Rp14.739.450.551,00	107,16%
Lain-lain PAD yang Sah	Rp22.475.104.899,00	Rp115.422.376.862,45	513,56%
Pendapat Transfer	Rp2.231.688.090.766,00	Rp2.644.529.518.571,00	118,50%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp1.893.687.680.000,00	Rp2.187.323.323.859,00	115,51%
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp50.533.470.000,00	Rp63.344.944.000,00	125,35%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp672.949.678.000,00	Rp982.890.873.555,00	146,06%
Dana Alokasi Umum	Rp853.339.993.000,00	Rp847.722.089.926,00	99,34%
Dana Alokasi Khusus	Rp316.864.539.000,00	Rp293.365.416.378,00	92,58%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp230.231.953.000,00	Rp218.735.230.856,00	95,01%
Dana Desa	Rp222.918.228.000,00	Rp211.423.885.856,00	94,84%
Dana Insentif Daerah	Rp7.313.725.000,00	Rp7.311.345.000,00	99,97%
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp77.331.158.916,00	Rp238.470.963.856,00	308,38%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp77.331.158.916,00	Rp238.470.963.856,00	308,38%
Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp76.693.951.926,00	251,97%
Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp76.693.951.926,00	251,97%
Belanja Daerah	Rp3.209.464.177.614,00	Rp2.902.763.901.620,69	90,44%
Belanja Operasi	Rp2.129.793.647.806,00	Rp1.915.800.552.080,66	89,95%
Belanja Pegawai	Rp1.119.349.498.079,00	Rp1.013.978.049.874,00	90,59%
Belanja Barang dan Jasa	Rp901.930.527.387,00	Rp799.344.769.302,12	88,63%
Belanja Hibah	Rp101.591.307.340,00	Rp95.846.700.404,54	94,35%
Belanja Bantuan Sosial	Rp6.922.315.000,00	Rp6.631.032.500,00	95,79%
Belanja Modal	Rp646.006.418.217,00	Rp575.387.610.372,03	89,07%
Belanja Modal Tanah	Rp19.156.440.000,00	Rp4.564.812.830,00	23,83%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp136.553.454.078,00	Rp122.546.543.114,00	89,74%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp168.160.432.482,00	Rp154.497.244.578,83	91,87%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp314.318.328.557,00	Rp286.679.786.117,20	91,21%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp5.446.073.100,00	Rp5.053.352.667,00	92,79%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp2.371.690.000,00	Rp2.045.871.065,00	86,26%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp5.121.658.105,00	51,22%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp5.121.658.105,00	51,22%
Belanja Transfer	Rp423.664.111.591,00	Rp406.454.081.063,00	95,94%
Belanja Bagi Hasil	Rp12.486.963.799,00	Rp11.909.878.616,00	95,38%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp411.177.147.792,00	Rp394.544.202.447,00	95,95%
Surplus / (Defisit)	-Rp615.630.116.039,00	Rp196.655.113.351,60	-31,94%
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	Rp649.472.765.324,00	Rp649.472.765.324,64	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp649.472.765.324,00	Rp649.472.765.324,64	100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
Pembiayaan Netto	Rp646.067.414.889,00	Rp649.472.765.324,64	100,53%
	Rp0,00	Rp846.127.878.676,24	100,00%

Sumber : BPKPAD Kab.Banjar, pertanggal 15 Januari 2026

a. Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 pertanggal 15 Januari 2026, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 3.099.419.014.972,29 Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 yaitu:



- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp. 378.195.544.475,29 dengan capaian 114,01%.
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 2.644.529.518.571,00 dengan capaian 118,50%
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 76.693.951.926,00 dengan capaian 251,97%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 378.195.544.475,29 atau sebesar 114,01% dari target sebesar Rp. 331.708.671.959,00 terdiri atas :

- Pendapatan pajak daerah terealisasi Rp. 192.638.435.244,74 atau sebesar 119,11% dari target sebesar Rp. 161.734.000.000,00
- Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 55.395.281.817,10 atau sebesar 41,42% dari target sebesar Rp. 133.745.147.512,00
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 14.739.450.551,00 atau sebesar 107,16% dari target sebesar Rp. 13.754.419.548,00
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 115.422.376.862,45 atau sebesar 513,56% dari target sebesar Rp. 22.475.104.899,00

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi Rp. 2.644.529.518.571,00 atau sebesar 119,99% dari target Rp. 2.201.250.791.916,00 Pendapatan transfer terbagi atas 3 (dua) hal yaitu Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan realisasi Rp. 2.187.323.323.859,00 dari anggaran Rp. 1.893.687.680.000,00 atau capaian 113,13% terdiri atas : Dana Bagi Hasil Pajak (realisasi Rp 63.344.944.000,00 dari anggaran Rp. 50.533.470.000,00 atau capaian 125,35 %); Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (realisasi Rp.



982.890.873.555,00 dari anggaran Rp. 672.949.678.000,00 atau capaian 146,06 %); Dana Alokasi Umum (realisasi Rp. 847.722.089.926,00 dari anggaran Rp. 853.339.993.000,00 atau capaian 99,34%); Dana Alokasi Khusus (realisasi Rp. 293.365.416.378,00 dari anggaran Rp. 316.864.539.000,00 atau capaian 92,58%).

- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (realisasi Rp. 218.735.230.856,00 dari anggaran Rp. 230.231.953.000,00 atau capaian 95,01%) terdiri atas : Dana Desa (realisasi Rp. 211.423.885.856,00 dari anggaran Rp. 222.918.228.000,00 atau capaian 94,84%) ; Dana Insentif Daerah (realisasi Rp. 7.311.345.000,00 dari anggaran Rp. 7.313.725.000,00 atau capaian 99,97%)
- Transfer Pemerintah Provinsi (realisasi Rp. 238.470.963.856,00 dari anggaran Rp. 77.331.158.916,00 atau capaian 308,38%) terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil Pajak (realisasi Rp. 238.470.963.856,00 dari anggaran Rp. 77.331.158.916,00 atau capaian 308,38%)

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 76.693.951.926,00 atau sebesar 251,97% dari anggaran Rp. 30.437.298.850,00 terdiri atas : Pendapatan hibah (realisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 0 atau sebesar 0%) ; Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi Rp. 76.693.951.926,00 sebesar 251,97% dari anggaran Rp. 30.437.298.850,00)

b. Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga 4) belanja transfer. Selama tahun 2025, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 2.902.763.901.620,69 dengan komponen belanja operasi sebesar Rp. 1.915.800.552.080,66 atau 89,95%, kemudian belanja modal Rp. 575.387.610.372,03 atau 89,07% ,selanjutnya belanja tak terduga sebesar Rp. 5.121.658.105,00 atau 51,22 % dan belanja transfer sebesar Rp. 406.454.081.063,00 atau 95,94%.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 pertanggal 15 Januari 2026 adalah Rp. 2.902.763.901.620,69 atau 90,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.209.464.177.614,00 Adapun



realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.915.800.552.080,66 atau 89,95% dari anggaran Rp. 2.129.793.647.806,00 terdiri atas: belanja pegawai (realisasi Rp. 1.013.978.049.874,00 dari anggaran Rp. 1.119.349.498.079,00 atau capaian 90,59%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 799.344.769.302,12 dari anggaran Rp. 901.930.527.387,00 atau capaian 88,63%); Belanja hibah (realisasi Rp. 95.846.700.404,54 dari anggaran Rp. 101.591.307.340,00 atau capaian 94,35%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 6.631.032.550,00 dari anggaran Rp. 6.922.315.000,00 atau capaian 95,79%).
- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 575.387.610.372,03 atau 89,07% dari anggaran Rp. 646.006.418.217,00 terdiri atas: belanja tanah (realisasi Rp. 4.564.812.830,00 dari anggaran Rp. 19.156.440.000,00 atau capaian 23,83%); belanja Peralatan dan Mesin (realisasi Rp. 122.546.543.114,00 dari anggaran Rp. 136.553.454.078,00 atau capaian 89,74%); belanja gedung dan bangunan (realisasi Rp. 154.497.244.578,83 dari anggaran Rp. 168.160.432.482,00 atau capaian 91,87%); belanja jalan, irigasi, dan jaringan (realisasi Rp. 286.679.786.117,20 dari anggaran Rp. 314.318.328.557,00 atau capaian 91,21%); belanja aset tetap lainnya (realisasi Rp. 5.053.352.667,00 dari anggaran Rp. 5.446.073.100,00 atau capaian 92,79%) ; Belanja Modal Aset Lainnya (realisasi Rp. 2.045.871.065,00 dari anggaran Rp. 2.371.690.000,00 atau capaian 86,26%).
- 3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 5.121.658.105,00 atau 51,22% dari anggaran Rp. 10.000.000.000,00
- 4) Belanja Transfer dengan realisasi Rp. 406.454.081.063,00 atau 95,94% dari anggaran Rp. 423.664.111.591,00 terdiri atas: belanja bagi hasil (realisasi Rp. 11.909.878.616,00 dari anggaran Rp. 12.486.963.799,00 atau 95,38%); belanja bantuan keuangan (realisasi Rp. 394.544.202.447,00 dari anggaran Rp. 411.177.147.792,00 atau 95,95%).

c. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 pertanggal 15 Januari 2026 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 649.472.765.324,64 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



649.472.765.324,64 atau 100% Sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasinya sebesar Rp. 0 dari anggaran Rp. 3.405.350.435,00 atau 0% terdiri atas: penyertaan modal pemerintah daerah (realisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 3.405.350.435,00 atau 0%);



1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjar secara umum akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan lintas sektor dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan daerah. Kedua permasalahan ini pada umumnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama lima tahun mendatang.

1. Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kabupaten Banjar diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara umum dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan meninjau capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Banjar dirinci sebagai berikut:

Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal	Kapasitas produksi industri kecil menengah belum optimal
		Nilai tambah sektor pariwisata daerah masih belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata berdasarkan konsep 7A pariwisata belum optimal
		Pembentukan modal tetap bruto belum optimal	Realisasi investasi sektor tersier masih rendah Intensifikasi investasi sektor primer dan sekunder belum optimal
		Ekspor barang dan jasa daerah belum terpetakan	Belum adanya standarisasi barang perdagangan
		Distribusi barang belum lancar	Sarpras perdagangan belum sesuai standar Belum memiliki pusat distribusi regional
		Omzet usaha mikro belum optimal	Keberdayaan usaha mikro masih rendah
		Belum optimalnya kualitas koperasi	Belum adanya regenerasi SDM koperasi Masih tingginya dominasi koperasi simpan pinjam
		Produktivitas angkatan kerja daerah belum optimal	Serapan tenaga kerja belum optimal
	Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan belum optimal	Nilai tambah sektor pertanian belum optimal	Produksi dan produktivitas pertanian kurang optimal Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya belum optimal
	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Tingginya angka kecelakaan
			Belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang
			Belum memadainya aksesibilitas menuju kawasan pariwisata dan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Penguatan SDM yang berkualitas dan berkarakter belum optimal	Pelayanan pendidikan belum optimal	pusat pertumbuhan
			Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata
			Sarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			Implementasi kurikulum merdeka masih belum optimal
			Minat dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di usia pendidikan masih terbatas
			Integrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal keagamaan melalui penyetaraan pendidikan masih terbatas
		Pelayanan kesehatan masih belum optimal	Sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas belum merata
			Kebutuhan tenaga medis dan paramedis masih belum tercukupi
			Layanan rumah sakit masih belum optimal
			Manajemen dan tata kelola kesehatan belum optimal
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan belum optimal
			Kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan
			Data penerima bantuan sosial masih perlu disesuaikan
			Cakupan penerima bantuan sosial masih terbatas
			Kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan sosial masih belum optimal
			Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan masih belum optimal
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Reformasi birokrasi daerah belum terimplementasi secara menyeluruh	Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Capaian akuntabilitas kinerja yang belum konsisten
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja
	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital masih rendah
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
			Kurangnya upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
	Belum optimalnya implementasi ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kurang akses pangan masyarakat	Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
			Belum optimalnya perlindungan kerusakan lingkungan
		Ketahanan pangan belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan
			Belum meratanya akses air baku
		Belum meratanya ketersediaan energi baru terbarukan	Menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat alih fungsi lahan, serangan hama, perubahan iklim, dan bencana
			Ketersediaan pangan masih rendah
	Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keselamatan	Pemanfaatan pangan belum beragam
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Penerapan energi baru terbarukan belum familier
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk sumber energi baru
			Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan



Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			infrastruktur penanganan bencana dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
		Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal	Masih rendahnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
			Pembentukan komunitas iklim belum maksimal
			Pengelolaan limbah gas buang belum optimal
	Belum optimalnya ketahanan sosial	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Masih tingginya pernikahan dini/anak
			Pemenuhan ruang dan hak anak yang masih belum optimal
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah/penampungan
		Adanya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Deteksi dini dan sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal
			Masih adanya permukiman dan perumahan yang belum terfasilitasi PSU
		Belum optimalnya akses rumah layak huni, terjangkau, berkelanjutan dan	Masih adanya kawasan kumuh
			Tingginya <i>backlog</i> permukiman

Sumber : Data diolah Bappedalitbang, 2026

2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mengalami berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui proses pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pembangunan berbasis urusan menjadi perlu untuk dilakukan dalam rangka pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan pemerintah daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Berikut tabel Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Pelayanan pendidikan belum optimal	Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata
			Sarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			Implementasi kurikulum merdeka masih belum optimal
			Minat dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di usia pendidikan masih terbatas
			Integrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal keagamaan melalui penyetaraan pendidikan masih terbatas
2	Kesehatan	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas belum merata
			Kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan masih belum tercukupi
			Belum optimalnya jumlah dan distribusi tenaga Kesehatan
			Layanan rumah sakit masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan belum optimal
			Kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Upaya penurunan stunting dan perbaikan gizi masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang menuju kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan
			Kesulitan topografi Kabupaten Banjar
			Banjir menyebabkan kualitas jalan menurun
			Belum teridentifikasinya aset lahan untuk jalan baru
		Belum optimalnya pengairan daerah	Pasang surut air membuat pekerjaan tidak dapat dilakukan setiap waktu
			Beberapa petak sawah belum teraliri irigasi
			Menumpuknya sedimentasi sungai sehingga perlu normalisasi
		Belum optimalnya drainase daerah	Belum ada masterplan drainase kecuali di Martapura Belum terkoneksinya drainase dengan sungai
			Kebiasaan membuang sampah di jaringan drainase
		Penataan bangunan dan gedung belum optimal	Integrasi dalam pengajuan IMB antar OPD
			Layanan SIMBG masih belum andal
			Bangunan area perkantoran masih belum ramah difabel
			Pengendalian bangunan belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan air minum dan air limbah	Data penerima layanan air minum belum aktual dan terkini
			Akses air baku sesuai standar aman di beberapa daerah sulit
			Kelembagaan masyarakat pengelola air minum kurang optimal
			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kurang diminati
			Embung komunal sebagai perlindungan mata air kondisinya kering pada saat musim kemarau
		Meningkatnya alih fungsi lahan	Belum optimalnya sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
			Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan
			Masih adanya pelanggaran penataan ruang
			Belum adanya peta lahan sawah dilindungi
			Data lahan sawah dilindungi dari pusat tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan daerah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kurangnya akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	Beberapa kawasan permukiman belum memenuhi standar
			Masih adanya permukiman dan perumahan yang belum terfasilitasi PSU
			Tingginya backlog permukiman
			Penanganan fisik atas rumah layak huni memerlukan intervensi OPD lain
			Data RTLH belum terkini
		Masih adanya kawasan kumuh	Kerancuan pembagian kewenangan antara PU dan PKP dalam intervensi rumah tidak layak huni
			Belum tersedia lahan untuk proses relokasi
		Penyelenggaraan PSU masih belum optimal	Data kawasan kumuh belum terkini
			Adanya penolakan perihal penerbitan kawasan permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Pendanaan bagi optimalisasi PJU
			Sarana prasarana tantribum kurang memadai (transportasi patroli)
			Aparatur PPNS kurang memadai (PPNS cuma 1 orang)
			Minimnya kompetensi aparaturnya penegak peraturan daerah
			Belum optimalnya peran satlinmas di lingkungan desa
			Data trantib belum terkonsolidasi di seluruh kecamatan
			Kurangnya pemahaman perkara dari masyarakat
		Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Koordinasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan tantribum belum optimal
			Tingginya pelanggaran atas konsumsi minuman beralkohol
			Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan bencana dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
			Masih rendahnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
			Rekomendasi atas mitigasi bencana belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD terkait
			Permasalahan banjir akibat berkurangnya serapan di beberapa wilayah
			Cakupan sarana mitigasi bencana masih rendah (tanda dan rambu bencana)
			Praktik buka lahan yang menyebabkan karhutla masih terjadi
			Belum ada alat pemadam sumbut untuk lahan gambut
			Belum seluruh kecamatan memiliki destana
			Pemanfaatan hasil kajian kebencanaan belum optimal
			Ketahanan bencana keluarga belum optimal
			Kecamatan Tangguh Bencana belum optimal
			Sistem peringatan diri (Early Warning System) belum menyeluruh dan terbatas bencana banjir
		Belum optimalnya pemadaman kebakaran	Cakupan pelayanan pemadaman kebakaran masih terbatas
			Pembangunan sektor masih menunggu tindak lanjut dari OPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		dan penyelamatan daerah	terkait
			Akses jalan sulit di daerah-daerah tertentu untuk memadamkan kebakaran
			Aparatur dan perlengkapan kebakaran masih terpusat di wilayah perkotaan
			Ketidaktahuan masyarakat atas layanan kebakaran
			Barisan Pemadam Kebakaran belum berbadan hukum
			Infrastruktur pemadam kebakaran sudah tidak berfungsi
			Inspeksi proteksi kebakaran belum optimal
6	Sosial	Belum optimalnya kesejahteraan kelompok rentan	Bantuan sosial pada kelompok rentan masih perlu ditingkatkan
			Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, dll. masih perlu ditingkatkan
			Pengelolaan dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan sosial
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah/penampungan
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Produktivitas angkatan kerja daerah belum optimal	Kesesuaian kompetensi dengan permintaan pasar belum memadai
			Belum semua perusahaan memiliki RTK mikro
			Jaringan pemasaran tenaga kerja belum memadai
			Kompetensi tenaga kerja belum memadai
			Perselisihan hubungan industrial
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu dioptimalkan	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Indeks ketimpangan gender 0,530)
			Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
			Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
			Masih adanya pernikahan dini/anak
9	Pangan	Ketersediaan pangan masih perlu ditingkatkan	Stok cadangan pangan perlu peningkatan (masih di dalam volume minimal)
			Lumbung pangan masih belum memadai
			Belum meratanya akses air baku
			Menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat alih fungsi lahan, serangan hama, perubahan iklim, dan bencana
		Keterjangkauan pangan belum optimal	Optimalisasi fungsi lumbung pangan
			Desa rawan pangan perlu diturunkan
			Beberapa komoditas masih tergantung daerah lain
			Sering terjadi kekurangan pasokan karena cuaca yang berpengaruh ke kapal.
		Pemanfaatan dan keamanan pangan belum optimal	Peningkatan diversifikasi pangan lokal belum memadai
			Peningkatan konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buahbuahan belum memadai
			Penurunan pangan yang memiliki kandungan kimia di atas ambang batas (pangan segar asal tumbuhan, hewan dan ikan) masih perlu ditingkatkan
10	Pertanahan	Pengelolaan aset pertanahan daerah masih belum optimal	Masih adanya konflik sengketa pertanahan
			Dokumen kepemilikan tanah masih banyak yang tumpang tindih
			Tidak ada batas patok tanah yang jelas
			Sebagian tanah aset kabupaten berada di wilayah hutan
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Kurangnya upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
			Belum optimalnya perlindungan kerusakan lingkungan
			Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan
			Pengawasan atas aktivitas industri berdampak terhadap lingkungan hidup masih lemah
			Kewenangan penindakan pelanggaran lingkungan hidup masih rancu
		Belum meratanya ketersediaan energi baru terbarukan	Penerapan energi baru terbarukan belum familier
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk sumber energi baru
		Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal	Pembentukan komunitas iklim belum maksimal
			Pengelolaan limbah gas buang belum optimal
		Pengelolaan sampah belum optimal	Pengelolaan sampah baru sampai 50%
			Sampah kiriman dari wilayah lain
			Unit pengelolaan sampah dalam kondisi kurang optimal
			Pelayanan sampah belum semua kecamatan
			TPS 3R terkonsentrasi di wilayah perkotaan
Peran bank sampah belum optimal			
Penurunan kualitas dan kuantitas air	Adanya keramba ikan ilegal		
	Banyaknya alih fungsi lahan permukiman		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan publik pencatatan sipil	Jangkauan pelayanan kependudukan belum dapat diakses secara mudah karena kondisi geografis
			Literasi digital masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan masih rendah
			Belum optimal sarana dan prasarana pendukung pencatatan sipil
		Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan sipil
			Belum adanya regulasi yang mewajibkan kepemilikan Kartu Identitas Anak
		Belum optimalnya pengelolaan dan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem informasi
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pemanfaatan informasi kependudukan	perangkat daerah
			Belum optimalnya implementasi standardisasi pengelolaan informasi
			Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Beum optimalnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal desa
			Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk
			Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB
15	Perhubungan	Masih tingginya kasus kecelakaan dan kemacetan	Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Masih lemahnya pengawasan dan penindakan adanya kendaraan dengan <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL)
			Belum adanya skema reaksi cepat dalam penguraian kemacetan berbasis teknologi informasi
			Belum ada Area <i>Traffic Control System</i>
			Masih adanya ruas jalan yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan
			Belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi
		Belum optimalnya pengelolaan transportasi air daerah	Sebagian besar kapal air yang beroperasi tidak sesuai standar
			Masih rendahnya ketaatan keselamatan pelayaran
			Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas awak kapal
			Masih adanya angkutan air yang tidak terdaftar
			Masih rendahnya kesadaran operator angkutan air untuk melakukan pemeriksaan kendaraan
16	Komunikasi Informatika dan	Belum optimalnya pengelolaan informasi publik	Literasi digital masyarakat terhadap pelayanan publik digital masih rendah
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah desa (blank spot)
			Belum ada data spesifik mengenai blank spot di desa-desa
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan pengaduan
			Belum memiliki peta rencana dan arsitektur SPBE
		Belum optimalnya penyelenggaraan aplikasi informasi daerah	Belum optimalnya pemanfaatan website kecamatan oleh masyarakat
			Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas programmer
			Belum terintegrasinya aplikasi antar OPD dalam satu layanan aplikasi
			Belum optimalnya skema KPBU dalam pembiayaan pemerintahan digital
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Produktivitas omzet usaha mikro belum optimal	Produksi usaha mikro khususnya usaha non-pertanian belum memadai
			Kualitas produk usaha mikro belum memadai
			Kapasitas pemasaran produk usaha mikro belum optimal
			Memiliki legalitas usaha mikro perlu ditingkatkan
			Beberapa usaha mikro sudah memisahkan pencatatan laporan keuangan usahanya dengan rumah tangga
			Kurangnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
		Volume usaha koperasi belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
			Regenerasi pengurus koperasi tidak ada
			Kurangnya pengawasan dan pendampingan
			Metode pengelolaan koperasi masih konvensional/ kewirausahaan koperasi tidak memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Masih tingginya dominasi koperasi simpan pinjam
			Digitalisasi koperasi masih kurang
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi belum optimal	Realisasi investasi sektor tersier masih rendah
			Intensifikasi investasi sektor primer dan sekunder belum optimal
			Kondusivitas iklim investasi perlu ditingkatkan
			Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum memadai
			Kualitas penyusunan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal
			Kualitas pelayanan perizinan perlu ditingkatkan
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Terbatasnya partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Belum optimalnya prestasi dan pembinaan olahraga	Belum optimalnya upaya pembinaan kepada pemuda
			Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
			Terbatasnya jumlah dan kompetensi pelatih
			Kurangnya dukungan sekolah dan tidak adanya sekolah khusus olahraga bagi para atlet
20	Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral daerah masih belum optimal	Masih terbatasnya kompetisi olahraga yang diikuti
			Belum adanya standar data yang seragam dari masing-masing perangkat daerah
21	Persandian	Pengamanan informasi masih belum optimal	Keterbatasan sumber daya persandian
22	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan daerah belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana kebudayaan
			Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan
			Belum optimalnya pengembangan wisata budaya dan sejarah
23	Perpustakaan	Belum optimalnya	Sarana dan prasarana perpustakaan perlu ditingkatkan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		literasi masyarakat	Terbatasnya layanan perpustakaan keliling
			Jam Buka perpustakaan bersamaan dengan waktu sekolah
			Koleksi buku digital dan non digital belum memenuhi standar
			Belum optimalnya peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan minat baca
			Terbatasnya pustakawan
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan kearsipan	Tata kelola urusan kearsipan belum optimal
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan budidaya belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum memadai
			Kualitas sarana dan prasarana perikanan belum memadai
			Pengembangan metode budidaya perikanan masih semi intensif/ semi tradisional
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Produksi perikanan tangkap belum optimal	Kapasitas SDM nelayan kurang memadai
			Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai
			Cara menangkap ikan masih tradisional
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Pengolahan dan pemasaran belum optimal	Pemasaran ke ritel modern terbatas
			Belum ada pabrik kemasan
		Kualitas produk perikanan belum optimal	Beberapa pembudidaya ikan sudah memiliki sertifikasi budidaya ikan yang baik dan cara pembuatan pakan yang baik
			Sertifikasi memiliki keterbatasan biaya
		Illegal fishing masih terjadi	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber daya perikanan
			Pembentukan kelompok pengawas perikanan belum memadai
			Pelaku penyetrum di desa masih banyak
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi belum memadai
			Pemasaran wisata perlu ditingkatkan
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
27	Pertanian	Produktivitas pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Kapasitas penyuluh pertanian masih belum memadai
			Sarana pertanian belum memadai
			Prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian secara umum masih konvensional
			Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan
			Bencana pertanian (pasang surut dan banjir rob) / dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
		Produksi hasil ternak belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia peternak belum optimal
			Sarana peternakan belum memadai
			Prasarana peternakan belum memadai
			Metode budidaya peternakan masih konvensional
		Populasi ternak masih belum sesuai target (sapi dan itik)	Akses terhadap bantuan permodalan masih belum memadai
			Tingkat kelahiran ternak masih rendah
			Kesehatan ternak belum memadai
			Tingkat kematian ternak masih dalam moderat
28	Perdagangan	Kapasitas pemasaran produk ekspor masih rendah	Kontinuitas produksi produk ekspor belum memadai
			Standarisasi ekspor kurang memadai
			Jaringan pemasaran ekspor belum optimal (kerjasama dengan indonesia export chanel)
		Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal	Kurang terkendalinya stok bahan pokok dan penting
			Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional belum memadai
			Perlindungan konsumen belum memadai
			Belum memiliki pusat distribusi regional
29	Perindustrian	Kapasitas dan kualitas produksi IKM belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Kualitas sarana dan prasarana IKM belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Standarisasi sertifikasi produk belum memadai
30	Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi	Pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi belum optimal
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
31	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Belum optimalnya sistem akuntabilitas daerah
			Belum optimalnya pelayanan publik
32	Sekretariat DPRD	Tantangan dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD	Tantangan dalam memfasilitasi agenda anggota DPRD
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			
33	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya perencanaan daerah yang berorientasi hasil	Belum optimalnya kualitas data kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
34	Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah serta validitas pendataan obyek pajak
			Belum optimalnya penyampaian data dan pemahaman anggaran oleh OPD
			Keterkaitan perencanaan dan penganggaran belum optimal
			Belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset daerah akibat keterbatasan sumber daya manusia
			Terdapat kesalahan dalam penginputan kode rekening
			Masih rendahnya pemahaman pelaporan keuangan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengelolaan kepegawaian daerah belum berlandaskan sistem merit yang optimal	Kualifikasi dan kompetensi ASN belum sesuai dengan standar yang berlaku
			Pengembangan kompetensi pada ASN tidak selalu dilaporkan
			E-kinerja banyak yang belum berkontribusi terhadap IPA
			Masih rendahnya Indeks Sistem Merit nilai ketercapaian
36	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam proses pembangunan daerah
			Belum optimalnya kapasitas tim litbang daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
37	Inspektorat Daerah	Pengawasan internal masih belum optimal	Kualitas pengendalian dan integritas menurut penilaian internal belum optimal
			Akuntabilitas kinerja belum optimal
			Kapasitas dan kapabilitas APIP belum optimal
			Manajemen risiko belum terkelola dengan optimal
			Pencegahan dan pendidikan anti korupsi masih belum optimal
			Masih terjadinya praktik pemberian saat pemilu
Unsur Kewilayahan			
38	Kecamatan	Pelayanan masyarakat belum optimal	Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan
			Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan
			Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang
			Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa belum optimal
			Kantor kecamatan belum ramah disabilitas
			Adanya <i>bypass</i> kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa
Unsur Pemerintahan Umum			
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Adanya potensi konflik sosial horizontal	Koordinasi Forkopimda kurang optimal
			Peran FKUB dalam pencegahan konflik belum optimal
			Data potensi konflik belum sinkron dengan data Polres
			Aktivitas penelitian di daerah belum terpetakan
			Beberapa ormas belum terdata dan berbadan hukum
			Masih ada beberapa aksi unjuk rasa
			Pembinaan karang taruna belum optimal
		Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Deteksi dini belum dilaksanakan
			Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
		Kemudahan akses digital terhadap narkoba	
		Sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal	

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”.

Visi ini secara sistematis menjadi arah cita-cita bagi pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Banjar. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya

Misi Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, baik dari sisi moral maupun intelektual. Beberapa fokus pembangunan yang tertuang dalam misi ini diantaranya adalah meningkatkan



kualitas SDM agar memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi. Hal tersebut dapat diupayakan dengan penguatan layanan pendidikan baik formal, maupun informal, pelatihan keterampilan hingga upaya pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat. Karakter religius dalam misi ini bertujuan untuk memperkuat identitas Kabupaten Banjar sebagai daerah yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan. Penguatan pendidikan Islam, peningkatan fasilitas keagamaan hingga penguatan program-program berbasis keagamaan menjadi beberapa fokus dari misi ini.

Upaya pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak dirumuskan guna menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Banjar yang harmonis dan kondusif. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan karakter baik di lingkungan sekolah, maupun keluarga. Penanaman nilai-nilai moral sejak dini menjadi salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan guna mewujudkan misi ini. Selain dikenal dengan karakter masyarakatnya yang religius, Kabupaten Banjar juga dikenal dengan karakter masyarakatnya yang memiliki budaya dan adat istiadat yang khas. Oleh karena itu, misi ini juga turut diarahkan untuk memperkuat kelestarian seni dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Banjar, sebagai langkah untuk menjaga identitas kedaerahan.

2. Misi: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif dijalankan dengan memperhatikan tiga pilar ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar tidak hanya berfokus pada pencapaian



indikator ekonomi makro, namun pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, lingkungan, dukungan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar dapat diwujudkan dengan 6 cara, yaitu 1) melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur 2) melanjutkan dan memantapkan pemerataan pembangunan 3) Melanjutkan dan mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan 4) Melanjutkan dan memantapkan restrukturisasi ekonomi 5) Membangun ketahanan pangan daerah, dan 6) Membangun kembali keunggulan sektor pertanian dan perikanan.

Perwujudan 6 cara pendukung pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif juga sejalan dengan proyek prioritas strategis (major project) yaitu fondasi Banjar Bumi Intan (Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata Dan Pertanian) dan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi Program Hasil Terbaik dan Cepat yang dikawal langsung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga didukung dengan 6 dimensi pada misi kedua yaitu melalui dimensi infrastruktur dan kewilayahan, dimensi pembangunan desa, dimensi pembangunan perkotaan, dimensi pembangunan pertanian, dimensi pembangunan perikanan, dan dimensi lapangan pekerjaan.

3. Misi: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang memperhatikan generasi yang akan datang. Penguatan tata kelola lingkungan hidup merupakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang ditopang sinergi antara kebijakan dan pelayanan publik dengan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini dilakukan melalui percepatan pembangunan yang difokuskan pada: 1) melanjutkan perbaikan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; 2) melanjutkan pengembangan penataan ruang; 3) melanjutkan penataan



lingkungan permukiman yang layak huni; dan 4) melanjutkan penanggulangan bencana. Adapun misi ini mencakup dimensi lingkungan hidup melalui proyek prioritas strategis air dan limbah layak, sampah komunitas, dan sampah sekolah; dan dimensi kebencanaan melalui proyek prioritas strategis pendidikan kebencanaan, jejaring crisis center, dan infrastruktur pengendali banjir.

Pada dimensi lingkungan hidup difokuskan pada melanjutkan perbaikan dan pencapaian akses layanan air bersih layak dan akses air limbah yang layak, melanjutkan pengelolaan sampah berbasis individual dan komunitas untuk mengurangi produksi sampah di masyarakat melalui inovasi dan integrasi pengelolaan sampah, dan mendorong pembentukan pendidikan tentang sampah dan pengelolaan sampah yang mendasar dan dapat diterapkan secara nyata di sekolah. Adapun pada dimensi kebencanaan difokuskan pada memberikan pendidikan kebencanaan di sekolah baik pada upaya pencegahan maupun penanggulangan bencana sehingga meningkatkan keamanan dan tanggap terhadap bencana, memberikan layanan yang untuk menyediakan bantuan darurat dan dukungan dalam situasi krisis yang dirancang untuk memberikan respons cepat dan dukungan dalam berbagai situasi darurat, seperti bencana alam, insiden keamanan, krisis kesehatan atau keadaan darurat lainnya, dan menyediakan serangkaian fasilitas dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengurangi dampak banjir. Infrastruktur ini bertujuan untuk melindungi daerah yang rentan terhadap banjir, menjaga keselamatan masyarakat, dan mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh banjir.

4. Misi: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Misi memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani merupakan misi penting dalam mendukung visi kepala daerah. Memperkuat tata kelola pemerintahan harus dilakukan melalui prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Good governance dan clean governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan



pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah harus memiliki birokrasi yang profesional, bersih, melayani, dan terpercaya. Beberapa kondisi yang harus diperkuat dalam mendukung birokrasi tersebut agar reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan terwujud diperlukan ASN yang profesional. ASN yang profesional adalah ASN yang memiliki pola pikir bahwa ASN adalah pelayan masyarakat dan abdi negara. ASN profesional dibentuk melalui penerapan sistem merit, integritas, dan kesejahteraan ASN. Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang akuntabel juga penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan terutama terkait perumusan program yang tepat sasaran, berorientasi hasil, dan berdampak dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik.

Selain dari sisi aparatur dan sistem, perlu juga adanya perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi melalui reformasi birokrasi tematik yang mengarah pada kemiskinan, investasi, digitalisasi pemerintahan, lingkungan hidup berkelanjutan, dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui penerapan manajemen kinerja, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, dan adanya kolaborasi dan sinergitas antar lembaga birokrasi. Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menguatkan aksi pencegahan korupsi menjadi prasyarat penting juga terutama melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, membangun zona integritas, meningkatkan kapasitas aparatur pengawas, dan menerapkan manajemen risiko di seluruh sektor.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan perwujudan dari visi dan misi pembangunan serta intervensi yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi isu strategis daerah. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode lima tahun. Setiap tujuan memiliki sasaran yang dirumuskan untuk menggambarkan pencapaian



tujuan tersebut. Berikut adalah rumusan tujuan, sasaran, dan indikator dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Isu Strategis dan Tujuan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis	Tujuan RPJMD
1	Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
2	Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal	
3	Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif
4	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	
5	Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terwujudnya ketahanan iklim daerah
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia
			Indeks Kesalehan Sosial
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)
			Harapan lama sekolah (HLS)
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
			Indeks Ketimpangan Gender
2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan	Indeks Harmoni Indonesia
			Indeks Kewaspadaan Nasional
			Indeks Pembangunan Kebudayaan
			Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Indeks Daya Saing Daerah
		Meningkatnya produktivitas ekonomi	PDRB Per Kapita
			Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian
		Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan
3	Terwujudnya ketahanan iklim daerah		Rasio Gini
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	kemandirian fiskal daerah Rasio PAD terhadap PDRB
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Infrastruktur
			Indeks Konektivitas
		Menurunnya Risiko Bencana	Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK
			Indesk Risiko Bencana
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Indeks Sistem Merit (Nilai Merit)
			Nilai SAKIP Daerah
			Indeks Integritas
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks SPBE
			Indeks Pemerintahan Digital
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Pelayanan Publik

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Prioritas Daerah

- Misi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya, memiliki sasaran dan program prioritas sebagai berikut:
 1. Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan program sebagai berikut:



- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan program sebagai berikut:
- Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
3. Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, dengan program sebagai berikut:
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - Program Perlindungan Khusus Anak
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Pengendalian Penduduk
4. Sasaran Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan, dengan program sebagai berikut:



- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Program Pengembangan Kebudayaan
- Misi 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan, memiliki sasaran dan program prioritas sebagai berikut:
1. Sasaran Meningkatnya produktivitas ekonomi, dengan program sebagai berikut:
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Sasaran Meningkatnya perekonomian yang inklusif, dengan program sebagai berikut:
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa
 - Program Hubungan Industrial
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Program Kawasan Permukiman
 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Penataan Desa
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian



- Program Promosi Penanaman Modal
 - Program Pengembangan Umkm
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Program Penanganan Bencana
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, dengan program sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah, dengan program sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
 - Program Kawasan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



- Misi 3: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan, memiliki sasaran dan program prioritas sebagai berikut:
 1. Sasaran Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dengan program sebagai berikut:
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Program Penanganan Bencana
 2. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan program sebagai berikut:
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Persampahan
- Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani, memiliki sasaran dan program prioritas sebagai berikut:
 1. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas, dengan program sebagai berikut:
 - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



- Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - Program Pengelolaan Arsip
 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital, dengan program sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 terdapat 160 Program, 456 Kegiatan dan 1.517 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 3.210.165.243.614,-. Untuk RKPD Perubahan Tahun 2025 terdapat 162 Program, 460 Kegiatan dan 1.548 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 3.144.013.922.914,- yang terinci pada tabel berikut ini :



Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per Urusan Pemerintahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu (Rp)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	13	13	89	88	719.575.440.008	700.172.937.069	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	19	19	87	87	720.108.043.461	704.925.319.336	Dinas Kesehatan, RSUD Ratu Zalecha, Puskesmas dan UPT lainnya
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	21	21	77	78	363.299.923.032	354.619.888.032	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	6	6	1.434.998.000	624.998.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	6	7	15	15	53.022.985.794	46.770.678.639	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	19	19	64	64	86.716.576.577	86.833.885.577	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau dan UPTD
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	19	19	78	79	67.165.961.072	66.751.431.576	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	14	14	59	53	33.312.433.521	22.683.146.021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	14	14	16	17	3.427.375.050	3.460.025.050	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	7	7	14	15	10.354.660.100	10.354.660.100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu (Rp)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	14	14	42	44	11.819.458.358	11.362.635.358	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	1	2	261.746.500	261.746.500	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	14	14	34	35	14.603.923.455	13.663.296.967	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	10	11	22	23	2.183.509.500	1.890.109.500	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	11	11	30	30	10.902.452.425	10.955.224.425	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	11	11	42	42	216.773.153.651	216.880.730.651	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	20	20	55	56	24.264.619.959	24.291.810.769	Dinas Perhubungan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	11	11	42	42	20.802.629.993	20.349.134.990	Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	4	4	187.144.700	187.144.700	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2	2	5	5	180.787.400	100.787.400	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	8	11	14	38	42	14.128.047.361	14.364.578.047	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	11	11	19	19	2.843.508.680	2.833.758.680	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	8	9	3.709.221.500	2.881.221.500	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	14	14	47	47	15.214.764.990	15.141.904.990	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	3	14	14	33	33	40.893.769.850	40.743.282.850	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
26	URUSAN PEMERINTAHAN	3	3	6	6	8	8	2.964.715.000	2.964.715.000	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu (Rp)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	APBD-P 2025	RKPD-P 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BIDANG KEBUDAYAAN									
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	5	5	10	10	9.221.398.500	9.251.577.900	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	10	10	27	27	8.421.439.630	8.451.743.630	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	6	6	12	12	279.286.500	285.236.500	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	25	25	73	81	56.340.060.140	55.436.198.141	Dinas Pertanian
31	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	20	20	71	73	114.822.121.541	116.198.611.393	Sekretariat Daerah
32	SEKRETARIAT DPRD	2	2	13	13	33	33	95.154.444.077	91.580.724.014	Sekretariat DPRD
33	PERENCANAAN	3	3	14	14	55	55	16.560.780.796	15.884.259.785	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	3	2	4	5	1.578.625.200	1.349.050.200	
35	KEUANGAN	4	4	15	15	84	90	318.904.303.553	322.183.344.715	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
36	KEPEGAWAIAN	2	2	11	11	50	50	17.972.112.448	16.619.405.448	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	2	6	8	4.830.421.000	5.116.886.000	
38	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	11	11	40	40	17.863.116.555	17.954.341.561	Inspektorat Daerah
39	KECAMATAN	6	6	19	19	76	79	94.767.919.092	94.577.852.200	Kecamatan
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	12	12	41	41	13.297.364.645	13.055.639.700	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL		160	162	456	460	1.565	1.548	3.210.165.243.614	3.144.013.922.914	

Sumber : Bappedalitbang, 2026



1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan



4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penerapan pelayanan standar pelayanan minimal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kentenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar; dan
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 188.45/18/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar.



Berikut adalah Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar yang mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025.

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR YANG MENDUKUNG PENERAPAN SPM TAHUN 2025

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
2.	Pendidikan Dasar		
3.	Pendidikan Kesetaraan		
BIDANG KESEHATAN			
4.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
5.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin.		
6.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.		
7.	Pelayanan kesehatan balita.		
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.		
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.		
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.		
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.		
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.		
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
BIDANG PEKERJAAN UMUM			
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Program Ketentraman dan Peningkatan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
21.	Pelayanan informasi rawan bencana.	Program Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan, Pencegahan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kabupaten Banjar
BIDANG SOSIAL			
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Banjar
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.		
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.		
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti,dan		
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.		

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2026



Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

Kebijakan Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM termuat dalam RPJMD.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 DAN 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,41	75,11	0,94
2	Persentase Penduduk Miskin	2,36	2,74	16,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,71	2,76	1,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5,07	6,74
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp. 40.027.000**	Rp. 41.993.000**	4,91
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,258	0,281	8,91

Sumber : Data diolah Bappedalitbang Kab.Banjar

Adapun dalam menghitung persentase perubahan capaian kinerja makro menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja Makro Tahun Pelaporan – Capaian Kinerja Makro Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Makro Tahun Sebelumnya X 100%

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan oleh penduduk. Pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah (jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas) dan harapan lama sekolah (jumlah tahun pendidikan yang diharapkan untuk ditempuh oleh anak usia sekolah). Standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai proksi untuk pendapatan. Berikut tabel capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2025:



**CAPAIAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	2024	2025
1	Kalimantan Selatan	75,19	76,10
2	Banjar	74,41	75,11
3	Tanah Laut	73,42	74,32
4	Kotabaru	72,42	73,03
5	Barito Kuala	71,40	72,05
6	Tapin	74,06	74,98
7	Hulu Sungai Selatan	73,95	74,81
8	Hulu sungai Tengah	73,33	74,26
9	Hulu sungai Utara	71,74	72,67
10	Tabalong	75,97	76,94
11	Tanah Bumbu	74,50	75,09
12	Balangan	73,83	74,78
13	Kota Banjarmasin	80,53	80,88
14	Kota Banjarbaru	81,65	82,20

Sumber : Data Diolah BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

Kabupaten Banjar mengalami kenaikan IPM dari 74,41 di tahun 2024 menjadi 75,11 di tahun 2025, sebesar 0,70 poin ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar berada di jalur yang baik dan mampu mempertahankan tren perbaikan dalam pembangunan manusia. Namun, hasil tersebut masih di bawah rata-rata provinsi, sehingga diperlukan langkah-langkah lebih fokus untuk memperkuat akses pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, posisi Kabupaten Banjar tergolong dalam kategori menengah, berada pada ranking 4 dibawah Banjarbaru, Banjarmasin dan Tabalong, Kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih tinggi didominasi oleh daerah perkotaan seperti Kota Banjarbaru (82,20) dan Kota Banjarmasin (80,88), yang secara konsisten menjadi pusat dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sisi lain, beberapa kabupaten seperti Tabalong (76,94) dan Tanah Bumbu (75,09) juga menunjukkan kemajuan yang signifikan berkat penguatan sektor ekonomi dan layanan dasar.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar tahun 2025 merupakan prioritas utama pembangunan daerah yang memerlukan intervensi komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Karena IPM dibentuk oleh tiga dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, maka strategi pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan



dasar, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantapan struktur ekonomi masyarakat.

1. Dimensi Pendidikan: Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu

Pemerintah Kabupaten Banjar menitikberatkan pembangunan pada dua aspek utama: peningkatan akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran.

a. Peningkatan Akses Pendidikan

Upaya pemerataan layanan pendidikan dilakukan melalui:

- Pembangunan dan rehabilitasi sarana–prasarana sekolah (PAUD, SD, SMP) termasuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sedang/berat, penyediaan mebel, alat praktik dan peraga.
- Penyediaan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- Penguatan layanan pendidikan nonformal melalui PKBM serta dukungan BOP kesetaraan untuk menekan angka putus sekolah.

b. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah daerah memperkuat kualitas pembelajaran melalui:

- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan pengelolaan Dana BOS secara efektif.
- Penguatan literasi dan numerasi, penyediaan konten digital, teknologi pembelajaran, serta fasilitasi komunitas belajar guru.
- Pengembangan perpustakaan sekolah dan pemanfaatan TIK untuk mendukung model pembelajaran modern.
- Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu guna mendukung peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).



2. Dimensi Kesehatan: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Layanan Dasar

Strategi pada sektor kesehatan difokuskan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) melalui penguatan layanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat, jaminan kesehatan, serta pengendalian penyakit.

- a. Penguatan Layanan Kesehatan Dasar
 - Optimalisasi fungsi Puskesmas, Pustu, dan Posyandu dengan tenaga kesehatan dan sarana medis yang memadai.
 - Penyediaan layanan terpadu ibu-anak, imunisasi, dan skrining kesehatan.
- b. Percepatan Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi
 - Intervensi 1000 HPK: pemeriksaan kehamilan, TTD, PMT balita, edukasi gizi, dan pemantauan tumbuh kembang.
 - Penguatan sinergi lintas sektor melalui TPPPS Kabupaten, kecamatan, dan desa.
- c. Perluasan Jaminan Kesehatan
 - Pendataan kepesertaan JKN dan fasilitasi pembiayaan PBI APBD.
 - Penyediaan layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan.
- d. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
 - Pembangunan sarana air minum aman, sanitasi sehat, dan jamban keluarga.
 - Edukasi PHBS untuk menekan risiko penyakit berbasis lingkungan.
- e. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Skrining hipertensi, diabetes, TBC, serta penyakit kronis lainnya.
 - Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi tambahan.

Upaya tersebut didukung oleh berbagai sub-kegiatan teknis seperti pembangunan dan pemeliharaan Puskesmas, pengadaan obat dan alat kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan seluruh kelompok usia, serta program promotive preventif lainnya.



3. Dimensi Ekonomi: Penguatan Daya Beli dan Struktur Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan standar hidup layak, pemerintah daerah mengarahkan intervensi pada:

- Penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya desa.
- Pengembangan UMKM melalui pelatihan, permodalan, pendampingan usaha, dan peningkatan pemasaran produk lokal.
- Penguatan sektor unggulan daerah: pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
- Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Fokus ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan indikator pengeluaran per kapita sebagai komponen IPM.

Agar semua strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berlangsung dengan baik, pemerintah melaksanakan tindakan pendukung seperti memperkuat integrasi data sektoral, memverifikasi data keluarga yang berstatus miskin untuk intervensi yang tepat, serta mengoptimalkan perencanaan APBD bagi program-program prioritas yang berdampak langsung pada indikator IPM. Penyatuan sinergi antar sektor melalui kerja sama pentahelix yakni pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media serta pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* menjadi elemen penting untuk memperluas jangkauan intervensi. Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan manusia dilakukan secara rutin, termasuk penghargaan bagi Perangkat Daerah, Desa, dan Kecamatan yang menunjukkan kinerja terbaik.

Dengan pendekatan terkoordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar bertekad untuk memastikan bahwa peningkatan IPM pada tahun 2025 berlangsung secara konsisten, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Kerja sama antar sektor diharapkan dapat mendorong peningkatan yang signifikan terhadap kualitas



hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.

2) Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya diukur dari aspek penghasilan, tetapi juga mencakup kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, indikator kemiskinan yang digunakan BPS tidak hanya mengidentifikasi siapa yang tergolong miskin, tetapi juga menilai kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan sebagai dasar perumusan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Berikut tabel capaian persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2025:

CAPAIAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	2024	2025
1	Kalimantan Selatan	4,11	3,84
2	Banjar	2,36	2,74
3	Tanah Laut	3,74	3,00
4	Kotabaru	4,45	4,39
5	Barito Kuala	4,36	4,31
6	Tapin	3,33	2,91
7	Hulu Sungai Selatan	3,38	3,12
8	Hulu Sungai Tengah	5,81	5,03
9	Hulu Sungai Utara	5,75	4,81
10	Tabalong	5,64	4,67
11	Tanah Bumbu	3,41	3,13
12	Balangan	4,87	4,64
13	Kota Banjarmasin	4,58	4,52
14	Kota Banjar Baru	3,79	3,44

Sumber : Data Diolah BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

Kabupaten Banjar, persentase penduduk miskin mengalami perubahan dari 2,36 persen pada tahun 2024 menjadi 2,74 persen pada tahun 2025. Pergerakan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angkanya masih berada di bawah rata-rata provinsi, perubahan tersebut menjadi indikator bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banjar tidak sepenuhnya stabil sepanjang periode pengamatan.



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, terdapat variasi pergerakan kemiskinan. Beberapa wilayah menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin, seperti Tanah Laut (3,74% menjadi 3,00%), Tapin (3,33% menjadi 2,91%), dan Tabalong (5,64% menjadi 4,67%). Di sisi lain, terdapat daerah yang angkanya relatif stabil atau mengalami penurunan kecil, misalnya Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Kabupaten Kota Baru, Barito Kuala, dan Balangan masih memiliki persentase penduduk miskin di atas 4 persen pada tahun 2025.

Dalam konteks tersebut, posisi Kabupaten Banjar berada pada kelompok kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan relatif rendah, namun dengan pergerakan yang berbeda dari beberapa daerah lain yang justru mengalami penurunan. Pola ini menandakan bahwa dinamika kemiskinan antarwilayah di Kalimantan Selatan tidak seragam dan masing-masing daerah menghadapi perubahan yang berbeda pada periode 2024–2025.

Penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Banjar yang membutuhkan langkah yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banjar menganggap kemiskinan sebagai isu yang kompleks, tidak hanya terkait dengan pendapatan, tetapi juga meliputi akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, layanan dasar, peluang kerja, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dirancang secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, hingga komunitas di tingkat desa.

Tahap pertama yang dilakukan adalah penguatan data kemiskinan yang akurat guna menentukan target program. Dengan memanfaatkan data P3KE, DTKS, serta melalui verifikasi lapangan oleh pemerintah desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan bahwa bantuan untuk mengatasi kemiskinan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Tahap kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah daerah memprioritaskan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta perumahan yang layak. Program-program seperti penanganan stunting, peningkatan



layanan kesehatan dasar, bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu, dan perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah meningkatkan perlindungan sosial adaptif sebagai langkah ketiga. Optimalisasi berbagai bentuk bantuan seperti bantuan pangan, subsidi untuk BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial dari daerah dilakukan untuk meringankan beban ekonomis rumah tangga kurang mampu, sehingga mereka memiliki lebih banyak ruang untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya.

Langkah keempat lebih fokus pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan usaha. Pemerintah Kabupaten Banjar menjalankan program menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, penguatan sektor pertanian yang produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pelatihan vokasi, akses modal, pendampingan usaha, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Langkah kelima mengedepankan peningkatan sinergi antar sektor dan kolaborasi berbagai pihak. Pendekatan ini diwujudkan dengan mengintegrasikan program-program antar perangkat daerah, penggunaan Dana Desa untuk mengatasi kemiskinan, dukungan dari sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan, serta peranan aktif organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan saling mendukung.

Selain itu, langkah keenam menekankan pentingnya inovasi di tingkat daerah. Berbagai bentuk inovasi yang diterapkan termasuk layanan jemput bola untuk mempercepat akses bagi penerima manfaat, peningkatan kualitas musyawarah desa dalam menentukan prioritas program, serta pengembangan kapasitas pendamping sosial agar intervensi yang dilakukan di lapangan menjadi lebih optimal.

Seluruh strategi ini ditujukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui program yang tepat dan terintegrasi serta adil, terutama



untuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Dengan adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah dan dukungan penuh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar optimis dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan inklusif.

3) **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Angka pengangguran adalah persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja di suatu daerah. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut tabel capaian angka pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2025:

**CAPAIAN ANGKA PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	2024	2025
1	Kalimantan Selatan	4,20	4,16
2	Banjar	2,71	2,76
3	Tanah Laut	3,43	3,30
4	Kotabaru	6,05	5,93
5	Barito Kuala	3,41	3,23
6	Tapin	3,86	3,69
7	Hulu Sungai Selatan	2,11	2,20
8	Hulu Sungai Tengah	3,20	3,12
9	Hulu Sungai Utara	3,73	3,79
10	Tabalong	3,44	3,48
11	Tanah Bumbu	6,37	6,05
12	Balangan	2,69	2,74
13	Kota Banjarmasin	6,56	6,49
14	Kota Banjar Baru	4,93	4,75

Sumber : Data Diolah BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjar pada tahun 2024–2025 menunjukkan perubahan yang relatif stabil dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Banjar tercatat sebesar 2,71 persen, dan mengalami kenaikan menjadi 2,76 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan, posisi Kabupaten Banjar tetap berada pada kelompok daerah dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah di lingkup provinsi.



Jika dibandingkan dengan tren Provinsi, Kalimantan Selatan secara umum mengalami sedikit penurunan dari 4,20 persen menjadi 4,16 persen. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota seperti Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin masih mencatat tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar berada pada kondisi pengangguran yang lebih terkendali dibandingkan beberapa wilayah lain di provinsi.

Di sisi lain, beberapa daerah mengalami penurunan TPT, seperti Tanah Laut, Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, sedangkan beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan, termasuk Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Dalam konteks ini, Kabupaten Banjar termasuk daerah yang perubahannya relatif ringan.

Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan berbasis kompetensi sehingga peserta memperoleh sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penyelenggaraan Job Fair juga menjadi bagian penting untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung sehingga peluang penempatan tenaga kerja dapat meningkat signifikan.

Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan, fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal merupakan langkah yang terus diperkuat. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan tercipta iklim kerja yang lebih produktif, kondusif, dan berkelanjutan serta mampu mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Kabupaten Banjar juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar selama proses konstruksi.

Selain itu, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha menjadi fokus penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.



Pemerintah memberikan berbagai bentuk fasilitas investasi, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan penyediaan insentif bagi investor. Pengembangan sektor pariwisata melalui promosi destinasi unggulan serta peningkatan sarana dan prasarana wisata juga diharapkan mampu menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal.

Secara keseluruhan, strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar kerja, meningkatkan serapan tenaga kerja, dan menekan tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Dengan penguatan keterampilan, perlindungan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, Kabupaten Banjar memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika kegiatan ekonomi suatu daerah, apakah berkembang, stagnan, atau menurun. Berikut tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2025:

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024-2025 (%)

No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi 2024**	Pertumbuhan Ekonomi 2025**
1.	Kota Banjarmasin	5.63	-
2.	Kota Banjarbaru	6.71	-
3.	Kabupaten Banjar	4,76	4.74**
4.	Kabupaten Tanah Laut	5.01	-
5.	Kabupaten Tapin	4,89	-
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	4,82	-
7.	Kabupaten Kotabaru	5,34	-
8.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5,15	-
9.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,95	-



10.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	4,43	-
11.	Kabupaten Balangan	4,15	-
12.	Kabupaten Tabalong	4,87	-
13.	Kabupaten Barito Kuala	5,02	-
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	5,05	-

Keterangan : ** Angka Sangat Sementara

*** Target RPJMD

Sumber : Data Diolah BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berdasarkan perhitungan *year on year* (c-to-c) menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh positif hingga Triwulan III Tahun 2025. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tercatat sebesar 4,76 persen, sementara pada tahun 2025 hingga Triwulan III, pertumbuhan ekonomi c-to-c mencapai 4,74 persen. Angka ini menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan membandingkan kinerja ekonomi pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga mencerminkan dinamika pertumbuhan secara tahunan.

Perbedaan antara capaian tahun 2024 dan tahun 2025 tersebut perlu dipahami secara proporsional, mengingat angka tahun 2025 masih merupakan capaian sementara (c-to-c sampai Triwulan III) dan belum mencerminkan kinerja ekonomi selama satu tahun penuh. Dengan demikian, nilai pertumbuhan ekonomi 2025 masih berpotensi mengalami perubahan seiring berjalannya aktivitas ekonomi pada Triwulan IV.

Secara umum, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berbasis c-to-c hingga Triwulan III 2025 memberikan indikasi bahwa perekonomian daerah masih memiliki ketahanan dan potensi untuk terus tumbuh. Pemerintah daerah perlu menjaga momentum ini melalui percepatan realisasi program pembangunan, optimalisasi belanja daerah, serta penguatan sektor-sektor penggerak ekonomi agar pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2025 dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Banjar menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat holistik, memadukan optimalisasi sektor basis (unggulan) dengan diversifikasi ekonomi dan penguatan infrastruktur penunjang. Berikut adalah mengenai langkah-langkah strategis dan implementasi yang telah berjalan :

1. Transformasi dan Modernisasi Sektor Pertanian dan Perikanan (Agrominapolitan) sebagai Pondasi

Kabupaten Banjar secara historis adalah daerah agraris dan merupakan peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Barito Kuala. Strategi utama yang dijalankan bukanlah meninggalkan



sektor ini, melainkan melakukan modernisasi untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu:

- **Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat:** Sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Kalsel, strategi yang dijalankan meliputi intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul dan mekanisasi pertanian (alsintan modern). Pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan pupuk dan memperbaiki jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim seperti banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
- **Pengembangan Kawasan Minapolitan:** Sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya (air tawar), menjadi fokus signifikan. Strategi pengembangan kawasan Minapolitan (kota perikanan) telah dilaksanakan dengan memperkuat rantai pasok dari produksi pakan, pembudidayaan, hingga pengolahan pascapanen. Hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan petani ikan dan membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan.
- **Hilirisasi Produk Pertanian/Perkebunan/Peternakan:** Pada sektor ini (karet, kelapa sawit, padi, daging ayam, itik, sapi, jeruk, cabe), dorongan untuk melakukan hilirisasi terus diupayakan agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk setengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
- **Mempercepat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
- **Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah**
 Proyek-proyek yang bisa menciptakan efek berganda pada perekonomian, misalnya beberapa proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Banjar, seperti Pembangunan Etalase Kota Martapura, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Gedung Volly Indoor Martapura, Pembangunan Stadion Mini Barakat, Rehab Lapangan Basket, Rehab Lapangan Tennis, Pembangunan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut, Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Gambut dan Danau Salak Mataraman, Pembangunan Puskesmas, dan sebagainya.



Mengendalikan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat melalui peran aktif TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Banjar dengan berbagai upaya yang dilakukan misalnya Sidak Pasar, Operasi pasar murah, Bantuan Subsidi Transportasi, dan lain-lain.

2. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Mitigasi Bencana

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terjadi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Di Kabupaten Banjar, pembangunan infrastruktur memiliki dua dimensi krusial: ekonomi dan sosial-lingkungan.

- **Konektivitas Antarwilayah:** Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan terus dilakukan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi (desa pertanian/perkebunan) dengan pasar. Konektivitas yang lancar menekan biaya logistik, sehingga margin keuntungan petani dan pelaku usaha meningkat, misalnya dengan perbaikan jalan inspeksi yang berada di Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, perbaikan Jalan Usaha Tani oleh Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa, dan sebagainya.
- **Infrastruktur Pengendali Banjir:** Mengingat kerentanan sebagian wilayah Kabupaten Banjar terhadap banjir, pembangunan infrastruktur pengendali air (seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase) menjadi strategi ekonomi vital. Hal ini dilakukan untuk melindungi lahan pertanian dan aset ekonomi masyarakat dari kerusakan akibat bencana, memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital

Dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita secara langsung di tingkat akar rumput, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi strategi kunci.

- **Digitalisasi UMKM:** Pemerintah daerah aktif mendorong pelaku UMKM untuk "Go Digital". Pelatihan pemasaran online, penggunaan platform e-commerce, dan digitalisasi sistem pembayaran (QRIS) telah dilaksanakan. Ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal khas Banjar, seperti kerajinan tangan, kain Sasirangan, dan kuliner.



- Pendataan UMKM : Pemerintah Daerah telah melaksanakan Pendataan UMKM yang dilakukan oleh para enumerator yang telah dibekali kemampuan untuk mendata secara riil jumlah UMKM di Kabupaten Banjar, ini sebagai basis data bagi pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat atau Daerah.
 - Fasilitasi Akses Permodalan: Sinergi dengan perbankan, khususnya BPR, Bank Kalsel dan Himbara, dilakukan untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dengan bunga rendah bahkan bunga nol persen dengan Kurma Manis, sehingga mereka dapat mengembangkan skala usahanya.
4. Pengembangan Pariwisata Religius dan Alam sebagai Lokomotif Baru
- Kabupaten Banjar memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, yang dijadikan strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam ekstraktif.
- Wisata Religius sebagai Magnet Ekonomi: Keberadaan makam ulama besar, khususnya kawasan Sekumpul (Makam Guru Sekumpul) dan Makam Datu Kelampayan, menjadi magnet wisata religius bertaraf nasional bahkan internasional. Strategi yang dijalankan adalah menata kawasan tersebut agar lebih nyaman bagi peziarah. Kegiatan haul tahunan atau momen 5 Rajab terbukti memberikan *multiplier effect* ekonomi yang masif bagi masyarakat sekitar, mulai dari sektor penginapan, transportasi, hingga kuliner.
 - Pengembangan Wisata Alam: Optimalisasi destinasi wisata alam seperti yang terletak dalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam dan wisata perairan (seperti di kawasan waduk Riam Kanan, Murung Batu Laba, Belangian, Paau, Batu Balian, Tiwingan, dan pasar terapung Lok Baintan) terus dilakukan dengan memperbaiki fasilitas pendukung (fasilitas Musholla, Toilet, dan Rambu) untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperlama durasi tinggal mereka.
5. Peningkatan Iklim Investasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia



Strategi jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan ditopang oleh iklim investasi yang sehat dan SDM yang kompeten.

- Reformasi Birokrasi dan Perizinan: Untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Banjar, pemerintah daerah berupaya menyederhanakan proses perizinan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terintegrasi, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Peningkatan pendapatan per kapita sangat berkorelasi dengan kualitas SDM. Investasi di sektor pendidikan (vokasi dan keterampilan) dan kesehatan terus didorong agar angkatan kerja di Kabupaten Banjar memiliki daya saing tinggi dan mampu mengisi peluang kerja di sektor-sektor yang sedang tumbuh, yaitu dengan berfokus pada penanganan Anak Tidak Sekolah, Program Penyetaraan Pondok Pesantren, Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan, dan Pencegahan Stunting.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui bauran kebijakan yang menyeimbangkan antara mempertahankan kekuatan sektor tradisional (pertanian dan perikanan) dan mendorong sektor-sektor baru yang potensial (pariwisata dan ekonomi kreatif digital). Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

5) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pendapatan per kapita adalah indikator ekonomi yang mencerminkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun. Indikator ini diperoleh dengan membagi nilai total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita sering kali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana semakin tinggi nilai pendapatan per kapita, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap individu. Berikut tabel PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 2025:



PDRB ADHB DAN ADHK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020-2024 (RP. TRILIUN/T)

PDRB	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
ADHB	16,53 T	17,93 T	21,07 T	22,63 T	24,04 T
ADHK	11,73 T	12,10 T	12,65 T	13,20 T	13,82 T

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025

PDRB PER KAPITA ADHB DAN ADHK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020-2024 (RUPIAH)

PDRB	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
ADHB	29.292.639	31.307.766	36.189.177	38.265.344	40.027.390
ADHK	20.794.623	21.138.293	21.728.510	22.318.055	23.024.366

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjar

PDRB KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020-2024 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAR RUPIAH)

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.917,83	3.008,16	3.176,26	2.360,95	3.610,81
B	Pertambangan dan Penggalian	2.231,37	2.884,09	4.860,82	4.990,45	5.006,36
C	Industri Pengolahan	1.130,20	1.223,63	1.321,49	1.347,08	1.463,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,25	27,11	29,45	32,30	34,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,74	42,12	47,70	51,79	54,39
F	Konstruksi	1.732,04	1.855,07	2.020,99	2.205,43	2.378,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.419,90	2.568,43	2.882,38	3.304,90	3.553,62
H	Transportasi dan Pergudangan	792,30	819,43	903,64	1.047,65	1.134,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	549,31	576,06	632,35	701,36	778,22
J	Informasi dan Komunikasi	676,07	740,45	800,48	870,06	950,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	376,80	403,65	414,07	442,93	476,58
L	Real Estat	596,43	643,28	683,46	733,85	788,81



	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
M,N	Jasa Perusahaan	62,26	65,03	71,46	81,06	90,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.270,84	1.261,90	1.290,26	1.347,08	1.474,74
P	Jasa Pendidikan	988,69	1.039,07	1.086,67	1.163,98	1.239,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	426,49	475,24	519,10	567,30	606,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	291,87	302,19	330,69	359,24	398,77
	PDRB	16.527,38 T	17.934,87 T	21.071,26 T	22.634,41 T	24.042,01 T

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025



PDRB KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020-2024 ATAS DASAR HARGA KONSTAN
(MILIAR RUPIAH)

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.984,09	2.003,37	2.028,28	2.064,66	2.181,02
B	Pertambangan dan Penggalian	2.116,52	2.232,11	2.391,22	2.464,79	2.544,20
C	Industri Pengolahan	753,73	784,37	815,55	834,08	869,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,04	15,73	16,95	18,39	19,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,96	29,19	30,90	32,38	33,54
F	Konstruksi	1.174,93	1.220,19	1.267,09	1.336,71	1.394,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.581,03	1.617,60	1.725,67	1.839,85	1.930,08
H	Transportasi dan Pergudangan	560,92	573,43	602,44	648,68	677,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	378,51	386,98	417,05	452,58	487,07
J	Informasi dan Komunikasi	514,46	559,59	593,89	630,96	677,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	246,47	251,62	249,43	262,73	277,90
L	Real Estate	433,61	458,11	479,60	502,35	521,72
M,N	Jasa Perusahaan	37,82	38,95	41,35	44,59	47,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	784,25	768,45	770,67	789,55	815,17
P	Jasa Pendidikan	655,84	672,54	693,43	723,93	763,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,54	306,17	325,56	343,58	360,46
R,S, T,U	Jasa lainnya	186,96	190,82	202,42	211,59	228,23
	PDRB	11.732,66 T	12.109,22 T	12.651,49 T	13.201,40 T	13.829,33 T

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025

Strategi untuk meningkatkan pendapatan per kapita ataupun PDRB di Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan yaitu :



1. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi kepada Pencari Kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi.
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan di Martapura, Kertak Hanyar dan Gambut sebagai pusat perdagangan dan jasa.
3. Membangun sentra ekonomi baru berbasis desa dan kecamatan
4. Penciptaan lapangan kerja baru melalui akselerasi investasi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan.
5. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Mini di Disnakertrans Kabupaten Banjar
6. Pengembangan Klaster Pertanian unggulan: padi, jeruk siam, komoditas hortikultura dan budidaya ikan air tawar.
7. Hilirisasi komoditas seperti olahan jeruk, beras premium dan produk frozen ikan
8. Penguataan kelembagaan petani yaitu Kelompok Tani, Gapoktan, BUMDes dan Koperasi.
9. Akses pembiayaan mudah dan murah melalui KURMA MANIS dan KUR rendah bunga.
10. Program Satu Desa Satu Produk Unggulan (OVOP).
11. Peningkatan Daya Saing Produk melalui standar mutu, izin PIRT, BPOM dan Sertifikat Halal.
12. Pengembangan Destinasi wisata unggulan dan Pelatihan SDM Pariwisata oleh Disbudporapar, dan sebagainya.

6) Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan distribusi pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu wilayah. Ketimpangan ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, salah satunya adalah Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang sangat merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama), dan nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi (satu orang memiliki semua pendapatan).

Gini Ratio merupakan salah satu data yang penting untuk memahami tingkat kesenjangan pendapatan di daerah. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, dengan mengetahui angka Gini Ratio, kebijakan pembangunan ekonomi, distribusi bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang secara lebih efektif dan tepat sasaran.



Berikut tabel capaian Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025:

GINI RATIO KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024-2025

NO	KABUPATEN/KOTA	2024	2025
1	Kalimantan Selatan	0,302	0,287
2	Banjar	0,258	0,281
3	Tanah Laut	0,257	-
4	Kotabaru	0,296	-
5	Barito Kuala	0,272	-
6	Tapin	0,260	-
7	Hulu Sungai Selatan	0,288	-
8	Hulu Sungai Tengah	0,251	-
9	Hulu Sungai Utara	0,276	-
10	Tabalong	0,300	-
11	Tanah Bumbu	0,309	-
12	Balangan	0,218	-
13	Kota Banjarmasin	0,347	-
14	Kota Banjar Baru	0,300	-

Sumber : BPS Kalsel, 2025

Tingkat ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui nilai Gini Ratio menunjukkan dinamika yang bervariasi di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Banjar tercatat sebesar 0,258, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di provinsi ini. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Banjar pada kelompok daerah dengan ketimpangan lebih kecil.

Memasuki tahun 2025, Gini Ratio Kabupaten Banjar mengalami kenaikan menjadi 0,281. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pelebaran ketimpangan pendapatan, meskipun secara umum Kabupaten Banjar masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 0,287. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banjar tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Jika melihat data tahun 2024 untuk daerah lain karena sebagian besar belum memperbarui data tahun 2025 terlihat bahwa Kota Banjarmasin, Tanah Bumbu, Kotabaru, serta Tabalong memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjar. Sementara itu, daerah seperti Balangan dan Hulu Sungai Tengah mencatat ketimpangan lebih rendah.

Ketersediaan data tahun 2025 yang masih terbatas pada sebagian daerah membuat perbandingan secara penuh belum dapat dilakukan. Namun, perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Banjar menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemerataan distribusi pendapatan agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.



Adapun dalam pelaksanaan untuk mengurangi ketimpangan di Kabupaten Banjar antara lain:

- Premi BPJS Kesehatan bagi warga Kab. Banjar sesuai persyaratan
- Pemberiaan Biaya Personel Siswa PAUD, SD dan SMP
- Pembangunan Sambungan Rumah (SR) akses air minum layak
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Pelatihan untuk meningkatkan usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa
- Peningkatan kapasitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
- Bantuan Permakanan dan Sandang untuk lansia, Disabilitas Gelandangan Pengemis terlantar
- Bantuan Permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA
- Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni
- Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- Mendorong pemerataan pemenuhan infrastruktur dasar

Perkembangan indikator kinerja makro Kabupaten Banjar menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya bergerak searah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sementara angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan kenaikan. Kondisi ini mencerminkan perbedaan karakteristik, sensitivitas, dan jeda waktu antar indikator dalam merespons kebijakan pembangunan daerah.

Secara metodologis, IPM merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM terutama didorong oleh perbaikan indikator pembentuknya yang bersifat struktural dan berjangka menengah panjang. Dalam perspektif teori pembangunan manusia (Amartya Sen), peningkatan IPM mencerminkan perluasan kapabilitas dasar masyarakat. Namun, peningkatan kapabilitas tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi apabila tidak didukung oleh struktur ekonomi yang inklusif dan mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai.

Dari sisi pembangunan manusia, peningkatan IPM juga diperkuat oleh kenaikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan daerah dalam meningkatkan keberlanjutan



sekolah dan menurunkan angka putus sekolah. Secara teoritis, peningkatan RLS merupakan investasi sumber daya manusia yang berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, sesuai dengan konsep time lag dalam teori pembangunan, dampak peningkatan pendidikan terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan baru akan terlihat secara lebih nyata pada periode berikutnya.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan mengalami kenaikan, yang secara empiris dipengaruhi oleh kenaikan Garis Kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, serta adanya tekanan inflasi. Dalam kondisi di mana tingkat kemiskinan daerah telah berada pada level sangat rendah, kelompok masyarakat miskin yang tersisa didominasi oleh kelompok miskin ekstrem yang memiliki daya tahan ekonomi rendah. Kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, gejolak ekonomi, maupun kejadian bencana. Secara statistik, kondisi tersebut menyebabkan kenaikan angka kemiskinan dapat terlihat dengan cepat, meskipun pada saat yang sama juga memiliki potensi untuk kembali menurun dalam waktu relatif singkat apabila tekanan ekonomi dapat dikendalikan dan intervensi perlindungan sosial berjalan efektif.

Sementara itu, kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 terjadi meskipun jumlah pencari kerja relatif menurun. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja yang terjadi belum mampu mengimbangi perubahan struktur angkatan kerja tersebut. Dalam kerangka teori pasar tenaga kerja (Todaro dan Smith), fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara dinamika partisipasi angkatan kerja dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, yang dalam jangka pendek dapat menghasilkan peningkatan TPT meskipun secara nominal relatif kecil.

Adapun dinamika ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dapat dijelaskan melalui hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa pada fase tertentu pembangunan, ketimpangan dapat meningkat akibat perbedaan kecepatan akses dan pemanfaatan hasil pembangunan antar kelompok masyarakat. Kelompok dengan tingkat pendidikan dan modal ekonomi yang lebih baik cenderung lebih cepat memperoleh manfaat dari peningkatan kualitas pembangunan manusia, sementara kelompok rentan membutuhkan waktu dan dukungan kebijakan yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.



Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa perbedaan arah pergerakan indikator makro merupakan fenomena yang wajar dalam proses pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas satu arah yang sederhana, melainkan dipengaruhi oleh struktur ekonomi, dinamika sosial, dan jeda waktu kebijakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi kebijakan pembangunan manusia, stabilisasi ekonomi, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif agar capaian pembangunan dapat berdampak lebih optimal dan berkelanjutan.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN PELAPORAN 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Urusan Pendidikan	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	96,56%	Dinas Pendidikan Kab.Banjär	
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	94,12%	Dinas Pendidikan Kab.Banjär	
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	66,02%	Dinas Pendidikan Kab.Banjär	
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	50,94%	Dinas Pendidikan Kab.Banjär	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik	34,12%	Dinas Pendidikan Kab.Banjär	
2	Urusan Kesehatan	Persentase Angka Kematian Ibu	0,17%	Dinas Kesehatan Kab.Banjär	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	26,57%	Dinas Kesehatan Kab.Banjär	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	83,20%	Dinas Kesehatan Kab.Banjär	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	95,60%	Dinas Kesehatan Kab.Banjär	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	99,65%	Dinas Kesehatan Kab.Banjär	
		Persentase Pelayanan	67,08%	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kesehatan Balita Sesuai Standar		Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	90,55%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	63,58%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57,32%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	95,19%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan Kab.Banjar	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	54,14%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	55,86%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	76,03%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	63,24%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	33,35%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota		DPUPRP Kab.Banjar	Tidak Dapat Dilaksanakan
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota	100%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	100%	DPUPRP Kab.Banjar	
		Persentase Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
		Persentase Penilaian	100%	DPUPRP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota		Kab.Banjar	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni		DPRKPLH Kab.Banjar	Tidak Dapat Dilaksanakan
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	3,64%	DPRKPLH Kab.Banjar	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1,11%	DPRKPLH Kab.Banjar	
		Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	DPRKPLH Kab.Banjar	
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	100%	BPBD Kab.Banjar	
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP Kab.Banjar	
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	88,24%	BPBD Kab.Banjar	
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	BPBD Kab.Banjar	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	BPBD Kab.Banjar	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80%	DPKP Kab.Banjar	
6	Urusan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	35,65%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,75%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	6,91%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	36,76%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	83,88%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banjar	
7	Urusan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	DISNAKERTRANS Kab.Banjar	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/	36,92%	DISNAKERTRANS Kab.Banjar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)			
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	188,18%	DISNAKERTRANS Kab.Banj	
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banj	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banj	
9	Urusan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	286,33%	DKPP Kab.Banj	
10	Urusan Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	2,09	DPUPRP Kab.Banj	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	56,59%	DPUPRP Kab.Banj	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	11,76%	DPUPRP Kab.Banj	
11	Urusan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	96,67%	DPRKPLH Kab.Banj	
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	74,56%	DPRKPLH Kab.Banj	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	97,55%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	68,00%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99,76%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	DISDUKCAPIL Kab.Banj	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	DPMD Kab.Banj	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	33,33%	DPMD Kab.Banj	
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	DPMD Kab.Banj	
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	100%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banj	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Keluarga Berencana				
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	73,49%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banj	
		Persentase Kebutuhan ber-Keluarga Bencana yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	71,45%	DINSOSP3AP2KB Kab.Banj	
15	Urusan Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,96	Dinas Perhubungan Kab.Banj	
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,42	Dinas Perhubungan Kab.Banj	
		Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	50%	Dinas Perhubungan Kab.Banj	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	DKISP Kab.Banj	
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	80,95%	DKISP Kab.Banj	
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	DKISP Kab.Banj	
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-15,80%	DKUMPP Kab.Banj	
		Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	20,61%	DKUMPP Kab.Banj	
18	Urusan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	101,13%	DPMPTSP Kab.Banj	
		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	180,03%	DPMPTSP Kab.Banj	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	14,33%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,10%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
		Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Pelatihan Daerah Provinsi	3,91%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	77,27%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
20	Urusan Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	97,85%	DKISP Kab.Banj	
21	Urusan Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	33,12%	DKISP Kab.Banj	
222	Urusan Kebudayaan	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	61,54%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	26,73%	DISBUDPORAPAR Kab.Banj	
23	Urusan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	57,18	DISPERSIP Kab.Banj	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	8,95	DISPERSIP Kab.Banj	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
24	Urusan Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	79,50%	DISPERSIP Kab.Banjar	
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	63,41	DKPP Kab.Banjar	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapasitas/tahun)	100,14%	DKPP Kab.Banjar	
26	Urusan Pariwisata	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	0,19%	DISBUDPORAPAR Kab.Banjar	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	-80,68%	DISBUDPORAPAR Kab.Banjar	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	110,19%	DISBUDPORAPAR Kab.Banjar	
27	Urusan Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,20%	Dinas Pertanian Kab.Banjar	
		Peningkatan Produksi Hortikultura	-41,13%	Dinas Pertanian Kab.Banjar	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	17,06%	Dinas Pertanian Kab.Banjar	
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveilance Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	Dinas Pertanian Kab.Banjar	
28	Urusan Perdagangan	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	83,25%	DKUMPP Kab.Banjar	
29	Urusan Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	70,20%	DKUMPP Kab.Banjar	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	0,46%	DKUMPP Kab.Banjar	
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	2,97%	DKUMPP Kab.Banjar	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	0,59%	DKUMPP Kab.Banjar	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN PELAPORAN 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	100%	Bappedalitbang Kab.Banjar	
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya	30,35%	BPKPAD Kab.Banjar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang Bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya			
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	12,20%	BPKPAD Kab.Banjara	
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun N	58,17%	BPKPAD Kab.Banjara	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33,16%	BPKPAD Kab.Banjara	
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	61,02%	BKPSDM Kab.Banjara	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	100%	Bappedalitbang Kab.Banjara	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	Inspektorat Daerah Kab.Banjara	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4	Inspektorat Daerah Kab.Banjara	
		Manajemen Risiko Indeks	4	Inspektorat Daerah Kab.Banjara	
		Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran N-1	99.91%	Inspektorat Daerah Kab.Banjara	
6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	40	Sekretariat Daerah Kab.Banjara	
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	26,27	Sekretariat Daerah Kab.Banjara	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	20,40	Sekretariat Daerah Kab.Banjara	
7	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N	Tepat	BPKPAD Kab.Banjara	
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	63,16%	Sekretariat Daerah Kab.Banjara	
8	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	85,10	Sekretariat Daerah Kab.Banjara	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjara

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran strategis dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencerminkan arah pembangunan daerah serta menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memenuhi prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART), yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sepanjang masih relevan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun untuk menyampaikan capaian atas target kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang meliputi capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Pengukuran kinerja dilakukan secara mandiri dan berjenjang terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai dasar dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berikut adalah penjabaran target dan realisasi atas Tujuan dan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.



A. Target Tujuan dalam RPJMD

Tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ditetapkan sebagai arah pencapaian kinerja strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak pembangunan bagi masyarakat. Tujuan tersebut dirumuskan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan daerah yang diukur melalui indikator kinerja utama yang bersifat strategis dan lintas sektor. Indikator tersebut mencerminkan capaian kualitas sumber daya manusia, daya saing dan inklusivitas pembangunan ekonomi, ketahanan iklim daerah, serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penetapan target kinerja tahun 2025 menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus sebagai alat untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Berikut tabel yang menyajikan tujuan pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan target tahun 2025 yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banjar.

TUJUAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No	Tujuan	Indikator	Target 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,78
		Indeks Kesalehan Sosial	81,53
2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25
		Indeks Daya Saing Daerah	3,57
3	Terwujudnya ketahanan iklim daerah	Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	0,93
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	79,46

B. Target Sasaran RPJMD yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Bupati

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan sasaran strategis pembangunan daerah yang



dijabarkan ke dalam indikator kinerja terukur beserta target capaian Tahun 2025. Sasaran strategis tersebut menjadi dasar pengukuran kinerja pemerintah daerah serta alat evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis pembangunan daerah dengan 15 (lima belas) indikator kinerja untuk menjadi Perjanjian Kinerja Bupati Banjar, mencakup aspek pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, kebencanaan, tata kelola pemerintahan, serta transformasi digital pelayanan publik yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA BUPATI BANJAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,89
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen	20
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,12
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	Persen	80,00
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,18
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	71,05
		Indeks Konektivitas	Nilai	84,86
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,39
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,31
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,95
		Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70,01

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Banjar Tahun 2025

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada bagian ini akan disajikan hasil pengukuran atas pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam menghasilkan outcome yang diharapkan.

C.1. Realisasi Tujuan

Berikut hasil pengukuran atas pencapaian indikator kinerja tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025, dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada akhir tahun pelaporan. Penyajian realisasi tujuan ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam



mewujudkan outcome pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.

REALISASI TUJUAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No	Tujuan	Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,78	75,11	100,44
		Indeks Kesalehan Sosial	81,53	81,70	100,21
2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25	4,74	90,29
		Indeks Daya Saing Daerah	3,57	3,77	105,60
3	Terwujudnya ketahanan iklim daerah	Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	0,93		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	79,46	82,73	104,12

Secara umum, capaian Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target serta indikator yang belum tersedia data realisasinya, sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.

Pada Tujuan pertama yakni Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesalehan Sosial. Pada Tahun 2025, nilai IPM Kabupaten Banjar mencapai 75,11, melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,78, dengan tingkat capaian sebesar 100,44 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Sementara itu, untuk indikator Indeks Kesalehan Sosial ditetapkan dengan target sebesar 81,53. Berdasarkan hasil pengukuran, indeks tersebut terealisasi sebesar 81,70, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial di tengah masyarakat berjalan sangat baik dan melampaui target kinerja. Kondisi tersebut mengindikasikan



meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai sosial keagamaan, seperti kepedulian sosial, toleransi, gotong royong, kepatuhan terhadap norma sosial, serta partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Pada Tujuan kedua yakni Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif, indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 4,74 persen dari target 5,25 persen menghasilkan capaian 90,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti dinamika ekonomi nasional dan global, fluktuasi harga komoditas, serta tingkat investasi dan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, indikator Indeks Daya Saing Daerah menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 3,77 dari target 3,57, atau sebesar 105,60 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek daya saing daerah, termasuk kemudahan berusaha, infrastruktur, inovasi, dan kualitas pelayanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi/Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dan merata.

Pada Tujuan yang ketiga, Terwujudnya ketahanan iklim daerah, dengan indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) belum memiliki data realisasi hingga laporan ini disampaikan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini belum dapat diukur. Keterlambatan data ini pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan verifikasi teknis, pengolahan data sektoral, serta sinkronisasi dengan sistem pelaporan lingkungan hidup di tingkat nasional.

Selanjutnya, pada Tujuan keempat Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, ditetapkan target sebesar 79,46,



dengan realisasi mencapai 82,73, atau 104,12 persen dari target. Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan efektif dan melampaui ekspektasi kinerja yang ditetapkan, hasil tersebut merefleksikan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Ke depan, fokus diarahkan pada konsistensi peningkatan kualitas serta penguatan area strategis agar tren capaian tetap progresif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator tujuan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan relatif stabil, dimana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian terbaik terlihat pada tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian, antara lain belum optimalnya capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi serta belum tersedianya data realisasi indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan data kinerja lingkungan hidup agar seluruh indikator tujuan dapat dicapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.

C.2. Realisasi Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Bupati Banjar

Berikut disajikan capaian kinerja sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Bupati Banjar Tahun 2025 berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang berhasil dicapai.

REALISASI ATAS TARGET PERJANJIAN KINERJA BUPATI BANJAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,89	73,87	99,97
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen	20	26,35	75,90
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,12	8,15	100,37
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,05	99,85
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor Pertambangan dan penggalian	Persen	80,00	81,19	101,49
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,18	2,74	79,56
5	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	71,05	71,05	100



	infrastruktur daerah	Indeks Konektivitas	Nilai	84,86	84,16	99,18
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,39	78,20	109,54
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,31	75,66	155,05
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,95	75,96	90,48
		Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70,01	71,16	101,64
		Indeks Integritas	Nilai	80	78,18	97,73
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,93	3,02	103,07
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,54	4,66	102,64

Di bawah ini disampaikan ulasan dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025, yakni sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah nilai hasil pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan suatu populasi atau individu, yang mengukur rata-rata jumlah tahun seseorang diperkirakan dapat hidup berdasarkan kondisi kesehatan saat ini. Usia Harapan Hidup dihitung oleh BPS menggunakan data dari:

- Jumlah penduduk
- Tingkat kematian menurut kelompok umur
- Survei atau sensus

Adapun fungsi dari Usia Harapan Hidup adalah:

- Menilai derajat kesehatan masyarakat
- Memonitor keberhasilan program kesehatan, gizi, sanitasi
- Indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Membantu perencanaan layanan kesehatan, jaminan sosial, lansia

Sedangkan faktor yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup antara lain:

- Akses layanan kesehatan
- Gizi dan sanitasi
- Kesejahteraan ekonomi
- Pendidikan ibu
- Perilaku hidup bersih dan sehat
- Ketersediaan air bersih dan lingkungan sehat.

KLASIFIKASI USIA HARAPAN HIDUP

UHH (Tahun)	Makna Umum
-------------	------------



< 65 tahun	Tingkat kematian masih tinggi, akses kesehatan rendah
65–70 tahun	Sedang, layanan kesehatan mulai menjangkau luas
> 70 tahun	Baik, tingkat kesehatan dan gizi sudah membaik
> 75 tahun	Sangat baik, kualitas hidup dan pelayanan tinggi

Usia Harapan Hidup merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang pada tahun 2025 ditetapkan targetnya adalah sebesar 73,89 tahun, sesuai dengan hasil publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui realisasi Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banjar pada tahun 2025 adalah sebesar 73,87 tahun, sehingga capaiannya adalah 99,97 persen. Nilai realisasi di angka 73,87 menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banjar telah berada di skala Baik, Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah berjalan dengan baik dan relatif konsisten. Selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pola hidup masyarakat, prevalensi penyakit tidak menular, serta dinamika sosial ekonomi.

2. Prevalensi Stunting

Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) menggambarkan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, terutama pada 1.000 HPK (hari pertama kehidupan). Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan stunting di daerah, sejauh mana kondisi gizi balita terkendali dan menilai efektivitas kebijakan intervensi gizi yang sudah diialankan.

Kondisi stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas sumber daya manusia di masa depan.

Pengukuran prevalensi stunting dilakukan menggunakan indikator antropometri TB/U dengan acuan standar pertumbuhan anak WHO. Dalam pengelompokannya:

- Pendek (stunted) apabila nilai TB/U berada di bawah



minus dua standar deviasi (-2 SD)

- Sangat pendek (severely stunted) apabila berada di bawah minus tiga standar deviasi (-3 SD).

Dimana umumnya stunting dipengaruhi oleh faktor berikut:

- Status gizi ibu hamil dan balita,
- Akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak,
- Ketersediaan dan pemanfaatan sanitasi serta air bersih,
- Kondisi sosial ekonomi keluarga,
- Pola asuh dan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA).

Pada tahun 2025 target prevalensi stunting ditetapkan sebesar 20 persen. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 26,35 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 75,90 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih memerlukan penguatan, terutama pada wilayah dan kelompok sasaran yang memiliki tingkat risiko tinggi serta memerlukan intervensi lintas sektor yang terintegrasi.

Pada tahun 2025 data realisasi nilai stunting didapatkan dari e-PPBGM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang merupakan sistem milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat data gizi individu secara *by name by address*, termasuk hasil penimbangan balita dan pemantauan ibu hamil, sehingga memungkinkan pemantauan status gizi dan stunting dilakukan secara lebih aktual dan berbasis data riil di lapangan.

Ke depan, upaya penurunan prevalensi stunting memerlukan penguatan konvergensi intervensi lintas perangkat daerah, peningkatan ketepatan sasaran kelompok berisiko, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data yang mutakhir, guna memastikan pencapaian target penurunan stunting secara berkelanjutan dan terukur.



3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu daerah, yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS ini adalah salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan Pengukuran RLS adalah untuk:

- Menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan yang sudah ditempuh oleh masyarakat
- Menjadi komponen utama dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
- Menjadi dasar bagi Perencanaan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, pada tahun 2025 target atas indikatornya adalah sebesar 8,12 tahun, dengan realisasi sebesar 8,15 tahun, angka ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,37 persen. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menekan angka putus sekolah. Di lapangan, program bantuan pendidikan, akses sekolah yang relatif merata, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkontribusi besar terhadap capaian ini. Namun demikian, kondisi nyata menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama pada sarana prasarana sekolah dan ketersediaan tenaga pendidik.

4. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah nilai hasil Pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak pada umur tertentu di masa mendatang, data HLS dihitung oleh BPS melalui



Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan merupakan salah satu komponen Indeks Pendidikan dalam IPM. Tujuan pengukuran HLS adalah untuk :

- Menggambarkan akses dan peluang pendidikan di masa depan
- Mewakili potensi pembangunan manusia jangka panjang
- Menjadi indikator perencanaan pendidikan daerah dan nasional.

KLASIFIKASI HARAPAN LAMA SEKOLAH (PERKIRAAN)

HLS (Tahun)	Tingkat yang dapat dicapai
< 9 tahun	Sebagian besar hanya sampai SMP
9–12 tahun	Sebagian besar akan tamat SMA/ sederajat
12–14 tahun	Potensi melanjutkan ke pendidikan tinggi
>14 tahun	Banyak yang bisa mencapai S1 atau lebih

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan indikator Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 13,07 tahun, dengan realisasi 13,05 tahun, realisasinya hampir sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 99,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara potensi, anak-anak usia sekolah di Kabupaten Banjar memiliki peluang yang cukup besar untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Di lapangan, orang tua semakin mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi, faktor ekonomi keluarga dan kebutuhan membantu orang tua bekerja masih menjadi penghambat utama bagi sebagian anak, khususnya di wilayah pertanian dan perikanan tradisional.

5. Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian

Indikator Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian digunakan untuk mengukur tingkat diversifikasi dan ketahanan struktur ekonomi daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase nilai tambah bruto seluruh sektor non-pertambangan dan penggalian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.



Indikator ini digunakan untuk menggambarkan perekonomian yang lebih produktif dengan berfokus pada produktivitas sektor-sektor yang berorientasi pada pengolahan, jasa, perdagangan, pertanian, dan manufaktur, yang lebih berkelanjutan.

Target kontribusi sektor PDRB di luar pertambangan dan penggalan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,00 persen. Hingga akhir periode pelaporan, indikator tersebut terealisasi sebesar 81,19 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,49 persen. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan berhasil dilampaui.

Capaian ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah semakin mengarah pada penguatan sektor-sektor non-pertambangan. Meningkatnya kontribusi sektor di luar pertambangan dan penggalan mengindikasikan adanya pertumbuhan yang positif pada sektor-sektor produktif seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, konstruksi, serta sektor pertanian. Kondisi ini mencerminkan proses diversifikasi ekonomi yang berjalan dengan baik dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah mempertahankan tren pertumbuhan ini melalui peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing pelaku usaha lokal, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah agar kontribusinya terhadap PDRB semakin optimal dan stabil.

6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) pada suatu wilayah dan periode tertentu. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih rendah daripada nilai Garis Kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan batas minimum nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kkal/kapita/hari) dan



kebutuhan dasar non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dll).

Dengan demikian, secara operasional, tingkat kemiskinan mencerminkan proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik kebutuhan energi makanan maupun kebutuhan esensial non-makanan berdasarkan standar resmi BPS.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,74 persen, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 2,3–2,4 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika sosial-ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banjar, mengingat selama beberapa tahun terakhir tren kemiskinan telah menunjukkan penurunan yang konsisten.

Meningkatnya angka kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik akibat tekanan ekonomi maupun kerentanan sosial yang muncul sepanjang tahun berjalan. Kenaikan persentase ini juga menggambarkan bahwa kelompok “miskin baru” (new poor) atau kelompok rentang hampir miskin (near poor) sangat mudah terdampak oleh perubahan harga kebutuhan pokok, ketidakstabilan pendapatan, serta menurunnya daya beli di sebagian masyarakat.

Selain itu, kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas perlindungan sosial serta efektivitas intervensi pemberdayaan ekonomi perlu semakin diperkuat. Meskipun Kabupaten Banjar selama ini termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan, kenaikan angka menjadi 2,74 persen menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti akses lapangan kerja produktif, nilai tambah sektor pertanian, fluktuasi harga komoditas, serta ketimpangan antarwilayah kecamatan masih memberikan pengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.



Target Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,18 persen, dengan realisasi sebesar 2,74 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 79,56 persen, yang menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa jauh pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata, sesuai kebutuhan, dan memuaskan masyarakat sebagai pengguna langsung. IKLI berfungsi sebagai umpan balik (feedback) yang objektif, komprehensif, dan kredibel dari masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.

IKLI umumnya diperoleh melalui survei yang menilai pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek layanan infrastruktur seperti:

- Jalan dan jembatan
- Drainase dan pengendalian banjir
- Air bersih
- Listrik
- Telekomunikasi
- Transportasi public
- Fasilitas umum lainnya

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) memiliki tujuan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain:

1) Mengukur Kinerja Pemerintah.

IKLI memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pemerintah daerah atau pusat dalam membangun dan menyediakan layanan infrastruktur kepada masyarakat.

2) Bahan Evaluasi dan Perumusan Kebijakan.

- Mengevaluasi program pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.



- Menetapkan kebijakan dan menyusun program/kegiatan tahun selanjutnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

3) Memahami Perspektif Masyarakat.

IKLI membantu pemerintah mengetahui secara langsung persepsi, ekspektasi, kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang mereka terima.

4) Meningkatkan Kualitas Layanan.

Dengan mengetahui elemen mana dari layanan infrastruktur yang kurang memuaskan, IKLI mendorong pemerintah untuk menyusun rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh.

5) Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan suara pengguna produk infrastruktur secara langsung.

Nilai IKLI yang tinggi menunjukkan bahwa layanan infrastruktur telah memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan nilai yang rendah menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan melalui program prioritas dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2025 target atas indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Banjar adalah sebesar 71,05, dengan realisasi sebesar 71,05 sehingga capaiannya adalah sebesar 100 persen. Tercapainya nilai IKLI sesuai target menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur daerah telah memenuhi standar kinerja yang direncanakan. Kesesuaian antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan infrastruktur telah dilakukan secara konsisten dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa:

- a. Layanan infrastruktur yang disediakan pemerintah daerah telah berfungsi secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur berada pada kategori baik.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur berada pada kategori baik.

8. Indeks Konektivitas

Indeks Konektivitas merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan wilayah melalui ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan aksesibilitas. Indikator ini menunjukkan fungsi infrastruktur sebagai penghubung antarwilayah dan masyarakat yang berfokus pada pemerataan pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pengukuran Indeks Konektivitas umumnya disusun berdasarkan beberapa variabel, antara lain:

- Ketersediaan dan kondisi jaringan jalan,
- Keterhubungan antarwilayah (desa–kecamatan–kabupaten),
- Aksesibilitas transportasi terhadap pusat layanan dasar dan ekonomi,
- Dukungan infrastruktur pendukung konektivitas lainnya.

Nilai indeks dinyatakan dalam skala 0–100, di mana semakin tinggi angka menunjukkan semakin baik keterhubungan dan efisiensi konektivitas wilayah.

Indeks Konektivitas sendiri adalah indeks yang menggambarkan:

- 1) Tingkat kemudahan mobilitas masyarakat.
- 2) Kelancaran distribusi barang dan logistik.
- 3) Pemerataan pembangunan wilayah.
- 4) Efektivitas jaringan transportasi
- 5) Dasar pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.

Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat dan barang dapat berlangsung secara efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan seperti keterbatasan



infrastruktur, jaringan tidak terhubung, kondisi jalan buruk, minimnya moda transportasi, atau tingginya waktu tempuh. Oleh karena itu, indeks ini menjadi acuan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur transportasi di daerah.

Pada Tahun 2025, Indeks Konektivitas ditargetkan sebesar 84,86 dan terealisasi 84,16, dengan tingkat capaian 99,18 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja konektivitas daerah pada tahun berjalan berada pada level sangat baik dan hampir memenuhi target yang ditetapkan. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan peningkatan konektivitas telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Capaian tersebut didukung oleh keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, peningkatan aksesibilitas antarwilayah, serta upaya menjaga fungsi infrastruktur transportasi agar tetap mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kinerja yang mendekati target juga mencerminkan bahwa hambatan struktural terhadap keterhubungan wilayah dapat dikelola dengan cukup efektif sepanjang tahun 2025.

Meskipun demikian, belum tercapainya target secara penuh menunjukkan masih adanya tantangan, terutama terkait kualitas infrastruktur di beberapa segmen wilayah, kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta kondisi geografis yang mempengaruhi efektivitas konektivitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi program peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur agar capaian Indeks Konektivitas dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks



Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

IKLH dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah. IKLH terdiri dari tiga indeks utama, yaitu:

1) Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Berdasarkan parameter PM_{10} (partikulat udara dengan diameter kurang dari 10 mikrometer).
- Diukur menggunakan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU).

2) Indeks Kualitas Air (IKA).

- Berdasarkan parameter kimia dan fisika seperti DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand), dan COD (Chemical Oxygen Demand).
- Diambil dari sungai atau badan air permukaan utama di suatu daerah.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

- Menggambarkan kemampuan tutupan lahan dalam mendukung kualitas lingkungan hidup.
- Dihitung berdasarkan citra satelit dan klasifikasi lahan, misalnya hutan, pertanian, dan permukiman.

IKLH mempunyai fungsi untuk :

- Menjadi acuan nasional dan daerah dalam merencanakan program lingkungan hidup.
- Menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.
- Memberikan gambaran bagi masyarakat dan investor mengenai kualitas lingkungan suatu wilayah.
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Dalam proses pengukuran IKLH ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi / Kabupaten / Kota berperan dalam antara lain:

- Mengumpulkan data kualitas udara, air, dan tutupan lahan dari wilayah masing-masing.
- Melaporkan data ke KLHK melalui sistem pelaporan



resmi, seperti SILHK (Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

- Memantau dan menjaga kualitas lingkungan sesuai indikator IKLH.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 target yang ditetapkan adalah sebesar 71,39, berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKLH mencapai 78,20 poin, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 109,54 persen.

Capaian IKLH yang melampaui target menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup berada pada kategori baik dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Nilai realisasi yang lebih tinggi dari target mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan secara umum.

Peningkatan IKLH mencerminkan adanya perbaikan pada satu atau lebih komponen penyusun indeks, seperti membaiknya kualitas air, terjaganya kualitas udara, serta meningkatnya tutupan lahan atau pengendalian alih fungsi lahan. Sebagai indikator outcome, IKLH menunjukkan keberhasilan pembangunan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

10. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana pada suatu wilayah, yang mencerminkan gambaran menyeluruh tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah, serta menilai efektivitas upaya pengurangan risiko dalam pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

IRB disusun dan diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai indeks nasional yang menjadi rujukan resmi dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Pemerintah daerah tidak melakukan



penghitungan indeks secara mandiri, melainkan berperan sebagai pendukung data dan pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) pada sasaran strategis Menurunnya Risiko Bencana menunjukkan realisasi sebesar 75,66 dari target 117,31, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 155,05 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Banjar pada tahun pelaporan jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yang mencerminkan keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan.

Nilai IRB yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, antara lain melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan kebencanaan, penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan kebencanaan, serta pelaksanaan edukasi dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, perbaikan tata kelola lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang juga turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat risiko bencana. Meskipun capaian indikator IRB secara kuantitatif menunjukkan hasil sangat baik, kondisi ini tetap perlu dicermati secara berkelanjutan mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang memiliki potensi kerawanan bencana alam. Oleh karena itu, keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi penguatan mitigasi struktural dan non-struktural, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menurunkan Indeks Risiko Bencana secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu untuk terus melaksanakan:

- 1) Penguatan mitigasi bencana berbasis wilayah.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan



masyarakat.

- 4) Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- 5) Pemanfaatan data dan informasi kebencanaan secara berkelanjutan.

11. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan secara objektif tingkat pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga sejauh mana pemerintah daerah menerapkan transparansi, disiplin anggaran, efektivitas belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah salah satu instrumen evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. IPKD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, terdapat 6 dimensi utama:

- 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD.
- 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Penyerapan anggaran.
- 5) Kondisi keuangan daerah.
- 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penilaian IPKD ini adalah:

- 1) Mengukur Kualitas Tata Kelola Keuangan.
- 2) Mendorong Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan.
- 3) Alat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemda.



- 4) Bahan Pertimbangan Kebijakan Pusat.
- 5) Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas.

Target IPKD pada tahun 2025 adalah sebesar 83,95, dengan realisasi sebesar 75,96, sehingga capaian kinerja mencapai 90,48 persen. Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 90,48 persen menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan, khususnya pada konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran serta kualitas pengendalian internal.

Sebagai indikator outcome tata kelola, IPKD sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, kualitas SDM pengelola keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Capaian yang belum optimal ini mencerminkan bahwa meskipun sistem pengelolaan keuangan telah berjalan, masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaannya di seluruh perangkat daerah.

12. Nilai SAKIP Daerah

Nilai SAKIP merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil sesuai dengan prinsip *good governance*. Nilai ini mencerminkan sejauh mana perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil (*outcome*).

Pengukuran Nilai SAKIP dilakukan melalui evaluasi oleh Kementerian PANRB, dengan mengacu pada pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku secara nasional. Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen utama, antara lain:

- Perencanaan kinerja, yang menilai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja.
- Pengukuran kinerja, yang menilai ketepatan indikator dan konsistensi pengukuran capaian



kinerja.

- Pelaporan kinerja, yang menilai kualitas penyajian LKjIP dan analisis capaian kinerja.
- Evaluasi internal, yang menilai efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja.
- Capaian kinerja, yang menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP, pada tahun 2025 ditetapkan target Nilai SAKIP sebesar 70,01, Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Nilai SAKIP tercatat sebesar 71,16, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,64 persen. Nilai SAKIP Daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan benar- benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

13. Indeks Integritas

Indeks Integritas adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kemajuan upaya pencegahan korupsi di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Semakin tinggi nilai Indeks Integritas menunjukkan bahwa sistem yang berjalan telah semakin baik dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang hasilnya sering disebut sebagai Indeks Integritas. SPI melibatkan responden dari internal instansi, pengguna layanan, serta para ahli/pengamat.

Komponen yang diukur dalam SPI KPK antara lain:

- Transparansi
- Antikorupsi
- Keadilan dalam layanan
- Sistem pengendalian internal



- Kualitas pelayanan publik
- Persepsi dan pengalaman korupsi

Adapun manfaat dari Indeks Integritas adalah antara lain:

- Sebagai alat ukur kemajuan reformasi birokrasi
- Memberi gambaran kondisi integritas aktual instansi pemerintah
- Sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan korupsi
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi

Indeks Integritas merupakan indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Integritas ASN, dimana pada tahun 2025 ditetapkan target Indeks Integritas sebesar 80, dengan realisasi 78,18, sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,73 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya integritas mulai terbentuk di lingkungan pemerintah daerah. Di lapangan, penerapan sistem dan regulasi sudah berjalan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek budaya organisasi dan pengawasan internal agar praktik integritas benar-benar melembaga.

14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pengukuran Indeks SPBE selama ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui evaluasi terhadap aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Indeks ini dirancang untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pemerintah, dengan skala nilai tertentu, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin baik tingkat penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

Pada Tahun 2025, pengukuran Indeks SPBE tidak lagi dilaksanakan, seiring dengan adanya transformasi kebijakan nasional SPBE menjadi Pemerintah Digital. Transformasi ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintah yang dilakukan secara



menyeluruh dan mendasar, bukan sekadar perubahan nomenklatur.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PANRB sedang melakukan revisi Peraturan Presiden tentang SPBE menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, dengan tujuan memastikan tata kelola digital pemerintah tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari transformasi kebijakan tersebut, dilakukan pula transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang ke depan tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelolaan layanan digital, tetapi lebih menekankan pada:

- Dampak nyata layanan digital terhadap masyarakat.
- Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.

Dengan tidak dilaksanakannya evaluasi Indeks SPBE oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banjar mengambil Langkah proaktif dengan melakukan pengukuran secara mandiri sebagai bentuk komitmen menjaga kesinambungan tata kelola SPBE di daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan mandiri tersebut, nilai Indeks SPBE Kabupaten Banjar Tahun 2025 mencapai 3,02 dari target 2,93, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,07 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa, meskipun berada dalam masa transisi kebijakan menuju Indeks Pemerintah Digital, kinerja tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Banjar tetap terjaga dan menunjukkan tren positif.

Ke depan, tantangan yang perlu diperkuat adalah memastikan transformasi digital tidak hanya berfokus pada aspek sistem dan aplikasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, dampak nyata bagi masyarakat, serta kepuasan pengguna sebagai indikator utama dalam paradigma Pemerintah Digital.

15. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi



pemerintah, baik pusat maupun daerah. IPP disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Pengukuran IPP dilakukan melalui evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan memperhatikan beberapa dimensi utama, antara lain:

- Kebijakan pelayanan publik.
- Profesionalisme SDM pelayanan,
- Sarana dan prasarana pelayanan.
- Sistem informasi pelayanan publik.
- Mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta
- Inovasi pelayanan publik.

Adapun tujuan Indeks Pelayanan Publik adalah:

- Mengukur tingkat kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah.
- Menjadi alat evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.
- Memberikan insentif atau rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.

IPP menekankan pada kepatuhan standar pelayanan sekaligus kualitas implementasinya, sehingga mencerminkan tingkat kematangan tata kelola pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, ditahun 2025 ditargetkan nilai capaiannya sebesar 4,54, dan berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, realisasi IPP Kab. Banjar tahun 2025 mencapai 4,66 sehingga capaiannya sebesar 102,64 persen.

Capaian IPP yang melebihi target ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah telah berada pada kategori sangat baik, khususnya dalam aspek pemenuhan standar pelayanan dan implementasi sistem pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini antara lain di pengaruhi oleh:

- Meningkatkan kepatuhan unit pelayanan terhadap standar pelayanan publik.
- Perbaikan sarana dan prasarana layanan.



- Penguatan sistem informasi pelayanan publik, termasuk layanan berbasis digital.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih responsif,

Serta munculnya inovasi pelayanan publik yang mempermudah akses masyarakat.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui peningkatan kinerja yang dicapai maka perlu membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN CAPAIAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (persen)	Target	Realisasi	Capaian (persen)	Target	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			73,89	73,87	99,97
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			20	26,35	75,9
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			8,12	8,15	100,37
		Harapan Lama Sekolah	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			13,07	13,05	99,85
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			80	81,19	101,49
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			2,18	2,74	79,56
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			71,05	71,05	100
		Indeks Konektivitas	72,7	79,1	108,8	81,86	84,44	103,15	84,86	84,16	99,18
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			71,39	78,2	109,54
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	150,6	133,44	111,39	132,9	118,31	111	117,31	75,66	155,05
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			83,95	75,96	90,48
		Nilai SAKIP Daerah	74,49	68,1	91,42	76,32	67,06	87,87	70,01	71,16	101,64
		Indeks Integritas	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			80	78,18	97,73
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,66	2,87	107,89	2,92	2,87	98,29	2,93	3,02	103,07
		Indeks Pelayanan Publik	Belum menjadi indikator			Belum menjadi indikator			4,54	4,66	102,64



Tahun 2025 merupakan periode penguatan kualitas pengukuran kinerja berbasis outcome, ditandai dengan bertambahnya indikator strategis yang sebelumnya belum digunakan pada Tahun 2023–2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan relevansi evaluasi kinerja pembangunan.

Pada sektor kesehatan, capaian Usia Harapan Hidup hampir mencapai target (99,97 persen), menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang relatif stabil. Namun demikian, prevalensi stunting masih berada di atas target dengan target 20 persen, realisasi 26,35 persen (capaian 75,90 persen) sehingga menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan intervensi lintas sektor secara berkelanjutan.

Sektor pendidikan menunjukkan kinerja sangat baik dan konsisten. Rata- Rata Lama Sekolah melampaui target, sementara Harapan Lama Sekolah mendekati target, mencerminkan keberhasilan kebijakan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat.

Indikator Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,00 persen dan terealisasi 81,19 persen dengan capaian 101,49 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.



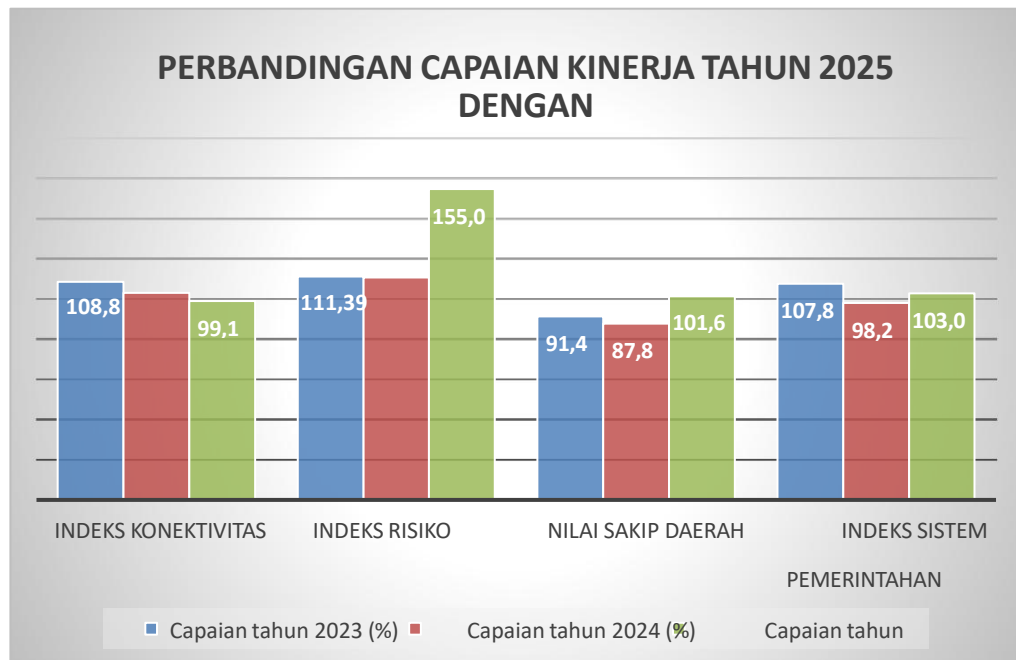
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, kinerja menunjukkan hasil positif. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur berada pada kategori baik dengan capaian 100 persen, sementara Indeks Konektivitas memperlihatkan tren peningkatan signifikan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan realisasi Tahun 2025 masih menunggu rilis data. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melampaui target secara signifikan (109,54 persen), menunjukkan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan.

Untuk aspek kebencanaan dan tata kelola, Indeks Risiko Bencana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, Indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 mencapai 155,05 persen, dengan realisasi 75,66 dari target 117,31. Penurunan nilai IRB ini mengindikasikan berkurangnya tingkat risiko bencana di Kabupaten Banjar secara nyata, hal ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi bencana yang diterapkan tidak hanya mampu menahan peningkatan risiko, tetapi juga berhasil menurunkan tingkat risiko secara signifikan. Di sisi tata kelola pemerintahan, Nilai SAKIP Daerah berhasil mencapai target pada Tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, menandakan adanya perbaikan sistem pengelolaan kinerja. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Integritas berada pada kategori baik dan menunjukkan arah penguatan tata kelola yang positif.



Pada sektor pelayanan publik dan digitalisasi, kualitas layanan menunjukkan kinerja sangat baik. Indeks Pelayanan Publik melampaui target, mencerminkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Sementara itu, capaian SPBE menunjukkan dinamika capaian selama periode 2023–2025, pada tahun 2025 kinerja kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 103,07 persen, yang berarti kembali melampaui target yang telah ditetapkan. Perbaikan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya konsolidasi dan penguatan tata kelola SPBE telah berjalan efektif.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa cuma ada empat indikator kinerja Sasaran Strategis yang bisa dibandingkan pertumbuhan capaian kinerja lintas tahunnya (2023-2025) yakni indikator Indeks Konektivitas, Indeks Risiko Bencana, Nilai SAKIP Daerah dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana disajikan dalam chart di bawah ini:



Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup kuat pada aspek produktivitas ekonomi, kualitas lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan. Capaian pada bidang-bidang tersebut mengindikasikan adanya perbaikan struktur ekonomi, meningkatnya kualitas tata kelola, serta penguatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi.

Namun masih terdapat dua indikator yang memerlukan perhatian serius, yaitu prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan. Kedua indikator tersebut bersifat mendasar karena berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun kinerja daerah secara umum menunjukkan tren positif, penguatan intervensi pada aspek sosial-ekonomi dasar tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.



E. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yakni tahun 2030 maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR DOKUMEN RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,32	73,87	98,07
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	16,25	26,35	61,67
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	8,15	89,86
		Harapan Lama Sekolah	13,43	13,05	97,17
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	81,75	81,19	99,31
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	1,4	2,74	51,09
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,05	71,05	93,43
		Indeks Konektivitas	87,01	84,16	96,72
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,45	78,2	107,94
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	112,31	75,66	148,44
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,73	75,96	89,65
		Nilai SAKIP Daerah	80,8	71,16	88,07
		Indeks Integritas	83,75	78,18	93,35
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,47	3,02	87,03
		Indeks Pelayanan Publik	4,8	4,66	97,08

Secara umum, perbandingan antara target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai kinerja yang cukup baik dengan tingkat capaian di atas 85 persen, bahkan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana



yang mencerminkan keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana di daerah. Indikator pada sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan mendekati target RPJMD. Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian serius, terutama Prevalensi Stunting dan Tingkat Kemiskinan, yang menunjukkan capaian relatif rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal pada akhir periode RPJMD. Berikut analisis capaian masing-masing indikator kinerja.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Usia Harapan Hidup memiliki target akhir RPJMD sebesar 75,32 tahun, sementara realisasi pada tahun 2025 mencapai 73,87 tahun dengan tingkat capaian 98,07 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara umum telah mengalami peningkatan dan relatif mendekati target yang ditetapkan. Tingginya capaian tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program peningkatan layanan kesehatan dasar, peningkatan akses fasilitas kesehatan, serta upaya promotif dan preventif yang dilakukan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan intervensi pada aspek kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular maupun tidak

menular, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan primer guna mencapai target RPJMD secara optimal.

2. Prevalensi Stunting.

Indikator prevalensi stunting memiliki target akhir RPJMD sebesar 16,25 persen, namun realisasi Tahun 2025 masih berada pada angka 26,35 persen dengan tingkat capaian 61,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penurunan stunting masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan intervensi yang lebih terintegrasi, baik melalui pendekatan intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif yang melibatkan sektor lain seperti sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data sasaran, serta penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan penurunan stunting di daerah.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah memiliki target RPJMD sebesar 9,07 tahun, sementara realisasi pada Tahun 2025 mencapai 8,15 tahun dengan capaian 89,86 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan formal terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan akses pendidikan pada beberapa wilayah, kondisi ekonomi keluarga, serta masih adanya peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan

setelah jenjang tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan akses pendidikan, program pendidikan kesetaraan, serta dukungan beasiswa bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

4. Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah memiliki target RPJMD sebesar 13,43 tahun dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 13,05 tahun dan capaian 97,17 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki peluang yang cukup besar untuk mengakses pendidikan hingga jenjang menengah bahkan pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan indikator ini.

5. Kontribusi Sektor PDRB di Luar Pertambangan dan Penggalian

Indikator kontribusi sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian memiliki target sebesar 81,75 persen, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 81,19 persen atau capaian 99,31 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah mulai menunjukkan arah yang lebih berimbang dengan meningkatnya kontribusi sektor non-pertambangan. Kondisi ini mencerminkan berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta sektor pertanian. Diversifikasi ekonomi ini penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi



daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator IKLH memiliki target 72,45, sementara realisasi Tahun 2025 mencapai 78,20 dengan capaian 107,94 persen.

Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah relatif terjaga dengan baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta upaya konservasi sumber daya alam. Pencapaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

7. Indeks Risiko Bencana.

Indikator Indeks Risiko Bencana memiliki target 112,31, sementara realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 75,66 dengan capaian 148,44 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di daerah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi yang ditargetkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan sistem mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.

8. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator ini memiliki target 84,73, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 75,96 atau capaian 89,65 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan



peningkatan pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran agar dapat mencapai standar pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

9. Nilai SAKIP Daerah.

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki target akhir RPJMD sebesar 80,80, sementara realisasi pada Tahun 2025 mencapai 71,16 dengan tingkat capaian 88,07 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Ke depan, peningkatan nilai SAKIP dapat dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja yang lebih terukur, penyelarasan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Selain

10. Tingkat Kemiskinan.

Indikator tingkat kemiskinan memiliki target RPJMD sebesar 1,40 persen, sementara realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 2,74 persen dengan capaian 51,09 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan masih belum optimal dan memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja yang produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi, termasuk



peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Indikator IKLI memiliki target RPJMD sebesar 76,05, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 71,05 atau capaian 93,43 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur daerah secara umum sudah cukup baik namun masih terdapat ruang perbaikan. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, serta fasilitas publik lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.

12. Indeks Konektivitas.

Indikator Indeks Konektivitas memiliki target 87,01, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 84,16 atau capaian 96,72 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan wilayah melalui jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung sudah cukup baik. Peningkatan konektivitas antar wilayah memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas barang dan jasa, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperkuat integrasi wilayah. itu, penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kinerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di daerah.

13. Indeks Integritas.

Indikator Indeks Integritas memiliki target RPJMD sebesar 83,75, dengan realisasi pada Tahun 2025 mencapai 78,18



atau dengan tingkat capaian 93,35 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan budaya integritas serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan capaian indeks ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan transparansi proses pelayanan publik, penerapan standar operasional prosedur yang lebih jelas dan konsisten, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat. Selain itu, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki target akhir RPJMD sebesar 3,47, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 3,02 atau dengan capaian 87,03 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai tingkat kematangan sistem yang lebih optimal.

Dalam rangka meningkatkan nilai SPBE, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan tata kelola teknologi informasi, meningkatkan integrasi aplikasi antar perangkat daerah, serta mendorong pemanfaatan layanan digital



yang lebih luas baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keamanan sistem informasi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang digital juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

15. Indeks Pelayanan Publik.

Indikator Indeks Pelayanan Publik memiliki target RPJMD sebesar 4,80, dengan realisasi pada Tahun 2025 mencapai 4,66 atau dengan capaian 97,08 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah secara umum telah berada pada kategori baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi digital, peningkatan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat semakin responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI PROVINSI DAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Prov	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,89	73,87	74,49	74,47



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Prov	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	20	26,35		19,18
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,12	8,15	8,82	9,07
		Harapan Lama Sekolah	13,07	13,05	13,12	13,3
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	80	81,19		
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	2,18	2,74	3,84	8,47
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	71,05	71,05		
		Indeks Konektivitas	84,86	84,16		
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,39	78,2	75,73	
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	117,31	75,66	83,68	
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83,95	75,96		
		Nilai SAKIP Daerah	70,01	71,16	82,96	
		Indeks Integritas	80	78,18	72,04	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,93	3,02	3,63	3,12
		Indeks Pelayanan Publik	4,54	4,66	4,56	

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa indikator strategis, meskipun masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan agar mampu bersaing dengan capaian provinsi maupun nasional.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai realisasi sebesar 73,87 tahun dari target 73,89 tahun. Meskipun capaian tersebut hampir memenuhi target yang ditetapkan, nilai UHH daerah masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 74,49 tahun dan nasional



sebesar 74,47 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu terus diperkuat, khususnya melalui peningkatan layanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat, serta penguatan program promotif dan preventif.

Sementara itu, indikator Prevalensi Stunting menunjukkan realisasi sebesar 26,35 persen dari target 20 persen, yang berarti masih berada di atas target yang diharapkan serta lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 19,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penguatan intervensi terpadu lintas sektor, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, maupun penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, indikator Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan realisasi sebesar 8,15 tahun atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,12 tahun. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 8,82 tahun dan nasional sebesar 9,07 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat agar tingkat pendidikan penduduk dapat terus meningkat.

Adapun indikator Harapan Lama Sekolah mencapai realisasi sebesar 13,05 tahun dari target 13,07 tahun. Capaian ini relatif mendekati target dan tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi sebesar 13,12 tahun maupun nasional sebesar 13,30 tahun, yang menunjukkan bahwa



peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan pada masa mendatang cukup baik.

Pada sasaran meningkatnya produktivitas ekonomi, indikator kontribusi sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalan menunjukkan realisasi sebesar 81,19 persen dari target 80,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah mulai mengalami penguatan pada sektor non-ekstraktif sehingga mendukung upaya diversifikasi ekonomi daerah.

Pada sasaran meningkatnya perekonomian yang inklusif, indikator tingkat kemiskinan menunjukkan realisasi sebesar 2,74 persen dari target 2,18 persen. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, tingkat kemiskinan daerah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 3,84 persen dan nasional sebesar 8,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif kondisi kesejahteraan masyarakat daerah masih lebih baik dibandingkan wilayah yang lebih luas, meskipun upaya penurunan kemiskinan tetap perlu ditingkatkan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah, indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan realisasi sebesar 71,05 yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Indeks Konektivitas mencapai realisasi sebesar 84,16 dari target 84,86. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah telah berjalan cukup baik dalam mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas layanan infrastruktur.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



mencapai realisasi sebesar 78,20 dari target 71,39, yang berarti melampaui target yang ditetapkan serta lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi sebesar 75,73. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah telah berjalan dengan baik.

Pada sasaran menurunnya risiko bencana, indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan realisasi sebesar 75,66 yang jauh lebih baik dibandingkan target sebesar 117,31 serta lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 83,68. Mengingat semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat risiko yang lebih kecil, maka capaian ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan realisasi sebesar 75,96 dari target 83,95 sehingga masih memerlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Nilai SAKIP Daerah mencapai 71,16 atau melampaui target sebesar 70,01, namun masih berada di bawah capaian provinsi sebesar 82,96 sehingga diperlukan penguatan implementasi manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun Indeks Integritas mencapai nilai 78,18 dari target 80, yang meskipun belum mencapai target, namun masih berada di atas capaian provinsi sebesar 72,04. Hal ini menunjukkan bahwa integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sudah cukup baik.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital, indikator Indeks Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai realisasi sebesar 3,02 dari target 2,93. Capaian ini juga mendekati rata-rata nasional sebesar 3,12, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 3,63. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik menunjukkan capaian sebesar 4,66 dari target 4,54 dan lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi sebesar 4,56, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah telah berada pada kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan daerah telah melampaui target serta memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan capaian provinsi maupun nasional, khususnya pada aspek lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama prevalensi stunting, usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta penguatan tata kelola pemerintahan, agar kinerja pembangunan daerah dapat semakin meningkat dan sejalan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

G. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternatif solusi yang dilakukan

Terkait hasil atau realisasi capaian yang telah didapatkan harus dilakukan analisis atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja serta ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi atas capaian untuk peningkatan capaian kinerja di triwulan berikutnya.

Secara lebih rinci berikut disampaikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan ataupun penyebab kegagalan, atau



peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dapat diambil sebagaimana dibahas perindikator sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Capaian UHH Tahun 2025 sebesar 99,97 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target, menandakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pencapaian target indikator ini faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain.

Faktor Pendorong.

- Akses pelayanan kesehatan dasar semakin merata.
- Cakupan imunisasi tinggi.
- Penurunan AKI dan AKB.
- Tren penurunan stunting.
- Layanan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat.
- Edukasi gizi terus meningkat.
- Akses air minum layak meningkat.
- Meningkatnya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Pemeriksaan kesehatan rutin lansia meningkat.

Faktor Penghambat.

- Masih ada kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB)
- Akses layanan kesehatan belum merata di wilayah tertentu.
- Stunting masih terjadi di beberapa kecamatan.
- Kebiasaan merokok masih tinggi.



Alternatif solusi

- Penguatan layanan KIA di Puskesmas & Posyandu
- Penempatan tenaga bidan pada wilayah yang masih kekurangan.
- Audit maternal perinatal (AMP) wajib setiap kasus AKI/AKB.
- Peningkatan fasilitas Puskesmas dan Pustu di wilayah sulit akses
- Pelatihan kader agar mampu melakukan deteksi dini.
- Untuk daerah tertentu perlu melaksanakan pemantauan pertumbuhan anak balita setiap bulan, Pendampingan oleh Kader, PKK, dan Tenaga Pendamping Keluarga (TPK), Deteksi dini penyakit kronis pada balita.
- Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) secara konsisten.
- Kampanye di media sosial & media lokal Kabupaten Banjar.
- Imunisasi dasar lengkap.

2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek).

Capaian indikator Prevalensi Stunting sebesar 76,92 persen menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting belum optimal dan masih menjadi tantangan utama. Berikut adalah faktor pendorong, penghambat dan alternatif solusi dalam pencapaian target Prevalensi Stunting:

Faktor Pendorong.

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menangani stunting, yang



ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan program terstruktur.

- Adanya dukungan regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas Stunting (KAWAN MANIS BEST), serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi payung hukum.
- Makin meratanya tenaga bidan disemua desa, dan sudah banyak yang tersertifikasi pelatihan Asuhan Persalinan Normal.
- Adanya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, yang ditandai dengan peluncuran inovasi seperti GEOLASTING (Geospasial untuk Percepatan Penurunan Stunting) dan penguatan sinergi/kerja sama antara Dinas Kesehatan, Bappedalitbang, Dinsos P3AP2KB, SKPD terkait lainnya, hingga TNI-Polri.
- Pelaksanaan program intervensi spesifik secara serentak, seperti pemantauan status gizi balita, pemberian tablet Fe, dan menjaga 1000 hari kehidupan (dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun).
- Kegiatan sosialisasi dan pendidikan kesehatan, termasuk pengenalan program "Isi Piringku", yakni pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dalam mengampanyekan konsumsi



makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Faktor Penghambat.

- Adanya kesulitan dalam akses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak, terutama di daerah tertentu seperti Kecamatan Aluh-aluh (disebutkan memiliki angka stunting tertinggi karena faktor ini).
- Tingkat pemahaman masyarakat tentang pencegahan stunting yang masih rendah (dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ekonomi).
- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk pengelolaan air limbah domestik.

Alternatif Solusi

- Penyediaan akses dasar, dengan mempercepat penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga berisiko stunting, khususnya di daerah prioritas.
- Mendorong program pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur/buah dan memelihara ikan melalui edukasi dan bantuan stimulan, terutama di daerah yang kesulitan akses pangan bergizi.
- Mendorong program pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur/buah dan memelihara ikan melalui edukasi dan bantuan stimulan, terutama di daerah yang kesulitan akses pangan bergizi.
- Mengaktifkan peran relawan KAWAN MANIS BEST di tingkat desa sebagai ujung tombak pendampingan keluarga berisiko stunting.



- Memperkuat sistem pendataan (melalui EPPGBM dan Satu Data Kabupaten Banjar) agar data prevalensi dan keluarga berisiko lebih akurat, serta menyusun sistem evaluasi program yang terstruktur dan berkala.
- Memastikan ketersediaan dan kalibrasi alat ukur stunting (seperti timbangan dan stadiometer) di semua Posyandu, termasuk dengan mekanisme pinjam pakai antar Posyandu/Puskesmas.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Realisasi RLS Tahun 2025 mencapai 100,37 persen, melampaui target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain.

Faktor Pendorong.

- Akses terhadap layanan pendidikan yang cukup baik.
- Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung seperti Wajib belajar 12 tahun (Program Indonesia Pintar), Bantuan Operasional Sekolah, program beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya.
- Meningkatnya kesadaran dan dukungan orang tua tentang pentingnya pendidikan.
- Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga.

Faktor Penghambat.

- Tidak tersedia sekolah lanjutan di wilayah terpencil atau pedesaan.



- Kualitas dan kemampuan guru yang masih belum merata.
- Tidak semua siswa miskin terjangkau program pendidikan seperti PIP atau BOS.
- Kurangnya pengawasan terhadap distribusi program pendidikan.

Alternatif solusi

- Menyediakan beasiswa khusus untuk biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pokok siswa yang harus sekolah ke luar desa/kecamatan.
- Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C).
- Peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, dengan pelatihan dan workshop rutin serta mendorong guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Guru Penggerak yang digagas oleh Kemendikbudristek.
- Pemetaan dan validasi data siswa miskin dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan mandiri sekolah.

4. Harapan Lama Sekolah

Capaian HLS sebesar 99,85 persen menunjukkan bahwa ekspektasi lama pendidikan penduduk hampir sepenuhnya tercapai. Untuk pelaksanaan pencapaian target indikator ini faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain.

Faktor Pendorong

- Adanya peningkatan pendapatan atau ekonomi keluarga.



- Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- Makin meningkatnya pemerataan sarana pendidikan.
- Adanya berbagai program bantuan pendidikan seperti beasiswa, BOS, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Faktor Penghambat.

- Perkawinan dini yang menghambat kelanjutan pendidikan remaja, khususnya perempuan.
- Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga anak-anak kehilangan minat belajar.

Alternatif solusi

- Perlunya pendidikan orang tua tentang dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.
- Perlunya peran organisasi kepemudaan dan perempuan dalam memotivasi anak perempuan untuk mengejar cita-cita.
- Kurikulum perlu diadaptasi dengan kebutuhan dan potensi lokal.
- Terapkan assessment berbasis kompetensi bukan hanya hafalan.

5. Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalan.

Pada Tahun 2025, capaian indikator ini adalah sebesar 98,98 persen, Secara kualitatif, sektor non-pertambangan tetap menunjukkan potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah, namun dominasi



sektor pertambangan masih memengaruhi struktur ekonomi Kabupaten Banjar. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat, dan alternatif solusi dalam mencapai target indikator Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Banjar

Faktor Pendorong

- Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan memiliki kontribusi besar dan menyerap tenaga kerja lokal. Kegiatan ekonomi harian masyarakat lebih banyak berasal dari sektor non-pertambangan.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan melalui penguatan sektor produktif non-ekstraktif.
- Meningkatnya jumlah UMKM, khususnya di sektor perdagangan, kuliner, dan jasa.
- Dukungan permodalan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran oleh pemerintah daerah.

Faktor Penghambat.

- Kontribusi sektor pertambangan yang sangat besar menyebabkan sektor lain relatif tertinggal secara struktur ekonomi.
- Produk pertanian dan perikanan masih didominasi bahan mentah.
- Kualitas SDM di sektor non-pertambangan belum merata, terutama di wilayah perdesaan.



- Daya saing produk lokal terhadap produk luar daerah masih perlu ditingkatkan.

Alternatif Solusi

- Mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- Fasilitasi kemitraan antara petani, nelayan, UMKM, dan industri.
- Penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif bagi investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
- Penajaman program OPD agar berorientasi pada peningkatan kontribusi sektor non-pertambangan.

6. Tingkat Kemiskinan

Capaian Tingkat Kemiskinan sebesar 79,56 persen menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan belum tercapai secara optimal. Berikut adalah faktor pendorong, penghambat dan alternatif solusi dalam pencapaian target Tingkat Kemiskinan:

Faktor Pendorong

- Adanya prioritas pengentasan kemiskinan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) yang mendorong konsistensi program lintas perangkat daerah.
- Adanya program bantuan sosial, jaminan sosial, serta intervensi pusat dan daerah (bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan) menjadi penopang daya beli masyarakat miskin.
- Adanya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, dimana peningkatan mutu dan kualitas Jalan, listrik, dan air bersih yang relatif baik mendukung



dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Faktor Penghambat

- Sebagian besar penduduk miskin bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan rentan terhadap gejolak ekonomi.
- Keterbatasan industri pengolahan dan usaha bernilai tambah menyebabkan peluang kerja berupah layak masih terbatas.
- Tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah membatasi daya saing tenaga kerja lokal.

Alternatif Solusi.

- Mendorong pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- Memperluas akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan pengendalian inflasi secara terpadu.

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI Tahun 2025 mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur daerah telah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

Faktor pendorong.

- Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Infrastruktur Dasar.



- Dukungan APBD serta pemanfaatan sumber pendanaan lain (DAK, bantuan provinsi, dan pusat) untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- Keterlibatan beberapa perangkat daerah teknis (DPUPR, Dinas Perhubungan, Disperkim dan LH, dan PD terkait lainnya) dalam pembangunan infrastruktur memberikan efek sinergi terhadap kualitas layanan publik.
- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan masukan terkait kondisi infrastruktur, sehingga menjadi bahan evaluasi langsung bagi pemerintah daerah.

Faktor Penghambat

- Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis beragam, termasuk daerah rawa dan wilayah terpencil, sehingga
- menyulitkan pemerataan layanan infrastruktur.
- Fokus pembangunan fisik belum sepenuhnya diimbangi dengan pemeliharaan rutin, sehingga beberapa infrastruktur cepat mengalami penurunan kualitas.
- Banjir, genangan air, dan kerusakan akibat cuaca ekstrem berdampak langsung terhadap fungsi infrastruktur dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan.

Alternatif Solusi.

- Mengarahkan program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayah dengan tingkat



layanan rendah, khususnya daerah perdesaan, terpencil, dan rawan bencana.

- Meningkatkan porsi anggaran dan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin agar kualitas layanan infrastruktur tetap terjaga dan berkelanjutan.
- Memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan infrastruktur, termasuk integrasi data dan informasi.
- Menjamin kualitas pelaksanaan survei IKLI melalui metode yang objektif, representatif, dan transparan sehingga hasil indeks mencerminkan kondisi riil layanan infrastruktur.

8. Indeks Konektivitas.

Capaian Indeks Konektivitas sebesar 99,18 persen menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan wilayah Kabupaten Banjar berada pada level sangat baik dan stabil. Berikut adalah faktor pendorong, penghambat dan alternatif solusi dalam pencapaian target Indeks Konektivitas di Kabupaten Banjar:

Faktor pendorong.

- Kabupaten Banjar memiliki posisi strategis sebagai daerah penghubung antarwilayah di Kalimantan Selatan, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten/kota, sehingga penguatan konektivitas menjadi kebutuhan dan prioritas pembangunan.
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Aksesibilitas. Peningkatan konektivitas wilayah telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah melalui pembangunan dan



peningkatan kualitas jalan, jembatan, serta prasarana transportasi.

- Tersedianya dukungan pendanaan yang cukup melalui APBD, DAK, serta
- bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam mendorong pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi.

Faktor Penghambat.

- Kondisi Geografis dan Topografi Wilayah.
- Wilayah Kabupaten Banjar yang terdiri dari daerah rawa, sungai, dan kawasan perdesaan terpencil menyebabkan pembangunan jaringan transportasi memerlukan biaya tinggi dan waktu lebih lama.
- Keterbatasan Infrastruktur Transportasi Umum.
- Layanan transportasi umum antar desa dan kecamatan masih terbatas, sehingga konektivitas belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Banjir dan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan, sehingga menurunkan tingkat konektivitas.
- Integrasi antara transportasi darat, sungai, dan simpul transportasi belum sepenuhnya terencana dan dikelola secara terpadu.

Alternatif Solusi.

- Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang adaptif terhadap kondisi banjir dan lingkungan rawa, termasuk peninggian badan jalan dan perbaikan sistem drainase.



- Mendorong pengembangan layanan transportasi umum perdesaan serta optimalisasi transportasi sungai sebagai alternatif konektivitas wilayah.
- Memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan penghubung desa– kecamatan serta akses menuju pusat pelayanan dan kawasan ekonomi produktif.
- Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam pembangunan jaringan transportasi strategis.
- Mengembangkan sistem pemantauan kondisi jalan, jembatan, dan layanan transportasi secara berkala untuk memastikan peningkatan konektivitas yang terukur dan berkelanjutan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IKLH Tahun 2025 mencapai 109,54 persen, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai hasil dari kebijakan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

Faktor pendorong.

- Adanya kebijakan dan regulasi lingkungan yang tegas.
- Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (RTRW).
- Kolaborasi lintas perangkat daerah dan lembaga lain dalam pengelolaan lingkungan.

Faktor penghambat.



- Sistem persampahan yang belum terintegrasi dan masih dominan open dumping.
- Kurangnya SDM ahli dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan.
- Data kualitas lingkungan (udara, air, lahan) tidak tersedia secara real-time atau berkala.

Alternatif Solusi

- Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi
- Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- Insentif bagi pengusaha dan masyarakat yang melakukan inovasi daur ulang.
- Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial tentang pemantauan kualitas udara, air, dan lahan.
- Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bidang lingkungan dan mengalokasikan rekrutmen CPNS atau PPPK berdasarkan kompetensi tersebut.
- Kolaborasi dengan lembaga seperti BMKG, BRIN, universitas, atau KLHK dalam memperoleh dan mengolah data lingkungan.

10. Indeks Risiko Bencana

Pada Tahun 2025, nilai IRB Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 75,66 jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan (semakin kecil semakin bagus), sehingga capaiannya sebesar 155,05 persen. Secara substantif, berbagai upaya mitigasi, penguatan BPBD, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat telah dilakukan, namun tingginya potensi bencana alam tetap menjadi faktor risiko struktural bagi Kabupaten Banjar.



Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

Faktor pendorong.

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengurangan risiko bencana melalui penguatan peran BPBD, penyusunan dokumen kebencanaan, serta pelaksanaan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
- Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kebencanaan.
- Tersusunnya dokumen perencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kajian risiko bencana, serta rencana kontinjensi menjadi dasar pengendalian risiko bencana secara terarah dan terukur.
- Sinergi antara BPBD, perangkat daerah teknis, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat memperkuat kapasitas daerah dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana.
- Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
- Edukasi kebencanaan dan pembentukan desa tangguh bencana meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kerentanan.

Faktor penghambat.

- Tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi.



- Kabupaten Banjar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, dan kebakaran hutan dan lahan, yang memengaruhi nilai risiko bencana secara keseluruhan.
- Kondisi geografis dan lingkungan yang rentan.
- Wilayah dengan topografi rendah, daerah aliran sungai, serta kawasan rawa meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan genangan.
- Keterbatasan peralatan, logistik, serta sistem peringatan dini di beberapa wilayah menghambat respons cepat saat terjadi bencana.
- Alih fungsi lahan, pembukaan kawasan permukiman di daerah rawan, serta kerusakan lingkungan memperbesar potensi dan dampak bencana.

Alternatif Solusi

- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir.
- Penyusunan dan sosialisasi regulasi tata ruang berbasis risiko bencana.
- Perluasan program Desa Tangguh Bencana (Destana).
- Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana secara rutin.
- Rehabilitasi daerah aliran sungai.
- Monitoring dan evaluasi risiko bencana secara berkala.

11. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian IPKD sebesar 90,48 persen menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah cukup baik namun belum optimal. Opini WTP dan pemanfaatan



SIPD menjadi faktor pendukung utama, sementara kualitas perencanaan, ketergantungan dana transfer, dan penyerapan anggaran yang belum merata masih memerlukan penguatan. Berikut adalah faktor pendorong, penghambat dan alternatif solusi dalam pencapaian target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah:

Faktor pendorong.

- Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perolehan opini WTP secara berkelanjutan menjadi indikator positif tata kelola keuangan dan mendorong peningkatan nilai IPKD.
- Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dengan penganggaran (KUA-PPAS dan APBD) mendorong efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
- Penggunaan aplikasi seperti SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang membantu integrasi perencanaan dan penganggaran.

Faktor penghambat.

- Kualitas perencanaan anggaran yang belum optimal.
- Masih terdapat ketidaktepatan dalam perencanaan program dan kegiatan, yang berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja.



- Ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dana transfer pusat membatasi fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Potensi PAD belum sepenuhnya tergali secara maksimal, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi.
- Penyerapan anggaran yang belum merata sepanjang tahun anggaran berpengaruh terhadap kinerja belanja dan nilai IPKD.

Alternatif Solusi

- Penguatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui pendekatan money follows program.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan PAD.
- Penguatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala.
- Pendampingan intensif bagi perangkat daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan rendah.
- Pelatihan teknis berkelanjutan bagi pejabat perbendaharaan dan perencana.

12. Nilai SAKIP.

Nilai SAKIP Tahun 2025 mencapai 101,64 persen, menandakan bahwa target kinerja telah tercapai dan sedikit melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi akuntabilitas dan



manajemen kinerja, meskipun konsistensi penerapan SAKIP sebagai alat manajemen strategis masih perlu diperkuat di seluruh perangkat daerah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

Faktor Pendorong

- Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mengawal usaha peningkatan implementasi SAKIP
- Adanya dukungan dari Kemenpan-RB dalam bentuk asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim SAKIP Kabupaten.

Faktor penghambat.

- Pada level Kabupaten pada tahun 2024, sempat terjadi penurunan skor sebesar 1,04 poin yang menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan indikator tertentu.
- Keterkaitan antara dokumen kinerja dengan penganggaran (money follows performance) belum sepenuhnya konsisten, sehingga capaian kinerja belum menjadi pertimbangan utama dalam alokasi anggaran.
- Terbatasnya SDM yang benar-benar memahami SAKIP, ditambah dengan mutasi pegawai dan beban kerja yang tinggi, berdampak pada inkonsistensi
- kualitas dokumen, keterlambatan penyampaian laporan, dan lemahnya analisis kinerja.



- Masih ada perangkat daerah yang memandang SAKIP sebagai kewajiban administratif (compliance), belum sebagai alat manajemen kinerja, sehingga implementasinya belum optimal.
- Belum seluruh perangkat daerah menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan perencanaan pemerintah daerah, melakukan penjenjangan kinerja secara lengkap, serta menyusun rencana aksi yang menjabarkan aktivitas pendukung sasaran kinerja beserta penanggung jawabnya.
- Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Alternatif Solusi.

- Melakukan telaah mendalam terhadap komponen yang mengalami penurunan nilai untuk mengidentifikasi indikator yang belum terpenuhi secara optimal.
- Mengoptimalkan fungsi TAPD dan Bappedalitbang untuk menilai kesesuaian antara target kinerja dengan alokasi anggaran dalam proses pembahasan anggaran (menggunakan capaian kinerja tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian anggaran tahun berikutnya)
- Penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
- Tim SAKIP memastikan setiap perangkat daerah telah menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah dengan tujuan



dan sasaran RPJMD serta RKPD, lalu melakukan penjenjangan kinerja secara lengkap, dan menyusun rencana aksi kinerja yang memuat aktivitas pendukung sasaran, target waktu, serta pejabat/pegawai penanggung jawab.

- Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk menggunakan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi program secara rutin termasuk sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- Mengintegrasikan pembahasan capaian kinerja dalam forum-forum manajemen, seperti rapat pimpinan, evaluasi triwulan, dan monitoring program prioritas.

13. Indeks Integritas.

Capaian Indeks Integritas sebesar 97,73 persen menunjukkan kinerja yang baik namun belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja iniantara lain:

Faktor pendorong.

- Adanya komitmen pimpinan daerah terhadap penguatan integritas dan pencegahan korupsi.
- Penguatan sistem berbasis elektronik (e-government) yang mengurangi interaksi tatap muka, sehingga meminimalisir peluang pungutan liar atau gratifikasi.
- Partisipasi aktif dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang memberikan panduan terukur bagi area intervensi rawan korupsi.



- Inspektorat Daerah berperan aktif dalam pengawasan, audit, reviu, serta pendampingan pengendalian intern dan manajemen risiko.
- Penyebaran baleho, spanduk, xbanner, pamphlet, video dan media sosial lainnya untuk mensukseskan SPI.

Faktor penghambat.

- Terbatasnya SDM di ITDA yang menangani SPI
- Lambatnya SKPD mengirimkan data responden.
- Responden yang menerima WA Blast malas untuk mengisi kuesioner
- Kurang validnya data responden.
- Responden yang mengisi tidak berdasarkan penilaian objektif.

Alternatif Solusi.

- Menetapkan Tim SPI lintas perangkat daerah melalui SK Kepala Daerah, dengan melibatkan Inspektorat, Bagian Organisasi, Diskominfo, dan OPD terkait sebagai support system.
- Mengaitkan ketepatan pengiriman data responden dengan penilaian kinerja perangkat daerah.
- Melakukan verifikasi dan pembersihan data (data cleaning) sebelum survei, termasuk validasi nomor dan identitas responden.
- Menyusun pertanyaan kuesioner yang spesifik, berbasis pengalaman layanan, dan menghindari pertanyaan yang terlalu umum atau subjektif.



- Mengedukasi masyarakat bahwa SPI adalah sarana evaluasi integritas dan bukan instrumen pengaduan langsung.
- Melaksanakan pelatihan antikorupsi dan etika jabatan secara rutin, khususnya bagi pejabat struktural dan pengambil kebijakan.

14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian SPBE Tahun 2025 sebesar 97,95 persen menunjukkan bahwa implementasi SPBE hampir mencapai target. Nilai yang digunakan merupakan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena pada 2025 tidak dilakukan penilaian nasional seiring transformasi kebijakan SPBE menjadi Pemerintah Digital. Tantangan utama masih terletak pada konsistensi implementasi dan keterbatasan SDM TIK. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor pendorong.

- Adanya komitmen dan dukungan kuat dari pimpinan dalam percepatan penerapan SPBE, termasuk kebijakan digitalisasi layanan dan administrasi pemerintahan.
- Adanya regulasi nasional tentang SPBE menjadi landasan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan arsitektur, peta rencana, dan layanan digital pemerintahan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses perencanaan, penganggaran, kepegawaian, dan layanan publik berbasis



elektronik berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai SPBE.

- Jaringan internet, perangkat keras, dan pusat data daerah secara bertahap telah tersedia dan mendukung implementasi aplikasi pemerintahan.

Faktor penghambat.

- Kebijakan, standar, dan pedoman teknis SPBE belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah.
- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM TIK berdampak pada pemeliharaan sistem, keamanan informasi, dan inovasi layanan digital.
- Sebagian aplikasi belum sepenuhnya user-friendly dan belum diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.
- Sebagian pelayanan publik yang masih berbasis manual dan belum terintegrasi secara digital.

Alternatif Solusi.

- Menyempurnakan dan menegaskan kebijakan SPBE daerah (Perkada/SK Kepala Daerah) sebagai acuan wajib seluruh perangkat daerah.
- Melaksanakan evaluasi rutin terhadap kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan standar SPBE, disertai tindak lanjut perbaikan.
- Melaksanakan pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan sertifikasi bidang TIK bagi ASN pengelola SPBE.
- Mengoptimalkan kerja sama dengan instansi lain, perguruan tinggi, dan penyedia layanan TIK untuk



mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem.

- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan aplikasi dengan melibatkan pengguna layanan sebagai masukan utama.
- Menetapkan layanan prioritas untuk didigitalisasi berdasarkan volume layanan dan dampak kepada masyarakat.
- Mengembangkan portal layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik lintas perangkat daerah.

15. Indeks Pelayanan Publik

IPP Tahun 2025 mencapai 102,64 persen, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target dari indikator Indeks Pelayanan Publik.

Faktor pendorong.

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Biro Organisasi Provinsi Kalsel sebagai Pembina Kabupaten
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan KemenPANRB selaku evaluator
- Komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kerjanya
- Komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjar



- Keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Banjar
- Pengawasan internal yang dilaksanakan dengan rutin.

Faktor penghambat.

- Belum semua perangkat daerah mengetahui mekanisme Penilaian Indeks Pelayanan Publik
- Penilaian Mandiri belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan SDM di Bagian Organisasi
- Infrastruktur dan Fasilitas yang Tidak Memadai di Perangkat Daerah
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah terkait pelayanan serta Rendahnya motivasi kerja dan disiplin pegawai
- Kurangnya integrasi sistem pelayanan dan Belum Optimalnya Digitalisasi Pelayanan
- Anggaran dan Pendanaan yang Terbatas dan tidak diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas, pelatihan SDM, atau digitalisasi.
- Kurangnya inovasi pada pelayanan karena ketidakmampuan melihat permasalahan dan mencari solusi dari pelayanan yang diberikan.

Alternatif Solusi

- Sosialisasi lebih intens kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait mekanisme Penilaian Indeks Pelayanan Publik, tidak hanya Perangkat Daerah yang menjadi lokus evaluasi



- Melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap kualitas Pelayanan Publik di Perangkat Daerah dan berkolaborasi dengan Inspektorat
- Meningkatkan anggaran untuk Infrastruktur dan Fasilitas bagi Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria sarana dan prasarana yang harus dimiliki Pemberi Layanan.
- Meningkatkan anggaran untuk pemberian pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme SDM.

H. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja dengan tingkat realisasi anggaran pada perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator tersebut.

Dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya khususnya dalam membandingkan antara capaian indikator sasaran strategis yang diperjanjikan oleh Kepala Daerah dengan capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah penanggung jawab dapat dilihat pada tabel dibawah:

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (persen)	Pagu	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,89	73,87	99,97	244.145.111.914	218.417.831.442	89,46
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	20	26,35	75,9	120.293.270.155	118.334.077.175	98,37



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (persen)	Pagu	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,12	8,15	100,37	189.419.809.761	173.948.689.726	91,83
		Harapan Lama Sekolah	13,07	13,05	101,49	189.419.809.761	173.948.689.726	91,83
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	80	81,09	98,98	33.752.993.489	28.187.060.224	83,51
4	Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	2,18	2,74	79,56	488.673.019.460	461.358.788.159	94,41
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	71,05	71,05	100	411.922.449.122	375.625.839.197	91,19
		Indeks Konektivitas	84,86	84,16	99,18	233.675.737.735	210.379.401.662	90,03
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,39	78,2	109,54	64.082.116.851	57.812.091.680	90,22
7	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	117,31	75,66	155,05	5.727.938.350	4.395.157.393	76,73
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	83,95	75,96	90,48	241.082.888.992	219.309.582.537	90,97
		Nilai SAKIP Daerah	70,01	71,16	101,64	503.447.853.035	450.705.190.926	89,52
		Indeks Integritas	80	78,18	97,73	1.880.763.000	930.223.444	49,46
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,93	3,02	103,07	21.170.562.093	19.914.987.333	94,07
		Indeks Pelayanan Publik	4,54	4,66	102,64	58.289.128.442	54.306.935.145	93,17

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja strategis dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara cukup efisien, dimana capaian kinerja yang optimal dapat diraih tanpa harus merealisasikan seluruh pagu anggaran yang tersedia. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan program, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa

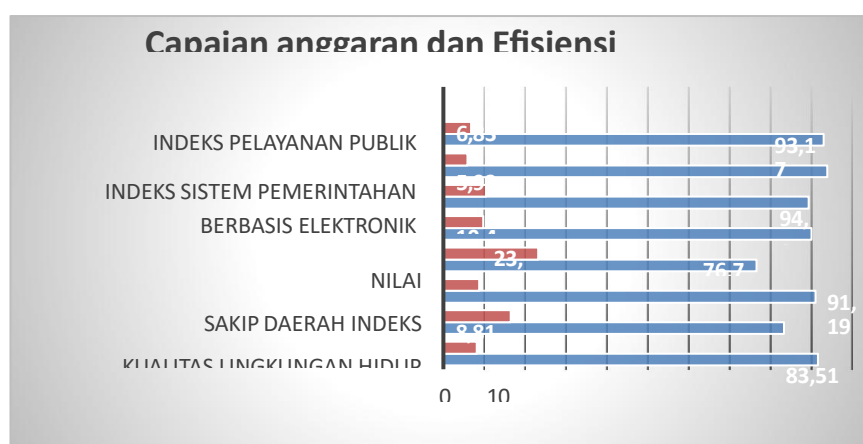


pengelolaan anggaran telah memperhatikan prinsip value for money, yaitu penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara singkat efesiensi anggaran dapat dilihat dapat tabel berikut, yang menampilkan indikator kinerja dengan capaian kinerja seratus persen keatas:

EFISIENSI ANGGARAN ATAS CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (persen)	Jumlah Efisiensi	Tingkat Efisiensi (persen)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	189.419.809.761	173.948.689.726	91,83	15.471.120.035	8,17
2	Meningkatnya produktivitas ekonomi	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	33.752.993.489	28.187.060.224	83,51	5.565.933.265	16,49
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	411.922.449.122	375.625.839.197	91,19	36.296.609.925	8,81
4	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	5.727.938.350	4.395.157.393	76,73	1.332.780.957	23,27
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.082.116.851	57.812.091.680	90,22	6.270.025.171	9,78
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Nilai SAKIP Daerah	503.447.853.035	450.705.190.926	89,52	52.742.662.109	10,48
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	21.170.562.093	19.914.987.333	94,07	1.255.574.760	5,93
		Indeks Pelayanan Publik	58.289.128.442	54.306.935.145	93,17	3.982.193.297	6,83





Pada sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, indikator Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp173,95 miliar dari pagu Rp189,42 miliar atau sebesar 91,83 persen, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp15,47 miliar atau sekitar 8,17 persen. Efisiensi ini bermakna bahwa peningkatan akses dan capaian pendidikan masyarakat dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pendidikan telah dilaksanakan secara cukup optimal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga mampu menghasilkan output yang diharapkan tanpa memerlukan seluruh alokasi anggaran.

Pada sasaran meningkatnya produktivitas ekonomi, indikator kontribusi sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp28,19 miliar dari pagu Rp33,75 miliar atau sebesar 83,51 persen. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5,57 miliar atau sekitar 16,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan struktur ekonomi daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, bahwa peningkatan aktivitas ekonomi non-pertambangan tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi anggaran pemerintah, melainkan juga didukung oleh dinamika ekonomi masyarakat. Maknanya, peran pemerintah dalam mendorong produktivitas ekonomi telah cukup efektif sebagai katalis, sehingga tidak memerlukan pembiayaan yang besar untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah, indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp375,63 miliar dari pagu Rp411,92 miliar atau sebesar 91,19



persen, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp36,30 miliar atau sekitar 8,81 persen. Efisiensi ini mengandung makna bahwa penyediaan dan peningkatan layanan infrastruktur telah mampu dilakukan secara optimal dengan pengelolaan anggaran yang cukup terkendali. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, baik dari sisi perencanaan teknis maupun pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pada sasaran menurunnya risiko bencana, indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Dari pagu anggaran sebesar Rp5,73 miliar, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp4,40 miliar atau sebesar 76,73 persen. Hal ini menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,33 miliar atau sekitar 23,27 persen. Tingginya tingkat efisiensi ini bermakna bahwa upaya pengurangan risiko bencana dapat dicapai secara sangat optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh efektifnya strategi mitigasi berbasis non-struktural, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data dan informasi kebencanaan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp57,81 miliar dari pagu Rp64,08 miliar atau sebesar 90,22 persen, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp6,27 miliar atau sekitar 9,78 persen, ini menunjukan upaya pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan secara efektif dengan dukungan anggaran yang tidak berlebihan, serta adanya kontribusi dari faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas lingkungan.



Pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, indikator Nilai SAKIP Daerah menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp450,71 miliar dari pagu Rp503,45 miliar atau sebesar 89,52 persen. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp52,74 miliar atau sekitar 10,48 persen, efisiensi ini bermakna bahwa penguatan sistem akuntabilitas kinerja tidak sepenuhnya membutuhkan tambahan anggaran yang besar, melainkan lebih bergantung pada perbaikan sistem, komitmen pimpinan, serta peningkatan kualitas manajemen kinerja di perangkat daerah.

Selanjutnya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp19,91 miliar dari pagu Rp21,17 miliar

atau sebesar 94,07 persen, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,26 miliar atau sekitar 5,93 persen. Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp54,31 miliar dari pagu Rp58,29 miliar atau sebesar 93,17 persen, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3,98 miliar atau sekitar 6,83 persen, efisiensi pada kedua indikator ini bermakna bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital telah berjalan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien, meskipun masih memerlukan investasi berkelanjutan untuk pengembangan sistem, integrasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran telah terjadi pada hampir seluruh sasaran strategis dengan tingkat yang bervariasi. Efisiensi tertinggi terdapat pada sektor penanggulangan bencana dan



produktivitas ekonomi, sementara sektor pelayanan publik berbasis digital menunjukkan efisiensi yang relatif moderat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola sumber daya secara cukup optimal, serta telah mengarah pada penerapan prinsip value for money, dimana setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

I. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh program/kegiatan sebagai alat atau sarana mencapai tujuan sesuai target yang ditetapkan, untuk itu harus dilakukan analisis atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tercapai tidaknya target kinerja. Berikut dijabarkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja:

1. Usia Harapan Hidup.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan 4 program, yakni:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program- program diatas antara lain, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan



Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB), Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, Pengelolaan



Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2. Pravalensi Stunting

Ada dua Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara langsung atas pencapaian target pada indikator ini yakni Dinas Kesehatan, dan DinsosP3AP2KB. Untuk usaha pencapaian target ini didukung dengan pelaksanaan beberapa program yakni:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program- program diatas antara lain:

- Pada Dinas Kesehatan dilaksanakan Kampanye pemberian Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil, Kampanye pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, kampanye pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin, skrining Hb pada remaja putri, kelas baduta canting, kelas ibu hamil, orientasi antropometri bagi kader posyandu, orientasi pemantauan cakupan layanan intervensi spesifik bagi kaderposyandu, pelatihan SDIDTK, Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang, peningkatan cakupan imunisasi (imunisasi kejar), Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan sehat di



semua tatatan masyarakat, rujukan stunting secara berjenjang dan konsultasi melalui telemedicine, Advokasi kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program-program pencegahan stunting, Pemberian PKMK (pangan untuk keperluan Medis Khusus) bagi Baduta Stunting.

- Pada DinsosP3AP2KB dilaksanakan berbagai kegiatan Operasional Pencatatan hasil Pemantauan Pendampingan sasaran berisiko stunting, Operasional Pendampingan dengan sasaran catin, keluarga berisiko stunting, Rapat Koordinasi Stunting, Rapat Teknis TP3S, Pra Audit Kasus Stunting, Rembuk Stunting.

3. Rata-Rata Lama Sekolah.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan 3 program, yakni:

- Program Pengelolaan Pendidikan.
- Program Pengembangan Kurikulum.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas antara lain melakukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sosialisasi, pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.

4. Harapan Lama Sekolah.

Pada Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab atas indikator kinerja ini, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian targetnya adalah:

- Program Pengelolaan Pendidikan.
- Program Pengembangan Kurikulum.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



Untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan melalui media sosial, kunjungan ke sekolah-sekolah dengan melibatkan orang tua siswa dan beberapa kegiatan lainnya.

5. Kontribusi Seluruh Sektor PDRB di Luar Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan berbagai program yakni sebagai berikut:

- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah:

- Program Penyuluhan Pertanian.
Mendampingi dalam penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat desa dan kecamatan, melaksanakan rapat/konsultasi/pelatihan pada 20 BPP Kecamatan, mendorong/mengikutsertakan para penyuluh PNS/P3K untuk mengikuti pelatihan ditingkat kabupaten atau provinsi, Bimtek peningkatan kapasitas kelompok tani, penumbuhan dan pengembangan petani, Fasilitasi pendampingan peningkatan KEP, Rembug Utama KTNA, Revitalisasi kelompok tani, Temu petani milenial, Pengelolaan simluhtan dan fasilitasi Kostratani
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
Sosialisasi pengumpulan data, sekunder, dan pengambilan data awal, Pelaksanaan pemetaan bersama surveyor, Expose dokumen hasil dari pemetaan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, penyusunan data sebaran infrastruktur prasarana pertanian di Kecamatan Martapura, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani, pembangunan pintu air pada beberapa kecamatan, renovasi fisik BPP, pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan rehab/pemeliharaan rumah potong unggas, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani, renovasi Puskesmas, pembangunan irigasi perpompaan peternakan, Sosialisasi pengawasan wilayah sumber bibit



ternak dan rumpun/galur ternak pada beberapa Kecamatan.

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Bantuan pupuk, bantuan hibah alat dan mesin pertanian (alsintan), pelaksanaan gerakan tanam dan gerakan panen komoditas tanaman pangan, memberikan pinjaman pakai alsintan kepada kelompok tani, Penyediaan benih padi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat/mesin/bangunan pengolahan kopi, penyediaan benih bersertifikat hortikultura Melaksanakan pendataan harga pasar (PIP), rekap data sampel stok gabah dan beras, Melaksanakan Monitoring Alat dan Mesin pasca panen tanaman pangan berupa combine harvester, perontok padi, rice milling unit. untuk perbanyak perbenihan/perbibitan pangan

- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pengadaaan insektida, pengadaan petrocum untuk gerakan pengendalian OPT, sosialisasi pembuatan pestisida nabati, penyaluran bantuan bahan pengendali serangan penyakit pada tanaman, monitoring rutin pengamatan serangan penyakit pada tanaman perkebunan karet berupa pestisida nabati anti kering alur sadap (ANKAS) dan Agensia Hayati Trichoderma untuk mengendalikan penyakit ular tanah, Pembersihan sungai atau saluran air yang kurang lancar, monitoring dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan), dan program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura, bimtek



peningkatan kapasitas petugas brigade kebakaran lahan dan kebun Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), sosialisasi dan koordinasi Kelompok Tani Peduli API (KTPA), monitoring sistem sarana dan prasarana kebakaran lahan dan kebun diperusahaan di Kabupaten Banjar, patroli kebakaran lahan dan kebun di wilayah rawan kebakaran, koordinasi dengan Kelompok tani Peduli Api (KTPA), sosialisasi pengolahan lahan tanpa bakar.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Meningkatkan populasi ternak adalah Inseminasi Buatan (IB) atau disebut juga dengan kawin suntik, pembinaan kelompok ternak, pemeriksaan kebuntingan, vaksinasi PMK, pembagian desinfektan dan vitamin untuk unggas, Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dengan target penyakit Avian Influenza, Penyakit Mulut dan Kuku, Lumpy Skin Disease (LSD), melaksanakan pengawasan penyakit hewan, pemeriksaan laboratorium klinik hewan, Pelayanan Keliling Klinik Hewan Kawanku Bungas “LAKIKU BUNGAS”, pemantauan dan pemeriksaan post mortem hewan Qurban dan hewan untuk Haul Guru Sekumpul.

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Untuk tiga program diatas secara umum aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pemberian bantuan 39 unit alat tangkap kepada 39 nelayan, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan



Pembiayaan, Kemitraan Usaha, memberikan rekomendasi Pengajuan Buku kapal Perikanan (BKP) melalui sistem digital seperti SIPALKA ONLINE dan BKP sebagai syarat Pengajuan Pembuatan Pas Kecil.

- Program Pengembangan Ekspor, dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
Melaksanakan pameran dagang, misi dagang, promosi produk unggulan, serta fasilitasi kemitraan dengan retail dan marketplace.
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
Melakukan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi IKM (halal, PIRT, TKDN, kemasan standar) serta peningkatan kompetensi SDM industri.
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi data industri, serta pemantauan kepatuhan pelaporan perusahaan melalui SIINAS.
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
Dengan mendukung pengelolaan dan pemanfaatan pasar rakyat melalui penyediaan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
Penyusunan kebijakan berbasis data, Pengembangan event dan festival daerah, Penguatan atraksi wisata unggulan, Pengemasan produk wisata tematik, Pengembangan wisata berbasis kearifan lokal, Inovasi produk wisata.
- Program Pemasaran Pariwisata.
Promosi destinasi wisata, Pengembangan branding pariwisata daerah, Pemasaran digital dan media sosial,



Partisipasi pameran pariwisata, Kerja sama dengan travel agent dan investor.

- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Mendorong diversifikasi produk wisata dan pelibatan pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi promosi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

6. Tingkat Kemiskinan

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah antara lain:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- Program Hubungan Industrial
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Kawasan Permukiman
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Penataan Desa



- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pengembangan UMKM.
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pengembangan Perumahan.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa.
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program di atas dalam mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis antara lain adalah:

- Pembinaan atlet daerah, Penyelenggaraan kejuaraan/kompetisi olahraga, Partisipasi dalam event olahraga tingkat provinsi/nasional.
- Fasilitasi kerja sama antar desa, Penyusunan perjanjian kerja sama desa, Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kerja sama desa.
- Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pembinaan perusahaan dan pekerja terkait ketenagakerjaan, Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, Pembentukan dan penguatan lembaga hubungan industrial.
- Pelayanan penempatan tenaga kerja (AK1, job matching), Fasilitasi job fair/bursa kerja, Penempatan tenaga kerja



dalam dan luar daerah, Kerja sama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja.

- Pemeriksaan kesehatan koperasi, audit dan pengawasan koperasi, pembinaan kepatuhan terhadap regulasi koperasi, penanganan koperasi bermasalah.
- Melakukan pendataan dan penyusunan basis data, fasilitasi kemudahan perizinan, pembinaan manajemen usaha, fasilitasi kemitraan dan akses permodalan, serta fasilitasi sertifikasi (PIRT, halal, HKI, dan lainnya). Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- Peningkatan akses pemasaran, penguatan produksi dan pengolahan, serta pengembangan usaha mikro agar mampu naik kelas menjadi usaha kecil. Intervensi ini berkontribusi terhadap peningkatan omzet dan perluasan akses pasar usaha mikro.
- Penyediaan pelayanan perizinan, pemantauan pelayanan perizinan, koordinasi dan sinkronisasi dalam kemudahan pemberian pelayanan perizinan, pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan serta pengolahan dan publikasi data dan informasi.
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Fasilitasi kegiatan lembaga adat, Penguatan peran masyarakat hukum adat, Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial.
- Pemberian bantuan sosial yang bersifat stimulan, pembinaan dan pendampingan sosial kepada PPKS seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengakses layanan dasar,



serta mengembangkan potensi diri sehingga mampu berfungsi secara mandiri di lingkungan masyarakat.

- Menyusun rencana dan strategi dalam pencapaian IKD, koordinasi dengan SKPD, lintas sektor dan lembaga terkait dalam pencapaian IKD, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator IKD secara berkala.
- Pendataan dan identifikasi kondisi rumah masyarakat guna mengetahui tingkat kelayakan hunian, selain itu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan melalui proses evaluasi dan penerbitan perizinan pembangunan agar pembangunan rumah memenuhi ketentuan tata ruang serta standar teknis bangunan gedung.
- Pemantauan harga dan stok, pelaksanaan operasi pasar, serta koordinasi peningkatan aksesibilitas barang pokok. Pengawasan pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas distribusi.

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan Program:

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Program Penyelenggaraan Jalan.
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Kawasan Permukiman



- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Adapun untuk aktivitas yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan diatas khususnya terkait pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah:

- Penyusunan kajian tematik pembangunan daerah.
- FGD dan konsultasi publik hasil kajian.
- Pengembangan basis data riset dan inovasi daerah.
- Peningkatan kapasitas dan struktur jalan.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan rusak.
- Pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
- Penataan kawasan permukiman padat/kumuh.
- Penataan ruang terbuka publik.
- Pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan.
- Pembangunan saluran drainase lingkungan.
- Rehabilitasi dan normalisasi drainase.
- Pembersihan dan pemeliharaan saluran.
- Pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan.
- Penyediaan penerangan jalan lingkungan (PJU).
- Penyediaan TPS, sanitasi, dan utilitas dasar.
- Penataan dan peningkatan fasilitas umum perumahan.
- Pembangunan prasarana permukiman terpadu.
- Penataan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
- Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- Penyediaan dan pemeliharaan rambu, marka, APILL.
- Pengawasan dan pengendalian lalu lintas.



8. Indeks Konektivitas.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan program:

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran.

Adapun aktivitas yang dilaksanakan pada program diatas antara lain:

- Pemeliharaan rutin jalan (pembersihan, penutupan lubang, pengecatan marka jalan).
- Rehabilitasi dan peningkatan jalan (overlay aspal, pelebaran, perbaikan struktur).
- Pembangunan jalan baru untuk membuka akses wilayah.
- Pemasangan rambu dan marka jalan untuk keselamatan.
- Pembersihan saluran drainase dari sampah dan sedimentasi.
- Perbaikan gorong-gorong dan inlet/outlet drainase.
- Monitoring debit dan kapasitas saluran.
- Manajemen lalu lintas (pengaturan lampu lalu lintas, rekayasa jalan, jalur khusus).
- Pengawasan angkutan umum (izin trayek, uji kendaraan, pengendalian tarif).
- Penyediaan fasilitas pendukung (halte, terminal, parkir).
- Peningkatan keselamatan transportasi (kampanye tertib lalu lintas, penegakan aturan).
- Pemeliharaan pelabuhan dan dermaga.



- Pengaturan lalu lintas kapal di sungai, laut, atau perairan darat.
- Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan.
- Pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang bertindak sebagai penanggung jawab atas indikator kinerja ini, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian targetnya adalah:

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas antara lain:

- Penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- Sosialisasi Proklamasi Kabupaten.
- Pembuatan Dokumen Rencana Aksi Daerah.
- Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PROPER.
- Penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup.
- Sosialisasi Kewajiban Pembuatan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).



- Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Sumber Pencemar Institusi dan non Institusi.
- Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- Sosialisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pemeliharaan Taman dan jalur hijau pada dalam dan luar kota.
- Pemeliharaan Tugu dan Properti RTH Lainnya.
- Sosialisasi Tentang Pengelolaan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha
- Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Perda MHA.

10. Indeks Risiko Bencana.

Program yang digunakan untuk mencapai target pada indikator ini adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan aktivitas aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan Sosialisasi dan edukasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat desa/kelurahan rawan.
- Melakukan kerjasama antar lembaga/stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana.
- Penguatan desa tangguh bencana (Destana).
- Pemasangan rambu, papan informasi, dan jalur evakuasi bencana.
- Pembentukan dan pembinaan tenaga kebencanaan.
- Penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan logistik kebencanaan.
- Apel kesiapsiagaan dan pengecekan personel serta sarana prasarana.
- Penyusunan rencana kontinjensi ditingkat desa



- Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.

11. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan aktivitas sebagai berikut:

- Perencanaan & Penganggaran.
- Penyusunan RKPD secara tepat waktu dan sesuai regulasi.
- Menjaga konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
- Verifikasi RKA OPD agar sesuai dengan SIPD.
- Penyampaian dokumen rancangan APBD tepat waktu ke DPRD.
- Penyampaian dokumen rancangan APBD tepat waktu ke DPRD.
- Penatausahaan & Akuntansi.
- Melakukan pencatatan transaksi keuangan secara berkala dan akurat.
- Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP.
- Melakukan rekonsiliasi rutin antara Perangkat Daerah dan BUD.
- Memonitor realisasi anggaran agar efisien dan efektif.
- Pelaksanaan Anggaran.
- Percepatan proses pengadaan barang/jasa.
- Monitoring progres fisik dan keuangan program kegiatan.
- Penyerapan anggaran secara terencana (tidak menumpuk di akhir tahun).



- Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan SIRUP dan e-procurement.
- Pengawasan Internal & Kepatuhan.
- Pelaksanaan review RKA & DPA oleh APIP.
- Pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK/APIP.
- Audit internal berkala pada OPD.
- Evaluasi risiko dan pengendalian intern (SPIP).
- Publikasi dokumen perencanaan & laporan keuangan pada website resmi.
- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu ke BPK.
- Transparansi & Pelaporan.
- Publikasi dokumen perencanaan & laporan keuangan pada website resmi.
- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu ke BPK.
- Updating data pada SIPD, OM SPAN, dan aplikasi pemantauan lainnya.

12. Nilai SAKIP Daerah.

Pada Bappedalitbang, Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab atas indikator kinerja ini, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian targetnya adalah:

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program di atas antara lain:



- Melakukan Desk membahas pokir kabupaten dan perangkat Daerah bersama narsum yang lebih memahami CSF (Kemenpan RB dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan SAKIP A (Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
- Melakukan pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah untuk perbaikan dan mengidentifikasi penyebab pencapaian tujuan organisasi
- Menambahkan fitur penyusunan pohon kinerja pada aplikasi simondelev
- Membuat surat terkait penyusunan rencana aksi yang memuat dukungan program/kegiatan/sub kegiatan teknis yang mendukung pencapaian sasaran/kinerja utama yang telah diverifikasi oleh Kemenpan
- melakukan pendampingan bagi perangkat daerah untuk melaporkan kinerja melalui aplikasi SIMONDALEV secara berkala
- Pemberian Reward dan Punishment berdasarkan pengukuran kinerja kepada Perangkat Daerah.
- Melakukan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- Mendampingi dan memberikan asistensi pada Perangkat Daerah dalam menyusun laporan kinerja triwulanan dan LKjIP.
- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aturan penulisan dan format sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.
- Mengawal dan memastikan semua Perangkat Daerah menyampaikan laporan kinerja (LKjIP) tepat waktu pada aplikasi esr Menpan.
- Melaksanakan pengawasan kinerja.
- Melaksanakan evaluasi AKIP



- Melaksanakan Pekan Konsultasi (triwulanan).

13. Indeks Integritas

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan program:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas antara lain:

- Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2024.
- Melakukan evaluasi dan pendampingan penerapan SPIP di perangkat daerah.
- Melaksanakan audit kepatuhan, audit kinerja, serta reviu laporan keuangan dan perencanaan.
- Bekerja sama dengan KPK, BPKP, Ombudsman, maupun lembaga lain terkait penguatan integritas.
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan (whistleblowing system, kanal aduan).

14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan 4 program, yakni :

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Adapun kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada program-program diatas antara lain:



- Menyiapkan penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- Monitoring dan evaluasi rutin capaian SPBE di perangkat daerah.
- Peningkatan kualitas infrastruktur TIK.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital dan literasi SPBE
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SPBE nasional dari KemenPAN-RB.

15. Indeks Pelayanan Publik

Pemenuhan target indikator ini ditunjang dengan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pelaksanaan kegiatan/aktivitas:

- Melaksanakan Desk Penyusunan dan Pelaporan SKM
- Melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan FKP
- Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan SKM dengan Inspektorat dan KemenPANRB
- Melaksanakan koreksi dan kompilasi Laporan FKP Perangkat Daerah
- Melaksanakan Dokumentasi dan kompilasi atas Standar Pelayanan Perangkat Daerah
- Melaksanakan Audiensi Pelayanan Publik dengan Ombudsman RI.

J. Realisasi Anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (sebelum diaudit BPK/unaudited), kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan capaian yang relatif baik, baik dari sisi pendapatan maupun pengendalian belanja daerah. Capaian kinerja APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 masuk dalam Kategori Tinggi. Hal ini tercermin



dari kinerja Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 120,78 persen, atau senilai Rp3.096.160.561.975,29 dari target anggaran sebesar Rp2.563.396.762.725,00. Capaian tersebut didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi 114,01 persen, serta Pendapatan Transfer yang mencapai 119,99 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, realisasi Belanja Daerah mencapai 90,42 persen, yaitu sebesar Rp2.902.124.069.531,98 dari total anggaran belanja sebesar Rp3.209.464.177.614,00. Realisasi belanja tersebut didominasi oleh Belanja Operasi dengan capaian 89,91 persen, Belanja Modal sebesar 89,10 persen, serta Belanja Transfer yang relatif optimal dengan capaian 95,94 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan cukup efektif dengan tetap menjaga prinsip efisiensi anggaran.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, realisasi Penerimaan Pembiayaan mencapai 100,00 persen atau sebesar Rp649.472.765.324,64, sementara Pengeluaran Pembiayaan tidak terealisasi, sehingga Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp649.472.765.324,64. Dengan memperhitungkan kondisi surplus/defisit anggaran, maka pada akhir Tahun Anggaran 2025 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 843.509.257.767,95, yang mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan fiskal serta masih adanya ruang optimalisasi penyerapan anggaran pada periode selanjutnya, yang rincian jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PERSEN	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.563.396.762.725,00	3.096.160.561.975,29	120,78	2.990.463.010.676,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	331.708.671.959,00	378.195.544.475,29	114,01	315.774.855.372,01
4.1.1	Pajak Daerah	161.734.000.000,00	192.638.435.244,74	119,11	130.670.478.289,00
4.1.2	Retribusi Daerah	133.745.147.512,00	55.395.281.817,10	41,42	7.173.930.214,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.754.419.548,00	14.739.450.551,00	107,16	11.008.793.672,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	22.475.104.899,00	115.422.376.862,45	513,56	166.921.653.197,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.201.250.791.916,00	2.641.271.065.574,00	119,99	2.647.209.070.419,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.123.919.633.000,00	2.402.800.101.718,00	113,13	2.410.966.212.656,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.331.158.916,00	238.470.963.856,00	308,38	236.242.857.763,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.437.298.850,00	76.693.951.926,00	251,97	27.479.084.885,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	100	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.437.298.850,00	76.693.951.926,00	251,97	27.479.084.885,00
5	BELANJA DAERAH	3.209.464.177.614,00	2.902.124.069.531,98	90,42	2.744.136.603.892,26
5.1	BELANJA OPERASI	2.129.793.647.806,00	1.914.984.376.956,38	89,91	1.832.482.411.263,75
5.1.1	Belanja Pegawai	1.119.349.498.079,00	1.013.978.049.874,00	90,59	967.689.238.104,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	901.930.527.387,00	799.281.648.112,10	88,62	751.020.519.567,75
5.1.5	Belanja Hibah	101.591.307.340,00	95.093.646.420,28	93,6	110.233.878.619,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.922.315.000,00	6.631.032.550,00	95,79	3.538.774.973,00
5.2	BELANJA MODAL	646.006.418.217,00	575.563.953.407,60	89,1	504.865.053.327,51
5.2.1	Belanja Modal Tanah	19.156.440.000,00	4.564.812.830,00	23,83	2.620.790.400,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.553.454.078,00	122.546.543.114,00	89,74	119.720.105.120,20
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.160.432.482,00	154.541.587.833,84	91,9	81.543.291.953,81
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.318.328.557,00	286.811.785.897,76	91,25	297.042.963.062,50
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.446.073.100,00	5.053.352.667,00	92,79	3.409.392.790 00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.371.690.000,00	2.045.871.065,00	86,26	528.510.001,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	5.121.658.105,00	51,22	1.534.226.050,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	5.121.658.105,00	51,22	1.534.226.050,00
5.4	BELANJA TRANSFER	423.664.111.591,00	406.454.081.063,00	95,94	405.254.913.251,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	12.486.963.799,00	11.909.878.616,00	95,38	7.819.777.589,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PERSEN	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	411.177.147.792,00	394.544.202.447,00	95,95	397.435.135.662,00
	Surplus / (Defisit)	-646.067,414.889,00	194.036.492.443,31	-30,03	246.326.406.783,75
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	649.472.765.324,00	649.472.765.324,64	100	429.146.358.540,89
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	649.472.765.324,00	649.472. 765.324,64	100	429.120.334.540,89
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	100	26.024.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.405.350.435,00	0	0	26.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.405.350.435,00	0	0	26.000.000.000 00
	Pembiayaan Netto	646.067.414.889,00	649.472.765.324,64	100,53	403.146.358.540,89
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	843.509.257.767,95	100	649.472.765.324,64

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan anggaran, berikut disajikan Rekapitulasi Penyerapan Belanja per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

REKAPITULASI PENYERAPAN BELANJA PER PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



No.	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Capaian (persen)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	719.575.440.008	657.309.067.405	91,35
2	Dinas Kesehatan	512.037.061.942	456.919.066.796	89,24
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	208.070.981.519	199.625.967.587	95,94
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	364.734.921.032	330.352.621.462	90,57
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	139.739.562.371	126.126.313.216	90,26
6	Satuan Polisi Pamong Praja	27.738.914.156	19.389.217.975	69,9
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.619.386.314	11.243.381.042	82,55
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	25.807.660.602	23.900.054.033	92,61
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.094.468.671	30.045.150.872	63,8
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12.081.204.858	10.066.484.952	83,32
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	16.787.432.955	15.373.092.196	91,58
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.902.452.425	9.613.787.958	88,18
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	216.773.153.651	214.881.158.959	99,13
14	Dinas Perhubungan	24.264.619.959	20.364.982.339	83,93
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	21.170.562.093	19.914.987.333	94,07
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	20.680.777.541	15.998.994.117	77,36
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.214.764.990	13.999.366.778	92,01
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.700.726.130	7.763.171.213	89,22
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	53.079.883.350	49.267.552.658	92,82
20	Dinas Pertanian	56.340.060.140	52.098.120.104	92,47
21	Sekretariat Daerah	114.822.121.541	106.940.288.447	93,14
22	Inspektorat Daerah	17.863.116.555	14.464.019.407	80,97
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	17.438.339.996	15.800.306.079	90,61
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	318.904.303.553	284.063.083.822	89,07
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.802.533.448	18.662.968.640	81,85
26	Sekretariat DPRD	95.154.444.077	79.282.829.712	83,32
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.297.364.645	12.124.757.674	91,18
28	Kecamatan Kertak Hanyar	8.226.253.135	7.583.548.035	92,19
29	Kecamatan Astambul	4.506.108.195	4.402.348.083	97,7
30	Kecamatan Gambut	7.265.730.340	6.819.682.274	93,86
31	Kecamatan Karang Intan	3.781.839.266	3.523.461.960	93,17
32	Kecamatan Martapura	18.064.975.970	16.383.765.989	90,69
33	Kecamatan Aranio	3.324.041.207	3.119.019.714	93,83
34	Kecamatan Sungai Tabuk	5.256.985.833	4.864.629.536	92,54
35	Kecamatan Aluh-Aluh	4.041.874.966	3.835.319.532	94,89
36	Kecamatan Mataraman	3.583.598.093	3.439.908.180	95,99
37	Kecamatan Simpang Empat	3.342.700.500	3.083.538.658	92,25
38	Kecamatan Pengaron	3.700.482.000	3.255.771.913	87,98
39	Kecamatan Sungai Pinang	2.948.478.160	2.550.379.588	86,5
40	Kecamatan Beruntung Baru	3.749.986.845	3.562.505.690	95
41	Kecamatan Martapura Barat	3.783.180.000	3.557.408.247	94,03
42	Kecamatan Sambung Makmur	3.635.300.080	3.438.041.162	94,57
43	Kecamatan Martapura Timur	3.853.777.000	3.459.291.706	89,76
44	Kecamatan Paramasan	2.562.954.000	2.294.869.906	89,54
45	Kecamatan Tatah Makmur	3.195.638.141	3.128.472.487	97,9
46	Kecamatan Telaga Bauntung	3.025.358.306	2.691.904.282	88,98
47	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.918.657.055	2.364.306.370	81,01

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Penyerapan Belanja per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, secara umum tingkat



penyerapan belanja pada sebagian besar Perangkat Daerah berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan mayoritas capaian berada di atas 90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Perangkat Daerah dengan pagu anggaran terbesar, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif optimal dengan capaian berkisar antara 89–91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja sektor strategis dan pelayanan dasar telah dilaksanakan secara cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan terutama dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Penyerapan belanja tertinggi tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian 99,13 persen, yang mencerminkan optimalnya penyaluran belanja, khususnya belanja transfer dan kegiatan yang bersifat mandatory. Selain itu, beberapa kecamatan juga menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik, seperti Kecamatan Tatah Makmur (97,90 persen), Kecamatan Astambul (97,70 persen), dan Kecamatan Mataraman (95,99 persen), yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa Perangkat Daerah dengan tingkat penyerapan belanja yang relatif rendah, antara lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian 63,80 persen, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 69,90 persen. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti penyesuaian kebijakan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun faktor teknis dan administratif lainnya, yang perlu menjadi perhatian pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian penyerapan belanja per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup efektif, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pengendalian,



dan monitoring pelaksanaan kegiatan agar tingkat penyerapan belanja dapat lebih optimal dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

K. Kesimpulan Umum.

Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan relatif konsisten dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya jumlah indikator kinerja yang mencapai dan melampaui target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, serta mendukung pencapaian target akhir RPJMD Kabupaten Banjar secara bertahap dan terukur.

Sebagian besar sasaran strategis menunjukkan kinerja yang baik, khususnya pada aspek kualitas lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Capaian indikator yang melampaui target mencerminkan efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kualitas manajemen kinerja dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan perhatian lebih, terutama pada indikator Prevalensi Stunting dan Tingkat Kemiskinan, yang hingga Tahun 2025 masih berada di bawah target kinerja dan memerlukan penguatan intervensi lintas sektor agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja daerah menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif. Selain itu, terdapat indikasi efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa sasaran strategis, yang ditunjukkan melalui pencapaian kinerja yang optimal dengan tingkat realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya telah mulai diterapkan secara konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan arah yang selaras dengan tahapan pencapaian target akhir RPJMD, dengan kecenderungan



kinerja yang semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penguatan kualitas perencanaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran tetap diperlukan agar seluruh target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

L. Upaya Perbaikan untuk masa mendatang

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja serta memastikan ketercapaian target akhir RPJMD Kabupaten Banjar, diperlukan upaya perbaikan yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.

Upaya perbaikan difokuskan pada percepatan pencapaian indikator yang hingga tahun 2025 masih berada di bawah target, khususnya Prevalensi Stunting dan Tingkat Kemiskinan, melalui penguatan intervensi lintas sektor, peningkatan ketepatan sasaran program, serta optimalisasi peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.

Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja perlu terus dilakukan melalui penguatan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan, sehingga setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target akhir RPJMD. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi juga perlu ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah tetap menjadi prioritas melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan pengendalian internal guna menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan indikator kinerja, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan perlu terus didorong melalui pengembangan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi, sejalan dengan arah



kebijakan nasional yang mengarahkan transformasi dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) sebagai instrumen pengukuran kematangan tata kelola digital pemerintah.

Dengan pelaksanaan berbagai upaya perbaikan tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun mendatang semakin meningkat dan selaras dengan tahapan pencapaian target akhir RPJMD secara optimal dan berkelanjutan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan tugas pembantuan tersebut tertuang pada, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena



tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Dana Tugas Pembantuan sangat berarti bagi daerah karena dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa membebani APBD dan tidak memerlukan pendamping dari APBD, Dana Tugas Pembantuan berasal anggaran Kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan data dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Prov. Kalsel bahwa Kabupaten Banjar tidak menerima Kegiatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Pembangunan dengan sumber pendanaan dari Dana Tugas Pembantuan sejak Tahun 2020 sampai dengan 2025, seperti pada tabel berikut ini:

No.	Perangkat Daerah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar	-	-	-	990.600.000	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjar	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar	12.419.039.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RSU Ratu Zaleha Martapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar	7.000.000.000	6.939.094.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar	1.261.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar	-	-	950.000.000	950.000.000	-	-	-	-	-	-
Total		21.180.627.000	6.939.094.000	950.000.000	5.940.600.000	-	-	-	-	-	-

Sumber: DIPA Dana Tugas Pembantuan Masing-Masing Perangkat Daerah

Dari tabel tersebut diketahui jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan dari tahun ketahun baik dari jumlah dana yang diterima dan jumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi pengelola.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1. Target kinerja

Pada tahun 2025 tidak ada target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Permasalahan dan Kendala

Dikarenakan tidak ada target maka tidak ada permasalahan dan kendala.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.2.1. Target kinerja

Pada tahun 2025 tidak ada target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas



pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan Gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2. Permasalahan dan Kendala

Dikarenakan tidak ada target maka tidak ada permasalahan dan kendala.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur terkait:

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup:
 - a. Jenis dan penerima pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Pencapaian SPM Pendidikan;dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan;dan
 - c. Tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - a. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Persentase anak usia dini yang mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- b. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$



c. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Persentase pendidikan kesetaraan yang mendapatkan pelayanan

=

Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan

Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan

x

100%

4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2025 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata – rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2025 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	19.649	15.356	78,15	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	86,5	78,15	90,35
						1) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	73,26	73,26	100
						2) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV)	69,48	69,48	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.955	86.069	92,59	SD			
						Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)	95,45	92,59	97,00
						1. Kemampuan literasi	64,18	61,57	95,93
						2. Kemampuan numerasi	56,93	54,03	94,91
						3. Indeks iklim keamanan	77,79	76,98	98,96
						4. Indeks iklim kebhinekaan	72,4	71,54	98,81
						5. Indeks iklim inklusivitas	61,98	59,53	96,05
						SMP			
						Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun)	95,45	92,59	97,00
						1. Kemampuan literasi	74,32	73,21	98,51
						2. Kemampuan numerasi	66,28	64,78	97,74
						3. Indeks iklim keamanan	74,93	73,43	98,00
						4. Indeks iklim kebhinekaan	72,2	71,2	98,61
						5. Indeks iklim inklusivitas	63,41	61	96,20
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	14.028	7.585	53,39	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	58,74	54,07	92,05

Sumber : Dinas Pendidikan

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Anak Usia Dini}} = (100\% \times 20) + (78,15\% \times 80) = 20\% + 62,52\% = 82,52\%$$

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Dasar}} = (97,37\% \times 20) + (92,59\% \times 80) = 19,47\% + 74,07\% = 93,54\%$$

$$IP_{\text{SPM Pendidikan Kesetaraan}} = (92,05\% \times 20) + (54,07\% \times 80) = 18,41\% + 43,26\% = 61,67\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 adalah Tuntas Pratama dengan nilai 79,78%.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Banjar Tahun 2025 berasal dari dari berbagai sumber
sebagaimana pada tabel berikut ini:

DATA APBD, ANGGARAN SATUAN KERJA DAN ANGGARAN SPM PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3.041.125.510.897	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	673.503.413.442	
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	188.302.174.361	
- Dana Bagi Hasil		
- DAU	77.381.848.634	
- DAK Fisik	3.994.015.000	
- DAK Non Fisik	76.798.783.677	

Sumber : Dinas Pendidikan

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendidikan Anak Usia Dini	33.155.009.736	31.048.833.861
Pendidikan Dasar	135.118.910.611	122.691.527.538
Pendidikan Kesetaraan	20.028.254.014	19.725.973.311
Jumlah	188.302.174.361	173.466.334.710

Sumber : Dinas Pendidikan

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.155.009.736	31.048.833.861	93,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.035.816.500	1.029.625.000	99,40
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	480.000.000	480.000.000	100,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.594.603.000	6.194.541.931	93,93
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.800.000	55.632.370	85,85
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.095.942.900	1.578.216.000	75,30
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.492.405.000	1.211.000.000	81,14
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	107.775.000	106.505.166	98,82
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.353.000	209.240.470	92,03
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.353.000	227.353.000	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.121.857.520	1.974.027.000	93,03
		Pengadaan Mebel PAUD	325.371.000	321.786.405	98,90
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.093.127.000	2.036.019.545	97,27
		Penyediaan infrastruktur TIK	1.403.000.000	971.139.000	69,22
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	594.195.000	188.806.330	31,78
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	757.168.500	652.304.032	86,15
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	524.392.116	521.755.000	99,50
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.153.000	11.153.000	100,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	344.048.000	331.218.000	96,27
		Pengembangan Konten Digital untuk	35.640.000	34.570.000	97,00

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pendidikan			
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.832.568.000	3.816.044.855,00	99,57
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	106.573.000	98.684.194	92,60
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	437.383.200	411.689.973	94,13
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.836.680.000	8.587.522.590	97,18
2	Pendidikan Dasar		135.118.910.611	122.691.527.538	90,80
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.615.144.034	87.726.580.464	89,87
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.358.950.000	860.427.330	63,32
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	213.958.000	193.965.963	90,66
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.497.753.125	10.204.389.801	65,84
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	414.530.000	413.650.000	99,79
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	951.560.000	848.613.250	89,18
		Pengadaan Mebel Sekolah	417.735.000	416.368.183	99,67
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	161.925.000	161.375.000	99,66
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	305.980.000	304.950.000	99,66
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	471.550.000	468.951.350	99,45
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.276.471.667	1.161.633.000	91,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.257.830.000	2.140.308.200	94,79
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	913.775.000	909.570.000	99,54
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.999.000.000	Rp 3.784.500.000	94,64
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.556.000	Rp 7.496.349	99,21
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18.599.256.875	17.780.632.996	95,60
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.295.800.000	468.398.364	36,15
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.432.498.000	833.913.923	58,21
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.684.500	55.796.831	98,43
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17.880.000	Rp 17.739.345	99,21
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	169.758.300	163.158.048	96,11
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	812.420.400	Rp 786.866.079,00	96,85
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	952.536.000	Rp 726.193.741	76,24
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	42.275.000	Rp 41.902.213	99,12
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.643.044.900	2.628.729.000	99,46
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	191.809.400	135.888.413	70,85
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	181.993.000	Rp 178.749.890	98,22
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	220.944.000	209.812.366	94,96
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	27.270.000	Rp 26.349.317	96,62

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.835.375.000,00	1.794.059.364	97,75
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.887.024.867	40.002.192.148	97,84
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37.503.766.577	34.964.947.074	93,23
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13.210.800	3.916.454	29,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.702.483.667	4.661.091.000	99,12
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	375.000.000	349.500.000,00	93,20
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.617.500	76.681.202,00	98,79
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	604.946.000	588.640.000	97,30
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	89.925.500	89.475.500	99,50
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	273.000.000	272.485.000	99,81
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	599.286.000	509.257.000	84,98
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	198.122.000	197.871.000	99,87
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	428.875.000	425.711.000	99,26
		Pembangunan Laboratorium	325.449.000	271.884.000	83,54
		Pembangunan Fasilitas Parkir	896.386.667	866.395.000	96,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	336.350.000	310.880.000	92,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	239.825.500	199.933.000	83,37
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.137.455.000	1.133.412.000	99,64
		Pengadaan Mebel Sekolah	516.245.000	512.425.035	99,26
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	149.859.000	147.195.053	98,22
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	539.488.333	530.602.000	98,35
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	348.925.000	347.283.045	99,53
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	147.113.400	96.231.900	65,41
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.261.488.000	1.248.155.230	98,94
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.505.000	34.505.000	100,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	34.277.200	34.277.111	100,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	23.412.600	23.240.513	99,26
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	459.279.000	456.509.941	99,40
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	774.056.100	764.663.456,00	98,79
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	37.548.000	37.547.503	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	711.260.000	707.300.000	99,44
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.916.909.000	2.863.926.085	58,25
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	281.276.000	274.107.436	97,45
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan	30.820.500	30.020.435	97,40

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		dan Intoleransi			
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	45.499.000	45.338.981	99,65
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	36.599.000	36.318.575	99,23
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	977.475.000	943.332.648	96,51
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.879.798.810	15.874.834.971	99,97
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.028.254.014	19.725.973.311	98,49
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.900.000	20.960.000	95,71
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	97.300.000	97.161.635	99,86
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.776.146	837.594.000	89,32
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.600.000	3.600.000	100,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.119.500	71.769.500	85,32
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.140.000	26.071.995	89,47
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	4.872.661.000	4.856.442.893	99,67
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	401.350.000	400.190.429	99,71
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	49.997.000	49.850.372	99,71
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.750.000	39.150.000	91,58
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	577.528.468	573.536.000	99,31
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	485.951.400	356.778.234	73,42
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26.750.500	26.590.500	99,40
		Pengadaan Mebel Sekolah	800.800.000	800.097.324	99,91
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	401.350.000	400.190.429	99,71
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.195.280.000	11.165.990.000	99,74

Sumber : Dinas Pendidikan

4.1.5. Dukungan Personil

Penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala Dinas Pendidikan	Pembina Tk.I	S2	Ya	
2	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Pembina	S2	Ya	
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Pembina	S2	Ya	
4	Kepala Bidang Bina PAUD dan Pendidikan	Penata Tk.I	S2	Ya	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
	Nonformal/Kesetaraan				
5	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Penata Tk.I	S2	Ya	
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk.I	S1	Ya	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Penata Tk.I	S1	Ya	
8	Operator Aplikasi e-SPM Sub Bagian Perencanaan		S1	Ya	
9	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Sekolah Dasar		SMA	Ya	
10	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Sekolah Menengah Pertama	Pembina	S3	Ya	
11	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Bina PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penata Muda Tk.I	D3	Ya	
12	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Sarana dan Prasarana	Penata	S1	Ya	

Sumber : Dinas Pendidikan

DATA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2025

No	Kecamatan	Pendidik (Guru - ASN)				Pendidik (Guru - Non ASN)			
		Pendidikan Minimal D-IV / S1			Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1			Pendidikan D-IV ke bawah
		Pendidikan anak usia dini	Bimbingan Konseling	Psikologi		Pendidikan anak usia dini	Bimbingan Konseling	Psikologi	
1	Aluh-Aluh	4	0	0	1	0	6	2	0
2	Aranio	2	0	0	0	0	3	0	0
3	Astambul	0	0	0	0	0	16	0	0
4	Beruntung Baru	0	0	0	0	0	12	0	0
5	Cintapuri Darussalam	2	0	0	0	0	4	0	0
6	Gambut	2	0	0	0	0	34	0	0
7	Karang Intan	0	0	0	0	0	21	3	0
8	Kertak Hanyar	7	0	0	0	0	21	1	0
9	Martapura	42	1	0	4	3	35	1	0
10	Martapura Barat	0	0	0	0	0	2	0	0
11	Martapura Timur	3	0	0	0	0	2	0	0
12	Mataraman	0	1	0	0	0	10	3	0
13	Paramasan	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengaron	2	1	0	0	0	4	0	0
15	Sambung Makmur	0	0	0	0	0	3	0	0
16	Simpang Empat	3	0	0	0	0	3	0	0
17	Sungai Pinang	2	0	0	0	0	2	0	0
18	Sungai Tabuk	0	0	0	0	0	30	3	0
19	Tatah Makmur	0	0	0	0	0	3	1	0
20	Telaga Bauntung	1	0	0	0	0	1	0	0
Jumlah		70	3	0	5	3	212	14	0

Sumber : Dinas Pendidikan

RINCIAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2025

No	Kecamatan	Tenaga Kependidikan									
		Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini					Pengawas Sekolah/Penilik				
		Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak	Pendidikan Minimal D-IV / S1 Kependidikan	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak
1	Aluh-Aluh	23	4	0	0	0	1	1	1	1	1
2	Aranio	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Astambul	24	1	0	0	0	1				
4	Beruntung Baru	17	2	0	0	0	1				
5	Cintapuri Darussalam	10	1	0	0	0	1				
6	Gambut	32	9	0	0	0	1	1			
7	Karang Intan	36	6	0	0	0	1	1	1	1	0
8	Kertak Hanyar	32	8	0	0	0	1	1	1	0	1
9	Martapura	73	23	0	0	6	5	3	3	3	0
10	Martapura Barat	12	3	0	0	0	1	0	0	0	0
11	Martapura Timur	23	4	0	0	0	1	1	1	1	1
12	Mataraman	32	12	0	0	0	2	1	1	1	0
13	Paramasan	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
14	Pengaron	7	2	0	0	0	1				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Kecamatan	Tenaga Kependidikan									
		Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini					Pengawas Sekolah/Penilik				
		Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak	Pendidikan Minimal D-IV / S1 Kependidikan	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak
15	Sambung Makmur	8	1	0	0	0					
16	Simpang Empat	19	2	0	0	0	1	1	1	1	1
17	Sungai Pinang	9	2	0	0	0	1				
18	Sungai Tabuk	32	14	0	0	0	1	1	1	0	0
19	Tatah Makmur	15	1	0	0	0	1				
20	Telaga Bauntung	4	0	0	0	0					
Jumlah		421	96	0	0	6	23	12	11	9	5

Sumber : Dinas Pendidikan



RINCIAN KUALIFIKASI PENDIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2025

No	Kecamatan	Pendidik (Guru - ASN)									Pendidik (Guru - Non ASN)								
		Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum			Guru bimbingan dan konseling			Guru pembimbing khusus bagi satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas			Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum			Guru bimbingan dan konseling			Guru pembimbing khusus bagi satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas		
		Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah
1	Aluh-Aluh	72	62	0	12	12	0				1	0	0	0	0	0			
2	Aranio	32	30	0	3	3	0				2	1	0	0	0	0			
3	Astambul	39	38	0	3	3	0				2	1	2	0	0	0			
4	Beruntung Baru	11	11	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
5	Cintapuri Darussalam	33	29	0	5	5	0				1	0	1	0	0	0			
6	Gambut	53	47	0	8	7	0				1	1	0	0	0	0			
7	Karang Intan	75	75	0	8	7	0				7	2	1	0	0	0			
8	Kertak Hanyar	46	33	0	5	4	0				13	6	0	1	1	0			
9	Martapura	150	137	0	18	17	0				71	40	21	3	3	1			
10	Martapura Barat	22	21	0	2	2	0				1	0	0	0	0				
11	Martapura Timur	28	24	0	3	3	0				4	3	0	1	1	0			
12	Mataraman	37	37	0	4	3	0				3	1	0	0	0	0			
13	Paramasan	9	8	0	2	2	0				0	0	0	0	0	0			
14	Pengaron	22	20	0	3	3	0				3	0	0	0	0	0			
15	Sambung Makmur	19	18	0	2	2	0				4	1	4	0	0	0			
16	Simpang Empat	47	39	0	5	4	0				1	1	2	0	0	0			
17	Sungai Pinang	24	23	0	3	3	0				0	0	1	0	0	0			
18	Sungai Tabuk	59	55	0	7	7	0				1	0	0	0	0	0			
19	Tatah Makmur	13	13	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
20	Telaga Bauntung	9	9	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
Jumlah		800	729	0	96	90	0				115	57	32	5	5	1			

Sumber : Dinas Pendidikan

RINCIAN KUALIFIKASI KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA PENUNJANG LAIN PADA PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kepala Sekolah							Pengawas Sekolah					Tenaga Penunjang Lain	
		Pendidikan Minimal D-IV / S1	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak		Pendidikan Minimal S2 kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah	Sertifikat guru penggerak	Pendidikan Minimal sekolah menengah atas/ sederajat	Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ke bawah
1	Aluh-Aluh	8	8	8	7	3	5							8	2
2	Aranio	4	4	4	4	3	1							7	1
3	Astambul	4	4	4	4	4	0							7	1
4	Beruntung Baru	1	1	1	1	1	0							3	0
5	Cintapuri Darussalam	4	4	4	4	3	1							2	2
6	Gambut	3	3	3	3	3	0							11	2
7	Karang Intan	9	9	8	8	7	0							10	5
8	Kertak Hanyar	3	3	3	3	2	0							11	3
9	Martapura	12	12	12	12	6	0	5		9	9	8	1	32	8
10	Martapura Barat	2	2	2	1	1	1							2	1
11	Martapura Timur	3	3	3	3	2	0							7	5
12	Mataraman	4	4	4	4	4	0							10	4
13	Paramasan	1	1	1	1	0	1							0	0
14	Pengaron	3	3	3	3	2	1							1	0
15	Sambung Makmur	3	3	3	3	1	1							2	0
16	Simpang Empat	4	4	4	4	2	2							10	1
17	Sungai Pinang	3	3	3	1	1	2							4	0
18	Sungai Tabuk	4	4	4	4	4	0							8	4
19	Tatah Makmur	1	1	1	1	1	0							3	0
20	Telaga Bauntung	1	1	1	1	0	1							0	0
Jumlah		77	77	76	72	50	16	5		9	9	8	1	138	39

Sumber : Dinas Pendidikan



RINCIAN KUALIFIKASI PENDIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2025

No	Kecamatan	Pendidik (Guru - ASN)									Pendidik (Guru - Non ASN)								
		Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum			Guru bimbingan dan konseling			Guru pembimbing khusus bagi satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas			Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum			Guru bimbingan dan konseling			Guru pembimbing khusus bagi satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas		
		Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1	Sertifikat Pendidik	Pendidikan D-IV ke bawah
1	Aluh-Aluh	72	62	0	12	12	0				1	0	0	0	0	0			
2	Aranio	32	30	0	3	3	0				2	1	0	0	0	0			
3	Astambul	39	38	0	3	3	0				2	1	2	0	0	0			
4	Beruntung Baru	11	11	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
5	Cintapuri Darussalam	33	29	0	5	5	0				1	0	1	0	0	0			
6	Gambut	53	47	0	8	7	0				1	1	0	0	0	0			
7	Karang Intan	75	75	0	8	7	0				7	2	1	0	0	0			
8	Kertak Hanyar	46	33	0	5	4	0				13	6	0	1	1	0			
9	Martapura	150	137	0	18	17	0				71	40	21	3	3	1			
10	Martapura Barat	22	21	0	2	2	0				1	0	0	0	0				
11	Martapura Timur	28	24	0	3	3	0				4	3	0	1	1	0			
12	Mataraman	37	37	0	4	3	0				3	1	0	0	0	0			
13	Paramasan	9	8	0	2	2	0				0	0	0	0	0	0			
14	Pengaron	22	20	0	3	3	0				3	0	0	0	0	0			
15	Sambung Makmur	19	18	0	2	2	0				4	1	4	0	0	0			
16	Simpang Empat	47	39	0	5	4	0				1	1	2	0	0	0			
17	Sungai Pinang	24	23	0	3	3	0				0	0	1	0	0	0			
18	Sungai Tabuk	59	55	0	7	7	0				1	0	0	0	0	0			
19	Tatah Makmur	13	13	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
20	Telaga Bauntung	9	9	0	1	1	0				0	0	0	0	0	0			
Jumlah		800	729	0	96	90	0				115	57	32	5	5	1			

Sumber : Dinas Pendidikan

RINCIAN KUALIFIKASI KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA PENUNJANG LAIN PADA PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kepala Sekolah							Pengawas Sekolah					Tenaga Penunjang Lain	
		Pendidikan Minimal D-IV / S1	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sertifikat guru penggerak		Pendidikan Minimal S2 kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi	Berasal dari guru	Sertifikat Pendidik	Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah	Sertifikat guru penggerak	Pendidikan Minimal sekolah menengah atas/ sederajat	Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ke bawah
1	Aluh-Aluh	8	8	8	7	3	5							8	2
2	Aranio	4	4	4	4	3	1							7	1
3	Astambul	4	4	4	4	4	0							7	1
4	Beruntung Baru	1	1	1	1	1	0							3	0
5	Cintapuri Darussalam	4	4	4	4	3	1							2	2
6	Gambut	3	3	3	3	3	0							11	2
7	Karang Intan	9	9	8	8	7	0							10	5
8	Kertak Hanyar	3	3	3	3	2	0							11	3
9	Martapura	12	12	12	12	6	0	5	9	9		8	1	32	8
10	Martapura Barat	2	2	2	1	1	1							2	1
11	Martapura Timur	3	3	3	3	2	0							7	5
12	Mataraman	4	4	4	4	4	0							10	4
13	Paramasan	1	1	1	1	0	1							0	0
14	Pengaron	3	3	3	3	2	1							1	0
15	Sambung Makmur	3	3	3	3	1	1							2	0
16	Simpang Empat	4	4	4	4	2	2							10	1
17	Sungai Pinang	3	3	3	1	1	2							4	0
18	Sungai Tabuk	4	4	4	4	4	0							8	4
19	Tatah Makmur	1	1	1	1	1	0							3	0
20	Telaga Bauntung	1	1	1	1	0	1							0	0
Jumlah		77	77	76	72	50	16	5	9	9		8	1	138	39

Sumber : Dinas Pendidikan



DATA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

No	Nama PKBM	Pendidik			
		Pamong Belajar		Tutor Pendidikan Kesetaraan	
		Pendidikan Minimal D-IV / S1 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	Pendidikan D-IV ke bawah	Pendidikan Minimal D-IV / S1 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	Pendidikan D-IV ke bawah
1	PKBM ABNAUL AMIN			3	1
2	PKBM AL-FIRDAUS			5	0
3	PKBM AL-HUSNA			3	4
4	PKBM AL-MUHAJIRIN			6	1
5	PKBM ANGGREK MERATUS			4	33
6	PKBM ANNISA			6	6
7	PKBM ARSYADIYAH			3	2
8	PKBM BARAKAT			4	3
9	PKBM BANUA			7	0
10	PKBM BATU SAWAR			3	0
11	PKBM CIPTA BERSAMA			0	2
12	PKBM DARUSSALAM			9	0
13	PKBM HARAPAN KITA			2	0
14	PKBM KARYA BERSAMA			2	1
15	PKBM MAKMUR BERKAH			2	0
16	PKBM MIFTAHUSSIBYAN			1	7
17	PKBM NURHUDA			5	1
18	PKBM PAMATON			0	2
19	PKBM SINAR BARU			3	2
20	PKBM WANNA			1	2
21	SPNF SKB BANJAR	6	0	18	0
Jumlah		6	0	87	67

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025.

DATA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

No	Nama PKBM	Tenaga Kependidikan					
		Pendidikan Minimal D-IV / S1		Pendidikan D-IV ke bawah		Tenaga Penunjang lain	
		Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan	Penilik	Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan	Penilik	Pendidikan minimal sekolah menengah atas/ sederajat	Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ke bawah
1	PKBM ABNAUL AMIN	1	1				
2	PKBM AL-FIRDAUS	1				1	
3	PKBM AL-HUSNA	1					
4	PKBM AL-MUHAJIRIN	1					
5	PKBM ANGGREK MERATUS	1					
6	PKBM ANNISA	1					
7	PKBM ARSYADIYAH	1					
8	PKBM BARAKAT	1				1	3
9	PKBM BANUA	1					
10	PKBM BATU SAWAR	1					
11	PKBM CIPTA BERSAMA	1					
12	PKBM DARUSSALAM	1					
13	PKBM HARAPAN KITA	1					
14	PKBM KARYA BERSAMA	1					
15	PKBM MAKMUR BERKAH	1					
16	PKBM MIFTAHUSSIBYAN	1					
17	PKBM NURHUDA	1				1	
18	PKBM PAMATON	1					



No	Nama PKBM	Tenaga Kependidikan					
		Pendidikan Minimal D-IV / S1		Pendidikan D-IV ke bawah		Tenaga Penunjang lain	
		Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan	Penilik	Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan	Penilik	Pendidikan minimal sekolah menengah atas/ sederajat	Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ke bawah
19	PKBM SINAR BARU	1					
20	PKBM WANNA	1					
21	SPNF SKB BANJAR	1				2	1
Jumlah		21	1	0	0	5	4

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan, solusi dan tindaklanjut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TINDAKLANJUT PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Permasalahan
1	Pada dapodik tidak dapat melakukan filterisasi peserta didik pada Kecamatan
2	Pada Input penerapan SPM Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berbeda dengan SKPD, sehingga tidak dapat mengisi data pada input penerapan SPM
3	Pada input penerapan SPM data sub kegiatan berbeda dengan anggaran yang ada pada SKPD

Sumber : Dinas Pendidikan



4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan mengatur terkait:

- 1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM Kesehatan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 2. SPM Kesehatan didalamnya mencakup:
 - a. Jenis dan penerima pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Pencapaian SPM Kesehatan;dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
- 3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan mencakup:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia;dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayan an antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu tertentu (nominator)}}{\text{jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota di dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28hari.yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten .kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

d. Pelayanan kesehatan balita;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah balita usian 12 – 23bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24 – 35bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 36 – 59bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$



e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten.kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah warga negara berusia 60th atau lebih yang mendaat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebh yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten.kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

Capaian SPM

$$= \frac{\text{jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu stu tahun yang sama}} \times 100\%$$

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)



$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2026 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Ket
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan resiko	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
	yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)		

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2026 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7426	6463	69.63	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1213	1031	85
						2. Tablet tambah darah	16376400	1163340	71.04
						3. Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	9098	6463	71.04
						4. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan HB	9098	6463	71.04
						5. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaa golongan darah	9098	6463	71.04
						6. Alat deteksi resiko ibu hamil : pemeriksaan glukoprotein urin	9098	6463	71.04
						7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	9098	6463	71.04
						8. Kartu ibu/rekam medis ibu	9098	6463	71.04
						9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9098	6463	71.04
						10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9098	6463	71.04
						11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	607	400	71.04
						12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	238	53	22.27
						13. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						14. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	79	79	100
						16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	81	84	100
						17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	7426	6423	87.03
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7426	7426	95.83	1. Formulir partograf	8682	7426	85.53
						2. Kartu ibu/rekam medis ibu	8682	7426	85.53
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8682	7426	85.53
						4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	8682	7426	85.53
						5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	238	53	22.27
						6. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						7. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	79	79	100
						9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	81	84	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7426	7400	96.78	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	8290	7295	88.00
						2. Vitamin K1 Injeksi	8268	7400	89.50
						3. Salep/tetes mata antibiotik	8268	7400	89.50
						4. Formulir bayi baru lahir	8268	7400	89.50
						5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	8268	7400	89.50
						6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8268	7400	89.50
						7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	8268	7400	89.50
						8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	238	54	22.69
						9. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						10. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	79	79	100
						12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	62	61	98.39
						13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						14. Kader Kesehatan	4284	4284	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	41256	28651	68.63	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	46110	28651	62.14
						2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	46110	28651	62.14
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46110	28651	62.14
						4. Vitamin A Biru	8286	6000	72.57
						5. Vitamin A Merah	46110	28651	62.14
						6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	2763	2064	74.70

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	5527	4855	87.84
						8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	4145	1303	31.44
						9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	6218	4220	67.87
						10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	2073	1547	74.63
						11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	3792	1037	27.35
						12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	3792	1139	30.04
						13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	274592	242940	88.47
						14. Peralatan Anafilaktik	25	25	100
						15. Formula terapi gizi buruk	292	0	0
						16. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01
						17. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						18. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						20. Guru PAUD	528	528	100
						21. Kader kesehatan	4284	4284	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92955	64362	70.70	1. Form pencatatan / buku rapor kesehatanku	93215	4800	5.15
						2. Form pencatatan / buku pemantauan kesehatan	80	80	100
						3. Kuesioner skrining kesehatan	93215	84362	69.05
						4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	25	25	100
						5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	25	25	100
						6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	4160	3000	72.12
						7. Alat pemeriksaan Hb	25	25	100
						8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	4209	3000	83.98
						9. Media promosi kesehatan	25	25	100
						10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	8157	6850	83.98
						11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	273	80	29.30
						12. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						13. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	79	79	100
						16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	99.20
						17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	0	0
						18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	90	90	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	398012	253116	67.78	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	125	125	100
						2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	25	25	100
						3. Alat : Tensimeter	435	435	100
						4. Alat : Glukometer	75	75	100
						5. Alat : Alat pemeriksa Hb	25	25	100
						6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	382.575	382.575	100
						7. Alat : KIT IVA Tes	25	25	100
						8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	7933	3000	37.82
						Kit Ophthalmologi komunitas	1	1	100
						10. Kuesioner PUMA	25	25	100
						11. Alat Pelayanan KB			
						a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	25	25	100
						b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	25	25	100
						c. Vasektomi set			
						12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	25	25	100
						13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15397	0	0
						14. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01
						15. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						16. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	99.20
						19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	90	90	100
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	62503	35300	60.14	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	175	175	100
						2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	75	75	100
						3. Alat pemeriksaan kolesterol	175	175	100
						4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	62581	35300	56.41
						5. Instrumen Skining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	750	360	48.00
						6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	62581	0	0
						7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	25	100
						8. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						9. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						10. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	44.42
						11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	74,3
						12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	67,8
						13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	90	90	100
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40261	38324	93.93	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	25	25	100
						2. Obat Hipertensi	40261	40261	100
						3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	435	435	100
						4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	25	25	100
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	2256	2256	100
						6. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01
						7. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						8. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	62	61	98.39
						11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	79	79	100
						12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	99.20
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7440	7440	97.80	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	5324	7440	100
						2. Fotometer atau Glukometer	75	75	100
						3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	5324	5324	100
						4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	75	75	100
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2810	2810	100
						6. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01
						7. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						8. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	79	79	100
						10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	100
						11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	81	84	100
						12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	72	73	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1191	1191	93.80	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	25	25	100
						2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	828	828	100
						3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	25	25	100
						4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	25	25	100
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	379	379	100
						6. Tenaga medis : Dokter	238	50	21.01
						7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	25	25	100
						8. Tenaga profesional lainnya	0	0	0
						9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	0	0	0
11	Pelayanan Kesehatan terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9743	9743	97.98	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1596	1596	100
						2. Reagen Zn TB	624	624	100
						3. Masker bedah dan Masker N95	9743	9743	100
						4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9743	9743	100
						5. Katrid tes cepat molekuler	9743	9743	100
						6. Formulir pencatatan dan pelaporan	9743	9743	100
						7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	25	25	100
						8. Tuberkulin	25	25	100
						9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	238	56	23.53
						10. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	79	79	100
						12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	125	124	99.20
						13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	72	73	100
						14. Tenaga kesehatan : Radiografer	10	7	70
						15. Kader Kesehatan	4284	4284	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan	20794	20794	97.40	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	3508	3508	100

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
		kesehatan				2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	20794	20794	100
						3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	20794	20794	100
						4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	25	25	100
						5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	238	55	23.11
						6. Tenaga kesehatan : Bidan	596	551	92.45
						7. Tenaga kesehatan : Perawat	673	373	55.42
						8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	72	73	100
						9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	125	124	99.20
						10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	2	2	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

IPSPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	=	84,30%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	=	95,83%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	=	96,78%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Balita	=	68,63%
IPSPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	=	70,70%
IPSPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	=	67,78%
IPSPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	=	60,14%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	=	93,93%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	=	97,80%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	=	93,80%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	=	97,98%
IPSPM Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	=	97,40%

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 adalah TUNTAS MADYA dengan nilai 85.42%.

4.2.4. Dukungan Personil

Penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terdiri dari:

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala Dinas Kesehatan	III d	S3	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
2	Sekretaris	IV b	Magister Manajemen	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
3	Kabid Kesehatan Masyarakat	IV a	Magister Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
4	Kabid Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	III d	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
5	Kasubbag Perencanaan	III d	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
6	Kasubbag Keuangan dan Aset	III a	S1 Ekonomi	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
					2024
7	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	III d	Magistes Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
8	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	III c	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
9	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatn Jiwa	III c	Magister Manajemen	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
10	Kasi Data, Informasi Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	III d	Magister Manajemen	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
11	Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan	III d	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
12	Kasi Surveilans dan Imunisasi	IV a	S1 Keperawatan	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
13	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	IV b	S3	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
14	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	III d	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
15	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	III a	S1 Kesehatan Masyarakat	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
16	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	III b	D3 Kebidanan	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
17	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Kesehatan Masyarakat	III c	D3 Kebidanan	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
18	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Sumber Daya Kesehatan	III c	D3 Kesehatan Gigi	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
19	Operator Aplikasi e-SPM Subbag Perencanaan	III c	D3 Kesehatan Gigi	0	Bimtek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
2	Rumah Sakit	Dokter spesialis obgyn	3	0	0	3	3	0
		Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga Gizi	8	0	7	15	13	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar



PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
2	Rumah Sakit	Dokter spesialis obgyn	3	0	0	3	3	0
		Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga Gizi	8	0	7	15	13	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	27	34	2	63	69	-6
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Kader Kesehatan	0	0	4284	4284	-	0
2	Rumah Sakit	Dokter spesialis anak	4	0	1	5	3	2
		Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	3	3	0	6	3	3
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN BALITA

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Guru PAUD					-	-
		Kader Kesehatan	0	0	4284	4284	-	-
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Dokter gigi	23	7	7	37	31	6
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Guru						
		Kader Kesehatan	0	0	90	90	-	
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Dokter gigi	2	0	0	2	3	-1
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Kader Kesehatan	0	0	90	90	-	-
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Kader Kesehatan	0	0	90	90	-	-
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar



PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	27	34	2	63	69	-6
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2
		Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	3	3	0	6	3	3
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Tenaga gizi	45	39	0	84	113	-29
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	50	23	2	75	95	-20
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	12
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1
		Tenaga gizi	8	0	7	15	13	2
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	21	3	3	27	10	17

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	13	12	0	25	-	-
		Tenaga profesional lainnya	0	0	0	0	0	
		Tenaga profesional lainTenaga lain yang	0	0	0	0	0	0

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
		terlatih di bidang kesehatan jiwanya						
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	2	0	0	2	3	-1
		Tenaga profesional lainnya	0	0	0	0	0	0
		Tenaga profesional lainTenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwanya	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Tenaga Kefarmasian	55	24	0	79	93	-14
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	50	23	2	75	95	-20
		Radiografer	0	0	0	0	0	0
		Kader Kesehatan	0	0	4284	4284	-	-
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		dokter spesialis penyakit dalam	3	0	1	4	3	1
		dokter spesialis paru	3	0	0	3	3	0
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Tenaga Kefarmasian	16	18	10	44	32	2
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	21	3	3	27	10	17
		Radiografer	4	3	5	12	11	1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)

No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
1	Puskesmas	Dokter	44	6	11	61	72	-11
		Bidan	317	234	5	556	566	-10
		Perawat	152	221	3	376	572	-196
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	50	23	2	75	95	-20
		Tenaga kesehatan masyarakat	62	62	3	127	183	-56
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	0	0	2	2	-	
2	Rumah Sakit	Dokter	13	2	6	21	16	5
		dokter spesialis	3	0	1	4	3	1



No	Puskesmas & RSUD Ratu Zalecha	SDMK (Saat ini) - Data Existing					Jumlah SDMK seharusnya berdasarkan ABK Kesehatan atau Standar Ketenagaan Minimal	Kesenjangan
		Jenis SDMK	PNS	PPPK	Lainnya	Total		
		penyakit dalam						
		dokter spesialis kulit dan kelamin	2	0	0	2	2	0
		Bidan	57	5	7	69	50	19
		Perawat	163	64	91	318	175	143
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	21	3	3	27	10	17
		Tenaga kesehatan masyarakat	7	1	2	10	11	-1

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjar

4.2.5. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025 berasal dari berbagai sumber sebagaimana pada tabel berikut ini:

DATA APBD, ANGGARAN SATUAN KERJA DAN ANGGARAN SPM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3.041.125.510.897	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	462.477.194.625	5,79
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	26.775.645.295	0,88
- Dana Bagi Hasil		
- DAU	14.877.101.514	
- DAK Fisik		
- DAK Non Fisik	11.889.537.281	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.824.821.800	2.373.177.400
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.688.400	138.940.000
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	215.667.800	64.671.150
Pelayanan Kesehatan Balita	158.739.280	153.244.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.947.167.100	1.563.391.100
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100.430.500	99.021.871
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	131.471.600	119.535.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.014.500	37.564.500
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	63.148.000	61.930.000
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	355.851.000	310.103.500
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	547.318.000	430.439.200
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	688.454.000	682.234.900
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.432.054.800	2.954.674.231
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.762.018.515	5.454.776.040
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.278.800.000	3.185.060.640
Jumlah	26.775.645.295	16.946.528.632

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.789.821.800	2.373.177.400	85,06
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.688.400	138.940.000	59,97
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	215.667.800	64.671.150	29,14
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	158.739.280	153.244.000	96,53
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.947.167.100	1.563.391.100	80,29
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100.430.500	99.021.871	98,59
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	131.471.600	119.535.000	90,92
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.014.500	37.564.500	98,81
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	63.148.000	61.930.000	98,07
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	355.851.000	310.103.500	87,14
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	547.318.000	430.439.200	78,64
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	688.454.000	682.234.900	99,09
13.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.432.054.800	2.954.674.231	66,66
14.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.762.018.515	5.454.776.040	46,38
15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.278.800.000	3.185.060.640	97,14

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan, solusi dan tindaklanjut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TINDAKLANJUT PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Indikator	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Ibu hamil yang datang ke petugas kesehatan lebih dari 3 bulan usia kehamilan, 2. Banyak ibu hamil yang belum mengkonsumsi tablet tambah darah dengan rutin, 3. Masih ada ibu hamil yang belum 6 kali	1. Bekerjasama dengan TPK untuk mengaktifkan pendampingan calon pengantin dalam dalam elsimil (elektronik hamil) 2. Mengaktifkan aplikasi Kesehatan calon pengantin 3. Meningkatkan peran petugas	Berkoordinasi dengan Dinsos P3AP2 KB untuk mendorong TPK lebih proaktif dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin Melakukan bimbingan kepada pengelola usia produktif untuk penggunaan aplikasi Kesehatan calon pengantin Melaksanakan desk program Kesehatan keluarga

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Indikator	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
		kunjungan ke petugas kesehatan (termasuk dengan dokter), 4 . Masih ada ibu hamil yang tidak periksa laboratorium	Kesehatan dalam edukasi pentingnya pemeriksaan kehamilan	dan gizi dalam penguatan peran petugas Kesehatan untuk memberikan edukasi pentingnya pemeriksaan kehamilan
2,	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Masih ada persalinan yang belum di faskes, 2. Masih ada persalinan yang ditolong oleh Dukun Kampung, 3. Faktor budaya masih kental di Masyarakat yaitu melahirkan di rumah karena adanya kepercayaan dan lebih nyaman dirumah untuk melahirkan tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan walaupun sudah dilengkapi peralatannya	1. Stiker P4K diaktifkan dan ditindak lanjuti sampai kepengambil keputusan akhir. 2. Kelas ibu hamil untuk menjaring ibu hamil agar persalinan dapat dilakukan dengan petugas kesehatan difasilitas kesehatan yang tersedia di desa.	Melaksanakan supervisi fasilitatif layanan KIA sekaligus monitoring stiker P4K ke Puskesmas dan mendorong Puskesmas untuk berkoordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama dan tokoh Masyarakat agar persalinan dilaksanakan di fasilitas kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Buku KIA masih belum dimanfaatkan secara optimal, 2. Formulir MTBM belum dipakai, Kunjungan KN3 belum maksimal karena masih banyak kematian neonatal, 3. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang tidak maksimal akan menyebabkan ibu melahirkan dengan bayi berisiko, terjadi komplikasi yang menyebabkan kematian pada bayi baru lahir sebelum umur bayi 28 hari	1. Peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan neonatal esensial untuk bidan yang belum terorientasi neonatal esensial 2. Melakukan kroscek penggunaan formulir MTBM. 3. Bimbingan teknis ke puskesmas.	Melakukan pertemuan peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan neonatal esensial bagi bidan desa yang mengikuti orientasi pelayanan Kesehatan neonatal esensial Melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas untuk monitoring penggunaan formular MTBM
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Petugas belum memahami Definisi Operasional, 2. Formulir KPSP tidak digunakan secara maksimal, 3.Tingkat kehadiran balita ke Posyandu masih rendah, 4. Cakupan imunisasi masih rendah, Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang mempunyai bayi / balita untuk mendatangi tenaga kesehatan ataupun kefasilitas kesehatan tingkat desa untuk memantau kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka	1. Sinkronisasi data antara kesehatan program kesehatan keluarga, gizi dan imunisasi 2. Melaksanakan orientasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi kader. 3. Meningkatkan promosi Kesehatan terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 4. Melaksanakan Desk evaluasi hasil kinerja dan penyamaan persepsi. 5. Bimbingan teknis ke puskesmas,	Melaksanakan desk program kesga dan gizi bagi pengelola gizi pengelola anak dan pengelola imunisasi Mendata kader yang belum terorientasi antropometri Melaksanakan orientasi antropometri bagi kader posyandu berdasarkan hasil pendataan Mendorong Puskesmas untuk lebih aktif dalam melaksanakan promosi dan edukasi terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	1. Belum tersedianya buku rapor kesehatan untuk semua sasaran, Cakupan TTD pada anak rematri usia pendidikan dasar masih rendah, 2.Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pelayanan anak usia pendidikan dasa	1. Melakukan penjaringan anak usia Pendidikan dasar pada posyandu remaja dan pondok pesantren atau diniyah. 2. Menghimbau untuk mengaktifkan posyandu remaja di desa. 3. Koordinasi antara pengelola usia Pendidikan dasar dan pengelola CKG puskesmas 4. Melakukan evaluasi melalui bimtek baik secara daring maupun luring	Mendorong Puskesmas untuk melaksanakan penjaringan anak usia Pendidikan dasar di posyandu remaja dan sekolah keagamaan/ponpes/diniyah Membuat surat edaran ke Puskesmas untuk mengaktifkan posyandu remaja /kunjungan remaja
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kendala sistem filter data individu di ASIK sehingga menghambat dalam input data skrining penyakit tidak menular Usia Produktif	- Memaksimalkan pendampingan penggunaan ASIK bagi kader. - Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja	Melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular terhadap usia produktif di Posbindu PTM rutin maupun mobile, Posyandu Siklus Hidup serta Pandu PTM di Puskesmas. Melaksanakan kegiatan lomba posbindu PTM dan DePe Cantix serta Pandu PTM di Puskesmas untuk upaya peningkatan pelaksanaan skrining ptm Prioritas
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1. Pemeriksaan factor risiko usia lanjut masih gabung di Posbindu, 2. Belum cukup ketersediaan strip uji gula darah dan kolesterol, 3. Banyak Lansia yang belum datang ke Posyandu, 4. Belum banyak tersedia strip kolesterol, 5.Kurangnya kesadaran lansia untuk memeriksakan kesehatannya, dimana lansia menganggap dirinya sehat	1. Membentuk posyandu lansia baru bila memungkinkan atau posyandu lansia yang ada berpindah-pindah per RT sehingga bisa menjangkau semua lansia. 2. Sweeping kunjungan lansia 3. Mengusulkan stik pemeriksaan gula darah dan kolesterol untuk lansia, 4. Membuat penjadwalan supervisi program lansia,	Berkoordinasi dengan Puskesmas agar membentuk posyandu lansia baru bila memungkinkan, apabila tidak memungkinkan dengan melaksanakan posyandu lansia mobile Koordinasi dengan seksi farmalkes untuk mengusulkan stik pemeriksaan gula darah dan kolesterol Melaksanakan bimbingan teknis program lansia ke Puskesmas
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Masih rendahnya literasi kesehatan, stigma terhadap penyakit kronis terutama Hipertensi, dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan rutin	1. Memaksimalkan peran serta jaringan puskesmas untuk pemantauan penderita hipertensi yang sudah terdata.	Mengadakan Komitmen kepala puskesmas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1. Masih ada petugas pengelola yang tidak tertib laporan register manual penderita Diabetes Melitus	Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja	Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Masih kurang maksimalnya input data ke aplikasi Simkeswa sehingga terdapat perbedaan data	Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja	Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga TBC (suspek) atau kontak erat sulit ditemui pada jam kerja saat petugas kunjungan rumah	Meningkatkan sosialisasi di masyarakat dan koordinasi lintas sektor Meningkatkan sdm puskesmas untuk capaian program dalam kunjungan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program TB dan melaksanakan kegiatan program TB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Indikator	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
			rumah	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang yang Berisiko Terinfeksi HIV	Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah di beberapa daerah dapat menjadi hambatan dalam penyerapan dan pemahaman informasi mengenai sosialisasi	Meningkatkan sosialisasi di masyarakat dan koordinasi lintas sektor Meningkatkan sdm puskesmas untuk capaian program dalam kunjungan rumah	Melaksanakan kegiatan konselor HIV AIDS Melaksanakan VCT Mobile Melaksanakan kegiatan Program HIV

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab.Banjara



4.3. **Urusan Pekerjaan Umum**

4.3.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengatur terkait:

- 1. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum (SPM Pekerjaan Umum) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 2. SPM Pekerjaan Umum didalamnya mencakup:
 - a. Jenis dan penerima pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Pencapaian SPM Pekerjaan Umum;dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
- 3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum mencakup:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;dan
 - b. Tata cara pemenuhan standar.
- 4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

=

Jumlah kumulatif Masyarakat (rumah tangga atau warga negara) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota

Jumlah total proyeksi rumah tangga atau warga negara di seluruh kabupaten/kota tersebut

x 100%

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

=

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan limbahnya dioleh di IPALD

Jumlah rumah di Kabupaten/Kota

x 100%

4.3.2. **Target Pencapaian**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2025 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Pekerjaan Umum untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2025
untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	595717	241434					
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6005	6005	100	Jaringan Perpipaan			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	2421	2421	100
						Kualitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	1367	1367	100
						Bukan Jaringan Perpipaan			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	N/A	N/A	N/A
						Kualitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak	N/A	N/A	N/A

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	595.717	495.286					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1169	1169	100%	KUANTITAS SPALD			
						Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	452	452	100%
						KUALITAS SPALD			
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	-	-	-
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua			
						Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	452	452	100%
						Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan, 2025

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 adalah TUNTAS PARIPURNA dengan nilai 100%.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2005 berasal dari dari berbagai sumber sebagaimana pada tabel berikut ini:



DATA APBD, ANGGARAN SATUAN KERJA DAN ANGGARAN SPM PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar		
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	364.734.921.032,00	
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	32.531.300.359,00	
- Dana Bagi Hasil		
- DAU	23.976.382.359,00	
- DAK Fisik	8.554.918.000,00	
- DAK Non Fisik	-	

Sumber : DPUPRP

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	20,066,777,200.00	18,440,309,814.25
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	12,464,523,159.00	11,447,395,890.00
Jumlah	32,531,300,359.00	29,887,705,704.25

Sumber : DPUPRP

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0.00%
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,477,246,700	7,143,270,100	95.53%
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	415,826,400	376,463,500	90.53%
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2,003,600,000	2,003,600,000	100.00%
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10,170,104,100	8,916,976,214	87.68%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	406,950,000	390,604,500	95.98%
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,446,011,159	10,479,227,390	91.55%
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	611,562,000	577,564,000	94.44%

Sumber : DPUPRP, 2025

4.3.5. Dukungan Personil

Penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar terdiri dari:

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		S-2		
2	Kepala Bidang Cipta Karya		S-1		
3	Kepala Seksi Air Minum		D-3		
4	Kepala Seksi Penyehatan lingkungan Permukiman		S-1		
5	Operator Aplikasi e-SPM Dinas PUPRP		S-1		

Sumber : DPUPRP



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan, solusi dan tindaklanjut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TINDAKLANJUT PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

No	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut
1	Terdapat beberapa permasalahan pada saat pelaksanaan berlangsung seperti permasalahan listrik, daftar penerima manfaat / BNBA yang berubah, perubahan jalur pipa distribusi dari hasil perencanaan	Membuat surat pernyataan yang berisi tentang alasan pemindahan / perubahan BNBA / daftar penerima manfaat dan di tandatangi oleh aparat desa dan penerima manfaat semula. Melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemindahan jalur pipa distribusi	SKPD dan Konsultan perencana melakukan koordinasi dengan aparat desa terkait daftar penerima manfaat, kesediaan lahan, jalur perpipaan dan mobilisasi dilapangan sehingga tidak menghambat jalannya pekerjaan.
2	Penerbitan SK Bansos yang memerlukan waktu yang relatif lama pada bagian Hukum Setda menyebabkan keterlambatan dalam penandatanganan PKS	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan mengingat waktu pekerjaan yang mendekati batas akhir disebabkan keterlambatan PKS	Percepatan penentuan lokasi prioritas Bansos, survey kelapanga dan perhitungan RAB serta proses SK Lokasi
3	Data terkait DPM untuk air limbah masih terkendala karena pencocokan data ulang dengan data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) dan data di lapangan	Melakukan survei untuk data KRS dan DPM di lapangan	Telah dilakukan survei untuk data KRS dan DPM di lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
4	Perbedaan standar layak dan aman di OPD lain membuat perhitungan menjadi lebih sulit, serta penyesuaian beberapa program sekaligus	Penyamaan persepsi dengan merujuk SPM PU	Melakukan rapat koordinasi dan pemindaian data layak dan aman sesuai dengan SPM PU
5	Perencanaan akses sanitasi diperlukan anggaran yang sangat besar mengingat pembangunan yang sudah berjalan wajib menyesuaikan SNI dan Peraturan yang berlaku untuk Pemeliharaan dan Operasional, perencanaan diarahkan kepada pemeliharaan, dana yang digunakan tidak mencapai 100% karena dari hasil perencanaan, kebutuhan untuk pemeliharaan diperlukan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia	Mencari sumber pendanaan bantuan pembangunan Tangki Septik Individual (TSI) ke pemerintah provinsi dan pusat	Mengajukan usulan pembangunan Tangki Septik Individual (TSI) ke pemerintah provinsi dan pusat
6	Pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan teknis, kendala paling sering terjadi yaitu ada perubahan nama penerima	Melakukan komitmen antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan pelaksana untuk meminimalisir perubahan data BNBA.	Pembuatan surat komitmen antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan Pelaksana.

Sumber : DPUPRP, 2025



4.4. **Urusan Perumahan Rakyat**

4.4.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengatur terkait:

- 1. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum (SPM Perumahan Rakyat) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 2. SPM Perumahan Rakyat didalamnya mencakup:
 - a. Jenis dan penerima pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Pencapaian SPM Perumahan Rakyat;dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
- 3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat mencakup:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;dan
 - b. Tata cara pemenuhan standar.
- 4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

=

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

x 100%

- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

=

Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

x 100%

4.4.2. **Target Pencapaian**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2025 sebagai Perangkat Daerah pelaksana SPM Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2025 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0
						2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
						3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0
						4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0
						2. Subsidi uang sewa	0	0	0
						3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0

Sumber : DPRKPLH

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 adalah TUNTAS PARIPURNA dengan nilai 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2025 berasal dari dari berbagai sumber sebagaimana pada tabel berikut ini:



Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3,041,125,510,897	100
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	139,739,562,371	4,59
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	188,466,000	0,01
- Dana Bagi Hasil	188,466,000	0,01
- DAU		
- DAK Fisik		
- DAK Non Fisik		

Sumber : DPRKPLH

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0
Jumlah		

Sumber : DPRKPLH

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	188.466.000	187.223.100	99.34
		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	93.178.500	92.719.600	99.51
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	95.287.500	94.503.500	99.18

Sumber : DPRKPLH, 2025

4.4.5. Dukungan Personil

Penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terdiri dari:

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	IV/b	S-2		
2	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	IV/a	S-2	- Sosialisasi Permen PUPR No.19/PRT/M/2018 - Sosialisasi Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM	
3	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	III/d	S-1		
4	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Perumahan Rakyat	IX	S-1	- Sosialisasi Permen PUPR No.19/PRT/M/2018 - Sosialisasi Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM	

Sumber : DPRKPLH



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan, solusi dan tindaklanjut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TINDAKLANJUT PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

No	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1.	Kendala administrasi berupa belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan status bencana oleh Kepala Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya penanganan bencana.	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk percepatan penetapan status bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM	Mendorong percepatan penerbitan SK penetapan status bencana oleh Kepala Daerah pada saat terjadi bencana.
2.	Belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat terkait implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Meskipun Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 telah menjadi dasar hukum, regulasi tersebut masih bersifat umum sehingga pemerintah daerah harus menafsirkan dan menyusun mekanisme pelaksanaan secara mandiri.	Penyusunan panduan teknis yang lebih rinci dan komprehensif dari pemerintah pusat serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan SPM.	Mengusulkan kepada pemerintah pusat penyusunan petunjuk teknis SPM secara lebih operasional serta menyusun pedoman teknis internal daerah sebagai acuan sementara pelaksanaan SPM.
3.	Keterbatasan anggaran daerah serta sifat bencana yang tidak dapat diprediksi menyebabkan pembiayaan SPM sering kali tidak mencukupi, terutama pada saat terjadi bencana berskala besar. Hal ini berdampak pada keterbatasan cakupan penerima bantuan dan penundaan penanganan bagi sebagian korban.	Mengalokasikan anggaran SPM secara bertahap sesuai prioritas serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan tambahan pascabencana.	Mengalokasikan anggaran SPM secara bertahap sesuai prioritas serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan tambahan pascabencana.
4.	Kesulitan dalam penetapan target kinerja SPM akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan prioritas penerima bantuan, yang saat ini lebih difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun secara regulasi seluruh warga terdampak berhak menerima layanan.	Melakukan penyesuaian target SPM dengan menyusun skala prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan dan kerentanan masyarakat.	Melakukan penyesuaian target SPM dengan menyusun skala prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan dan kerentanan masyarakat.
5.	Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana SPM dalam memahami regulasi, administrasi, dan mekanisme pelaksanaan SPM penanganan bencana.	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis penerapan SPM.	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan bagi personil penerapan SPM
6.	Proses pendataan dan identifikasi korban bencana dan kerusakan rumah belum optimal akibat keterbatasan anggaran pendataan, luasnya wilayah terdampak, kondisi medan pascabencana yang sulit dijangkau, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas personel pendata.	Penguatan sistem pendataan melalui optimalisasi perencanaan anggaran pendataan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan aparat wilayah setempat.	Mengalokasikan anggaran khusus pendataan, melibatkan perangkat daerah terkait, aparat kecamatan/kelurahan dan masyarakat, serta memanfaatkan sistem pendataan berbasis digital untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi data.

Sumber : DPRKPLH



4.5. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

4.5.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Mininal, jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. **Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Persentase ketenteraman dan ketertiban umum

pelayanan dan

=

Jumlah warga negara terdampak penegakan PERDA atau PERKADA yang sesuai mutu + jumlah warga yang terlayani (pengaduan dan temuan) di Kabupaten/Kota

Proyeksi warga negara warga negara terdampak penegakan PERDA atau PERKADA yang sesuai mutu + jumlah warga yang terlayani (pengaduan dan temuan) di Kabupaten/Kota

x

100%

2. **Pelayanan informasi rawan bencana**

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan kajian risiko bencana;dan
- b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.

Persentase pelayanan informasi rawan bencana

=

Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah penduduk yang berada di Kawasan rawan bencana

x

100%

3. **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Pembuatan rencana kontijensi;
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;dan
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

pelayanan dan terhadap

=

Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah penduduk yang berada di Kawasan rawan bencana

x

100%

4. **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat:

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas;
- b. Respon cepat darurat bencana;
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;



- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;dan
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

=

Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Perkiraan jumlah korban bencana secara keseluruhan

x

100%

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

=

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh relawan kebakaran dan penyelamatan

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X

x

100%

4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal target SPM terkait trantibumlinmas yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten / Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022



4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Banjar Tahun 2025
untuk indikator SPM dengan jenis pelayanan dasar
ketenteraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota	3875	3875	100	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	63	63	100
						2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	8	8	100
						3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	16	7	43.75
						4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1	1	100
						5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	-	-	-
						6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	-	-	-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	385.200	385.200	100	Penyusunan Kajian Risiko Bencana			
						Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100
						Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	2	2	100
						Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	3	3	100
						Tersedianya Tenaga	4	4	100

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
						Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
						Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	600	600	100
						Terlaksananya sosialisasi tatap muka	34	34	100
						Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	37	37	100
						Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100
						Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
						Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100
						Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	50	50	100
						Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100
						Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100
						Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100
						Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
						Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	94	94	100
						Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100
						Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100
						Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	450	450	100	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
						Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1	1	100
						Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	2	2	100
						Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	2	2	100
						Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100
						Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan	4	4	100

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						kebutuhan)			
						Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
						Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
						Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
						Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)			
						Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
						Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	120	120	100
						Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100
						Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)			
						Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
						Gladi Lapang			
						Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	100
						Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
						Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100
						Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
						Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
						Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	25	25	100
						Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	100	100	100
						Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	25	25	100
						Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	9	9	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	187.777	187.777	100	Kejadian Bencana			
						Respon Cepat Darurat Bencana			
						Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2	2	100
						Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	26	26	100
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
						Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	241	241	100
						Tersedianya Sarana dan	2	2	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)			
						Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100
						Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	26	26	100
						Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100
						Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	26	26	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	205	205	100	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	65	65	100
						Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	16	16	100
						Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	539	539	100
						Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	6	8	100
						Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	205	205	100

Sumber : Data Diolah oleh Bag. Pemerintahan Kab.Banjara

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025 adalah TUNTAS UTAMA dengan nilai 96,92%.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Banjar Tahun 2025 berasal dari dari berbagai sumber sebagaimana pada tabel berikut ini:

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	3.776.164.100	2.772.582.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	556.975.000	490.923.750
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.195.905.350	1.944.226.583
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.768.498.000	1.766.145.515
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	12.059.524.002	11.325.136.417

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



(DAMKAR)
Sumber : Data Diolah oleh Bagian Pemerintahan

Sub Urusan Trantibum

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3,041,125,510,897	100 %
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	27,738,914,156	16.82%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	3,776,164,100	0.15%
a. Dana Bagi Hasil		
b. DAU	3,776,164,100	0.15%
c. DAK Fisik		
d. DAK Non Fisik		

Sumber : Satpol PP Kab Banjar

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,776,164,100	2,772,582,000	73.42
		Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1,283,535,300	891,242,000	69.44
		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	292,437,800	166,223,000	56.84
		Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	591,926,000	433,940,000	73.31
		Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	618,154,000	310,934,000	50.30
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	9,400,000	-	-
		Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	980,711,000	970,243,000	98.93
		Kegiatan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	689,189,000	528,011,000	76.61
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	397,564,000	369,995,000	93.07
		Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	258,713,000	129,048,000	49.88
		Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32,912,000	28,968,000	88.02

Sumber : Satpol PP Kab.Banjara

Sub Urusan Kebencanaan

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3,041,125,510,897	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	13.619.386.314	
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	5,727,938,350	
- Dana Bagi Hasil		
- DAU	5,727,938,350	
- DAK Fisik		
- DAK Non Fisik		

Sumber : BPBD

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		763,535,000	684,785,295	89.69%
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	556,975,000	490,923,750	88.14%
		Sub.Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	556,975,000	490,923,750	88.14%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	206,560,000	193,861,545	93.85%
		Sub.Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67,122,000	63,533,580	94.65%
		Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota	40,406,000	37,844,755	93.66%
		Sub.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	33,712,000	32,617,175	96.75%
		Sub.Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	65,320,000	59,866,035	91.65%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2,195,905,350	1,944,226,583	88.54%
		Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1,558,482,850	1,370,128,198	87.91%
		Sub.Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	72,314,000	59,297,600	82.00%
		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49,111,000	45,160,000	91.95%
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	324,513,000	296,895,202	91.49%
		Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	126,680,000	116,534,038	91.99%
		Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	64,804,500	56,211,545	86.74%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,768,498,000	1,766,145,485	63.79%
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	119,980,000	104,487,532	87.09%
		Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52,015,000	8,168,075	15.70%
		Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	65,200,000	63,759,200	97.79%
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	825,012,500	744,796,228	90.28%
		Sub. Kegiatan Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana	1,706,290,500	844,934,450	49.52%
Jumlah			5,727,938,350	4,395,157,363	76.73%

Sumber : BPBD

Sub Urusan Damkar

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	3,041,125,510.897	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	25.807.660.602	
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	12.059.524.002	
● Dana Bagi Hasil		
● DAU	12.059.524.002	
● DAK Fisik		
● DAK Non Fisik		

Sumber : DPKP

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	12.059.524.002	11.325.136.417	93,91%
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.647.607.720	9.267.916.859	96,06%
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	361.203.200	315.036.402	87,22%
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	533.641.400	311.164.531	58,31%
		Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	227.427.000	220.846.229	97,11%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.319.399.120	8.246.152.717	99,12%
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	13.231.000	13.042.800	98,58%
		Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	192.706.000	161.674.180	83,90%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	63.379.200	60.750.126	95,85%
		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	34.844.200	34.419.708	98,78%
		Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	28.535.000	26.330.418	92,27%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	385.054.000	355.945.984	92,44%
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	282.889.000	268.986.580	95,09%
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	92.091.000	77.011.085	83,62%
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	10.074.000	9.948.319	98,75%
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.963.483.082	1.640.523.448	83,55%
		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1.963.483.082	1.640.523.448	83,55%

Sumber : DPKP Kab.Banjarnegara

4.5.5. Dukungan Personil

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala Satpol PP	IV/ b	Strata 2		√
2	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	III/d	Strata 2		√
3	Kepala Bidang SDA & Perlindungan Masyarakat	IV/ a	Strata I		√
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	IV/ a	Strata 2		√
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	III/c	Strata I		√
6	Operator Aplikasi e-SPM Sekretariat	IX	Strata I		√
7	Operator Aplikasi e-SPM Sekretariat	-	SLTA		√

Sumber : Satpol PP Kab.Banjarnegara

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP								SATLINMAS
		ASN						TENAGA KONTRAK		
		PNS		PPPK		JUMLAH				
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	37	5	150	3	187	8	1		2519



Sumber : Satpol PP Kab.Banjar

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM SUB URUSAN KEBENCANAAN TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala BPBD	Pembina Tingkat I	S.2		
2	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik	Pembina	S.1		
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembina	S.2		
4	Kasubbag Perencanaan	Penata TK.I	D.3		
5	Kasubbag Keuangan	Penata TK.I	S.1		
6	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Kedaruratan Logistik	Penata Muda	S.1		
7	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penata Muda	S.1		

Sumber : BPBD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



No	Nama	Jabatan	Jenis Mutu Pelayanan									Diklat yang Diikuti	Status	
			Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	Glati Lapang	Koordinasi Teknis Pemanjapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		ASN	Non ASN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Drs.Wasis Nugraha,S.IP	Kepala Pelaksana											X	
1	Yayan Daryanto, S. Hut	Kabid Kedaruratan dan Logistik				X	X			X	X		X	
2	Abdullah Fahtar, SE., MM	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan				X	X						X	
3	Azhar Alamsyah, S.Sos	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi				X	X						X	
4	Yayan Daryanto, S. Hut	Kabid kedaruratan dan Logistik								X	X		X	
5	Rio Nanang Hermawan, ST, MT	Kasi Rehabilitasi				X	X						X	
6	Nina Dlati, AMk	Kasubbag Perencanaan dan Program											X	
7	Yannaldo Bachdie, SAP	Kasi Logistik											X	
8	Aisyah, SKM	Kasi Pencegahan				X	X						X	
9	Firmansah, S.P.	Kasi Kesiapsiagaan			X	X	X						X	
10	Sri Wahyudhy, ST	Kasi Rekonstruksi											X	
11	Muhammad Arifin, SE	Kasi Kedaruratan				X				X	X		X	
12	Sri Isna Hayani, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset											X	
13	Suprpto, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan											X	
14	Ihsan, S.ST	Penelaah Teknis Kebijakan											X	
15	Endang Marhadati, SAP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian											X	
16	Henry Puspitawati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan											X	
17	Risma Inayati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan											X	
18	Mufly Alfian Bakhtiar, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan				X							X	
19	Dwi Afyani Rahmah, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan				X							X	
20	Aldy Fahriza Noor, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan			X	X	X			X	X		X	
21	Muhibbah Sofia	Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula								X	X		X	
22	Cindy Syafina Budi Ananda	Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula								X	X		X	
23	Muhammad Hendra Saputra, SH	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama								X	X		X	
24	Muhammad Rifani, SKom	Penata Komputer Ahli Pertama								X	X		X	
25	Noor Laila, SKM	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama				X				X	X		X	
26	Gusti Tita Rahma Yulianti, SE	Perencana Ahli Pertama											X	
27	Eka Widya Puji Astuti, SAP	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama											X	
28	Taufik Firdaus, S.T	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama			X	X	X			X	X		X	
29	Muhammad Budi Saputra, S.T	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama								X	X		X	
30	Alfisyah, SE	Penata Layanan Operasional											X	



No	Nama	Jabatan	Jenis Mutu Pelayanan									Diklat yang Diikuti	Status	
			Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	Glati Lapang	Koordinasi Teknis Pemanjapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		ASN	Non ASN
31	Budi, SE	Penata Layanan Operasional								x	x		x	
32	Ahmad Hafizjanoor, SHut	Penata Layanan Operasional								x	x		x	
33	Gusti Rina Aulia, SPd	Penata Layanan Operasional											x	
34	Lily Trisnarty, SE	Penata Layanan Operasional								x	x		x	
35	Ahmad Firdaus Rifani, SKom	Penata Layanan Operasional								x	x		x	
36	Nurhidayah, SE	Pengolah Data Kedaruratan								x	x			x
37	Mira Nadya Silvania, SKom	Petugas Puskalops								x	x			x



38	Sofia Maulida, SE	Analisis Mitigasi Bencana								X	X			X
39	Siti Jubaidah, S.Stat	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran								X	X			X
40	Nohasanah, S.Si.T	Penyusun Laporan Keuangan								X	X			X
41	Akhrad Iqbal Bulkia, SM	Koordinator Gudang Peralatan								X	X			X
42	Syaiful Rahman, S.Sos	Pengolah Data Rekonstruksi								X	X			X
43	M. Rifky Munanda, SH	Pengadministrasi Umum								X	X			X
44	Rezky Apriyanda Nugraha, S.Tr.Kes	Rescue			X					X	X			X
45	Muhammad Balya Riyadi	Pengadministrasi Umum			X					X	X			X
46	MDhairby, AMd. Kep	Rescue			X					X	X			X
47	Mulyadi	Pelugas Jaga Malam Kantor								X	X			X
48	Ramiansyah, SE	Koordinator Gudang Logistik								X	X			X
49	Tri Sasmito Budi Raharjo	Rescue								X	X			X
50	Rahmansyah	Penjaga Repeater								X	X			X
51	Muhammad Zubairi, S.Pi	Pengelola Sarana dan Peralatan Kantor								X	X			X

Sumber : BPBD

DUKUNGAN PERSONIL PENERAPAN SPM SUB URUSAN DAMKAR TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek atau Diklat terkait Standar Pelayanan Minimal	
				Telah Diikuti	Belum diikuti
1	Kepala DPKP	Pembina Tingkat I / Ivb	S-2		✓
2	Kepala Bidang Pencegahan	Pembina/IVa	S-2	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
3	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana	Penata Tingkat I/ IIIId	S-2		✓
4	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, Aset	Penata/IIIc	S-1		✓
5	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pemadaman	Golongan IX	S-1	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
6	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pemadaman	Kelas Jabatan VII	S-1	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	
7	Operator Aplikasi e-SPM Bidang Pencegahan	Golongan IX	S-1	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I	

Sumber : DPKP

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL DPKP							
		ASN						TENAGA KONTRAK	
		PNS		PPPK		JUMLAH			
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	17	4	4	75	18	78	13	19

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat yang Diikuti
1	2	3	4
1	GUSTI YUDHI, S.Pi. M.M.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
2	H. M. SOFYANI NOOR, S.Sos., M.Pd.	KASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
3	MUHAMMAD DIMYATI, S.Sos.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
			Diklat Inspektur Pemadam Kebakaran
4	RUDY MUZAKIR, S. Sos.	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA, INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
5	DONY PERMADI, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
6	RIZKY MIRAJI, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
7	ERMA, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
8	ANNISA ZURAIDA, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
9	MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
10	MUHAMMAD NAZAR KHULAIFI, S.T.	ANALIS KEBAKARAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
			Diklat Inspektur Pemadam Kebakaran
11	MUHAMMAD IRWANSYAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
			Diklat Fire Rescue
12	FAJAR MAULANA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
13	ALWAN IRFAN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
14	MUHAMMAD BUSIRI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
15	SAYID MUHAMMAD ROJIB	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
16	RYAN FADILLAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
17	MAULIDA RAHMAFANY	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat yang Diikuti
1	2	3	4
			Kualifikasi Pemadam I
18	M.SAMLAWI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
19	ERRI WIBOWO	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
20	RIZKY APRILIANOR	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
21	AHMAD RIFALDI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
22	MUHAMMAD RIZA RAHMAN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
23	MUHAMMAD ARIE MAULIDIN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Diklat Fire Rescue
24	M. ZAINI FADILLAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
25	DWI NOOR WAHIDAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
26	MUHAMMAD NUR	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
27	RIDUANSYAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
28	MUHAMMAD REVEN RENALDY	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
29	AGUS MAULIDI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
30	MUHAMMAD RIKY SAPUTRA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
31	SERI MURNI YANTI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
32	MUHAMMAD MULKAN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
33	EDI PRASETYO	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
34	SAMUEL TIMBANG	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
35	ISRIANI HIDAYAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
36	AKHMAD KHARISMA ADZANDY	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
37	MUHAMAD BAYU RINALDI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
38	MUHAMMAD NOOR	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
39	RIDHA RASYID Hidayat	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
40	EDWIN NUGRAHA PERMANA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
41	MUHAMMAD NASYID	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
42	RUDINI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
43	HARRY NATHA SAPUTRA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
44	RIZKI ANANDA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Diklat Inspektur Pemadam Kebakaran
45	GT. RIDKA NOOR IFANSYAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
46	RONI FITRIANI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
47	GUSTI BAYU ANZANI AKHFIRA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
48	PUPUT DWI SUKMANA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
49	HAROEN AL RASYID	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
50	FAISOL	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Diklat Operator Pemadam Kebakaran
51	NOFIADI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
52	RIDHO RIZKY WIJAYA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
53	ANANG SUBHAN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
54	ABDUL HAFIZ	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
55	HARIS AFRIZAL	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
56	SAIFI RIZWANA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat yang Diikuti
1	2	3	4
			Kualifikasi Pemadam I
57	FAKHRURRAZI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
58	MUHAMMAD HAZMI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Diklat Fire Rescue
59	SLAMAT RIYADI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
60	AHMAD SAYUTI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Diklat Fire Rescue
61	SAMLANI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
62	ANDRI RIFA'I	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
63	HARNITA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
64	AKHMAD YANI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
65	ARIEF YUDIANTO	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
66	MISRAN HARIYANTO	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
67	RAHMADANI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
68	SUTAN SYAHRIR	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
69	ABDUL KHOLIQ	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
70	FAIZAL RAHMAN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
71	SALEH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
72	SUPIAN SAURI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
73	ROZIKIN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
74	JAMALUDDIN	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
75	RAHMAT	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
76	KARINA ARSITA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
77	RISA AYU CHAIRANI, SKM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
78	NONI REZKI MEIRANI, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
79	AKHMAD UBAIDILLAH	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
80	M. LUTFI	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
81	Wahyu Rahmad Bawani Putra	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
82	Muhamad Shobi Rahman	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
83	Wira Permadi Azhar	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
84	Muhammad Aryadi Saputra	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
85	Ahmad Yazid	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
86	Gt. Mauliani Kusuma	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
87	Ibrahim	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
88	Husairi	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
89	Gusti Abdurrahman	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
90	M. Irwansyah, S.Kom	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
91	Nor Halimah	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
92	Nafsul Mutmainah	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
93	Gt. Khalimatus Sa'diah	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
94	Muhammad Luthfi Ekayuda	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
95	Nurhikmah	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
96	Yudita Apriadi Putra	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat yang Diikuti
1	2	3	4
97	M. Hamidi	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
98	Ghina Aulia	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I
99	Tanjung Heru Nurtama	PETUGAS TEKNIS	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
1	H. Muhammad Sofyani Noor S.SOS, M.PD	laki-laki	1968-08-17	Regu Penyuluh	Martapura		630300000016		
2	Nusri	laki-laki	1995-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000017		
3	Muhammad Ramadhan Nor	laki-laki	1999-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000018		
4	M. Hamdani	laki-laki	1999-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000019		
5	ABDUL HARIS	laki-laki	2001-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000020		
6	Muhammad Syarwani	laki-laki	1997-09-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000021		
7	Hasan	laki-laki	2002-10-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000022		
8	MUHAMMADHANIF ASYROFI	laki-laki	1998-05-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000023		
9	Muhammad Agil	laki-laki	1995-05-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000024		
10	Nur Hilalliyah	perempuan	1999-11-26	Regu Penyuluh	Martapura		630300000025		
11	MUNIROH	perempuan	2001-01-14	Regu Penyuluh	Martapura		630300000026		
12	Muhammad rizki abdilah	laki-laki	1999-08-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000027		
13	Muhammad Fauzan Noor	laki-laki	2002-12-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000028		
14	Muhammad Aryadi Saputra	laki-laki	2001-06-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000029		
15	AHMAD SYARIF	laki-laki	1978-08-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000030		
16	HENDRA	laki-laki	1987-06-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000031		
17	Arif Haryo Kusuma	laki-laki	1988-01-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000032		
18	soraya aldena	perempuan	2002-12-18	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000033		
19	Dedy Helmi Kurniawan	laki-laki	1994-12-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000034		
20	muhammad saukani	laki-laki	1986-03-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000035		
21	Abdul Hakim	laki-laki	1996-07-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000036		
22	Widi Harto	laki-laki	1983-11-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000038		
23	Didik Prasetyo	laki-laki	1995-02-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000039		
24	SIBAWAIHI	laki-laki	1981-01-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000040		
25	deddy rusmadi	laki-laki	1972-02-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000041		
26	H.ABDULLAH	laki-laki	1991-03-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000042		
27	MUHAMMAD ROSYAD	laki-laki	1978-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000043		
28	AHMAD RIPAI	laki-laki	1975-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000044		
29	Fakhruzzaki	laki-laki	1995-07-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000045		
30	dody risandy	laki-laki	1997-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000046		
31	Muhammad Wildan, SP, MP	laki-laki	1986-07-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000047		
32	muhammad safii	laki-laki	1977-07-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000048		
33	USMAN	laki-laki	1984-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000049		
34	M.IRFANIANNUR	laki-laki	1993-07-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000050		
35	AHMAD KURNIAWAN	laki-laki	1986-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000051		
36	JARKASI	laki-laki	1949-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000052		
37	HALIMAH	perempuan	1991-10-30	Regu Penyuluh	Martapura Timur		630300000053		
38	MUHAMMAD HIDAYAT	laki-laki	1996-11-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000054		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
39	MUHAMMAD TAUFIK	laki-laki	1998-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000055		
40	MUHAMMAD YUSUF	laki-laki	2001-07-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000056		
41	RISKI	laki-laki	2001-07-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000057		
42	Hasan Baseri	laki-laki	1977-05-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000058		
43	Irfan Noor	laki-laki	2003-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000059		
44	JUMBERI	laki-laki	1982-04-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000060		
45	MUHAMMAD SAFII	laki-laki	1992-10-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000061		
46	Mahyuddin	laki-laki	1972-09-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000062		
47	Gusti Akhmad Hafizi	laki-laki	2003-08-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000063		
48	H.TATAK KUSDARYONO	laki-laki	1969-01-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000064		
49	MUHAMMAD AMIN	laki-laki	2003-04-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000065		
50	Ahmad sojarwo	laki-laki	1983-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000066		
51	Muhammad wildan najib	laki-laki	1999-03-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000067		
52	M.ILHAM MUHAIMIN	laki-laki	2003-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000068		
53	Salmani	laki-laki	1982-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000069		
54	M. Saadillah	laki-laki	1962-02-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000070		
55	H.MUHAMMAD ARIFIN,S.Sos.MAP	laki-laki	1965-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000071		
56	Taberani	laki-laki	1971-02-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000072		
57	AHMAD JULIANSYAH	laki-laki	2001-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000073		
58	MUHAMMAD ZAINI IKHSAN	laki-laki	1996-04-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000074		
59	Nain	laki-laki	1979-11-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000075		
60	Hamzah	laki-laki	1973-08-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000076		
61	Gazali Rahman H	laki-laki	1970-09-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000077		
62	MUHAMMAD ROOM	laki-laki	1994-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000078		
63	MUHAMMAD SYAIPULAH	laki-laki	2000-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000079		
64	Achmad zulfiqri	laki-laki	2000-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000080		
65	Wahyunita	perempuan	1989-08-22	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000081		
66	Ahmad Rasyid Fajrillah	laki-laki	1998-02-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000082		
67	ARDIANSYAH	laki-laki	1977-04-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000083		
68	Said al akhsani	laki-laki	1977-11-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000084		
69	Muhammad Zaini	laki-laki	1982-04-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000085		
70	Jahri Padli	laki-laki	1983-03-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000086		
71	jani	laki-laki	1996-11-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000087		
72	Muhammad Sayuti	laki-laki	2001-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000088		
73	ardiansyah	laki-laki	1999-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000089		
74	MASHUDI.S.Sos,M.Si	laki-laki	1970-07-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000090		
75	Jum'ah	perempuan	1982-01-12	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000091		
76	Ahmad Saputra	laki-laki	2001-10-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000092		
77	Muhammad Ramadhani	laki-laki	1999-12-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000093		
78	MIFATAHUL JANNAH	perempuan	1996-10-19	Regu Penyuluh	Martapura		630300000094		
79	Bridge Bounty Martha	laki-laki	1990-07-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000095		
80	irwan	laki-laki	1996-01-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000096		
81	Tikrimah	perempuan	1970-04-03	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000097		
82	Zainal Abidin	laki-laki	1986-05-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000098		
83	A Murtada	laki-laki	1986-10-28	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000099		
84	MUHAMMAD ROPIQ	laki-laki	2003-08-06	Pemadaman dan	Sungai		630300000100		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
				Penyelamatan	Pinang				
85	Marzuki M	laki-laki	1979-08-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000101		
86	Jamal mirdad	laki-laki	1991-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000102		
87	TEGUH YUWONO	laki-laki	1975-08-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000103		
88	Haderi	laki-laki	1964-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000104		
89	SHOBIRIN	laki-laki	1972-09-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000105		
90	Suhaimi	laki-laki	1969-01-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000106		
91	AHMAD SIDDIK AL MANSYAWI	laki-laki	2003-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000107		
92	HANAFI	laki-laki	1974-05-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000108		
93	AHMAD GUZALI	laki-laki	1981-10-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000109		
94	Muliyadi	laki-laki	1966-08-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000110		
95	sumar yuni	laki-laki	1987-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000111		
96	Yudha Setiawan	laki-laki	1984-03-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000112		
97	Baihaki	laki-laki	2000-10-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000113		
98	Abu Sofyan	laki-laki	1972-09-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000114		
99	Rahimah	perempuan	1999-12-26	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000115		
100	Padelianyah	laki-laki	1970-09-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000116		
101	Husin qadri	laki-laki	2000-12-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000117		
102	Muhammad Fahrani Hasbi	laki-laki	1972-05-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000118		
103	BAHRUN	laki-laki	1968-08-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000119		
104	akhmad kharisma adzandy	laki-laki	1994-10-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000120		
105	ali akbar	laki-laki	1998-05-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000121		
106	AHMAD ZAINURI	laki-laki	1993-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000122		
107	SARIFUDIN	laki-laki	1993-07-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000123		
108	Feri Rusadi	laki-laki	1997-02-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000124		
109	Sanusi	laki-laki	1972-03-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000125		
110	AHMAD RAIZ	laki-laki	1986-09-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000126		
111	Muhammad Asro	laki-laki	1996-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000127		
112	M. Lambri	laki-laki	1987-03-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000129		
113	Tanjung Heru Nurtama	laki-laki	1993-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000130		
114	M SAID JAILANI	laki-laki	2000-12-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000131		
115	BUDIANSYAH	laki-laki	1993-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000132		
116	Aspihan	laki-laki	1996-09-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000133		
117	MUHAMMAD REHAN	laki-laki	2002-06-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000134		
118	zulkani	laki-laki	1994-04-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000135		
119	muhammadziyad	laki-laki	2001-12-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000138		
120	Rommy akmal	laki-laki	1995-04-10	Regu Penyuluh	Sungai Tabuk		630300000141		
121	M. Fajrian Noor	laki-laki	1997-08-08	Regu Penyuluh	Martapura		630300000142		
122	Gt. Khalimatus Sa'diah	perempuan	2001-01-08	Regu Penyuluh	Martapura		630300000143		
123	Muhammad	laki-laki	1992-04-25	Regu Penyuluh	Martapura		630300000144		
124	Abdurrahman	laki-laki	1995-08-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000145		
125	muhammad rasyid	laki-laki	2003-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000146		
126	RAFI' HAMDI	laki-laki	1984-01-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000147		
127	muhammad rasyad	laki-laki	2003-03-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000148		
128	Muhammad Muhtar	laki-laki	2000-07-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000149		
129	MAHMUDIN	laki-laki	1999-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000150		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
130	muhammad tamin	laki-laki	1994-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000151		
131	iwan	laki-laki	1999-07-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000152		
132	abdurrahman	laki-laki	1996-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000153		
133	fitrianoor	laki-laki	1999-01-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000154		
134	muhammad suri	laki-laki	1999-11-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000155		
135	Abdul majid	laki-laki	1995-06-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000156		
136	m.yasir wahyudi	laki-laki	1990-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000157		
137	Muhammad Muhtadin	laki-laki	2001-11-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000158		
138	Rizali Hadi	laki-laki	1987-05-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000161		
139	AKHMAD SAKHBANIE	laki-laki	1999-11-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000162		
140	kurnaini	laki-laki	1985-08-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000163		
141	MAHDIAN SYAHRANIE	laki-laki	1993-11-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000164		
142	zaini	laki-laki	1993-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000165		
143	M.RIDUAN	laki-laki	1996-07-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000166		
144	AHMAD FARGALI	laki-laki	2002-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000167		
145	Haderansyah	laki-laki	1996-09-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000168		
146	MUHAMMAD AL KHUDAIRI	laki-laki	1995-10-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000169		
147	M.Ilmi	laki-laki	2003-07-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000170		
148	Muhammad aripin	laki-laki	2002-06-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000171		
149	Muhammad nawawi	laki-laki	2004-02-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000172		
150	Muhammad Maulidi	laki-laki	1998-07-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000173		
151	Muhammad Zacky	laki-laki	2002-05-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000174		
152	Abdullah	laki-laki	1981-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000175		
153	Pahmi	laki-laki	2003-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000176		
154	Aditya Wijaya	laki-laki	2000-11-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000177		
155	ACHMAD HUDAYAN	laki-laki	1974-08-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000178		
156	putri sekar wijayanti	perempuan	2001-04-28	Regu Penyuluh	Sungai Tabuk		630300000179		
157	dana	laki-laki	1992-08-10	Regu Penyuluh	Sungai Tabuk		630300000180		
158	DARDIANSYAH MARIADI	laki-laki	1986-05-23	Regu Penyuluh	Sungai Tabuk		630300000181		
159	M. Rudi Iwan	laki-laki	1971-09-16	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Tabuk		630300000182		
160	Ahmad Dimiati	laki-laki	1982-10-17	Regu Penyuluh	Martapura		630300000183		
161	Muhammad Ikhwani	laki-laki	2000-10-16	Regu Penyuluh	Martapura		630300000184		
162	Rakhmat hidayat	laki-laki	2002-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000185		
163	muhammad hulaifi	laki-laki	1999-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000186		
164	Hasrul Abdilah F. Mastho	laki-laki	1997-03-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000187		
165	MUHAMMAD IHDI	laki-laki	2001-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000188		
166	MUHAMMAD AMIN RAMADAN	laki-laki	2002-11-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000189		
167	Maulana Ikhsan	laki-laki	2001-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000191		
168	Nafsul Mutmainah	perempuan	1996-07-15	Regu Penyuluh	Martapura		630300000192		
169	muhammad saufi ansori	laki-laki	1998-05-19	Regu Penyuluh	Martapura		630300000193		
170	Muhammad amin	laki-laki	1988-08-27	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000194		
171	Rusdi	laki-laki	1968-11-09	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000195		
172	Agra Aji Nugraha	laki-laki	1999-10-17	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000196		
173	Musthopa	laki-laki	1979-09-06	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000197		
174	Hari Santoso	laki-laki	1994-06-06	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000198		
175	Muhammad Rizky	laki-laki	2000-09-24	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000199		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
176	Resiyono	laki-laki	1972-08-27	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000201		
177	Gevangga Syahid Al Ra'Afi	laki-laki	1997-11-07	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000202		
178	Muhammad arie Murtadha	laki-laki	1990-10-11	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000204		
179	Zainal Ukhtaini	laki-laki	1971-06-02	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000206		
180	YUDHI ARIYANTO	laki-laki	1980-12-18	Regu Komunikasi dan Informasi	Simpang Empat		630300000207		
181	Ahmad Rifa'i	laki-laki	2001-02-16	Regu Komunikasi dan Informasi	Simpang Empat		630300000208		
182	Hendri Setiawan	laki-laki	1992-01-20	Regu Komunikasi dan Informasi	Simpang Empat		630300000209		
183	Abdus Samad	laki-laki	1996-09-01	Regu Komunikasi dan Informasi	Simpang Empat		630300000210		
184	Yoga Maulana	laki-laki	2001-09-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000211		
185	Yunus Adi Putra	laki-laki	2003-10-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000212		
186	ABDUS SALAM	laki-laki	1996-07-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Pengarom		630300000213		
187	Wahidun	laki-laki	1973-03-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000214		
188	AbdulHadi	laki-laki	2001-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000215		
189	ABQARI WAJIDI	laki-laki	1998-09-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000216		
190	apreiza rosada	laki-laki	2001-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000217		
191	MUHAMMAD NORHAFIJI	laki-laki	1998-12-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000218		
192	HASBULLAH	laki-laki	1974-11-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000219		
193	SYAHRIL	laki-laki	1976-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000220		
194	ASRA	laki-laki	1989-09-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000221		
195	ABD KADIR ZAILANI	laki-laki	1976-01-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000222		
196	ARIF RAHMAN	laki-laki	1998-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000223		
197	AHMAD YANI	laki-laki	1982-11-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000224		
198	AHMAD HABIBI	laki-laki	1998-05-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000225		
199	A RIDUAN	laki-laki	1993-08-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000226		
200	SARBANI	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000227		
201	ABDUL HALIM	laki-laki	1992-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000228		
202	SYAMSUL HADI	laki-laki	1971-11-28	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000230		
203	AHMAD RIZALI	laki-laki	1996-05-12	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000231		
204	A. FAISAL	laki-laki	1993-10-13	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000232		
205	siti jamilah	perempuan	1999-04-07	Regu Penyuluh	Tatah Makmur		630300000233		
206	SUPIAN NOOR	laki-laki	2004-07-10	Regu Penyuluh	Martapura Barat		630300000234		
207	nasrullah	laki-laki	1990-07-06	Regu Komunikasi dan Informasi	Beruntung Baru		630300000235		
208	jamani	laki-laki	1976-06-15	Regu Komunikasi dan Informasi	Beruntung Baru		630300000236		
209	abd syukur	laki-laki	1989-04-02	Regu Komunikasi dan Informasi	Beruntung Baru		630300000237		
210	HAIRUNI	laki-laki	2001-10-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000238		
211	muhammad saufi rahman	laki-laki	2002-10-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000239		
212	BAHRIAN NOR	laki-laki	1996-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000240		
213	MUHAMMAD SANUSI	laki-laki	1993-09-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000241		
214	Muhammad Rifansyah	laki-laki	2002-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000242		
215	Muhammad abdul gaffur	laki-laki	1994-01-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000243		
216	Ahmad Murjani	laki-laki	1997-03-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000244		
217	Fakhrian	laki-laki	1965-06-05	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000245		
218	Bilhakim	laki-laki	1976-09-01	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000246		
219	Ahmad Zulkani	laki-laki	1997-10-19	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000247		
220	Zul Fahma	laki-laki	2000-09-15	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000248		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
221	M NURDIN	laki-laki	1998-03-04	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000249		
222	muhammad ghiffary arrizani maulani	laki-laki	2002-07-24	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000250		
223	Muhammad Mulkani	laki-laki	1991-03-08	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000251		
224	MUHAMMAD FAHRURRAJI	laki-laki	2003-09-20	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000252		
225	ANSHARI ARSYAD	laki-laki	2003-04-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000253		
226	SULAIMAN	laki-laki	1981-01-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000254		
227	Ahmad Zaini	laki-laki	1976-10-15	Regu Penyuluh	Sungai Pinang		630300000255		
228	AKHMAD KADRI	laki-laki	2002-11-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000256		
229	fadeli	laki-laki	1982-05-09	Regu Penyuluh	Beruntung Baru		630300000257		
230	Muhammad alwi	laki-laki	1987-10-10	Regu Penyuluh	Beruntung Baru		630300000258		
231	m.baidawi	laki-laki	1999-03-25	Regu Penyuluh	Beruntung Baru		630300000259		
232	sairaji	laki-laki	1999-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000260		
233	Akhmad Rafi Aufari Fahmi	laki-laki	2002-01-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000261		
234	muhtar	laki-laki	1969-03-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000262		
235	EDYRAHMAN	laki-laki	1993-09-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000264		
236	Muhammad syauqi	laki-laki	2003-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000266		
237	muhammad ariyani	laki-laki	1989-12-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000267		
238	Ahmad Kaprawi	laki-laki	1979-04-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000268		
239	Muhammad hamidi	laki-laki	1993-06-19	Regu Penyuluh	Martapura		630300000270		
240	MAULIDA RAHMAFANY	perempuan	2000-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000272		
241	m.rizalianoor	laki-laki	1999-09-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000273		
242	Isriani Hidayah	perempuan	1994-12-27	Regu Penyuluh	Martapura		630300000274		
243	HUSAIRI	laki-laki	1991-11-30	Regu Komunikasi dan Informasi	Astambul		630300000275		
244	Nova Indriyani	perempuan	1999-03-11	Regu Komunikasi dan Informasi	Simpang Empat		630300000276		
245	ahmad hijaji	laki-laki	2004-04-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000277		
246	Rahmadani	laki-laki	1981-05-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000278		
247	Gusti Ernawati	perempuan	1987-08-31	Regu Penyuluh	Martapura		630300000279		
248	Edi prasetyo	laki-laki	1996-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000280		
249	Ahmad Yazid	laki-laki	1989-02-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000281		
250	GUSTI ABDURRAHMAN	laki-laki	1997-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000282		
251	GUSTI MAULIANI KUSUMA	perempuan	1988-10-10	Regu Penyuluh	Martapura		630300000283		
252	Ghina Aulia	perempuan	2004-10-03	Regu Penyuluh	Martapura		630300000284		
253	Dwi Noor Wahidah	perempuan	1997-11-12	Regu Penyuluh	Martapura		630300000286		
254	AHMAD SAUFI MA'RUP	laki-laki	1997-05-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000287		
255	M.Samlawi	laki-laki	1999-12-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000289		
256	muhammad hifni	laki-laki	2000-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000290		
257	Ahmad Rizkiawan	laki-laki	2003-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000291		
258	abdul hadi	laki-laki	2003-02-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000292		
259	muhammad shobron	laki-laki	1988-07-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000293		
260	Abdul Kholiq	laki-laki	1976-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000294		
261	AHMAD MUHAMMAD	laki-laki	1987-06-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000296		
262	MUHAMMAD HAKIM ABDILLAH	laki-laki	2002-09-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000297		
263	A.SHOFWANI	laki-laki	1992-09-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000298		
264	Muhammad Fakhri	laki-laki	1988-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000299		
265	M. KHOLIL	laki-laki	1983-01-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000300		
266	marhani	laki-laki	1973-05-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000301		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
267	AKHMAD LUKMAN KARIMULLAH	laki-laki	2002-09-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000302		
268	Fathul Arifin	laki-laki	1980-10-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000303		
269	Muhammad irwansyah	laki-laki	2002-01-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000304		
270	MUHAMMAD SHOBI RAHMAN	laki-laki	1998-05-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000305		
271	Wahyu rahmad bawani putra	laki-laki	2000-09-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000306		
272	Muhammad Hadya	laki-laki	2000-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000307		
273	rasidul gapur	laki-laki	1987-08-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000308		
274	Ahmad Rahmadi	laki-laki	1997-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000309		
275	Muhammadgozi	laki-laki	2003-02-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000310		
276	Muhammad Hasbi	laki-laki	1991-04-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000311		
277	MUHAMAD HAFIZI	laki-laki	2003-01-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000312		
278	MUHAMMAD HILMANI	laki-laki	1989-04-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000313		
279	M. AMINULLAH	laki-laki	2003-03-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000314		
280	AHMAD BERKATI	laki-laki	2002-04-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000315		
281	Ahmad Salim	laki-laki	1998-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000316		
282	Muhammad Syafi'i	laki-laki	2002-11-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000317		
283	Gusti M. Azril	laki-laki	2004-09-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000318		
284	MUHAMMAD MUSTOPA	laki-laki	1995-05-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000319		
285	muhammad paaroni	laki-laki	2000-05-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000320		
286	M.hasir	laki-laki	1989-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000321		
287	muhammad_rusdi	laki-laki	2001-08-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000322		
288	muhammad aklia nor	laki-laki	1993-08-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000323		
289	Afrian	laki-laki	2002-09-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000324		
290	Muhammad Nazir	laki-laki	2002-06-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000325		
291	Habibi	laki-laki	1986-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000326		
292	Muhammad Halim	laki-laki	1994-08-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000327		
293	Hiro Rahman	laki-laki	1992-09-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000328		
294	Zainudin	laki-laki	1996-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000329		
295	Zainal Hakim	laki-laki	1998-07-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000330		
296	kabian	laki-laki	1968-12-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Aluh Aluh		630300000331		
297	Heria Asmarani	laki-laki	1993-11-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000332		
298	Muhammad Jaelani	laki-laki	1998-06-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000333		
299	JAMALUDDIN	laki-laki	1977-05-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000334		
300	MUHAMMAD NAUBI	laki-laki	2002-12-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000335		
301	MUHAMMAD ZAKI	laki-laki	2003-04-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000336		
302	abdul hadi	laki-laki	2000-08-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Pengarom		630300000337		
303	MUHAMMADSEMAN	laki-laki	2002-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000338		
304	M. Wahyu Fajriannor	laki-laki	1990-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000339		
305	M.Iqbal	laki-laki	2003-09-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000342		
306	Rahmat Akbar Ritonga	laki-laki	1988-08-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000343		
307	muhammad rifqi mukarram	laki-laki	2000-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000344		
308	Muhammad_Gozali	laki-laki	2003-04-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000345		
309	Muhammad Amin	laki-laki	1986-12-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000346		
310	muhammad isroni	laki-laki	1998-11-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000347		
311	Muhammad Rifky Maulana	laki-laki	2004-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000348		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
312	SAIFUL ANSARI	laki-laki	1983-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000349		
313	MUHAMMAD MULYANI	laki-laki	2002-10-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000350		
314	m. rifqy Ihsani Salim	laki-laki	2004-09-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000351		
315	Mudera	laki-laki	1975-01-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Pinang		630300000352		
316	Ahmad saubari	laki-laki	1999-02-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000353		
317	Muhammad kurniawan	laki-laki	1997-11-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000354		
318	HASNAN	laki-laki	1983-03-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000355		
319	ABDILLAHDARAJAD	laki-laki	1998-08-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000356		
320	Muhammad Riski	laki-laki	2002-11-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000357		
321	AHMAD GAPURI	laki-laki	1979-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000358		
322	Aliansyah	laki-laki	1979-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000359		
323	Muhammad Ferdy Setia	laki-laki	2002-07-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000360		
324	Taufik Fikriyadi	laki-laki	1970-01-26	Regu Komunikasi dan Informasi	Gambut		630300000361		
325	masrani	laki-laki	1970-02-04	Regu Komunikasi dan Informasi	Gambut		630300000362		
326	noria rahman hidayat	laki-laki	1984-05-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000363		
327	H. SYAKHRUDDIN, S.Pd	laki-laki	1956-12-12	Regu Komunikasi dan Informasi	Gambut		630300000364		
328	Syahrul	laki-laki	1973-05-04	Regu Komunikasi dan Informasi	Gambut		630300000365		
329	REZA MAULANA	laki-laki	2001-08-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000366		
330	abdulrahim	laki-laki	1986-06-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000367		
331	muhammad maulana	laki-laki	1991-08-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000368		
332	syahrudin	laki-laki	1985-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000369		
333	Syamsuri	laki-laki	1968-05-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000370		
334	M. Ala	laki-laki	1983-08-17	Regu Komunikasi dan Informasi	Sungai Pinang		630300000372		
335	Gusti Bayu Anzani Akhfira	laki-laki	1989-09-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000373		
336	Dewi Erliyani	perempuan	1979-04-21	Regu Penyuluh	Astambul		630300000374		
337	ahmad noval	laki-laki	2003-02-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000375		
338	surahyo	laki-laki	1987-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000376		
339	Muhammad fadillah	laki-laki	1997-08-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000377		
340	Abdurrahim	laki-laki	2002-06-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000378		
341	Wahyudin Noor	laki-laki	1969-12-31	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000379		
342	Ruhamah Faisal	perempuan	1967-02-14	Regu Penyuluh	Martapura		630300000380		
343	Hj. Nane Andriadne, SH	perempuan	1970-03-12	Regu Penyuluh	Martapura		630300000381		
344	MUHAMMAD RAYHAN	laki-laki	2003-01-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000382		
345	MUHAMMAD QOZWAINI	laki-laki	2004-01-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000383		
346	SAUFAN SAURI	laki-laki	2004-01-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000384		
347	Ari anugerah	laki-laki	2003-07-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000385		
348	Rizkoini	laki-laki	2001-10-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000386		
349	NURKAMALIA	perempuan	2003-05-26	Regu Penyuluh	Astambul		630300000387		
350	Hasanudin	laki-laki	2000-09-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000388		
351	Zaini Gani	laki-laki	1994-04-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000389		
352	AHMAD RASYIDI	laki-laki	1995-12-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000390		
353	MUHAMMAD HAPIS	laki-laki	1997-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000391		
354	ZAINAL MAKMUN	laki-laki	1960-07-09	Regu Komunikasi dan Informasi	Astambul		630300000392		
355	MUHAMMAD HAIRI	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000393		
356	ALFIANNOR	laki-laki	1994-10-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000394		
357	ABDUL AZIZ AWWALI	laki-laki	2002-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000395		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
358	SUGIANNOR	laki-laki	1982-11-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000396		
359	AHMAD ZAINI	laki-laki	2004-03-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000397		
360	Ahmad Nujuli	laki-laki	2004-06-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000398		
361	muhammad noval	laki-laki	2001-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000399		
362	AJIJAYADI	laki-laki	1976-07-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000400		
363	Muhammad Fiqri Haykal	laki-laki	2002-05-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000402		
364	H. Salam	laki-laki	1952-07-13	Regu Komunikasi dan Informasi	Gambut		630300000403		
365	yuda asmara	laki-laki	1980-11-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000404		
366	sandiabdillah	laki-laki	1993-05-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000405		
367	taofik rahman	laki-laki	2001-03-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000406		
368	MUHAMMAD HILMAN	laki-laki	1997-06-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000407		
369	MUHAMMAD NASRULLAH	laki-laki	1997-12-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000408		
370	Fahmi Ridlani	laki-laki	1977-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000409		
371	AHMAD ZAINUDDIN	laki-laki	1994-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000410		
372	Abdul Basit	laki-laki	1996-07-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000411		
373	Muhammad Refani	laki-laki	1996-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000412		
374	NIDAUl KHAIR	laki-laki	1994-07-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000413		
375	AHMAD MUJAHID	laki-laki	1978-07-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000414		
376	Muhammad Nor Ihsan	laki-laki	2000-05-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000415		
377	MUHAMMAD FAHRURRAZI	laki-laki	1993-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000416		
378	Muhammad Irwan Wijaya	laki-laki	1988-02-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000417		
379	M.RAFI'I	laki-laki	2000-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000418		
380	Sabirin	laki-laki	1991-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000419		
381	Zainal Abidin	laki-laki	2003-04-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000420		
382	M Asanu Amala	laki-laki	1997-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000421		
383	Muhammad Ramdhani	laki-laki	2001-10-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000422		
384	ACHYANI	laki-laki	1981-05-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000423		
385	Ahmad Rifki	laki-laki	2001-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000424		
386	abdul zakir muhadi	laki-laki	1979-10-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000425		
387	MUHAMMAD ANDI RAMADANSYAH	laki-laki	1986-05-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000427		
388	Muhammad Alfian	laki-laki	1992-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000428		
389	LUKMANUL HAKIM	laki-laki	1973-06-06	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000429		
390	MUHAMMAD SAUQI	laki-laki	2004-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000430		
391	NOR YASIN	laki-laki	1973-04-20	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000431		
392	GT. MUHAMMAD KUSUMAYUDA	laki-laki	1985-03-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000432		
393	SYARKAWI	laki-laki	1975-01-03	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000433		
394	Achmad Zarqowi	laki-laki	1987-04-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000434		
395	muhammad sendi rianto	laki-laki	1991-10-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000435		
396	Adi Rachman	laki-laki	1972-08-04	Regu Komunikasi dan Informasi	Martapura		630300000436		
397	Dwi Saputra	laki-laki	2001-11-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000437		
398	Abdullah	laki-laki	2003-12-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000438		
399	Muhammad Arsyad	laki-laki	1988-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000439		
400	Risa Ayu Chairani	perempuan	1987-07-11	Regu Penyuluh	Martapura		630300000440		
401	Muhammad Rizky	laki-laki	2001-06-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000441		
402	H.ABD.MUNIR	laki-laki	1979-04-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000442		
403	YUDITA APRIADI PUTRA	laki-laki	2002-12-21	Pemadaman dan	Martapura		630300000443		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
				Penyelamatan					
404	sugiyana nur	laki-laki	1984-10-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000444		
405	Fahriansyah	laki-laki	1982-06-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000445		
406	salimi	laki-laki	1981-01-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000446		
407	Muhammad abdul haris	laki-laki	2000-09-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000447		
408	Rahmatur Rabani	laki-laki	1997-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000448		
409	mulyadi	laki-laki	1995-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000449		
410	abdulhakim	laki-laki	1979-07-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000450		
411	MUHAMMAD AMRULLAH	laki-laki	1992-05-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000451		
412	AHMAD JUNAIDI	laki-laki	1992-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000452		
413	AHMAD RABBANI	laki-laki	1986-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000453		
414	AHMADSUPIAN	laki-laki	2000-11-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000454		
415	Aji Budiono	laki-laki	1976-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000455		
416	Ahmadkamaluddin	laki-laki	2001-09-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000456		
417	Najib	laki-laki	2000-10-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000457		
418	muhmmad iqbal	laki-laki	2001-08-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000458		
419	MUHAMMAD FIQRI	laki-laki	2004-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000459		
420	SHOLAHUDDIN	laki-laki	2005-02-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000460		
421	Ahmad Rafi'i	laki-laki	1992-09-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000461		
422	RAHMAN	laki-laki	1987-10-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000462		
423	SHOLHAN	laki-laki	1985-12-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000463		
424	KHALILURRAHMAN	laki-laki	1992-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000464		
425	JAMBRI	laki-laki	1984-02-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000465		
426	NESTRIYANTO	laki-laki	1982-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000466		
427	AHSANI	laki-laki	1975-02-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000467		
428	MUHAMMAD NOR	laki-laki	1981-04-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000468		
429	zulkifli	laki-laki	1984-09-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000469		
430	MURSIDI	laki-laki	1987-12-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000470		
431	JAINAL PIKRI	laki-laki	2000-12-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000471		
432	SUBKIANNOR	laki-laki	1999-07-20	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000472		
433	AHMAD NAJLI	laki-laki	1997-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000473		
434	SOLIHIN	laki-laki	1990-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000474		
435	MUHAMMAD ALFIANI	laki-laki	1997-07-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000475		
436	AHMAD SYAHBANA	laki-laki	1997-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000476		
437	HASANUDDIN	laki-laki	1990-12-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000477		
438	RIF'AN	laki-laki	1992-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000478		
439	MUHAMMAD HILMAN NABAWI	laki-laki	2005-02-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000479		
440	MUJAJIDIN	laki-laki	1982-06-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000480		
441	WAHYUDI	laki-laki	1980-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000481		
442	TAUPIK	laki-laki	1975-01-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000482		
443	Miftahul aripin	laki-laki	1985-03-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000483		
444	ABDUL HAKIM	laki-laki	1979-03-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000484		
445	AHYANI	laki-laki	1971-04-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000485		
446	MUHAMMAD RAFI'I RAMLI	laki-laki	1986-04-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000486		
447	najiyulah	laki-laki	1993-02-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000487		
448	MUHAMMAD ALFANI	laki-laki	1993-12-15	Pemadaman dan	Astambul		630300000488		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
				Penyelamatan					
449	sahmi raji	laki-laki	1994-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000489		
450	noor hairi ipansyah	laki-laki	1988-11-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000490		
451	Akhmad Junaidi	laki-laki	1992-05-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000491		
452	Muhaini	laki-laki	1988-10-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000492		
453	Muhammad rasyad	laki-laki	1992-10-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000493		
454	Ahmad Rayhan	laki-laki	2004-12-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000494		
455	Rahmat raehan	laki-laki	1994-09-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000495		
456	SANDI IRWANDA	laki-laki	1989-06-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000496		
457	Hasdianor Efendi	laki-laki	1999-11-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Simpang Empat		630300000497		
458	Muhammad Mahdi	laki-laki	1999-05-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000498		
459	KHAIDIR	laki-laki	2004-04-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000499		
460	M Rudiansyah	laki-laki	1994-01-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000501		
461	Najamudin	laki-laki	2000-09-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000502		
462	Ayan Saputra	laki-laki	1991-05-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Beruntung Baru		630300000503		
463	Muhammad Hendrayani	laki-laki	1989-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000504		
464	zulkifli	laki-laki	1992-02-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000505		
465	muhammad najamuddin	laki-laki	2004-12-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000506		
466	Lukman	laki-laki	1993-02-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000507		
467	Muhammad khalil	laki-laki	1992-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000508		
468	Muhmmad Mirza	laki-laki	2002-05-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000509		
469	MUHAMMAD SYARKAWI	laki-laki	1985-01-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000510		
470	Rusli Padli	laki-laki	1977-06-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000511		
471	Saipullah	laki-laki	1983-07-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000512		
472	AHMAD NAUFAL	laki-laki	1998-08-04	Regu Penyuluh	Astambul		630300000513		
473	Muhammad Noorrahim	laki-laki	2000-08-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Tatah Makmur		630300000514		
474	Hermansyah	laki-laki	1986-12-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000515		
475	Ariansyah	laki-laki	2000-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000516		
476	Muhammad Fikri	laki-laki	2004-03-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000517		
477	Muhammad Syahid	laki-laki	2000-11-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000518		
478	MAHRAWI	laki-laki	1986-03-14	Regu Komunikasi dan Informasi	Astambul		630300000519		
479	Muhammad Luthfi	laki-laki	2000-06-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000520		
480	Hairudin	laki-laki	1996-06-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000521		
481	Muhammad Kaspul Anwar	laki-laki	1978-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000522		
482	MUHAMMAD HUSNI	laki-laki	1987-04-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000523		
483	faurani	laki-laki	1991-11-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000524		
484	Aturtorang parningotan banjarnahor	laki-laki	1990-06-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000525		
485	AHMAD YUSRI NAPALI	laki-laki	1997-06-04	Regu Penyuluh	Astambul		630300000526		
486	Muhammad Rahmadi	laki-laki	1995-12-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000527		
487	M.Hasbiyannor	laki-laki	2002-08-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000528		
488	muhammad hafizi rizki	laki-laki	2003-03-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000529		
489	Achmad deren putra Aditya	laki-laki	2005-05-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000530		
490	Muhammad Hilman, S.Kep., Ns	laki-laki	1999-04-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000531		
491	M FAISAL HAFIDZ	laki-laki	1998-11-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000532		
492	MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN	laki-laki	2004-10-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000533		
493	AHMAD FASIHULLISAN	laki-laki	2004-10-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000534		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
494	PAHRI ABI	laki-laki	2004-05-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000535		
495	MUHAMMAD HATIM ANNOR	laki-laki	2004-10-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000536		
496	Ahmad Riduan Syah	laki-laki	1999-03-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000537		
497	Muhammad Syarif Hidayatullah	laki-laki	1998-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000538		
498	Mursalin	laki-laki	1990-02-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000539		
499	Masrani	laki-laki	1973-08-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000540		
500	M.HARIS HIDAYATULLAH	laki-laki	2005-05-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000541		
501	M.Akmal Khairuddin	laki-laki	2005-02-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000542		
502	Yani	laki-laki	1986-06-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000543		
503	Hamithan Ariadi	laki-laki	1983-09-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000544		
504	Suriani	laki-laki	1968-04-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000545		
505	Aisyah	perempuan	1994-06-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000546		
506	As'at	laki-laki	1968-03-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000547		
507	SHALEH	laki-laki	1973-12-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000548		
508	Samani	laki-laki	2000-08-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000549		
509	Aditia Dwi Ramadhani	laki-laki	2000-12-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000550		
510	mkaspudin	laki-laki	1996-03-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000551		
511	MUHAMMAD FITRI	laki-laki	1995-04-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000552		
512	helmy	laki-laki	2003-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000553		
513	sarli	laki-laki	1984-05-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000554		
514	MUHAMMAD REIFAN SETYAWAN	laki-laki	2004-09-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000555		
515	ADITYA JANUARDY	laki-laki	2004-01-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000556		
516	NOR ISLAH RAHAIDI	laki-laki	2002-10-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000557		
517	MISRANSYAH	laki-laki	1989-08-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000558		
518	MUHAIMIN	laki-laki	1979-07-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000559		
519	M.Hifji	laki-laki	1998-04-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000560		
520	NOR AIDI	laki-laki	1991-09-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000561		
521	MUHAMMAD MAKKI HUMAIDI	laki-laki	1984-04-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000562		
522	HAMDAN	laki-laki	1980-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000563		
523	AHMAD RAPI'I	laki-laki	1980-12-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000564		
524	MUHAMMAD ZAINUDIN	laki-laki	2005-11-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000565		
525	Ronywijaya	laki-laki	1984-04-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000566		
526	AHMAD RIFA'I SYA'BANI	laki-laki	2005-09-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000567		
527	ZAINAL ARIFIN	laki-laki	1983-07-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000568		
528	MUHAMMAD RIZKY	laki-laki	1999-02-11	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000569		
529	HJ.MARFU'AH	perempuan	1982-03-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000570		
530	TAUFIK RAHMAN	laki-laki	1986-12-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000571		
531	MAHLAN	laki-laki	1992-01-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Astambul		630300000572		
532	GT.MUHAMMAD GAJALI RAHMAN	laki-laki	2003-05-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000573		
533	FATHURRAHMAN	laki-laki	1968-12-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000574		
534	M.ARIFIN	laki-laki	1995-09-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000575		
535	SAMLANI	laki-laki	1975-12-12	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000576		
536	ENCIK MOHAMMAD RIDUWAN	laki-laki	1992-06-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000577		
537	Muhammad Rizki	laki-laki	2004-11-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000578		
538	MUHAMMAD ARUBI	laki-laki	1994-10-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000579		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
539	GUNAWAN	laki-laki	1992-09-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000580		
540	Muhammad Nasir	laki-laki	2002-04-18	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000581		
541	MUHAMMAD ADLI JAHIDI	laki-laki	2003-08-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000582		
542	Husnuzzonni	laki-laki	2000-08-25	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000583		
543	MUHAMMAD HAIDIR	laki-laki	1998-03-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000584		
544	sugian noor	laki-laki	1991-10-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Kertak Hanyar		630300000585		
545	SUBHAN	laki-laki	1977-02-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000586		
546	MUHAMMAAD MADANI	laki-laki	2003-11-13	Pemadaman dan Penyelamatan	Karang Intan		630300000587		
547	M.SUPIAN	laki-laki	1983-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Barat		630300000588		
548	IFANDI	laki-laki	1985-09-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000589		
549	MUHAMMAD HAFIE ARSYADI	laki-laki	1997-10-29	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000590		
550	Hendera Suryadi	laki-laki	1985-01-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000591		
551	Muhammad Gazali Rahman	laki-laki	2005-04-21	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000592		
552	Slamat Riyadi	laki-laki	1985-12-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000593		
553	Muhammad Nor	laki-laki	1976-04-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000594		
554	M. Fachrurrozie. S	laki-laki	2001-12-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000595		
555	Khairul Fuad	laki-laki	1978-12-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000596		
556	MUHAMMAD HALWATI	laki-laki	2004-02-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000597		
557	nazeli wahdi	laki-laki	2003-03-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000598		
558	M. Supian R	laki-laki	1978-04-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000599		
559	Abdurrasyid	laki-laki	1990-12-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000600		
560	M HATIM	laki-laki	1985-02-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000601		
561	Fitriadi	laki-laki	1978-09-04	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000602		
562	Syahrani	laki-laki	1988-11-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000603		
563	Muhammad hafiji	laki-laki	2000-07-22	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000604		
564	Sopian noor	laki-laki	1980-08-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000605		
565	Hafiz anshori	laki-laki	1998-04-15	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000606		
566	Muhammad Riza	laki-laki	1998-08-16	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000607		
567	Hendra hermawan	laki-laki	1985-03-02	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000608		
568	Mzaini	laki-laki	1997-03-05	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000609		
569	Ahmad Sulthon	laki-laki	1991-06-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000610		
570	Romadani	laki-laki	1978-08-08	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000611		
571	MUHAMMAD YUSUF	laki-laki	1993-09-30	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000612		
572	Zulkifli	laki-laki	1973-07-17	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000613		
573	AHMAD SYARMADA	laki-laki	2005-03-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000614		
574	ADITYA JANUARDI	laki-laki	2004-01-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000615		
575	Irlan samudra jaya	laki-laki	1989-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000616		
576	Muhammad Sanwani	laki-laki	2003-10-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000617		
577	Ahmad	laki-laki	1998-02-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000618		
578	Muhammad Aziz Darmawan	laki-laki	2002-02-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000619		
579	M. Zikri rehan	laki-laki	2000-01-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000620		
580	Gusti muhammad nijar	laki-laki	2005-07-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000621		
581	MUHAMMAD HALWATI	laki-laki	2004-02-28	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000622		
582	M. SAYUTI	laki-laki	1995-10-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000623		
583	Akhmad Fadillah	laki-laki	1992-08-07	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura Timur		630300000624		

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterampilan	Alamat	Nama BPK	No. Register Redkar	Pembinaan	
								Sudah (Sebutkan nama Pembinaan)	Belum
584	M syahid	laki-laki	2003-05-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000625		
585	Sayyid husaini assegaf	laki-laki	1993-04-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000626		
586	Muhammad Iqbal Hidayat	laki-laki	2002-10-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000627		
587	Hasan	laki-laki	2003-03-27	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000628		
588	Muhammadhafiz	laki-laki	2003-09-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000629		
589	Ahmad Yasir	laki-laki	2003-06-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000630		
590	Safrudin	laki-laki	2001-04-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000631		
591	Muhammad Hefni	laki-laki	2003-12-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000632		
592	ahmad royani	laki-laki	2004-05-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000633		
593	Gt muhammad syarif	laki-laki	2000-06-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000634		
594	SYAHRUL ZAD	laki-laki	2000-08-10	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000635		
595	Ibhan Nazi	laki-laki	1991-08-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Mataraman		630300000636		
596	Ahmad Mulyadi	laki-laki	1999-06-14	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000637		
597	Ahmad Syafe'i	laki-laki	2003-06-24	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000638		
598	Muhammad zein	laki-laki	1980-10-23	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000639		
599	Fakhrurrazi	laki-laki	1969-03-03	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000640		
600	Suryadi	laki-laki	2004-03-09	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000641		
601	MUHAMMMAD RIZKY	laki-laki	2001-10-01	Pemadaman dan Penyelamatan	Sungai Tabuk		630300000642		
602	Fahrurrozze AB	laki-laki	1969-09-06	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000643		
603	M.Hudan Nur Ramadhan	laki-laki	2005-10-31	Pemadaman dan Penyelamatan	Gambut		630300000644		
604	AHMAD JAYADI	laki-laki	1984-03-26	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000645		
605	Muhammad fathan azhari	laki-laki	1993-05-19	Pemadaman dan Penyelamatan	Martapura		630300000646		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengatur terkait:

- 1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM Sosial) adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang berhak diperoleh setiap penerima pelayanan dasar secara minimal.
- 2. SPM Sosial didalamnya mencakup:
 - a. Jenis dan penerima pelayanan dasar;
 - b. Mutu pelayanan dasar;
 - c. Pencapaian SPM Sosial;dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi.
- 3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Sosial mencakup:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia;dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 4. Penerima pelayanan dasar pada:
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

$$C_{pnaian.SPM} = \frac{\frac{Jumlah\ Penyandang\ Disabilitas\ Terlantar\ yang\ Terpenuhi\ Kebutuhan\ Dasarnya\ di\ Luar\ Panti}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Penyandang\ Disabilitas\ yang\ Memperoleh\ Rehabilitasi\ Sosial\ di\ Luar\ Panti}} \times 100\%$$

- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

$$C_{pnaian.SPM} = \frac{\frac{Jumlah\ Anak\ Terlantar\ yang\ Terpenuhi\ Kebutuhan\ Dasarnya\ di\ Luar\ Panti}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Anak\ Terlantar\ yang\ Memperoleh\ Rehabilitasi\ Sosial\ di\ Luar\ Panti}} \times 100\%$$

- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.

$$C_{pnaian.SPM} = \frac{\frac{Jumlah\ Lanjut\ Usia\ Terlantar\ yang\ Terpenuhi\ Kebutuhan\ Dasarnya\ di\ Luar\ Panti}{Jumlah\ Warga\ Negara\ Lanjut\ Usia\ Terlantar\ yang\ Memperoleh\ Rehabilitasi\ Sosial\ di\ Luar\ Panti}} \times 100\%$$

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten atau Kota yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2025, sebagai OPD pelaksana SPM Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut;

TARGET SPM URUSAN SOSIAL TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Ket
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah WN. PD terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah WN. PD terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah WN. lansia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah WN. Gepeng yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah WN. Gepeng yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah WN. korban bencana Kabupaten / Kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022

4.6.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2025 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Dalam Hitungan	416	416	100				
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	600	600	100	1. Layanan data dan pengaduan	50	50	100
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	45	45	100
						3. Penyediaan permakanaan	600	600	100
						4. Penyediaan sandang	50	50	100
						5. Penyediaan alat bantu	10	10	100
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	15	100
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	47	47	100
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	20	20	100
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen	9	9	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						kependudukan			
						10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan Kesehatan	20	20	100
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	100
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100
						13. Layanan rujukan	10	10	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Dalam Hitungan	242	242	100				
		Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50	50	100	1. Layanan data dan pengaduan	25	25	100
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	25	25	100
						3. Penyediaan permakanaan	50	50	100
						4. Penyediaan sandang	50	50	100
						5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	50	50	100
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	10	10	100
						8. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	7	7	100
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan Kesehatan	15	15	100
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	15	100
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	100
						12. Layanan rujukan	20	20	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Dalam Hitungan	2500	2500	100				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	875	875	100	1. Layanan data dan pengaduan	100	100	100
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	55	55	100
						3. Penyediaan permakanaan	875	875	100
						4. Penyediaan sandang	120	120	100
						5. Penyediaan alat bantu	10	10	100
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	40	40	100
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40	40	100
						8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlanter	25	25	100
						9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	15	15	100
						10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	20	20	100
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	45	45	100
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40	40	100
						13. Layanan rujukan	10	10	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekpitulasi) * Tidak Dalam Hitungan	27	27	100				
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	25	25	100	1. Layanan data dan pengaduan	25	25	100
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	10	100
						3. Penyediaan permakanaan	25	25	100
						4. Penyediaan sandang	5	5	100
						5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	20	20	100
						6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	15	15	100
						7. Pemberian	5	5	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
						bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis			
						8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	5	5	100
						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	100
						12. Layanan rujukan	10	10	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	6000	5390	89.83	1. Penyediaan permakanan*	6000	5390	89.83
						2. Penyediaan sandang*	700	111	15.86
						3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi*	350	350	100
						4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan*	960	235	24.48
						5. Pelayanan dukungan Psikososial*	135	88	65.19

*Realiasi diambil pada TW. II
 Sumber : DinsosP3AP2KB, 2025

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025 adalah TUNTAS UTAMA dengan nilai 93,33%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran terkait upaya pencapaian standar pelayanan minimal urusan sosial di Kabupaten Banjar Tahun 2025 berasal dari berbagai sumber sebagaimana pada tabel berikut:

ANGGARAN SPM URUSAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

Pendanaan	Pagu (Rp)	%
APBD Kabupaten Banjar	Rp. 3,041,125,510,897	
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (DinsosP3AP2KB)	Rp. 47,094,468,671	0.14
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	Rp. 2.376.729.200	

- Dana Bagi Hasil	-	
- DAU	Rp. 2.736.729.200	
- DAK Fisik	-	
- DAK Non Fisik	-	

Sumber : DinsosP3AP2KB,

**ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL
TAHUN 2025**

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	418.839.735	399.691.045
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	118.377.443	90.919.615
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	714.534.250	657.601.805
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	74.607.772	74.607.772
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pascabencana bagi korban bencana Kabupaten	1.410.370.000	260.528.500
Jumlah	2.736.729.200	1.479.428.960

Sumber : DINSOSP3AP2KB

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Rehabilitasi Sosial					
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.326.359.200	1.218,900.460	91.90
		1	Penyediaan permakanaan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	252,478,600	243,913,200	96.23
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	21,937,500	20,123,175	91.73
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	477,176,100	437,699,275	91.87
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	12,171,250	10,890,375	91.28
			Total	763,763,450	712,626,025	93.30
		2	Penyediaan sandang			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	29,188,500	27,775,000	95.16
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	29,188,500	27,775,000	95.16
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	86,077,000	82,800,000	96.19
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	-	-
			Total	144,454,000	138,350,000	95.77
		3	Penyediaan alat bantu			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	100,900,000	99,595,000	98.71
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	0	-	-
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	100,900,000	99,595,000	98.71
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	-	-
			Total	201,800,000	199,190,000	98.71
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	634,000	0	0
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	8,633,000	5,200,000	60.23
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	22,633,000	15,400,000	68.04
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	0	0
			Total	31,900,000	20,600,000	64.58
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	11,561,000	11,310,000	97.83
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	15,889,500	15,342,985	96.56
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	0	0	0
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	56,071,000	55,037,950	98.16
			Total	83,521,500	81,690,935	97.81
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	3,914,160	3,566,670	91.12
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	1,957,100	1,783,330	91.12
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	4,892,700	4,458,330	91.12
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	978,540	891,670	91.12
			Total	11,742,500	10,700,000	91.12
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	875,000	250,000	28.57

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	680,500	250,000	36.74
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1,458,300	250,000	17.14
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	486,200	250,000	51.42
			Total	3,500,000	1,000,000	28.57
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,167,000	500,000	42.84
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	875,000	750,000	85.71
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	875,000	750,000	85.71
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	583,000	500,000	85.76
			Total	3,500,000	2,500,000	71.43
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,749,875	750,000	42.86
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	875,000	500,000	57.14
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	3,499,750	1,750,000	50.00
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	874,875	250,000	28.58
			Total	6,999,500	3,250,000	46.43
		10	Pemberian layanan kedaruratan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	12,855,000	11,781,175	91.65
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	7,141,343	6,545,125	91.65
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	15,710,000	14,399,200	91.66
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	2,856,907	2,618,000	91.64
			Total	38,563,250	35,343,500	91.65
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,050,000	250,000	23.81
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	525,000	250,000	47.62
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1,575,000	500,000	31.75
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	350,000	250,000	71.43
			Total	3,500,000	1,250,000	35.71
		12	Pemberian layanan rujukan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,488,000	0	0
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	30,675,000	12,400,000	40.42
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	476,000	0	0
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	476,000	0	0
			Total	33,115,000	12,400,000	37.45
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1,410,370,000	260,528,500	18.47
		1	Penyediaan makanan	525,995,000	235,342,500	44.74
		2	Penyediaan sandang	448,656,000	500,000	0.11
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	423,993,500	15,158,000	3.58
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	11,725,500	9,528,000	81.26

Sumber : DINSOSP3AP2KB

4.6.5. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar terdiri dari :

DUKUNGAN PERSONIL SPM URUSAN SOSIAL TAHUN 2025

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IV.c	S2	-	-
2	Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Penata Tk.I/IIId	S1	-	-

3	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	Penata Tk.I/III.d	S1	-	-
4	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penata Tk.I/III.d	S1	-	-
5	Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	Penata Tk.I/III.d	S1	-	-
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk.I/III.d	S1	-	-
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I/III.d	S1	-	-
8	Pekerja Sosial Ahli Pertama	IX	D4	-	-
9	Penata Layanan Operasional	IX	S1	-	-
10	Pengolah Data dan Informasi pada Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	PTT	S1	-	-
Sumber : DSP3AP2KB					

Dalam pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial, juga dibantu oleh Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang disediakan sebagaimana terjadi dalam tabel berikut ini :

PEKERJA SOSIAL PROFESSIONAL DAN/ATAU TKS DAN/ATAU RELAWAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

No	Kecamatan	Pusat Kesejahteraan Sosial - Relawan Sosial																		
		Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial Profesional	Penyuluh Sosial	Relawan Sosial Tersertifikasi								Relawan Sosial Belum Tersertifikasi							
					Karang Taruna	Tenaga pelopor perdamaian	Taruna siaga bencana	Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	Kader rehabilitasi berbasis masyarakat	Kader rehabilitasi berbasis keluarga	Penyuluh sosial masyarakat	Karang Taruna	Tenaga pelopor perdamaian	Taruna siaga bencana	Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	Kader rehabilitasi berbasis masyarakat	Kader rehabilitasi berbasis keluarga	Penyuluh sosial masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kabupaten Banjar		3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-
1	Aluh-Aluh		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
2	Aranio		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Astambul		-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
4	Beruntung Baru		-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
5	Cintapuri Darussalam		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gambut		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19	-	2	-	-	-	-	-
7	Karang Intan		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	3	1	-	-	-	-
8	Kertak Hanyar		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Martapura		-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	27	-	14	-	-	-	-	-
10	Martapura Barat		-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	30	-	1	-	-	-	-	-
11	Martapura Timur		-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	38	-	4	-	-	-	-	-
12	Mataraman		-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
13	Paramasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-
14	Pengaron		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
15	Sambung Makmur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-
16	Simpang Empat		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
17	Sungai Pinang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	-	-	-	-
18	Sungai Tabuk		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	27	-	2	-	-	-	-	-
19	Tatah Makmur		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
20	Telaga Bauntung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		0	3	-	-	1	29	14	1	-	-	-	352	-	28	6	-	-	-	-

Sumber : DinsosP3AP2KB

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN TINDAKLANJUT PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL
TAHUN 2025

No	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1	Pengumpulan data masih menghadapi kendala berupa lamanya proses integrasi dan pemilahan data, verifikasi dan validasi lapangan yang belum tuntas, keterbatasan akses wilayah, ketidaksinkronan data akibat potensi data ganda, serta keterbatasan informasi dan keterampilan SDM dalam pengelolaan data.	Menetapkan batas waktu yang jelas untuk pengumpulan dan pemilahan data serta menjalin kerja sama dengan petugas data dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengumpulan data, termasuk di wilayah desa terpencil.	penyusunan jadwal pengumpulan dan pemilahan data secara terstruktur, penguatan koordinasi dan kerja sama dengan petugas pendata serta stakeholder terkait hingga tingkat desa, termasuk penugasan khusus untuk wilayah terpencil guna memastikan kelengkapan dan ketepatan data.
2	Penghitungan kebutuhan masih dilakukan secara individual per orang PPKS, diperparah oleh kurangnya pemahaman SDM terhadap SPM serta rendahnya kesadaran akan pentingnya penghitungan kebutuhan, sehingga menimbulkan data ganda/berulang dan berdampak pada ketidaktepatan progres, analisis, serta akurasi data.	Penghitungan kebutuhan dilakukan dengan menetapkan target PPKS sebagai sasaran penerima layanan SPM melalui pemastian data by name by address (BNBA) serta peningkatan pemahaman SPM dengan mencari berbagai sumber informasi atau mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran dan validasi data PPKS secara berkala berbasis by name by address (BNBA), meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait SPM, serta menyusun mekanisme penghitungan kebutuhan yang terstandar agar data lebih akurat dan konsisten.
3	Perencanaan dan penganggaran SPM belum optimal karena adanya pemberian bantuan di luar anggaran Dinas Sosial yang tidak diketahui besaran anggarannya, penghitungan kebutuhan yang belum berbasis data akurat, serta ketidaktepatan dan ketidakvalidan data yang menghambat proses pengolahan sehingga berdampak pada ketidaktepatan perencanaan dan penyusunan anggaran.	Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan pihak pemilik sumber dana lain yang memberikan bantuan kepada PPKS serta melakukan penyesuaian kegiatan dengan penganggaran layanan SPM agar lebih tepat dan terarah.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan pendataan bantuan dari seluruh sumber pendanaan bagi PPKS, melakukan sinkronisasi data kebutuhan dengan perencanaan kegiatan, serta menyusun penganggaran layanan SPM secara lebih terintegrasi dan berbasis data yang valid.
4	Pelaksanaan layanan SPM kepada PPKS belum optimal karena masih dilakukan secara perorangan, menghadapi kendala aksesibilitas di wilayah pedesaan dan pesisir, serta dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman SDM terhadap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan, dan penganggaran sehingga layanan menjadi tidak tepat sasaran dan tujuan serta masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pembelajaran, diskusi, dan konsultasi.	Pelaksanaan dilakukan dengan memperkuat pemahaman terhadap maksud dan tujuan pemberian layanan SPM bagi PPKS serta melakukan koordinasi, konsultasi, dan diskusi dengan pihak pengampu SPM di tingkat daerah maupun pusat.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pendalaman pemahaman kebijakan dan pedoman SPM, memperkuat koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan pihak pengampu SPM di daerah maupun pusat, serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan agar lebih tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Sumber : DINSOSP3AP2KB

4.7. Program dan Kegiatan

1. Urusan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 158.171.453.634 dengan realisasi anggaran Rp. 151.814.653.404.

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diukur dengan indikator Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD. Adapun target kegiatan ini Adalah 86,5% dengan realisasi 85,73%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi dan target kinerja berupa Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 18 ruang dengan rincian:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	TK Negeri Pembina Aluh Aluh	3	Ruang
2	TK Negeri Pembina Pembina Cintapuri Darussalam	3	Ruang
3	TK Negeri Pembina Kertak Hanyar	2	Ruang
4	TK Negeri Pembina Mataraman	2	Ruang
5	TK Negeri Pembina Martapura	8	Ruang

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.035.816.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.029.625.000 (99,40%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD diukur dengan indikator Jumlah Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik dan target kinerja berupa 160 orang peserta didik dan realisasi 160 orang peserta didik dengan rincian:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Martapura Timur	7	Peserta Didik
2	Aluh-Aluh	15	Peserta Didik
3	Aranio	7	Peserta Didik
4	Astambul	16	Peserta Didik
5	Beruntung Baru	8	Peserta Didik
6	Cintapuri Darussalam	2	Peserta Didik
7	Gambut	10	Peserta Didik
8	Karang Intan	19	Peserta Didik
9	Kertak Hanyar	1	Peserta Didik
10	Martapura	22	Peserta Didik

No	Kecamatan	Volume	Satuan
11	Martapura Barat	9	Peserta Didik
12	Mataraman	14	Peserta Didik
13	Paramasan	1	Peserta Didik
14	Pengaron	8	Peserta Didik
15	Sambung Makmur	2	Peserta Didik
16	Simpang Empat	10	Peserta Didik
17	Sungai Tabuk	8	Peserta Didik
18	Tatah Makmur	1	Peserta Didik

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 480.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 480.000.000 (100%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD dan target kinerja berupa 1.123 orang peserta didik dan realisasi 1.066 orang peserta didik dengan rincian:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Martapura Timur	67	Orang
2	Aluh-Aluh	90	Orang
3	Aranio	22	Orang
4	Astambul	76	Orang
5	Beruntung Baru	50	Orang
6	Cintapuri Darussalam	20	Orang
7	Gambut	67	Orang
8	Karang Intan	93	Orang
9	Kertak Hanyar	89	Orang
10	Martapura	150	Orang
11	Martapura Barat	35	Orang
12	Mataraman	60	Orang
13	Paramasan	3	Orang
14	Pengaron	20	Orang
15	Sambung Makmur	22	Orang
16	Simpang Empat	39	Orang
17	Sungai Pinang	23	Orang
18	Sungai Tabuk	99	Orang
19	Tatah Makmur	35	Orang
20	Telaga Bauntung	6	Orang

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 6.594.603.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.194.541.931 (93,93%).

- Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dan target kinerja berupa 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen yaitu Dokumen Hasil Pendampingan Pemutakhiran Dapodik PAUD. Adapun

pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 64.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.632.370 (85,85%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru diukur dengan indikator Jumlah ruang kelas sekolah yang bertambah dan target kinerja berupa Pembangunan Ruang Kelas sebanyak 8 ruang dan realisasi 7 ruang dengan rincian:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	TK Al Ishlah Desa Sungai Sipai Kec. Martapura	1	Ruang
2	TK Harapan Ibu Desa Banyu Hirang Kec. Gambut	1	Ruang
3	TK Negeri Permai Podok 2 Kec. Aluh Aluh	2	Ruang
4	TK Negeri Tanjung Rema Darat Kec. Martapura	1	Ruang
5	TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec. Martapura Barat	2	Ruang

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.095.942.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.578.216.000 (75,30%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Baru yang Dibangun dan target kinerja berupa 1 Unit dan realisasi 1 Unit yaitu Pembangunan TK Negeri Pembina Sungai Tabuk. Adapun pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.492.405.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.211.000.000 (81,14%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia dan target kinerja berupa 2 Paket dan realisasi 2 Paket yaitu 1 paket pengadaan tas ransel dan 1 paket pengadaan Alat Tulis Kantor. Adapun pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 107.775.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 106.505.166 (98,82%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD diukur dengan indikator Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dan target kinerja sebanyak 300 Satuan

Pendidikan dan realisasi 300 Satuan Pendidikan dengan rincian:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Kegiatan Sosialisasi Akreditasi	90	Satuan Pendidikan
2	Kegiatan Pendampingan Akreditasi	90	Satuan Pendidikan
3	Lomba PKG dan Gugus PAUD	12	Satuan Pendidikan
4	Pendampingan ARKAS	108	Satuan Pendidikan

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 227.353.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.240.470 (92,03%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 15 unit dengan realisasi 14 unit dengan rincian:

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	TK Negeri Pembina Tatah Makmur	1	Unit
2	TK Negeri Permai Podok 2 Kec. Aluh Aluh	4	Unit
3	TK Negeri Intan Lestari Kec. Martapura	2	Unit
4	TK Negeri Pembina Martapura	2	Unit
5	TK Negeri Pembina Kertak Hanyar	1	Unit
6	TK Negeri Pembina Mataraman	1	Unit
7	TK Negeri Pembina Simpang Empat	1	Unit
8	TK Negeri Tunas Pratama Kec. Martapura	1	Unit
9	TK Negeri SATAP (PAUD-SD SATAP) Kec. Martapura Barat	1	Unit

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.121.857.520 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.974.027.000 (93,03%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel PAUD diukur dengan indikator Jumlah Mebel PAUD yang tersedia dan target kinerja sebanyak 6 Paket dengan realisasi 6 Paket dengan rincian: 1 Paket Alat Penyimpanan Kantor (Lemari/Filling Kabinet), 1 Paket Alat Kantor Lainnya (Papan Tulis), 1 Paket Mebel (Sofa Tamu), 1 Paket Alat Pendingin (AC), 1 Paket Rumah Tangga Lainnya (Speaker Wireless, USB, Microphone) dan 1 Paket Alat Peraga Praktik Sekolah. Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 325.371.000 dengan realisasi anggaran 321.786.405 (98,90%).

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD diukur dengan indikator Jumlah Satuan PAUD yang mengikuti proses belajar dan target kinerja

sebanyak 447 Satuan Pendidikan dengan realisasi 447 Satuan Pendidikan dengan rincian:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	24	Satuan Pendidikan
2	Aranio	13	Satuan Pendidikan
3	Astambul	25	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	17	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	12	Satuan Pendidikan
6	Gambut	33	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	36	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	35	Satuan Pendidikan
9	Martapura	80	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	24	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	32	Satuan Pendidikan
13	Paramasan	1	Satuan Pendidikan
14	Pengaron	8	Satuan Pendidikan
15	Sambung Makmur	8	Satuan Pendidikan
16	Simpang Empat	19	Satuan Pendidikan
17	Sungai Pinang	11	Satuan Pendidikan
18	Sungai Tabuk	37	Satuan Pendidikan
19	Tatah Makmur	15	Satuan Pendidikan
20	Telaga Bauntung	6	Satuan Pendidikan

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.093.127.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.036.019.545 (97,27%). Adapun anggaran Sub Kegiatan digunakan untuk kegiatan Festival Hari Pendidikan, Festival Kreativitas Anak Usia Dini, Festival Menari Kreasi Anak Usia Dini dan Kegiatan Aktivitas Anak Usia Dini.

- Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur TIK diukur dengan indikator Jumlah Paket Infrastruktur TIK yang tersedia dan target kinerja sebanyak 2 Paket dengan realisasi 1 Paket yaitu pengadaan Smart Board sebanyak 10 unit. Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.403.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 971.139.000 (69,22%).
- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD
Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD diukur dengan indikator Jumlah Perlengkapan PAUD yang tersedia dan target kinerja sebanyak 5 Paket dengan realisasi 3 Paket yaitu 1 Paket Pengadaan Buku Bercerita, 1 Paket Pengadaan Perlengkapan Alat Permainan Tradisional dan 1 Paket Pengadaan Alat Penyimpanan (Lemari dan Filling Kabinet). Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 594.195.000 dengan realisasi anggaran Rp. 188.806.330 (31,78%).
- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan diukur dengan Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen dengan rincian:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Pelantikan Pokja Bunda PAUD	43	Orang
2	Sosialisasi PAUD HI	50	Orang
3	Sosialisasi Kombel Hari Belajar Guru	50	Orang
4	Seminar Parenting	65	Orang
5	Sosialisasi Pentingnya PAUD Kepada Masyarakat	300	Orang
6	Bimtek Pembelajaran Mendalam	300	Orang
7	Pedampingan Perencanaan Berbasis Data	80	Orang
8	Sosialisasi G7KAIH	25	Orang
9	Pendampingan Sulingjar	250	Orang
10	Pendampingan TPPK	250	Orang
11	Sosialisasi Sekolah Sehat	445	Orang
12	Pengukuhan Bunda PAUD	310	Orang

Pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 757.168.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.304.032 (86,15%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat dan target kinerja sebanyak 3 Unit dengan realisasi 3 Unit dengan rincian 1 Unit TK Negeri Pembina Beruntung Baru, 1 Unit TK Negeri Pertiwi Podok dan 1 Unit TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam. Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 524.392.116 dengan realisasi anggaran Rp. 521.755.000 (99.50%).

- Sub Kegiatan Pelatihan Aplikasi Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pelatihan Aplikasi Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 40 orang dengan realisasi 40 orang dengan rincian :

No	Nama PAUD	Kecamatan	Jumlah Peserta
1	KB Melati	Aluh-Aluh	1 Orang
2	PAUD Harapan Kita	Aluh-Aluh	1 Orang
3	PAUD Melati	Aluh-Aluh	1 Orang
4	PAUD Melati Mina	Aluh-Aluh	1 Orang
5	PAUD Mutiara	Aluh-Aluh	1 Orang
6	PAUD Permata Mulia	Aluh-Aluh	1 Orang
7	TK Negeri Pembina	Aluh-Aluh	1 Orang
8	PAUD Raudhatul Athfal	Aluh-Aluh	1 Orang
9	PAUD Ryadhos Shoolihiin	Aluh-Aluh	1 Orang

No	Nama PAUD	Kecamatan	Jumlah Peserta
10	PAUD Seroja	Aluh-Aluh	1 Orang
11	TK Antasari	Aluh-Aluh	1 Orang
12	KB Al Mukaramah	Cintapuri Darussalam	1 Orang
13	KB Anggrek	Cintapuri Darussalam	1 Orang
14	KB Ar-Raudah	Cintapuri Darussalam	1 Orang
15	KB Cerdas	Cintapuri Darussalam	1 Orang
16	KB Qurratul Ain	Cintapuri Darussalam	1 Orang
17	TK Tunas Pertiwi	Cintapuri Darussalam	1 Orang
18	TK El Kariem	Paramasan	1 Orang
19	KB Mawar	Sambung Makmur	1 Orang
20	KB Rajawali	Sambung Makmur	1 Orang
21	PAUD Al-Hasani	Sambung Makmur	1 Orang
22	PAUD An-Nur	Sambung Makmur	1 Orang
23	PAUD Tunas Bangsa	Sambung Makmur	1 Orang
24	KB Cahaya Kasih	Sungai Pinang	1 Orang
25	KB Harapan Ibu	Sungai Pinang	1 Orang
26	KB Kasih Bunda	Sungai Pinang	1 Orang
27	KB Pelangi	Sungai Pinang	1 Orang
28	KB Sayang Bunda	Sungai Pinang	1 Orang
29	TK Arraudah	Sungai Pinang	1 Orang
30	TK Mawaddah	Sungai Pinang	1 Orang
31	TK Negeri Pembina Sungai Pinang	Sungai Pinang	1 Orang
32	TK Permata Hati	Sungai Pinang	1 Orang
33	TK Pertiwi Nuruddiniyah	Sungai Pinang	1 Orang
34	TK Tunas Harapan	Sungai Pinang	1 Orang
35	KB Dewi Sartika	Telaga Bauntung	1 Orang
36	KB Tunas Bersama	Telaga Bauntung	1 Orang
37	PAUD Asuhan Bunda	Telaga Bauntung	1 Orang
38	PAUD Cahaya Bunda	Telaga Bauntung	1 Orang
39	PAUD Kasih Ibu	Telaga Bauntung	1 Orang
40	TK Negeri Pembina Telaga Bauntung	Telaga Bauntung	1 Orang

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.153.000 dengan realisasi anggaran Rp. 11.153.000 (100%).
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan diukur dengan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 400 orang dan realisasi 400 orang dengan rincian:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Sosialisasi PAUD Berkualitas	50	Orang
2	Pendampingan PAUD Berkualitas	50	Orang
3	Bimtek PKG dan Gugus PAUD	245	Orang
4	Pendidikan dan Pelatihan Pengasuhan Stimulasi Penanganan Stunting Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	55	Orang

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 344.048.000 dengan realisasi anggaran Rp. 331.218.000 (96,27%).
- Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan
 Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan dan target kinerja berupa 1 Konten Digital dan realisasi 1 Konten Digital yaitu Pemanfaatan Aplikasi Canva dalam Pembelajaran PAUD. Adapun pagu anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 35.640.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.570.000 (97%).
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
 Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD diukur dengan indikator Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia dan target kinerja sebanyak 8 Paket dengan realisasi 13 Paket dengan rincian:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam untuk PAUD/TK Swasta	1	Paket
2	Belanja Hibah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam untuk PAUD/TK Swasta	1	Paket
3	Belanja Hibah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam untuk PAUD/TK Swasta	1	Paket
4	Belanja Hibah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran untuk PAUD Swasta dan Negeri (DAK-PAUD)	1	Paket
5	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran untuk PAUD Negeri (DAK-PAUD).	1	Paket
6	Pengadaan APE Dalam untuk TK Negeri (ABT)	1	Paket
7	Pengadaan APE Luar untuk TK/PAUD Negeri (ABT)	1	Paket
8	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam untuk TK Negeri 1	1	Paket
9	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam untuk TK Negeri 2	1	Paket
10	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam untuk TK Negeri 3	1	Paket
11	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam untuk TK Negeri 4	1	Paket
12	Belanja Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar untuk PAUD/TK Swasta	1	Paket
13	Belanja Modal Pengadaan APE Luar untuk PAUD Negeri	1	Paket

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.832.568.000 dengan realisasi anggaran Rp. 3.814.408.374 (99,53%).

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD diukur dengan indikator Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD dan target kinerja sebanyak 433 orang dan realisasi 433 orang dengan rincian:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Sosialisasi BOSP PAUD	433	Orang
2	Pendampingan Aplikasi SI BOS PAUD	433	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 106.573.000 dengan realisasi anggaran Rp. 98.684.194 (92,60%).

- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dan target kinerja sebanyak 631 orang dan realisasi 631 orang dengan rincian:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Apresiasi PTK PAUD dan PNF	21	Orang
2	Bimtek Pengembangan Literasi dan Numerasi Guru PAUD	100	Orang
3	Bimtek Penguatan 8 Standar Nasional	29	Orang
4	Bimtek Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	100	Orang
5	Bimtek Penyusunan Modul Ajar dan KOSP bagi Pamong dan Tutor	100	Orang
6	Bimtek Tutor dan Nonformal	90	Orang
7	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar	60	Orang
8	Komunitas Belajar PAUD	80	Orang
9	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Penilik	29	Orang
10	Rapat Pengawas TK	22	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 437.383.200 dengan realisasi anggaran Rp. 411.689.973 (94,13%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD diukur dengan indikator Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP dan target kinerja sebanyak 425 orang dan realisasi 425 orang dengan rincian:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	23	Satuan Pendidikan
2	Aranio	12	Satuan Pendidikan

No	Kecamatan	Volume	Satuan
3	Astambul	25	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	17	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	11	Satuan Pendidikan
6	Gambut	32	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	36	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	31	Satuan Pendidikan
9	Martapura	73	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	12	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	23	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	32	Satuan Pendidikan
13	Paramasan	1	Satuan Pendidikan
14	Pengaron	8	Satuan Pendidikan
15	Sambung Makmur	7	Satuan Pendidikan
16	Simpang Empat	19	Satuan Pendidikan
17	Sungai Pinang	8	Satuan Pendidikan
18	Sungai Tabuk	35	Satuan Pendidikan
19	Tatah Makmur	14	Satuan Pendidikan
20	Telaga Bauntung	6	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.836.680.000 dengan realisasi anggaran Rp. 8.587.522.590 (97,18%).

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar. Adapun target kegiatan ini adalah 95,45% dengan realisasi 91,28%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diukur dengan indikator Jumlah sekolah baru yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 4 Unit dengan realisasi sebanyak 2 Unit dengan rincian berupa :

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan SD Negeri Gambut 10 Kec. Gambut	1	Unit
2	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan SD Negeri Mataraman 1 Kec. Mataraman	1	Unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.358.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 860.427.330 (63,32%).

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Capaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah dasar dan target kinerja sebanyak 805 orang dengan realisasi 744 orang dengan rincian berupa :

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Sosialisasi Penggunaan Dana BOS SD	372	Orang
2	Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS	372	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 213.958.000 dengan realisasi anggaran Rp. 193.965.963,- (90,66%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 9 Paket dengan realisasi sebanyak 8 Paket dengan rincian berupa :

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Peralatan Olah Raga Tradisional SD	1	Paket
2	Pengadaan TIK (Laptop) Jenjang SD (ABT)	1	Paket
3	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK-SD	1	Paket
4	Pengadaan Pengadaan Penguat Jaringan/ Starlink (ABT II)	1	Paket
5	Pengadaan TIK (Smartboard) jenjang SD (ABT)	1	Paket
6	Pengadaan TIK (Smartboard) Sekolah Rujukan Google Jenjang SD (ABT) (Indrasari 2)	1	Paket
7	Pengadaan Smart class room utk SDN Jawa 2 dan SDN Keraton 1	1	Paket
8	Pengadaan Buku Referensi Pendidikan untuk SD	1	Paket

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.497.753.125 dengan realisasi anggaran Rp. 10.204.389.801,- (65,84%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 2 Unit dengan realisasi sebanyak 2 Unit dengan rincian berupa :

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDN Garis Hanyar Kec. Cintapuri Darussalam	1	unit
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDN Kahelaan 3 Kec. Sungai Pinang	1	unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 414.530.000 dengan realisasi anggaran Rp. 413.650.000,- (99,79%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU diukur dengan indikator Jumlah

Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 4 Ruang dengan realisasi sebanyak 4 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Kertak Empat Kec. Pengaron	1	Ruang
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Mangkauk 3 Kec. Pengaron	1	Ruang
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Sungai Alang 2 Kec. Karang Intan	1	Ruang
4	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Aranio 1 Kec. Aranio	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 951.560.000 dengan realisasi anggaran Rp. 848.613.250,- (89,18%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah diukur dengan indikator Jumlah mebel sekolah yang tersedia dan target kinerja sebanyak 2 Paket dengan realisasi sebanyak 2 Paket dengan rincian berupa :

A

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan maja kursi siswa SD-kayu lurus	1	Paket
2	Pengadaan mebel Laboratorium Komputer SD	1	Paket

apun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 417.735.000 dengan realisasi anggaran Rp. 416.368.183,- (99,67%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/Berat dan target kinerja sebanyak 1 Unit dengan realisasi sebanyak 1 Unit dengan rincian berupa Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD Negeri Belimbing Baru Kec. Sungai Pinang.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.925.000 dengan realisasi anggaran Rp. 161.375.000,- (99,66%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 2 Ruang dengan realisasi sebanyak 2 Ruang dengan rincian berupa 1 Ruang Perpustakaan SD Negeri Podok 2 dan 1 Ruang Perpustakaan SDN Aluh-Aluh Besar 1.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 305.980.000 dengan realisasi anggaran Rp. 304.950.000,- (99,66%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU diukur dengan indikator Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 3 Ruang dengan realisasi sebanyak 3 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Aluh Aluh Besar 3 Kec. Aluh Aluh	1	ruang
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Handil Purai 2 Kec. Beruntung Baru	1	ruang
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar	1	ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 471.550.000 dengan realisasi anggaran Rp. 468.951.350,- (99,45%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 5 Ruang dengan realisasi sebanyak 5 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Perpustakaan SDN Benteng Seberang Kec. Pengaron	1	Ruang
2	Pembangunan Perpustakaan SDN Cindai Alus 2 Kec. Martapura	1	Ruang
3	Pembangunan Perpustakaan SDN Maniapun Kec. Pengaron	1	Ruang
4	Pembangunan Perpustakaan SDN Pasar Kamis 1 Kec. Kertak Hanyar	1	Ruang
5	Pembangunan Perpustakaan SDN Tajau Landung 1 Kec. Sungai Tabuk (ABT)	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.276.471.667 dengan realisasi anggaran Rp. 1.161.633.000,- (91%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru diukur dengan indikator Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah dan target kinerja sebanyak 7 Ruang dengan realisasi sebanyak 9 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Galam Rabah 2 Kec. Cintapuri darussalam	1	Ruang
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kecil Kiram Kec. Karang Intan	1	Ruang
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sungai Batang Ilir 1 Kec. Martapura Barat	1	Ruang
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Paramasan Bawah 3 Kec. Paramasan	1	Ruang
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sungai Batang Banyu Kec. Sambung Makmur	1	Ruang
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tanah Intan Kec. Simpang Empat	1	Ruang
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tatah Pemangkih Laut 2 Kertak Hanyar	1	Ruang
8	Pembangunan Ruang Kelas Inklusi SDN Indrasari 1 Kec.Martapura (ABT II)	1	Ruang
9	Pembangunan Ruang Kelas Inklusi SDN Tungkaran Kec.Martapura (ABT II)	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.257.830.000 dengan realisasi anggaran Rp. 2.140.308.200,- (94,79%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 7 Unit dengan realisasi sebanyak 9 Unit dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri Ali Mukim Kec. Pengaron	1	Unit
2	Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri Pingaran 2 Kec. Astambul	1	Unit
3	Rehabilitasi Toilet/Jamban SD Negeri Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar	1	Unit
4	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Banyu Hiranng Kec. Gambut	1	Unit
5	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Baliangin Kec. Sambung Makmur (ABT)	1	Unit
6	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Gunung Ulin Kec. Mataraman (ABT)	1	Unit
7	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Handil Purai 2 Kec. Beruntung Baru (ABT)	1	Unit
8	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Jingah Habang Ulu (ABT II)	1	Unit

9	Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Keraton 3 kec.Martapura (ABT II)	1	Unit
---	--	---	------

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 913.775.000 dengan realisasi anggaran Rp. 909.570.000,- (99,54%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil dan target kinerja sebanyak 1.333 orang dengan realisasi sebanyak 1.271 orang dengan rincian berupa:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	76	Peserta Didik
2	Aranio	42	Peserta Didik
3	Astambul	92	Peserta Didik
4	Beruntung Baru	35	Peserta Didik
5	Cintapuri Darussalam	26	Peserta Didik
6	Gambut	82	Peserta Didik
7	Karang Intan	114	Peserta Didik
8	Kertak Hanyar	49	Peserta Didik
9	Martapura	131	Peserta Didik
10	Martapura Barat	49	Peserta Didik
11	Martapura Timur	72	Peserta Didik
12	Mataraman	70	Peserta Didik
13	Paramasan	33	Peserta Didik
14	Pengaron	63	Peserta Didik
15	Sambung Makmur	33	Peserta Didik
16	Simpang Empat	73	Peserta Didik
17	Sungai Pinang	67	Peserta Didik
18	Sungai Tabuk	116	Peserta Didik
19	Tatah Makmur	32	Peserta Didik
20	Telaga Bauntung	16	Peserta Didik

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.999.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 3.784.500.000,- (94,64%).

- Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen dengan rincian berupa 1 Dokumen Regrouping di 8 Sekolah dan 1 Dokumen Izin Pendirian Sekolah.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.556.000 dengan realisasi anggaran Rp. 7.496.349,- (99,21%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 72 Ruang dengan realisasi 109 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SD Negeri Aluh Aluh Kecil 2	6	Ruang
2	SD Negeri Batu Balian 1	3	Ruang
3	SD Negeri Benua Riam	4	Ruang
4	SD Negeri Danau Salak 1	2	Ruang
5	SD Negeri Keraton 2	3	Ruang
6	SD Negeri Lok Tunggul	3	Ruang
7	SD Negeri Madurejo 2	3	Ruang
8	SD Negeri Mekar	6	Ruang
9	SD Negeri Mekar Sari	3	Ruang
10	SD Negeri Simpang Warga 1	3	Ruang
11	SD Negeri Sungai Jati	3	Ruang
12	SD Negeri Sungai Uyak	3	Ruang
13	SD Negeri Tiwingan Lama	3	Ruang
14	SDN Kaliukan 2	2	Ruang
15	SDN Sungkai 1	6	Ruang
16	SDN Bincau 1	6	Ruang
17	SDN Belimbing Lama	6	Ruang
18	SDN Gambut 7	6	Ruang
19	SDN Gambut 9	7	Ruang
20	SDN Limamar	1	Ruang
21	SDN Padang Panjang5	6	Ruang
22	SDN Pakutik	3	Ruang
23	SDN Sumber harapan 2	6	Ruang
24	SDN Tanjung Rema Darat	1	Ruang
25	SDN Tatah Belayung Baru	3	Ruang
26	SDN Kertak Hanyar 1-2	2	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.599.256.875 dengan realisasi anggaran Rp. 17.780.632.996,- (95,60%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan target kinerja sebanyak 596 orang dengan realisasi 215 Orang dengan rincian berupa :

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	12	Orang
2	Aranio	6	Orang
3	Astambul	10	Orang
4	Beruntung Baru	5	Orang
5	Cintapuri Darussalam	3	Orang
6	Gambut	27	Orang
7	Karang Intan	5	Orang
8	Kertak Hanyar	15	Orang
9	Martapura	54	Orang
10	Martapura Barat	7	Orang
11	Martapura Timur	7	Orang

12	Mataraman	9	Orang
13	Paramasan	9	Orang
14	Pengaron	5	Orang
15	Simpang Empat	5	Orang
16	Sungai Pinang	5	Orang
17	Sungai Tabuk	26	Orang
18	Tatah Makmur	3	Orang
19	Telaga Bauntung	2	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.295.800.000 dengan realisasi anggaran Rp. 468.398.364,- (36,15%).

- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dan target kinerja sebanyak 740 orang dengan realisasi 723 Orang dengan rincian berupa :

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Diklat Inklusi	100	Orang
2	Diklat PPG	100	Orang
3	Diklat PPG PJOK	50	Orang
4	Diklat Hari Belajar Guru	473	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.432.498.000 dengan realisasi anggaran Rp. 833.913.923,- (58,21%).

- Sub Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur dengan indikator Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dan target kinerja sebanyak 185 Komunitas dengan realisasi 185 Komunitas dengan rincian berupa :

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	13	Komunitas Belajar
2	Aranio	4	Komunitas Belajar
3	Astambul	15	Komunitas Belajar
4	Beruntung Baru	5	Komunitas Belajar
5	Cintapuri Darussalam	7	Komunitas Belajar
6	Gambut	12	Komunitas Belajar
7	Karang Intan	13	Komunitas Belajar
8	Kertak Hanyar	10	Komunitas Belajar
9	Martapura	21	Komunitas Belajar
10	Martapura Barat	7	Komunitas Belajar
11	Martapura Timur	8	Komunitas Belajar
12	Mataraman	10	Komunitas Belajar
13	Paramasan	5	Komunitas Belajar
14	Pengaron	9	Komunitas Belajar
15	Sambung Makmur	4	Komunitas Belajar

16	Simpang Empat	10	Komunitas Belajar
17	Sungai Pinang	8	Komunitas Belajar
18	Sungai Tabuk	17	Komunitas Belajar
19	Tatah Makmur	5	Komunitas Belajar
20	Telaga Bauntung	2	Komunitas Belajar

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 56.684.500 dengan realisasi anggaran Rp. 55.796.831,- (98,43%).

- Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan dan target kinerja sebanyak 2 Konten Digital dengan realisasi 2 Konten Digital dengan rincian berupa : 1. Website Sekolah dan 2. Konten Edukasi Pembelajaran Bagi Guru.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.880.000 dengan realisasi anggaran Rp. 17.739.345,- (99,21%).

- Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 260 Orang dengan realisasi 260 Orang dengan rincian berupa :

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Diklat Operator Sekolah	60	Orang
2	Diklat Kepala Sekolah	200	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 169.758.300 dengan realisasi anggaran Rp. 163.158.048,- (96,11%).

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan target kinerja sebanyak 360 Satuan Pendidikan dengan realisasi 373 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa :

No	Kecamatan	Volume	Satuan
----	-----------	--------	--------

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	26	Satuan Pendidikan
2	Aranio	11	Satuan Pendidikan
3	Astambul	29	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	10	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	14	Satuan Pendidikan
6	Gambut	25	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	29	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	19	Satuan Pendidikan
9	Martapura	39	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	13	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	18	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	21	Satuan Pendidikan
13	Paramasan	9	Satuan Pendidikan
14	Pengaron	16	Satuan Pendidikan
15	Sambung Makmur	8	Satuan Pendidikan
16	Simpang Empat	21	Satuan Pendidikan
17	Sungai Pinang	17	Satuan Pendidikan
18	Sungai Tabuk	32	Satuan Pendidikan
19	Tatah Makmur	11	Satuan Pendidikan
20	Telaga Bauntung	5	Satuan Pendidikan

Adapun Aktivitas yang dilaksanakan berupa

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Kisi-Kisi Soal dan Penulisan Naskah Soal
2. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Proktor Dalam Pelaksnaan ANBK
3. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek kapasitan Guru Kelas Awal Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (MPLS)
4. Pelasanaan Peran PMM/Platform Rumah Belajar Guru Dalam Implentasi Kurikulum Merdeka
5. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD
6. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi 1
7. Pengadaan Map Ijazah Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kab. Banjar
8. Pengadaan Serfikat Ijazah Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kab. Banjar

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 812.420.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 786.866.079,- (96,85%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa diukur dengan indikator Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan target kinerja sebanyak 585 Peserta Didik dengan realisasi 880 Peserta Didik dengan rincian berupa :

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Calistung	120	Peserta Didik
2	FLS2N 100 Peserta	100	Peserta Didik
3	O2SN 60 Peserta	60	Peserta Didik
4	Karakter Islami 100 Peserta	100	Peserta Didik
5	OSN 40	40	Peserta Didik
6	FTBI 100	100	Peserta Didik
7	Turnamen Sepak Bola U-12 360 Peserta	360	Peserta Didik

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 952.536.000 dengan realisasi anggaran Rp. 726.193.741,- (76,24%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan target kinerja sebanyak 373 Orang dengan realisasi 373 Orang dengan rincian berupa :

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	26	Orang
2	Aranio	11	Orang
3	Astambul	29	Orang
4	Beruntung Baru	10	Orang
5	Cintapuri Darussalam	14	Orang
6	Gambut	25	Orang
7	Karang Intan	29	Orang
8	Kertak Hanyar	19	Orang
9	Martapura	39	Orang
10	Martapura Barat	13	Orang
11	Martapura Timur	18	Orang
12	Mataraman	21	Orang
13	Paramasan	9	Orang
14	Pengaron	16	Orang
15	Sambung Makmur	8	Orang
16	Simpang Empat	21	Orang
17	Sungai Pinang	17	Orang
18	Sungai Tabuk	32	Orang
19	Tatah Makmur	11	Orang
20	Telaga Bauntung	5	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.275.000 dengan realisasi anggaran Rp. 41.902.213,- (99,12%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun dan target kinerja sebanyak 14 Unit dengan realisasi 18 Unit dengan rincian berupa :

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Jamban/Toilet SD Negeri Sungai Tuan Kec. Astambul	1	unit
2	Pembangunan Jamban/Toilet SD Negeri Tatah	1	unit

No	Belanja	Volume	Satuan
	Jaruju Kec. Tatah makmur		
3	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Handil Purai 1 Kec. Beruntung Baru	1	unit
4	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Jingah Habang Hilir Kec. Karang Intan	1	unit
5	Pembangunan Pagar Halaman SDN Antasan Senor Kec. Martapura Timur	1	unit
6	Pembangunan Pagar Halaman SDN Pasar Jati 3 Kec. Astambul	1	unit
7	Pengurugan Halaman/Paving SD Negeri Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk	1	unit
8	Pengurugan Halaman/Paving SDN Sungai Batang Ilir 1 Kec. Martapura Barat	1	unit
9	Pembangunan/Pengurugan Halaman SDN Keliling Benteng Ulu 2 Kec. Martapura Barat	1	unit
10	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Pasayangan 2 Kec. Martapura	1	unit
11	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Keraton 3 Kec. Martapura	1	unit
12	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Pulau Nyiur 2 Kec. Karang Intan	1	unit
13	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Tungkaran Kec. Martapura (ABT II)	1	unit
14	Pembangunan Jamban/Toilet SDN Garis Hanyar Kec. Cintapuri Darussalam	1	unit
15	Pengurugan Halaman/Paving SDN Sungai Batang 2 Kec. Martapura Barat	1	unit
16	Pembangunan Halaman SDN Keramat 2 S.Tabuk	1	unit
17	Pembangunan Halaman SDN Batu Balian 1 Kec.Simpang Empat	1	unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.643.044.900 dengan realisasi anggaran Rp. 2.628.729.000,- (99,46%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dan target kinerja sebanyak 124 Satuan Pendidikan dengan realisasi 124 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa :

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	6	Satuan Pendidikan
2	Aranio	6	Satuan Pendidikan
3	Astambul	6	Satuan Pendidikan
4	Beruntung Baru	6	Satuan Pendidikan
5	Cintapuri Darussalam	6	Satuan Pendidikan
6	Gambut	6	Satuan Pendidikan
7	Karang Intan	6	Satuan Pendidikan
8	Kertak Hanyar	6	Satuan Pendidikan
9	Martapura	8	Satuan Pendidikan
10	Martapura Barat	6	Satuan Pendidikan
11	Martapura Timur	6	Satuan Pendidikan
12	Mataraman	6	Satuan Pendidikan
13	Paramasan	6	Satuan Pendidikan
14	Pengaron	7	Satuan Pendidikan
15	Sambung Makmur	6	Satuan Pendidikan
16	Simpang Empat	7	Satuan Pendidikan
17	Sungai Pinang	6	Satuan Pendidikan
18	Sungai Tabuk	6	Satuan Pendidikan
19	Tatah Makmur	6	Satuan Pendidikan
20	Telaga Bauntung	6	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 191.809.400 dengan realisasi anggaran Rp. 135.888.413,- (70,85%).

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi diukur dengan indikator Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dan target kinerja sebanyak 3 Kegiatan dengan realisasi 3 Kegiatan dengan rincian berupa : 1 Kegiatan Sosialisasi Ramah Anak, 1 Kegiatan Sosialisasi Perundungan dan 1 Kegiatan Sosialisasi Gerakan Sekolah Sehat.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 181.993.000 dengan realisasi anggaran Rp. 178.749.890,- (98,22%).

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 405 orang dengan realisasi 395 Orang dengan rincian berupa:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Bimbingan Teknis Pengawas	32	Orang
2	Bimbingan Teknis Pembelajaran Jarak Jauh dan Pembelajaran Mendalam	363	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 220.944.000 dengan realisasi anggaran Rp. 209.812.366,- (94,96%).

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan diukur dengan indikator

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen dengan rincian berupa : 1 Dokumen Kesiapan Pelaksanaan TKA dan 1 Dokumen Kesiapan Pelaksanaan MBG.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.270.000 dengan realisasi anggaran Rp. 26.349.317,- (96,62%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 2 Paket dengan realisasi 4 Paket dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Matematika Dasar IPBA untuk 13 SD di Kec. Martapura Kota	1	Paket
2	Pengadaan MEQIB (Mathematics Education Quality Improvement Programme) untuk 12 SD di Kec. Martapura Kota	1	Paket
3	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK-SD)	1	Paket
4	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan untuk SD (ABT)	1	Paket

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.835.375.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.794.059.364,- (97,75%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS dan target kinerja sebanyak 372 Satuan Pendidikan dengan realisasi 372 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

No	Kecamatan	Volume	Satuan
1	Aluh-Aluh	26	Orang
2	Aranio	11	Orang
3	Astambul	29	Orang
4	Beruntung Baru	10	Orang
5	Cintapuri Darussalam	14	Orang
6	Gambut	25	Orang
7	Karang Intan	29	Orang
8	Kertak Hanyar	18	Orang
9	Martapura	39	Orang
10	Martapura Barat	13	Orang
11	Martapura Timur	18	Orang
12	Mataraman	21	Orang
13	Paramasan	9	Orang
14	Pengaron	16	Orang
15	Sambung Makmur	8	Orang
16	Simpang Empat	21	Orang
17	Sungai Pinang	17	Orang
18	Sungai Tabuk	32	Orang

No	Kecamatan	Volume	Satuan
19	Tatah Makmur	11	Orang
20	Telaga Bauntung	5	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.887.024.867 dengan realisasi anggaran Rp. 40.002.192.148,- (97,84%).

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Adapun target kegiatan ini adalah 95,45% dengan realisasi 86,87%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diukur dengan indikator Jumlah sekolah baru yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 1 Unit dengan realisasi 1 Unit dengan rincian berupa: 1 Dokumen Laporan Koordinasi dan kajian pembangunan USB di daerah Kahelaan.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 13.210.800 dengan realisasi anggaran Rp. 3.916.454,- (29,65%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah ruang kelas sekolah telah direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 17 Ruang dengan realisasi 20 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMPN 1 Astambul	1	Ruang
2	SMPN 2 Astambul	3	Ruang
3	SMPN 3 Aluh-Aluh	1	Ruang
4	SMPN 2 Martapura Timur	10	Ruang
5	SMPN 2 Martapura Barat	1	Ruang
6	SMPN 1 Karang Intan	1	Ruang
7	SMPN 3 Karang Intan	1	Ruang
8	SMPN 7 Karang Intan	1	Ruang
9	SMPN 3 Cintapuri	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.702.483.667 dengan realisasi anggaran Rp. 4.661.091.000,- (99,12%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil dan target kinerja sebanyak 125 Peserta Didik dengan realisasi 125 Peserta Didik dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMPN 1 Tatah Makmur	5	Peserta Didik
2	SMP Darussalam	3	Peserta Didik
3	SMP Islam Arriyadh	1	Peserta Didik
4	SMPN 1 Aluh-Aluh	5	Peserta Didik
5	SMPN 1 Beruntung Baru	3	Peserta Didik
6	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	4	Peserta Didik
7	SMPN 1 Gambut	5	Peserta Didik
8	SMPN 1 Karang Intan	1	Peserta Didik
9	SMPN 1 Kertak Hanyar	1	Peserta Didik
10	SMPN 1 Martapura Barat	4	Peserta Didik
11	SMPN 1 Mataraman	2	Peserta Didik
12	SMPN 1 Pengaron	3	Peserta Didik
13	SMPN 1 Sambung Makmur	3	Peserta Didik
14	SMPN 1 Simpang Empat	4	Peserta Didik
15	SMPN 1 Sungai Tabuk	5	Peserta Didik
16	SMPN 1 Telaga Bauntung	2	Peserta Didik
17	SMPN 2 Aluh-Aluh	3	Peserta Didik
18	SMPN 2 Aranio	4	Peserta Didik
19	SMPN 2 Astambul	4	Peserta Didik
20	SMPN 2 Karang Intan	2	Peserta Didik
21	SMPN 2 Kertak Hanyar	1	Peserta Didik
22	SMPN 2 Martapura	4	Peserta Didik
23	SMPN 2 Martapura Barat	2	Peserta Didik
24	SMPN 2 Martapura Timur	5	Peserta Didik
25	SMPN 2 Simpang Empat	5	Peserta Didik
26	SMPN 2 Sungai Tabuk	3	Peserta Didik
27	SMPN 3 Aluh - Aluh	2	Peserta Didik
28	SMPN 3 Karang Intan	1	Peserta Didik
29	SMPN 3 Martapura	3	Peserta Didik
30	SMPN 3 Mataraman	4	Peserta Didik
31	SMPN 3 Simpang Empat	3	Peserta Didik
32	SMPN 3 Sungai Pinang	1	Peserta Didik
33	SMPN 4 Aranio	1	Peserta Didik
34	SMPN 4 Astambul	1	Peserta Didik
35	SMPN 4 Martapura	2	Peserta Didik
36	SMPN 4 Simpang Empat	3	Peserta Didik
37	SMPN 4 Sungai Tabuk	3	Peserta Didik
38	SMPN 5 Aluh-Aluh	2	Peserta Didik
39	SMPN 6 Karang Intan	1	Peserta Didik
40	SMPN 6 Martapura	6	Peserta Didik
41	SMPN 7 Aluh-Aluh	4	Peserta Didik
42	SMPN 7 Karang Intan	4	Peserta Didik

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 375.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 349.500.000,- (93,20%).

- Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dan target kinerja sebanyak 1

Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen dengan rincian berupa: 1 Dokumen Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendataan Siswa Jenjang SMP, Kegiatan Sosialisasi Anti Bullying dan Narkoba Jenjang SMP dan Kegiatan Sosialisasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Bagi Peserta Didik Jenjang SMP.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 77.617.500 dengan realisasi anggaran Rp. 76.681.202,- (98,79%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru diukur dengan indikator Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah dan target kinerja sebanyak 2 Ruang dengan realisasi 2 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 6 Martapura	1	Ruang
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kertak Hanyar	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 604.946.000 dengan realisasi anggaran Rp. 588.640.000,- (97,30%).

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Capaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama dan target kinerja sebanyak 75 Orang dengan realisasi 75 Orang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Orang
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Orang
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Orang
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Orang
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Orang
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Orang
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Orang
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Orang
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Orang
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Orang
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Orang
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Orang
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Orang
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Orang
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Orang

No	Belanja	Volume	Satuan
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Orang
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Orang
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Orang
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Orang
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Orang
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Orang
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Orang
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Orang
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Orang
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Orang
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Orang
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Orang
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Orang
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Orang
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Orang
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Orang
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Orang
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Orang
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Orang
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Orang
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Orang
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Orang
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Orang
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Orang
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Orang
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Orang
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Orang
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Orang
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Orang
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Orang
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Orang
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Orang
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Orang
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Orang
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Orang
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Orang
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Orang
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Orang
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Orang
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Orang
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Orang
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Orang
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Orang
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Orang
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Orang
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Orang
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Orang
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Orang
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Orang
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Orang
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Orang
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Orang
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Orang
69	SMP Darussalam	1	Orang
70	SMP Hidayatullah	1	Orang
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Orang
72	SMP IT Usluhuddin	1	Orang
73	SMP Mitra Kasih	1	Orang
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Orang
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.925.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 89.475.500,- (99,50%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU diukur dengan indikator Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 2 Ruang dengan realisasi 2 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMPN 1 Sungai Tabuk	1	Ruang
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMPN 1 Sambung Makmur	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 273.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 272.485.000,- (99,81%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU diukur dengan indikator Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 2 Ruang dengan realisasi 2 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU SMPN 2 Cintapuri Darussalam	1	ruang
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU SMPN 5 Martapura	1	Ruang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 599.286.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 50.9257.000,- (84,98%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 1 Ruang dengan realisasi 1 Ruang dengan rincian berupa: 1 Ruang UKS SMPN 1 Sungai Tabuk.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 198.122.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 197.871.000,- (99,87%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Perpustakaan

Sekolah yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 1 Ruang dengan realisasi 1 Ruang dengan rincian berupa: 1 Ruang Pembangunan Perpustakaan SMPN 3 Karang Intan.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 428.875.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 428.875.000,- (99,26%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Laboratorium diukur dengan indikator Jumlah ruang laboratorium sekolah menengah pertama yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 1 Ruang dengan realisasi 1 Ruang dengan rincian berupa: 1 Ruang Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 2 Martapura Barat.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 325.449.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 271.884.000,- (83,54%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir diukur dengan indikator Jumlah fasilitas parkir yang telah dibangun dan target kinerja sebanyak 5 Unit dengan realisasi 5 Unit dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Fasilitas parkir SMPN 2 Martapura barat	1	Unit
2	Pembangunan Fasilitas parkir SMPN 2 Kertak Hanyar	1	Unit
3	Pembangunan Fasilitas parkir SMPN 1 Mataraman	1	Unit
4	Pembangunan Fasilitas parkir SMPN 1 Sungai Pinang	1	Unit
5	Pembangunan Fasilitas Parkir (Urug/Pagar/Paving) SMPN 4 Aluh-Aluh ABT	1	Unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 896.386.667,- dengan realisasi anggaran Rp. 866.395.000,- (96,65%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 2 Ruang dengan realisasi 2 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah SMPN 4 Simpang Empat	1	Ruang

2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah SMPN 1 Pengaron	1	Ruang
---	--	---	-------

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 336.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 310.880.000,- (92,43%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium diukur dengan indikator Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 1 Ruang dengan realisasi 1 Ruang dengan rincian berupa: 1 Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMPN 1 Kertak Hanyar.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 239.825.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 199.933.000,- (83,37%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 6 Unit dengan realisasi 7 Unit dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Rehabilitasi Sedang/Berat WC/Toilet beserta sanitarynya SMPN 2 Aranio	1	Unit
2	Rehabilitasi Sedang/Berat WC/Toilet beserta sanitarynya SMPN 1 Sambung Makmur	1	Unit
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas (Rehab Toilet/WC) beserta sanitarinya SMPN 1 S.Pinang ABT	1	Unit
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas (Rehab Toilet/WC) beserta sanitarinya SMPN 4 Mataraman ABT	1	Unit
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas (Rehab Toilet/WC) beserta sanitarinya SMPN 2 Pengaron ABT	1	Unit
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas (Rehab Toilet/WC) beserta sanitarinya SMPN 4 Karang Intan ABT	1	Unit
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas (Rehab Toilet/ WC/ BK/ OSIS/ UKS) beserta sanitarinya SMPN 1 Tatah Makmur (ABT II)	1	Unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.137.455.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.133.412.000,- (99,64%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah diukur dengan indikator Jumlah mebel sekolah yang tersedia dan target kinerja sebanyak 1 Paket dengan

- realisasi 1 Paket dengan rincian berupa: 1 Paket Pengadaan Meja Kursi Siswa.
- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 516.245.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 512.425.035,- (99,26%).
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah diukur dengan indikator Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia dan target kinerja sebanyak 1 Paket dengan realisasi 1 Paket dengan rincian berupa: 1 Paket Pengadaan Meja Kursi Guru/TU.
Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 149.859.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 147.195.053,- (98,22%).
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah diukur dengan indikator Jumlah rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat dan target kinerja sebanyak 3 Unit dengan realisasi 3 Unit dengan rincian berupa:
- | No | Belanja | Volume | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumdin Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah SMPN 1 Cintapuri Darussalam (2025) | 1 | Unit |
| 2 | Rehabilitasi Rumdin Kepsek/ Guru/Penjaga Sekolah SMPN 1 S.Makmur (ABT) | 2 | Unit |
- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 539.488.333,- dengan realisasi anggaran Rp. 530.602.000,- (98,35%).
- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia dan target kinerja sebanyak 1 Paket dengan realisasi 1 Paket dengan rincian berupa: 1 Paket Pengadaan ATK Siswa.
Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 348.925.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 347.283.045,- (99,53%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan target kinerja sebanyak 63 orang dengan realisasi 63 orang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMPN 1 Aluh-aluh	2	Orang
2	SMPN 4 Aluh-aluh	1	Orang
3	SMPN 6 Aluh-Aluh	2	Orang
4	SMPN 7 Aluh-aluh	1	Orang
5	SMPN 8 Aluh-aluh	3	Orang
6	SMPN 3 Astambul	2	Orang
7	SMPN 1 Beruntung Baru	1	Orang
8	SMPN 2 Cintapuri Darussalam	1	Orang
9	SMPN 1 Gambut	6	Orang
10	SMPN 3 Gambut	1	Orang
11	SMPN 3 Karang Intan	1	Orang
12	SMPN 4 Karang Intan	1	Orang
13	SMPN 5 Karang Intan	2	Orang
14	SMPN 7 Karang Intan	1	Orang
15	SMPN 1 Kertak Hanyar	1	Orang
16	SMPN 2 Kertak Hanyar	4	Orang
17	SMPN 1 Martapura	3	Orang
18	SMPN 2 Martapura	2	Orang
19	SMPN 3 Martapura	2	Orang
20	SMPN 6 Martapura	1	Orang
21	SMPN 1 Martapura Barat	1	Orang
22	SMPN 2 Martapura Barat	1	Orang
23	SMPN 2 Martapura Timur	2	Orang
24	SMPN 1 Mataraman	2	Orang
25	SMPN 2 Mataraman	1	Orang
26	SMPN 3 Mataraman	1	Orang
27	SMPN 1 Paramasan	1	Orang
28	SMPN 1 Pengaron	1	Orang
29	SMPN 4 Simpang Empat	1	Orang
30	SMPN 1 Sungai Pinang	1	Orang
31	SMPN 2 Sungai Pinang	1	Orang
32	SMPN 3 Sungai Pinang	1	Orang
33	SMPN 1 Sungai Tabuk	1	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 147.113.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 96.231.900,- (65,41%).

- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dan target kinerja sebanyak 886 Orang dengan realisasi 1.260 Orang dengan rincian berupa:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMP	86	Orang
2	Kegiatan Pendampingan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) SMP	76	Orang
3	Kegiatan Seminar Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional (PTK SMP)	76	Orang
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Sekolah Jenjang SMP	100	Orang
5	Peningkatan Kompetensi Guru Jenjang SMP	100	Orang
6	Kegiatan Bimbingan Teknis Supervisi Proses Pembelajaran untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Jenjang SMP	86	Orang
7	Kegiatan Pendampingan Implementasi	152	Orang

	Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Jenjang SMP		
8	Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana BOS Jenjang SMP	152	Orang
9	Kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam dan Coding Jenjang SMP	152	Orang
10	Diklat PM Pengawas, Kepsek, dan Guru Jenjang SMP	128	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.261.488.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.248.155.230,- (98,94%).

- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur dengan indikator Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dan target kinerja sebanyak 2 Komunitas dengan realisasi 2 Komunitas dengan rincian berupa: Kegiatan Workshop Pemahaman Aktivitas Komunitas Belajar Antar Sekolah Jenjang SMP (81 Orang Peserta).

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.505.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 34.505.000,- (100%).

- Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan dan target kinerja sebanyak 1 Konten Digital dengan realisasi 1 Konten Digital dengan rincian berupa: Pembuatan Buku Pembelajaran Digital Jenjang SMP

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.277.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 34.277.111,- (100%).

- Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 1 76 Orang dengan realisasi 76 Orang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Orang
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Orang
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Orang
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Orang
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Orang
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Orang
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Orang
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Orang
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Orang
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Orang
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Orang
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Orang
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Orang
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Orang
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Orang
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Orang
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Orang
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Orang

No	Belanja	Volume	Satuan
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Orang
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Orang
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Orang
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Orang
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Orang
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Orang
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Orang
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Orang
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Orang
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Orang
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Orang
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Orang
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Orang
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Orang
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Orang
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Orang
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Orang
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Orang
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Orang
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Orang
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Orang
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Orang
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Orang
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Orang
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Orang
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Orang
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Orang
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Orang
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Orang
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Orang
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Orang
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Orang
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Orang
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Orang
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Orang
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Orang
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Orang
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Orang
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Orang
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Orang
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Orang
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Orang
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Orang
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Orang
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Orang
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Orang
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Orang
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Orang
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Orang
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Orang
69	SMP Darussalam	1	Orang
70	SMP Hidayatullah	1	Orang
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Orang
72	SMP IT Usluhuddin	1	Orang
73	SMP Mitra Kasih	1	Orang
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Orang
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Orang
76	SMP Tahfidzul Quran	1	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.412.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.240.513,- (99,26%).

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan target kinerja sebanyak 76 Satuan Pendidikan dengan realisasi 76 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan

No	Belanja	Volume	Satuan
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Satuan Pendidikan
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Satuan Pendidikan
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Satuan Pendidikan
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Satuan Pendidikan
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Satuan Pendidikan
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Satuan Pendidikan
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Satuan Pendidikan
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Satuan Pendidikan
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Satuan Pendidikan
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Satuan Pendidikan
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Satuan Pendidikan
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Satuan Pendidikan
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Satuan Pendidikan
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Satuan Pendidikan
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Satuan Pendidikan
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Satuan Pendidikan
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Satuan Pendidikan
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Satuan Pendidikan
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Satuan Pendidikan
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Satuan Pendidikan
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Satuan Pendidikan
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Satuan Pendidikan
69	SMP Darussalam	1	Satuan Pendidikan
70	SMP Hidayatullah	1	Satuan Pendidikan
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Satuan Pendidikan
72	SMP IT Usluhuddin	1	Satuan Pendidikan
73	SMP Mitra Kasih	1	Satuan Pendidikan
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Satuan Pendidikan
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Satuan Pendidikan
76	SMP Tahfidzul Quran	1	Satuan Pendidikan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini berupa:

- a. Bimtek Pembelajaran Digital berbasis IT penguatan Kompetensi Literasi dan Numerasi Jenjang SMP.
- b. Bimtek Penyusunan Kurikulum Program Pendidikan Individual (PPI) bagi PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) Jenjang SMP,

- c. Sosialisasi Kurikulum Jenjang SMP,
- d. Asesmen Sumatif Akhir Jenjang SMP (Sampul Ijazah),
- e. Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah Jenjang SMP, dan
- f. Pelatihan Komprehensif bagi Pendamping Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang SMP.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 459.279.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 456.509.941,- (99,40%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa diukur dengan indikator Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan target kinerja sebanyak 1.018 Orang dengan realisasi 1.742 orang dengan rincian berupa:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Lomojari	18	Orang
2	FLS3N	157	Orang
3	OSN	424	Orang
4	O2SN	48	Orang
5	Bola Voli	238	Orang
6	GSI	126	Orang
7	Karakter Islami	274	Orang
8	FTBI	246	Orang
9	Ajang Olahraga	211	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 774.056.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 764.663.456,- (98,79%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan target kinerja sebanyak 76 Orang dengan realisasi 76 Orang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Orang
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Orang
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Orang
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Orang
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Orang
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Orang
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Orang
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Orang
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Orang
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Orang
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Orang
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Orang
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Orang
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Orang
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Orang
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Orang
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Orang
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Orang
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Orang
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Orang
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Orang
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Orang
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Orang
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Orang
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Orang
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Orang
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Orang
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Orang

No	Belanja	Volume	Satuan
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Orang
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Orang
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Orang
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Orang
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Orang
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Orang
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Orang
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Orang
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Orang
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Orang
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Orang
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Orang
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Orang
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Orang
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Orang
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Orang
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Orang
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Orang
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Orang
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Orang
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Orang
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Orang
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Orang
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Orang
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Orang
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Orang
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Orang
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Orang
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Orang
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Orang
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Orang
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Orang
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Orang
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Orang
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Orang
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Orang
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Orang
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Orang
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Orang
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Orang
69	SMP Darussalam	1	Orang
70	SMP Hidayatullah	1	Orang
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Orang
72	SMP IT Usluhuddin	1	Orang
73	SMP Mitra Kasih	1	Orang
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Orang
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Orang
76	SMP Tahfidzul Quran	1	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.548.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.547.503,- (100%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun dan target kinerja sebanyak 3 Unit dengan realisasi 3 Unit dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pembangunan Lapangan Olahraga/Lapangan Upacara SMPN 1 Martapura	1	Unit
2	Pembangunan Lapangan Olahraga/Halaman Upacara SMPN 2 Martapura Barat ABT	1	Unit
3	Pembangunan Pembangunan toilet/WC beserta sanitarynya SMPN 1 Gambut	1	Unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 711.260.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 707.300.000,- (99,44%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 5 Paket dengan realisasi 5 Paket dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Pengadaan Peraga PJOK dan Permainan Tradisional	1	Paket
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (DAK)untuk 4 sekolah yaitu: SMPN 1 Aluh-Aluh, SMPN 3 S.Tabuk, SMPN 3 K.Intan, SMPN 5 Aluh2	1	Paket
3	Pengadaan TIK (Smartboard) jenjang SMP (Lokasi: SMPN 2 Martapura, SMPN 1 Astambul, SMPN 1 Aluh-Aluh, SMPN 1 Sungai Tabuk, SMPN 1 tatah Makmur, SMPN 1 Martapura Barat, SMPN 1 Mataraman, SMPN 1 Kertak Hanyar, SMPN 1 S.Pinang, SMPN 2 Martapura Timur)	1	Paket
4	Pengadaan TIK (Smart Board) Sekolah Rujukan Google Jenjang SMP (ABT) SMPN 6 Martapura	1	Paket
5	Pengadaan media penunjang smart classroom untuk SMPN 1 Martapura dan SMPN 3 Martapura (ABT)	1	Paket

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.916.909.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.863.926.085,- (58,25%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dan target kinerja sebanyak 76 Satuan Pendidikan dengan realisasi 76 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Satuan Pendidikan
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Satuan Pendidikan
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Satuan Pendidikan
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Satuan Pendidikan
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Satuan Pendidikan
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Satuan Pendidikan
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Satuan Pendidikan
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Satuan Pendidikan
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Satuan Pendidikan
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Satuan Pendidikan
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Satuan Pendidikan
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Satuan Pendidikan
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan

No	Belanja	Volume	Satuan
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Satuan Pendidikan
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Satuan Pendidikan
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Satuan Pendidikan
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Satuan Pendidikan
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Satuan Pendidikan
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Satuan Pendidikan
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Satuan Pendidikan
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Satuan Pendidikan
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Satuan Pendidikan
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Satuan Pendidikan
69	SMP Darussalam	1	Satuan Pendidikan
70	SMP Hidayatullah	1	Satuan Pendidikan
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Satuan Pendidikan
72	SMP IT Usluhuddin	1	Satuan Pendidikan
73	SMP Mitra Kasih	1	Satuan Pendidikan
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Satuan Pendidikan
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Satuan Pendidikan
76	SMP Tahfidzul Quran	1	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 281.276.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 274.107.436,- (97,45%).

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi
 Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi diukur dengan indikator Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dan target kinerja sebanyak 1 Kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan dengan rincian berupa: 1 Kegiatan Sosialisasi Layanan Pendampingan untuk Pencegahan 3 Dosa Besar di Satuan Pendidikan Jenjang SMP.

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.820.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.020.435,- (97,40%).
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Capaian kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 76 Orang dengan realisasi 76 Orang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Orang
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Orang
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Orang
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Orang
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Orang
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Orang
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Orang
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Orang
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Orang
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Orang
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Orang
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Orang
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Orang
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Orang
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Orang
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Orang
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Orang
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Orang
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Orang
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Orang
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Orang
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Orang
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Orang
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Orang
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Orang
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Orang
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Orang
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Orang
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Orang
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Orang
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Orang
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Orang
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Orang
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Orang
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Orang
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Orang
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Orang
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Orang
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Orang
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Orang
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Orang
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Orang
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Orang
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Orang
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Orang
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Orang
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Orang
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Orang
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Orang
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Orang
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Orang
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Orang
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Orang
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Orang
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Orang
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Orang
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Orang
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Orang
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Orang

No	Belanja	Volume	Satuan
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Orang
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Orang
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Orang
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Orang
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Orang
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Orang
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Orang
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Orang
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Orang
69	SMP Darussalam	1	Orang
70	SMP Hidayatullah	1	Orang
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Orang
72	SMP IT Usluhuddin	1	Orang
73	SMP Mitra Kasih	1	Orang
74	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Orang
75	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Orang
76	SMP Tahfidzul Quran	1	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.499.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.338.981,- (99,65%).

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen dengan rincian berupa: 1 Dokumen Laporan Kegiatan Bimtek Pendidikan Seks dan Pernikahan Dini untuk Remaja Jenjang SMP.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.599.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.318.575,- (99,23%).

- Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Capaian kinerja sub kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik dan target kinerja sebanyak 7.316 buku dengan realisasi 7.915 buku dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Buku Pandik	1.905	Buku
2	Buku Pengayaan	1.905	Buku
3	Buku Referensi	1.905	Buku
4	Buku Buliyng	1.976	Buku
5	Ref 1 & 2	224	Buku

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 977.475.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 943.332.648,- (96,51%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS dan target kinerja sebanyak 75 Satuan Pendidikan dengan realisasi 75 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

N	Nama Sekolah	Volum	Satuan
1	SMP Negeri 1 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan

N	Nama Sekolah	Volum	Satuan
2	SMP Negeri 2 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
3	SMP Negeri 3 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
4	SMP Negeri 4 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
5	SMP Negeri 5 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
6	SMP Negeri 6 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
7	SMP Negeri 7 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
8	SMP Negeri 8 Aluh-Aluh	1	Satuan Pendidikan
9	SMP Negeri 1 Aranio	1	Satuan Pendidikan
10	SMP Negeri 2 Aranio	1	Satuan Pendidikan
11	SMP Negeri 3 Aranio	1	Satuan Pendidikan
12	SMP Negeri 4 Aranio	1	Satuan Pendidikan
13	SMP Negeri 1 Astambul	1	Satuan Pendidikan
14	SMP Negeri 2 Astambul	1	Satuan Pendidikan
15	SMP Negeri 3 Astambul	1	Satuan Pendidikan
16	SMP Negeri 4 Astambul	1	Satuan Pendidikan
17	SMP Negeri 1 Beruntung Baru	1	Satuan Pendidikan
18	SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
19	SMP Negeri 2 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
20	SMP Negeri 3 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
21	SMP Negeri 4 Cintapuri Darussalam	1	Satuan Pendidikan
22	SMP Negeri 1 Gambut	1	Satuan Pendidikan
23	SMP Negeri 2 Gambut	1	Satuan Pendidikan
24	SMP Negeri 3 Gambut	1	Satuan Pendidikan
25	SMP Negeri 1 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
26	SMP Negeri 2 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
27	SMP Negeri 3 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
28	SMP Negeri 4 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
29	SMP Negeri 5 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
30	SMP Negeri 6 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
31	SMP Negeri 7 Karang Intan	1	Satuan Pendidikan
32	SMP Negeri 1 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
33	SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	1	Satuan Pendidikan
34	SMP Negeri 1 Martapura	1	Satuan Pendidikan
35	SMP Negeri 2 Martapura	1	Satuan Pendidikan
36	SMP Negeri 3 Martapura	1	Satuan Pendidikan
37	SMP Negeri 4 Martapura	1	Satuan Pendidikan
38	SMP Negeri 5 Martapura	1	Satuan Pendidikan
39	SMP Negeri 6 Martapura	1	Satuan Pendidikan
40	SMP Negeri 1 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
41	SMP Negeri 2 Martapura Barat	1	Satuan Pendidikan
42	SMP Negeri 1 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
43	SMP Negeri 2 Martapura Timur	1	Satuan Pendidikan
44	SMP Negeri 1 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
45	SMP Negeri 2 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
46	SMP Negeri 3 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
47	SMP Negeri 4 Mataraman	1	Satuan Pendidikan
48	SMP Negeri 1 Paramasan	1	Satuan Pendidikan
49	SMP Negeri 1 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
50	SMP Negeri 2 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
51	SMP Negeri 3 Pengaron	1	Satuan Pendidikan
52	SMP Negeri 1 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
53	SMP Negeri 2 Sambung Makmur	1	Satuan Pendidikan
54	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
55	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
56	SMP Negeri 3 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
57	SMP Negeri 4 Simpang Empat	1	Satuan Pendidikan
58	SMP Negeri 1 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
59	SMP Negeri 2 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
60	SMP Negeri 3 Sungai Pinang	1	Satuan Pendidikan
61	SMP Negeri 1 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
62	SMP Negeri 2 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
63	SMP Negeri 3 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
64	SMP Negeri 4 Sungai Tabuk	1	Satuan Pendidikan
65	SMP Negeri 1 Tatah Makmur	1	Satuan Pendidikan
66	SMP Negeri 1 Telaga Bauntung	1	Satuan Pendidikan
67	SMP Darul Hijrah Putra	1	Satuan Pendidikan
68	SMP Darul Hijrah Putri	1	Satuan Pendidikan
69	SMP Darussalam	1	Satuan Pendidikan
70	SMP Hidayatullah	1	Satuan Pendidikan
71	SMP Islam Ar-Riyadh	1	Satuan Pendidikan
72	SMP IT Usluhuddin	1	Satuan Pendidikan

N	Nama Sekolah	Volum	Satuan
73	SMP Muhammadiyah Bi-ih	1	Satuan Pendidikan
74	SMP Tahfiz Quran Darul Hijrah 3	1	Satuan Pendidikan
75	SMP Tahfidzul Quran	1	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.879.798.810,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.874.834.971,- (99,97%).

- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan. Adapun target kegiatan ini adalah 58,74% dengan realisasi 89,01%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dan target kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen dengan rincian berupa: 1 Dokumen Laporan kegiatan sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), serta sosialisasi dan pendampingan akreditasi.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.960.000,- (95,71%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 2 Paket dengan realisasi 2 Paket dengan rincian berupa: 1 Paket Pengadaan Tas Ransel dan 1 Paket Pengadaan ATK Bagi Peserta Didik.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 97.161.635,- (99,86%).

- Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- Capaian kinerja sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru diukur dengan indikator Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah dan target kinerja sebanyak 5 Ruang dengan realisasi 5 Ruang dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru/Gedung PKBM Arsyadiyah Kec. Martapura Timur	1	Ruang
2	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas baru PKBM Harapan Kita Kec. Aluh Aluh	1	Ruang
3	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru PKBM Pamaton Kec. Aranio	1	Ruang
4	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PKBM Nur Huda Kec. Martapura (Menunggu	1	Ruang

	ABT Syah)		
5	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru/Gedung PKBM Arsyadiyah Kec. Martapura Timur	1	Ruang

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 937.776.146,- dengan realisasi anggaran Rp. 837.594.000,- (89,32%).
- Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan target kinerja sebanyak 5 Orang dengan realisasi 5 Orang dengan rincian berupa: Pemberian Insentif bagi Tutor sebanyak 5 orang dari PKBM se-Kabupaten Banjar.
 Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.600.000,- (100%).
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur dengan indikator Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dan target kinerja sebanyak 5 Komunitas dengan realisasi 5 Komunitas dengan rincian berupa: Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang di hadiri 28 Satuan PNF
 Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.119.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 71.769.500,- (85,32%).
 - Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 Capaian kinerja sub kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 60 orang dengan realisasi 60 orang dengan rincian berupa: Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dengan peserta 60 orang dari 28 Satuan PNF.
 Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 29.140.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.071.995,- (89,47%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik diukur dengan indikator Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan target kinerja sebanyak 9.782 Peserta Didik

dengan realisasi 9.782 Peserta Didik dengan rincian berupa:

No	Nama Sekolah	Volume	Satuan
1	PKBM Abnaul Amin	126	Peserta Didik
2	PKBM Al-Firdaus	277	Peserta Didik
3	PKBM Al-Hidayah	390	Peserta Didik
4	PKBM Al-Husna	468	Peserta Didik
5	PKBM Al-Muhajirin	216	Peserta Didik
6	PKBM Anggrek Meratus	674	Peserta Didik
7	PKBM Annisa	591	Peserta Didik
8	PKBM Arsyadiyah	512	Peserta Didik
9	PKBM Banua	249	Peserta Didik
10	PKBM Barakat	563	Peserta Didik
11	PKBM Batu Sawar	212	Peserta Didik
12	PKBM Benteng Muda	369	Peserta Didik
13	PKBM Cipta Bersama	205	Peserta Didik
14	PKBM Darussalam	439	Peserta Didik
15	PKBM Hajjah Muflihah	100	Peserta Didik
16	PKBM Harapan Kita	674	Peserta Didik
17	PKBM Insan Sekumpul	435	Peserta Didik
18	PKBM Karya Bersama	384	Peserta Didik
19	PKBM Makmur Berkah	241	Peserta Didik
20	PKBM Mandiri	471	Peserta Didik
21	PKBM Mekar Jaya	351	Peserta Didik
22	PKBM Miftahussibyan	132	Peserta Didik
23	PKBM Nurhuda	398	Peserta Didik
24	PKBM Pamaton	384	Peserta Didik
25	PKBM Pelangi	242	Peserta Didik
26	PKBM Sinar Baru	283	Peserta Didik
27	PKBM Wanna	396	Peserta Didik

Aktivitas atau kegiatan pada sub kegiatan ini berupa:

- a. Belanja Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
- b. Bantuan Pendidikan Kesetaraan
- c. Bantuan Kelompok Belajar Kelas Baru
- d. Gebyar Pendidikan Kesetaraan
- e. Penyusunan Modul Ajar dan KOSP
- f. Rapat Bulanan Kesetaraan
- g. Monitoring dan Evaluasi Program
- h. Program Pendataan WB

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.872.661.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.856.442.893,- (99,67%).

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 4 Paket realisasi 4 Paket dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Al Muhajrin Kec. Martapura	1	Paket
2	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Pelangi Kec. Sambung Makmur	1	Paket
3	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Al Hidayah Kec. Gambut	1	Paket
4	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Batu Sawar Kec. Astambul	1	Paket

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 401.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 400.190.429,- (99,71%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dan target kinerja sebanyak 27 Satuan Pendidikan dengan realisasi 27 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

No	Nama Sekolah	Volume	Satuan
1	PKBM Abnaul Amin	1	Satuan Pendidikan
2	PKBM Al-Firdaus	1	Satuan Pendidikan
3	PKBM Al-Hidayah	1	Satuan Pendidikan
4	PKBM Al-Husna	1	Satuan Pendidikan
5	PKBM Al-Muhajirin	1	Satuan Pendidikan
6	PKBM Anggrek Meratus	1	Satuan Pendidikan
7	PKBM Annisa	1	Satuan Pendidikan
8	PKBM Arsyadiyah	1	Satuan Pendidikan
9	PKBM Banua	1	Satuan Pendidikan
10	PKBM Barakat	1	Satuan Pendidikan
11	PKBM Batu Sawar	1	Satuan Pendidikan
12	PKBM Benteng Muda	1	Satuan Pendidikan
13	PKBM Cipta Bersama	1	Satuan Pendidikan
14	PKBM Darussalam	1	Satuan Pendidikan
15	PKBM Hajjah Muflihah	1	Satuan Pendidikan
16	PKBM Harapan Kita	1	Satuan Pendidikan
17	PKBM Insan Sekumpul	1	Satuan Pendidikan
18	PKBM Karya Bersama	1	Satuan Pendidikan
19	PKBM Makmur Berkah	1	Satuan Pendidikan
20	PKBM Mandiri	1	Satuan Pendidikan
21	PKBM Mekar Jaya	1	Satuan Pendidikan
22	PKBM Miftahussibyan	1	Satuan Pendidikan
23	PKBM Nurhuda	1	Satuan Pendidikan
24	PKBM Pamaton	1	Satuan Pendidikan
25	PKBM Pelangi	1	Satuan Pendidikan
26	PKBM Sinar Baru	1	Satuan Pendidikan
27	PKBM Wanna	1	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.997.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.850.372,- (99,71%).

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi diukur dengan indikator Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dan target kinerja sebanyak 1 Kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan dengan rincian berupa: 1 Kegiatan Pendampingan Bagi SPNF Untuk Pencegahan, Perundungan, Kekerasan Dan Intoleransi.

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 39.150.000,- (91,58%).

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diukur dengan indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dan target kinerja sebanyak 5 Unit dengan realisasi 5 Unit dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
----	---------	--------	--------

1	Belanja Hibah Rehabilitasi Jamban/Toilet PKBM PKBM Karya Bersama Kec. Astambul	1	Unit
2	Belanja Hibah Rehabilitasi Jamban/Toilet PKBM Nur Huda Kec. Martapura	1	Unit
3	Rehabilitasi Jamban/Toilet PKBM Miftakhussibyan kec. Karang Intan	1	Unit
4	Pembangunan (CTPS) Cuci Tangan Pakai Sabun SPNF-SKB Kab. Banjar	1	Unit
5	Rehabilitasi Pembangunan Halaman SPNF-SKB Kab. Banjar	1	Unit

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 577.528.468,- dengan realisasi anggaran Rp. 573.536.000,- (99,31%).

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dan target kinerja sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi 3 Dokumen dengan rincian berupa:

No	Nama Kegiatan	Volume	Satuan
1	Sosialisasi BOSP	85	Orang
2	Sosialisai ANBK	85	Orang
3	Sosialisasi Akreditasi jumlah peserta 85 orang	85	Orang

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 485.951.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 356.778.234,- (73,42%).

- Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan target kinerja sebanyak 60 Orang dengan realisasi 60 Orang dengan rincian berupa:

No	Nama Sekolah	Volume	Satuan
1	PKBM Abnaul Amin	2	Orang
2	PKBM Al-Firdaus	2	Orang
3	PKBM Al-Hidayah	2	Orang
4	PKBM Al-Husna	2	Orang
5	PKBM Al-Muhajirin	3	Orang
6	PKBM Anggrek Meratus	3	Orang
7	PKBM Annisa	2	Orang
8	PKBM Arsyadiyah	2	Orang
9	PKBM Banua	2	Orang
10	PKBM Barakat	2	Orang
11	PKBM Batu Sawar	2	Orang
12	PKBM Benteng Muda	2	Orang
13	PKBM Cipta Bersama	2	Orang
14	PKBM Darussalam	2	Orang
15	PKBM Hajjah Muflihah	2	Orang
16	PKBM Harapan Kita	2	Orang
17	PKBM Insan Sekumpul	2	Orang
18	PKBM Karya Bersama	2	Orang
19	PKBM Makmur Berkah	2	Orang
20	PKBM Mandiri	2	Orang
21	PKBM Mekar Jaya	2	Orang
22	PKBM Miftahussibyan	2	Orang
23	PKBM Nurhuda	2	Orang
24	PKBM Pamaton	2	Orang
25	PKBM Pelangi	2	Orang
26	PKBM Sinar Baru	2	Orang
27	PKBM Wanna	3	Orang
28	SPNF SKB Banjar	3	Orang

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 26.750.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.590.500,- (99,40%).
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah diukur dengan indikator Jumlah mebel sekolah yang tersedia dan target kinerja sebanyak 2 Paket dengan realisasi 2 Paket dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah Pengadaan Mebel PKBM Swasta	1	Paket
2	Pengadaan mebel SPNF-SKB Kab. Banjar	1	Paket

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 800.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 800.097.324,- (99,91%).
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia dan target kinerja sebanyak 4 Paket dengan realisasi 4 Paket dengan rincian berupa:

No	Belanja	Volume	Satuan
1	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Al Muhajrin Kec. Martapura	1	Paket
2	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Pelangi Kec. Sambung Makmur	1	Paket
3	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Al Hidayah Kec. Gambut	1	Paket
4	Belanja Hibah Pengadaan Peralatan Keterampilan PKBM Batu Sawar Kec. Astambul	1	Paket

- Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 401.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 400.190.429,- (99,71%).
- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan diukur dengan indikator Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP dan target kinerja sebanyak 28 Satuan Pendidikan dengan realisasi 28 Satuan Pendidikan dengan rincian berupa:

No	Nama Sekolah	Volume	Satuan
1	PKBM Abnaul Amin	1	Satuan Pendidikan
2	PKBM Al-Firdaus	1	Satuan Pendidikan
3	PKBM Al-Hidayah	1	Satuan Pendidikan
4	PKBM Al-Husna	1	Satuan Pendidikan
5	PKBM Al-Muhajirin	1	Satuan Pendidikan
6	PKBM Anggrek Meratus	1	Satuan Pendidikan
7	PKBM Annisa	1	Satuan Pendidikan
8	PKBM Arsyadiyah	1	Satuan Pendidikan
9	PKBM Banua	1	Satuan Pendidikan
10	PKBM Barakat	1	Satuan Pendidikan
11	PKBM Batu Sawar	1	Satuan Pendidikan
12	PKBM Benteng Muda	1	Satuan Pendidikan
13	PKBM Cipta Bersama	1	Satuan Pendidikan
14	PKBM Darussalam	1	Satuan Pendidikan
15	PKBM Hajjah Muflihah	1	Satuan Pendidikan
16	PKBM Harapan Kita	1	Satuan Pendidikan
17	PKBM Insan Sekumpul	1	Satuan Pendidikan
18	PKBM Karya Bersama	1	Satuan Pendidikan
19	PKBM Makmur Berkah	1	Satuan Pendidikan
20	PKBM Mandiri	1	Satuan Pendidikan
21	PKBM Mekar Jaya	1	Satuan Pendidikan

22	PKBM Miftahussibyan	1	Satuan Pendidikan
23	PKBM Nurhuda	1	Satuan Pendidikan
24	PKBM Pamaton	1	Satuan Pendidikan
25	PKBM Pelangi	1	Satuan Pendidikan
26	PKBM Sinar Baru	1	Satuan Pendidikan
27	PKBM Wanna	1	Satuan Pendidikan
28	SPNF SKB Banjar	1	Satuan Pendidikan

Adapun pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.195.280.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.165.990.000,- (99,74 %).

2. Urusan Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Persentase capaian SPM Puskesmas. Adapun target program ini adalah 95% dengan realisasi 85,42% Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Capaian SPM Puskesmas. Adapun target kegiatan ini adalah 95% dengan realisasi 85.42%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil diukur dengan indikator Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Target kinerja sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 7.426 orang (100%) dengan realisasi 6.463 orang (87,03%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp637.546.800,- dengan realisasi keuangan Rp 605.320.000 (94,95%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2 kegiatan berupa Kampanye Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Cetak Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin diukur dengan indikator Jumlah ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

dan target kinerja sebesar 7.426 orang (100%) dengan realisasi 7.426 orang (100%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp. 231.688.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 138.940.500 (40,03%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3 kegiatan berupa cetak formulir penafisan, cetak kartu ibu dan cetak partograph untuk menunjang pelayanan Ibu bersalin.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir diukur dengan indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan target kinerja sebesar 7.426 orang (100%) dengan realisasi 7.400 orang (99,65%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp.215.667.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 65.156.000 (30,21%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kegiatan berupa Peningkatan Kapasitas Bidan di Desa dalam Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial, Cetak Formulir MTBM, BMHP SHK, Kampanye MP ASI untuk TPG dan Kampanye MP ASI untuk Kader Posyandu.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita diukur dengan indikator Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan target kinerja sebesar 46.256 orang dengan realisasi 28.651 orang (69,45%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp. 158.739.280,- dengan realisasi keuangan Rp. 153.244.000 (96,54%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 4 kegiatan berupa Peningkatan Kapasitas Bidan di Desa dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Balita, Cetak Formulir KPSP dan cetak formulir MTBS.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar diukur dengan Jumlah usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 92.955 orang dengan realisasi 84.362 orang (90,76%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp. 319.885.600,- dengan realisasi keuangan Rp 268.659.600 (83,99%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3 kegiatan berupa Belanja cetak buku rapor anak sekolah, kegiatan pembinaan UKS dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan penjangkaran kesehatan usia anak sekolah.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif diukur dengan indikator Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan target kinerja berupa :

Pagu kegiatan Rp. 100.430.500 dengan realisasi belanja Rp. 99.021.871,- (98,60%). Target kinerja sejumlah 398012 orang dengan capaian 253116 orang (63,60%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diukur dengan indikator Jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan target kinerja sebesar 62.503 orang dengan realisasi 35.300 orang (56,48%).

Pagu anggaran sub kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp. 91.721.600,- dengan realisasi keuangan Rp. 86.985.000 (94,84%), realisasi fisik 100%. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3 kegiatan berupa Cetak Buku Kesehatan Lanjut Usia, Refreshing Pendampingan Usia lanjut Bagi Caregiver untuk Petugas

Puskesmas. dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan SPM usia lanjut.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi diukur dengan indikator Jumlah penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan target kinerja 40.261 orang dengan capaian 38.324 orang atau 95,19%. Pagu kegiatan Rp. 38.014.500 dengan realisasi belanja Rp. 37.564.500 (98,82%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus diukur dengan indikator Jumlah penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan target kinerja berupa 7.440 orang dengan capaian 7.440 orang atau 100%. Pagu kegiatan Rp. 63.148.000,- dengan realisasi belanja Rp. 61.930.000,- (98,07%)

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat diukur dengan indikator Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Dan target kinerja 1.191 orang dengan capaian 1.191 orang atau 100%. Pagu kegiatan Rp. 68.451.000 dengan realisasi belanja Rp. 65.453.500,- (95,62%)

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis diukur dengan indikator Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dan target kinerja 9.743 orang dengan capaian 9.743 orang atau 100%. Pagu kegiatan Rp 70.918.000,- dengan realisasi belanja Rp 67.514.20,- ((95,20%).

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV diukur dengan indikator Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dan target kinerja 20.794 orang dengan capaian 20.794 orang atau 100%. Pagu kegiatan Rp 688.454.000,- dengan realisasi belanja Rp 682.234.900,- (99,10%)

3. Urusan Pekerjaan Umum

1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian kinerja Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman. Adapun target program ini adalah 77,35% dengan realisasi 76,91% Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Di Daerah Kabupaten/Kota capaian, kinerja kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Akses Air Minum. Adapun target kegiatan ini adalah 77,35% dengan realisasi 76,91% kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Capaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan dan target kinerja berupa Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 8 (Delapan) Desa dengan total Kapasitas 9,6 l/detik. Realisasi untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.143.270.100,00

- Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama Dan target kinerja berupa Terasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9 Desa (Desa Bantuan Sosial) dengan realisasi belanja Rp. 376.463.500,00.

- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Capaian kinerja sub kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi yang Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebanyak 9 Desa (Desa Bantuan Sosial) dengan realisasi belanja Rp. 2.003.600.000,00.

- Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Capaian kinerja sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebanyak 14 Desa dengan realisasi belanja Rp. 8.932.969.590,00.

2) Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Capaian kinerja Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik. Adapun target program ini adalah 62,22% dengan realisasi 64,28%. Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik, Adapun target kegiatan ini

adalah 452 unit dengan realisasi 452 Unit, kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja diukur dengan indikator Tersedianya sarana dan prasaranan pengangkutan lumpur tinja Dan target kinerja berupa 2 Unit *Saptage transfer Station* (STS) dan 2 Motor Tinja Keliling (MOTENG).
- Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat diukur dengan indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Doemstik Dan target kinerja berupa 452 Unit/KK
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Capaian kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan Indikator Masyarakat yang mendapatkan pembinaan, dan target kinerja berupa 500 orang yang mendapatkan pembinaan.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Perumahan

Capaian kinerja Program Pengembangan Perumahan diukur dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni. Adapun target program ini adalah 76.95% dengan realisasi 76.86% Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Capaian kinerja kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100% kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Capaian kinerja sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana diukur dengan indikator 1 dokumen Dan target kinerja berupa :

Realisasi belanja Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana sebesar Rp92.719.600,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.178.500,-. (99,51%)

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator 1 Dokumen Dan target kinerja berupa : Capaian kinerja sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi belanja sebesar Rp. 94,503,500,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 95,287,500,- (99,18%)

- 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani Adapun target kegiatan ini adalah 16 unit dengan realisasi 0. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Sub Urusan Trantibum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara, Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan, Persentase sda satpol pp dan satlinmas yang memiliki kualifikasi Adapun target program ini adalah:

- a. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara

Target Indikator program ini sebesar 4,3 % dengan realisasi 4,82 Program ini didukung Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Capaian kinerja kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota diukur dengan indikator Persentase Pelanggaran yang ditindak Sesuai Standar dan Persentase Pengawasan dan penyuluhan Perda dan Perkada yang terlaksana

Adapun target kegiatan ini adalah :

- 1) Persentase Pelanggaran yang ditindak Sesuai Standar target 100% dengan realisasi 100% kegiatan ini didukung Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah . Capaian kinerja sub kegiatan 4 laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
- 2) Persentase Pengawasan dan penyuluhan Perda dan Perkada yang terlaksana target 100% dengan realisasi 100% kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan 4 laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah . Capaian kinerja sub kegiatan 4 laporan diukur dengan indikator diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan

Target Indikator program ini sebesar 100 % dengan realisasi 100 % Program ini didukung Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan Penanganan

Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Potensi Gangguan Trantibum yang terdeteksi dan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun target kegiatan ini :

- 1) Jumlah Potensi Gangguan Trantibum yang terdeteksi target 240 Kegiatan dengan realisasi 240 Kegiatan. Kegiatan ini didukung Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

Capaian kinerja sub kegiatan 12 laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

- 2) Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum target 100 % dengan realisasi 100 %.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa .Capaian kinerja sub kegiatan 12 Laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah.Capaian kinerja sub kegiatan 4 Laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.

- c. Persentase sda satpol pp dan satlinmas yang memiliki kualifikasi

Target Indikator program ini sebesar 100 % dengan realisasi 100 % Program ini Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase SDA Satpol PP yang memiliki kualifikasi bidang teknis dan Persentase anggota SATLINMAS yang kompeten. Adapun target kegiatan ini:

1) Persentase SDA Satpol PP yang memiliki kualifikasi bidang teknis

Target 100 % dengan realisasi 100 %. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Capaian kinerja sub kegiatan 159 orang diukur dengan indikator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian kinerja sub kegiatan 63 unit diukur dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia.

2) Persentase anggota SATLINMAS yang kompeten

Target 100 % dengan realisasi 100 %. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Capaian kinerja sub kegiatan 5 dokumen diukur dengan indikator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan 100 diukur dengan indikator

Persentase SDA Satpol PP yang memiliki kualifikasi bidang teknis.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Capaian kinerja sub kegiatan 1 laporan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda.

Sub Urusan Kebencanaan

Program Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja Program Penanggulangan Bencana diukur dengan indikator:

- a. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, target Kinerja 100 % dengan realisasi kinerja 100 %
- b. Menguatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana, target Kinerja 100% dengan realisasi kinerja 100%
- c. Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penanggulangan Bencana, target kinerja 100% dengan realisasi kinerja 100% Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota diukur dengan indikator Sasaran Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan Capaian kinerja 100%. kegiatan ini didukung sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

Capaian kinerja Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) diukur dengan indikator Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun dan target kinerja 256236 orang dengan realisasi 314.517 orang. Capaian kinerja sub kegiatan ini 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Apel Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta kekeringan, Apel Siaga Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor,

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana, Pelatihan Penguatan Kelembagaan PBBM, Sosialisasi PRB Kabupaten, Sosialisasi Kecamatan Tangguh Bencana Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Sosper) dan Kegiatan Publikasi Media cetak dan elektronik yang mempunyai banyak viewers setiap kali berita yang ditayangkan sehingga pencapaian realisasi melebihi target

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Capaian kinerja Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana diukur dengan sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan tiga Indikator Sasaran yaitu :

- a. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki rencana kontingensi bencana target kinerja 2 Desa dan realisasi capaian kinerja 2 Desa yang diselenggarakan di Gunung Batu Kec.Sambung Makmur dan Desa Pembantanan Kec.Sungai Tabuk.
- b. Persentase SDM Kebencanaan yang Meningkatkan Kapasitasnya / Tersertifikasi, target kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja 100%.
- c. Persentase desa/kelurahan yang memiliki Sarana dan Prasarana Kebencanaan sesuai standar, target kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja 100%.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman di Kawasan tempat tinggalnya , target kinerja berupa 367 unit dan teralisasi sebanyak 367 unit. Capaian sub kegiatan ini 100%. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Sumber Dana
1.	Botol minum Veples	25	Buah	Alokasi Umum
2.	Senter	25	Buah	Alokasi Umum
3.	Jas Hujan	25	Buah	Alokasi Umum
4.	Sarung Tangan anti Panas	25	Pasang	Alokasi Umum
5.	Senter Middle	25	Buah	Alokasi Umum
6.	Mesin Perahu Karet	1	Unit	Alokasi Umum
7.	Genset Portable 5000 watt	4	Unit	Alokasi Umum

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Sumber Dana
8.	Genset Tower Light 1000 watt	1	Set	Alokasi Umum
9.	Mesin Alkon	5	Unit	Alokasi Umum
10.	Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inchi	25	Roll	Alokasi Umum
11.	Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inchi	25	Roll	Alokasi Umum
12.	Perahu Fiber - Polyethylene	4	Unit	Alokasi Umum
13.	Chainsaw	3	Unit	Alokasi Umum
14.	Tandon isi 1200 ltr	40	Buah	Alokasi Umum
15.	Nozzle 1,5	10	Unit	Alokasi Umum
16.	Nozzle 2,5	10	Unit	Alokasi Umum
17.	Sepatu Safety	25	Pasang	Alokasi Umum
18.	Tandu Emergency	1	Buah	Alokasi Umum
19.	Tenda Posko Penanggulangan Bencana	4	Unit	Alokasi Umum
20.	Tenda Pengungsi	4	Unit	Alokasi Umum
21.	Plang Jalur Evakuasi	40	Buah	Alokasi Umum
22.	Plang Titik Kumpul	40	Buah	Alokasi Umum
Jumlah		367		

- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 Capaian Kinerja sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan Indikator Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota dan target kinerja 150 Orang dengan realisasi 150 Orang yaitu kegiatan Gladi Lapangan Kesiapsiagaan KARHUTLA.
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 Capaian Kinerja sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam diukur dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, target kinerja 100 keluarga dengan realisasi 100 keluarga yaitu terdiri dari 50 keluarga di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh dan 50 Keluarga di Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman sehingga capaian sub kegiatan ini adalah 100%
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 Capaian kinerja sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan diukur dengan indikator jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan target kinerja 2 kawasan dengan realisasi yaitu Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) 2 kawasan yaitu di Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur dan Desa Pembantanan Kecamatan Astambul Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang

dilaksanakan selama 9 hari terdiri dari aparaturnya pemerintah desa, lembaga desa, babinsa, babinkamtibnas dan masyarakat Desa. Kegiatan berupa workshop, pelatihan dan Gladi/simulasi Penanggulangan Bencana.

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi , capaian sub kegiatan ini 100%

Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi diukur dengan indikator jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi sebanyak 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen berupa Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan. Capaian sub kegiatan ini 100%.

- Sub Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan target kinerja 2 Kawasan dengan realisasi 2 kawasan, Peserta Pelatihan ini terdiri dari Relawan PB se-Kecamatan Martapura, Relawan PB PD Muhammadiyah & DPC Nahdlatul Ulama Kab. Banjar, TRC IKB Rapi Wil. 02 Banjar dan TRC BPBD Kab. Banjar.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Capaian kinerja Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana diukur dengan 3 indikator yaitu :

- a. Jumlah SK Penetapan Status Bencana Sesuai Standar , target kinerja 2 dokumen realisasi kinerja 3 Dokumen.
- b. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Upaya Penyelamatan sesuai standar, target kinerja 100 % realisasi kinerja 100%.
- c. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Logistik, target kinerja 100% realisasi kinerja 100%.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator jumlah

dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat dengan target 2 dokumen dan terealisasi 3 dokumen yaitu 1 SK Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir , Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan 1 SK Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan / lahan dan kekeringan. Dan SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir , Angin Puting Beliung, Tanah Longsor ,Capaian sub kegiatan ini 100%.

- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator yaitu jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan di evakuasi per jenis kejadian bencana target 6000 orang dengan realisasi sebanyak 187777 orang yang berhasil ditolong dan dievakuasi. Capaian kinerja sub kegiatan ini 100%

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja sub kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis, target kinerja 20 orang dengan realisasi kinerja 20 Orang,

- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana target kinerja 1100 orang dan realisasi sebanyak 53084 Orang dikarenakan terjadi bencana banjir pada awal tahun 2025 . Capaian sub

kegiatan ini adalah 90,28%. Efisiensi anggaran dikarenakan adanya perbedaan harga yang lumayan pada standar harga satuan (SSH) Kabupaten Banjar dengan harga pasar.

- Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Capaian kinerja pada Sub Kegiatan Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana dapat diukur dengan indikator jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota target 2 laporan, Adapun realisasi kinerjanya adalah 2 laporan yaitu Laporan Pelaksanaan Posko Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Posko Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor. Ditambah pada Akhir Desember 2025 naik Status menjadi Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor .Capaian kinerja sub kegiatan ini 100%, kegiatan aktivitas komando ini terdiri beberapa aktivitas antara lain Melakukan Pemetaan Sumber Daya (personel, sarana, dan prasarana) yang tersedia di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung komando penanganan darurat bencana, Penyusunan dan pelaksanaan mekanisme aktivasi serta pengorganisasian sistem komando penanganan darurat, Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, TNI, POLRI, dan unsur terkait lainnya.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana diukur dengan indikator 3 indikator yaitu:

- a. Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, target 3 dokumen dan realisasi sebanyak 3 dokumen
- b. Jumlah Mekanisme Pemulihan yang Telah Secara Formal disepakati oleh Seluruh Pemangku Kepentingan. Target kinerja 100% dan realisasi sebesar 100%
- c. Persentase Hasil Koordinasi Penanganan Pasca Bencana yang ditindaklanjuti. Dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 Capaian kinerja Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dengan target kinerja 3 dokumen dan realisasi kinerja 3 dokumen berupa 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, 1 Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor dan 1 Dokumen Laporan Rapat koordinasi / Focus Group Discussion (FGD) Perhitungan Mandiri IKD Kabupaten Banjar.
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 Capaian Kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan target 20 Orang dan realisasi 20 orang. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik serta non fisik yang mencakup aspek pembangunan manusia, perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor yang diikuti oleh unsur BPBD dan dinas lain terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim LH , Dinas pertanian dan lain-lain, capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 100%
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 Capaian kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana

Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal, target kinerja 1 Lembaga dan realisasi 1 Lembaga, kegiatan ini berupa sosialisasi yang diikuti oleh Perusahaan (CV maupun PT) di wil. kabupaten banjar, yg telah berpartisipasi penanganan saat bencana banjir masif di wil. kabupaten banjar, karena kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi dengan dunia usaha. Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 100%

- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota
Capaian kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dengan target kinerja 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen berupa laporan jitupasna bencana longsor dan jitupasna angin putting beliung .Yang mana dalam pelaksanaanya terdapat aktivitas yaitu Pelatihan penyusunan Jitupasna, Pelatihan penyusunan R3P, Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kegiatan Verifikasi Kerusakan Akibat Kejadian Bencana Dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana dengan capaian kinerja 100%.

Sub Urusan Damkar

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diukur dengan indikator:

- Persentase tingkat pemahaman masyarakat, target 100%, Realisasi 100%
- Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pemadaman dan penyelamatan, target 90,33%, realisasi 91,12%
- Persentase harta, benda, dan nyawa yang dapat diselamatkan pasca kebakaran, target 68,34%, Realisasi 78,49%
- Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang ditindaklanjuti dan diproses tepat waktu, target 100%, Realisasi 100%

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
Capaian kinerja Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator :

- Persentase kejadian kebakaran yang tertangani, target 100%, Realisasi 100%.
- Persentase penyelamatan yang terlayani, target 100%, Realisasi 100 %.
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, target 100%, realisasi 100%.
- Persentase aparatur pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang memiliki kualifikasi/tersertifikasi, target 100%, realisasi 100%.
- Persentase kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, target 100%, realisasi 100%.

Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Capaian kinerja sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa 365 Laporan. Realisasi telah

terlaksana persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dalam 365 hari.

- Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dan target kinerja berupa 365 Dokumen. Realisasi telah terlaksana persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dalam 365 hari.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri diukur dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan Legal sesuai standar teknis terkait dengan target sebesar 264 unit . Realisasi telah terlaksana dan serah terima barang sebanyak 264 unit berupa 1 unit mobil rescue untuk pos sektor Gambut, 2 unit fire truck, 41 unit fire jaket, sepatu 41 unit, helm 41 unit, baju anti api 24 unit, tas 10 unit, pompa 2 unit dan 1 unit water supply 4000 liter.

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 227.427.000 dengan realisasi keuangan Rp. 220.846.299 (97,11%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Target yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan adalah sebanyak 6 (enam) orang, dengan realisasi capaian sebanyak 8 (delapan) orang.

Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan pelatihan teknis pemadam kebakaran, dengan rincian 2 (dua) orang aparatur mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor 113, Jakarta Timur, serta 6 (enam) orang aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi indikator kinerja pada sub kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tambahan yang disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengikutsertakan aparatur tambahan, sebagai upaya optimalisasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 13.231.000 dengan realisasi keuangan Rp. 13.042.800 (98,58). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi capaian sebanyak 2 (dua) dokumen.

Realisasi capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Banjarmasin dengan Pemerintah Kabupaten Banjar mengenai penyelenggaraan

pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Selain itu, telah dilaksanakan Nota Kesepakatan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dengan Pemerintah Kabupaten Banjar terkait penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Realisasi indikator kinerja pada sub kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya perpanjangan kerja sama terhadap nota kesepakatan yang sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran.

Perpanjangan kerja sama tersebut dituangkan kembali dalam bentuk dokumen resmi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, sehingga jumlah dokumen kerja sama yang dihasilkan pada tahun berjalan menjadi lebih banyak dari target yang telah ditetapkan.

- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tanggap Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 192.706.000 dengan realisasi keuangan Rp. 161.674.180 (83,90%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tanggap Kebakaran dengan target sebesar 500 keluarga dan realisasi 500 Keluarga. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tanggap Kebakaran bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, khususnya keluarga dan ibu-ibu PKK, dalam menghadapi risiko kebakaran rumah tangga.

2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.844.200 dengan realisasi keuangan Rp. 34.419.708 (98,78 %). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 4 (empat) dokumen, dengan realisasi capaian sebanyak 4 (empat) dokumen. berdasarkan Rencana Aksi Simondalev, target berada di semua tri wulan. namun realisasi dokumen cuma ada di tw I,II, dan IV. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pendataan pada Triwulan III tidak dilaksanakan karena pada periode tersebut dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan lapangan sehubungan dengan adanya fokus kegiatan pada pengolahan data hasil pendataan sebelumnya, yang telah didata pada Triwulan I dan II.

Selain itu, pada Triwulan III juga dilakukan penyusunan dan penyempurnaan instrumen pendataan serta penyiapan administrasi pendukung guna memastikan keakuratan dan kesesuaian data dengan ketentuan sistem proteksi kebakaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pendataan lapangan kembali dilanjutkan pada Triwulan IV, sehingga target dokumen tetap dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

**NAMA PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN PENDATAAN SARANA PRASARANA
PROTEKSI KEBAKARAN DI WILAYAH KAB. BANJAR PADA TAHUN 2025**

No.	Kegiatan	Lokasi	Hari/Tanggal	Triwulan
1	Pendataan Bangunan Gedung Stadion Demang Lehman Martapura, PT. Barito Putera Berbakti	Martapura	Kamis, 23 Januari 2025	I
2	Pendataan Bukit Bintang	Karang Intan	Rabu, 16 April 2025	II
3	Pendataan Dinas Perkim, BPBD, DISHUB	Martapura	Selasa, 13 Mei 2025	II
4	Pendataan Kecamatan mataraman	Mataraman	Rabu, 14 Mei 2025	II
5	Pendataan Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Ketapang	Martapura	Kamis, 15 Mei 2025	II
6	Pendataan BKPSDM, Sekda Bagian Hukum, BPKPAD	Martapura	Rabu, 21 Mei 2025	II
7	Pendataan DKUPP, Dinsos, Dinas Perpustakaan	Martapura	Kamis, 22 Mei 2025	II
8	Pendataan Satpol PP, Dinas Capil, Disbudporapar	Martapura	Selasa, 27 Mei 2025	II
9	Pendataan DPUPRP, Sekda Bagian hukum, Dinkes	Martapura	Kamis, 5 Juni 2025	II
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas tenaga Kerja, Kecamatan Martapura	Martapura	Kamis, 12 Juni 2025	II
11	Dinas Pendidikan, BKBDP, Bapedalitbang	Martapura	Senin, 16 Juni 2025	II

No.	Kegiatan	Lokasi	Hari/Tanggal	Triwulan
12	Pendataan Bangunan Usaha Retail (alfamart, indomaret, MR DIY)	Kab Banjar	13-15 Oktober 2025	III

Sumber Data: Bidang Pencegahan DPKP

Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengevaluasi ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai jumlah, jenis, lokasi, serta kondisi sarana prasarana proteksi kebakaran, antara lain alat pemadam api ringan, hidran, sistem deteksi kebakaran, dan sistem proteksi kebakaran lainnya.

- Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.535.000 dengan realisasi keuangan Rp. 26.330.418 (92,27 %). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 4 (empat) dokumen, dengan realisasi capaian sebanyak 4 (empat) dokumen. berdasarkan Rencana Aksi Simondalev, target berada di semua tri wulan namun realisasi dokumen cuma ada di tw II, III dan IV. Pada TW I masih mendata inspeksi bangunan gedung yang mana saja yang akan dinilai ulang dan penilaian, baru dilaksanakan pada TW II dst.

REKAPITULASI BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR YANG SUDAH DILAKUKAN VERIFIKASI PENILAIAN PORTEKSI KEBAKARAN

NO	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL	TRIWULAN
1	Penilaian Bangunan Gedung Bukit Bintang	Karang Intan	Rabu, 16 April 2025	II
2	Penilaian Bangunan Gedung BIDLABFOR POLDA Kalsel	Kec. Gambut	Kamis, 17 Juli 2025	III
3	Penilaian Ratu Zalecha Martapura	Martapura	Jum'at, 19 September 2025	IV
4	Penilaian Mahad Bakkah	Martapura	Kamis, 09 Oktober 2026	IV
5	Penilaian Rubhasan	Martapura	Rabu, 01 Oktober 2027	IV
6	Penilaian SPBU dan SPBE	Kab Banjar	20 Oktober-04 November 2025	IV

Sumber Data: Bidang Pencegahan DPKP

Hasil akhir dari pelaksanaan sub kegiatan ini berupa Sertifikat Laik Kebakaran (SLK), yang diberikan kepada bangunan atau gedung yang telah memenuhi persyaratan teknis dan

administratif terkait keselamatan kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 282.889.000 dengan realisasi keuangan Rp. 268.986.580 (95,09%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 500 (lima ratus) orang, dengan realisasi capaian sebanyak 500 (lima ratus) orang. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan dengan menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta memfasilitasi usulan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 92.091.000 dengan realisasi keuangan Rp. 77.011.085 (83,62 %). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran dalam Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) desa/kelurahan, dengan realisasi capaian sebanyak 20 (dua puluh) desa/kelurahan. Kegiatan pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masing-masing. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa/kelurahan memiliki kemampuan, kemandirian, dan kesiapsiagaan

- yang lebih baik dalam menghadapi potensi kejadian kebakaran.
- Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
 Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.074.000 dengan realisasi keuangan Rp. 9.948.913 (98,76 %). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen. Dokumen yang dihasilkan berupa dokumen dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, khususnya dukungan kegiatan pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada desa/kelurahan selama satu tahun anggaran.

DAFTAR DESA YANG TELAH TERSEDIA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TANGGAL
1	Dukungan pemberdayaan Masyarakat	Desa Rantau Nangka	Kamis, 23 Januari 2025
2	Dukungan pemberdayaan Masyarakat	Desa Cindai Alus	Selasa, 4 Sepetember 2025

Sumber Data : Bidang Pencegahan DPKP

- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia diukur dengan indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%. kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 Capaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi diukur dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan

Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Dan target kinerja berupa 217 unit. Terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan target pada kepala DPPA yang tertera sebanyak 217 unit, sementara pada rincian DPPA menunjukkan jumlah sebanyak 995 unit. Hal ini dikarenakan pada saat tahapan KUA-PPAS belum sempat mengubah target di kepala DPPA. Sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 995 unit (100%).

REKAPITULASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi T.A 2025

Nama Barang	Target	Satuan	Realisasi
Emergency Kit	1	Set	1
Matras	30	Buah	30
Peralatan Decontaminasi Alat Steril, 2 Set Sirkumsisi, Cairan H2o2 Box, Klorin 2 Box	1	Paket	1
Peluit Elektrik	2	Buah	2
Jas Hujan Dinas Lapangan	96	Buah	96
Alat Pemotong Kaca	1	Buah	1
Kantong Jenazah	50	Buah	50
Lifebuoy (Ban Pelampung)	10	Set	10
Masker Wajah 3m	96	Set	96
Sleeping Bag	30	Buah	30
Tali Lempar (Throw Rope) (Tali Untuk Korban Di Air)	6	Roll	6
Kompor Nesting	96	Buah	96
Selimut Tahan Api (Fire Blanket) (Peralatan Evakuasi Korban)	10	Buah	10
Kacamata Safety	91	Buah	91
Towing Bar	3	Buah	3
Pompa Pemadam	1	Unit	1
Harnest	4	Buah	4
Ascender Handle	5	Buah	5
Tali Kernmantle Statis	1	Roll	1
Gerinda Mini	3	Buah	3
Ranjang Tingkat Anggota Regu Dan Kasur	21	Set	21
Manequin Full Body	2	Buah	2
Dongkrak 100 Ton	2	Buah	2
Self Contained Breathing Apparatus (Scba)	2	Buah	2
Kompor Lapangan	4	Buah	4
Scuba Set	1	Set	1
Alat Pemotong Besi Portable	1	Set	1
Breathing Apparatus Portable (Alat Bantu Nafas Portable) Untuk Korban	10	Set	10
Cutting Spreader Otomatis	1	Set	1
Gergaji Tangan Bermesin	3	Buah	3
Gergaji Tangan Portable	3	Buah	3
Helm Water Rescue	10	Buah	10
Kursi Evakuasi (Chair Stretcher)	9	Buah	9
Multi Purpose Device Mpd (Cmc)	1	Set	1
Petzl ASAP	1	Buah	1
Pneumatic Lifting Bags (Alat Pengangkat Benda Berat Untuk Penyelamatan Korban)	3	Set	3
Sanfire Lampu Penerangan Solaris	1	Set	1
Sanfire Pompa Punggung 19 L	1	Set	1
Sarung Tangan Vertical	10	Set	10
Senter Tahan Ledakan	10	Buah	10
Sepatu Penyelamatan Air	10	Set	10
Thermal Imaging Camera (Alat Pendeteksi Panas Tubuh Korban Bahkan Di Area Berasap)	1	Set	1
Senter Rescue	20	Buah	20
Winch	2	Unit	2
Carabiner	10	Buah	10
Alat Detektor Multi Gas (Alat Pendeteksi Gas Berbahaya Dan Beracun)	2	Set	2
Baju Lebah	4	Set	4
Brankar	1	Set	1
Kandang Karantina Hewan Berbahaya	2	Buah	2
Kandang Ular	2	Buah	2

Nama Barang	Target	Satuan	Realisasi
Neckuler	6	Buah	6
Oksigen Portable	4	Set	4
Sarung Tangan Anti Gigitan Ular	2	Set	2
Tandu	4	Buah	4
Trailer Perahu Motor	1	Unit	1
Wearpack Safety Baju Pelindung Bahan Kimia	91	Set	91
Buku Edukasi Masyarakat	200	Buah	200
Total	995	Unit	995

Sumber: Pengurus Barang DPKP Kab. Banjar

Realisasi telah terlaksana dan serah terima barang sebanyak 270 unit berupa 1 unit pompa pemadam, 4 buah full body harness, 5 buah ascendre handle, 1 roll tali kernmantle statis, 3 buah gerinda mini, 21 set ranjang Tingkat, 2 buah mannequin full body, 2 buah dongkrak 100 ton, 4 buah kompor lapangan, 2 buah SCBA, 1 set scuba, 10 set Breathing Apparatus Portable, 1 set cutting spreader, 3 buah gergaji tangan, 10 buah helm water rescue, 9 buah kursi evakuasi, 1 set MPD, 1 buah Petzl ASAP, 1 set Sanfire pompa punggung 19 L, 10 set sarung tangan vertical, 10 buah sentre tahan ledakan, 10 set Sepatu penyelamatan air, 1 set thermal imaging camera, 20 buah senter rescue, 2 unit winch, 10 buah carabiner, 2 set alat detector multi gas, 4 set baju lebah, 1 set brankar, 2 buah kandang karantina hewan berbahaya, 2 buah kendang ular, 6 buah neckuler, 4 set oksigen portable, 2 set sarung tangan anti gigitan ular, 4 buah tandu, 1 unit trailer perahu motor, 91 set wearpack safety baju pelindung bahan kimia.

6. Urusan Sosial

1) Program Rehabilitasi Sosial

Capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial diukur dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar, adapun target program ini adalah 15,85 Persen dengan realisasi 13,26 Persen. Program ini didukung Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Capaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial diukur dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang Mendapatkan Assesment, adapun target kegiatan ini adalah 84 Persen dengan realisasi 99,29 Persen kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 1550 Orang dan realisasinya adalah 1550 (100%) Pagu Rp. 763,763,450 dengan realisasi Rp. 712,626,025 (93.30%) adapun rincian berupa Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 243,913,200, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 20,123,175, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 437,699,275, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 10,890,375.

- Sub Kegiatan Penyediaan sandang

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan sandang diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 220 Orang dan realisasinya adalah 220 Orang dengan Pagu Rp. 144,454,000 dan realisasi Rp. 138,350,000 (95.77%) dengan rincian berupa Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 27,775,000, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 27,775,000, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 82,800,000.

- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan sandang diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 20 Orang dan realisasinya adalah 20 Orang (100%) dengan Pagu Rp. 201,800,000, dan realisasi sebesar Rp.199,190,000

(98.71%) rincian berupa Rp. 99,595,000 (Penyandang Disabilitas Terlantar) Rp. 99,595,000 (lanjut usia terlantar).

- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 87 Orang dan realisasinya adalah 87 Orang (100%) dengan Pagu Rp. 31,900,000 dan realisasinya sebesar Rp. 20,600,000 (64.58%) adapun rincian berupa Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp.0, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 5,200,000, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 15,400,000, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 0.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial diukur dengan indikator Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 152 Orang dan realisasinya adalah 152 Orang (100%) dengan Pagu Rp. 83,521,500 dengan realisasi Rp. 81,690,935 (97.81%) adapun rinciannya berupa Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 11,310,000, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp 15,342,985, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp.0, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 55,037,950.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat diukur dengan indikator Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 60 Orang dan realisasinya adalah 60 Orang (100%) dengan Pagu Rp.

11,742,500 dengan realisasi Rp. 10.700.000 (91.12%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 3,566,670, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 1,783,330, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 4,458,330, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 891,670.

- Sub Kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja : 60 Orang dan realisasinya adalah 60 Orang (100%) dengan Pagu Rp 3,500,000 dengan realisasi Rp. 2,500,000 (71.43%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 500,000, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 750,000, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 750,000, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 500,000.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 200 Orang dan realisasinya adalah 200 Orang (100%) dengan Pagu Rp 6,999,500 dengan realisasi Rp. 3,250,000 (46.43%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 750,000, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 500,000, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 1.750,000, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 250,000.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 135 Orang dan realisasinya adalah 135 Orang (100%) dengan Pagu Rp 38,563,250 dengan realisasi Rp 35,343,500 (91.65%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 11,781,175, Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp.

6,545,125, Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp. 14,399,200, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 2,618,000.

- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 95 Orang dan realisasinya adalah 95 Orang (100%) dengan Pagu Rp 3,500,000 dengan realisasi Rp 1,250,000 (35.71%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 250.000 Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 250.000 Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp.500,000, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 250,000.
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 40 Orang dan realisasinya adalah 40 Orang (100%) dengan Pagu Rp 33,115,000 dengan realisasi Rp 12,400,000 (37.45%) dengan rincian Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 12,400,000.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Dan target kinerja berupa : 36 Orang dan realisasinya adalah 36 Orang (100%) dengan Pagu Rp 3,500,000 dengan realisasi Rp 1,000,000 (28.57%) dengan rincian Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti) Rp. 250.000 Anak Terlantar (di Luar Panti) Rp. 250.000 Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti) Rp.250,000, Gelandangan Pengemis (di Luar Panti) Rp. 250,000.

2) Program Penanganan Bencana

Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Capaian kinerja Program

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dengan target 100 % dengan realisasi 100% dan Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya dengan target 70 % dengan realisasi 55% Program ini didukung Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100% kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Dan pagu Rp. 525,995,000 dan realisasi Rp. 235,342,500 (44.74%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 448,656,000 dan realisasi Rp. 500,000 (0,11%).

- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Capaian kinerja sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 423,993,500 dan realisasi Rp. 15,158,000 (3,58%).

- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

Capaian kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial diukur dengan indikator Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan

Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 11,725,500 dan realisasi Rp. 9,528,000 (81.26%).

BAB V

PENUTUP

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bupati Banjar Tahun 2025, Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

Syukur Alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan saat ini kita telah melewati Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025 mengacu pada visi Kabupaten Banjar “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 misi yaitu:

- 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.
- 2) Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan.
- 4) Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

LPPD ini secara dominan menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penerapan standar pelayanan minimal, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Adapun simpulan dari penjelasan LPPD tahun 2025 sebagai berikut:

Capaian kinerja makro Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 0,94% dari tahun 2024 sebesar 74,41 menjadi 75,11 ditahun 2025.
- 2) Persentase Penduduk Miskin mengalami peningkatan sebesar 16,10% dari tahun 2024 sebesar 2,36 menjadi 2,74 ditahun 2025.

- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 1,85% dari tahun 2024 sebesar 2,71 menjadi 2,76 ditahun 2025.
- 4) Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,74% dari tahun 2024 sebesar 4,75 menjadi 5,07 ditahun 2025.
- 5) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan sebesar 4,91% dari tahun 2024 sebesar Rp. 40.027.000** menjadi Rp. 41.993.000** ditahun 2025.
- 6) Ketimpangan pendapatan dengan pendekatan *Gini ratio* mengalami peningkatan sebesar 8,91% dari tahun 2024 sebesar 0,258 menjadi 0,281 ditahun 2025.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah 46 perangkat daerah. Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Banjar per Tahun 2025 sebanyak 10.200 yang terdiri atas 4.032 laki-laki dan 6.168 perempuan.
- 2) Total Anggaran Pendapatan dalam APBD tahun 2025 per tanggal 15 Januari 2026 sebesar Rp. 2.563.396.762.725,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.099.419.014.972,29,- (119,49%).
- 3) Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2025 per tanggal 15 Januari 2026 sebesar Rp. 3.209.464.177.614,-. dengan realisasi Belanja APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 2.902.763.901.620,69,- dengan SILPA Tahun 2025 sebesar Rp. 846.127.878.676,24,-

Capaian penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Kabupaten Banjar belum maksimal dalam menerapkan SPM Pelayanan Dasar tahun 2025 dikarenakan beberapa hal berikut ini :

- 1) Program dan kegiatan standar pelayanan minimal (SPM) belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan;
- 2) Terbitnya regulasi baru, tidak diimbangi dengan penyesuaian penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah pengampu SPM;
- 3) Perangkat Daerah pengampu SPM belum memahami penerapan dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan regulasi yang ada;
- 4) Masih ditemukan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak menggunakan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Masih ditemukan administrasi lebih besar dibandingkan *outcome* Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Basis Data untuk target penerapan Standar Pelayanan Minimal belum valid;dan

7) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Walaupun terdapat banyak kendala dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dapat disampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan SPM pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Urusan SPM bidang Pendidikan mempunyai indeks pencapaian sebesar 79,78% dengan kategori Tuntas Pratama.
- 2) Urusan SPM bidang Kesehatan mempunyai indeks pencapaian sebesar 85,42% dengan kategori Tuntas Madya.
- 3) Urusan SPM bidang Pekerjaan Umum memiliki indeks pencapaian 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.
- 4) Urusan SPM bidang perumahan rakyat memiliki indeks pencapaian sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.
- 5) Urusan SPM bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat memiliki indeks pencapaian sebesar 96,92% dengan kategori Tuntas Utama.
- 6) Urusan SPM bidang sosial memiliki indeks pencapaian sebesar 93,33% dengan kategori Tuntas Utama.

Meskipun standar pelayanan minimal secara ideal target harus tetap konsisten 100% namun dikarenakan banyak permasalahan dalam kendalanya menyebabkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Banjar belum maksimal.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam target kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya:

- 1) Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) dengan realisasi 73,87.
- 2) Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dengan realisasi 26,35.
- 3) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan realisasi 8,15.
- 4) Indikator Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 13,05.
- 5) Indikator Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian dengan realisasi 81,19.
- 6) Indikator Tingkat Kemiskinan dengan realisasi 2,74.
- 7) Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan realisasi 71,05.
- 8) Indikator Indeks Konektivitas dengan realisasi 84,16.

- 9) Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi 78,20.
- 10) Indikator Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 75,66.
- 11) Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi 75,96.
- 12) Indikator Nilai SAKIP Daerah dengan realisasi 71,16.
- 13) Indikator Indeks Integritas dengan realisasi 78,18.
- 14) Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan realisasi 3,02.
- 15) Indikator Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi 4,66.

Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif DPRD Kabupaten Banjar selaku mitra Pemerintah serta semua unsur yang terlibat. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.